



Islamisasi Pembangunan

**Muhammad Syukri Salleh
Muhammad Qorib
Sukiman
Kasyful Mahalli**

**Muhyarsyah
Mohd Shukri Hanapi
Warjio
Saprinal Manurung**

Editor : Azuar Julianti

umsu  **PRESS**



ISLAMISASI PEMBANGUNAN

**Muhammad Syukri Salleh
Muhammad Qorib
Sukiman
Kasyful Mahalli**

**Muhyarsyah
Mohd Shukri Hanapi
Warjio
Saprinal Manurung**

**Editor:
Azuar Juliandi**



ISLAMISASI PEMBANGUNAN

Penulis: Muhammad Syukri Salleh, Muhyarsyah, Muhammad
Qorib, Mohd Shukri Hanapi, Sukiman, Warjio, Kasyful
Mahalli, Saprinal Manurung
Editor: Azuar Juliandi
Desain Sampul: Zulfadli

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved

Cetakan Pertama: April 2014

Diterbitkan oleh UMSU PRESS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238
Telp. 061-6638296, Fax. 061-6638296
Email: umsupress@gmail.com
<http://umsupress.com>

ISBN: 978-602-70330-0-9



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan hidayahnya sehingga buku Islamisasi Pembangunan dalam berbagai Perspektif dapat diterbitkan untuk menjadi sumber pembelajaran bagi banyak orang khususnya bagi para ilmuwan Islam di Nusantara.

Buku Islamisasi Pembangunan disusun berdasarkan kertas kerja pada *International Conference on Islamic Development (5th ICID)* yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan *Centre for Islamic Development Management (ISDEV)* Universiti Sains Malaysia pada tanggal 23 April 2013.

Buku ini berisi mengenai wacana-wacana pembangunan Islam, antara lain: Islamisasi Pemikiran Pembangunan, Islamisasi Ilmu Pengetahuan di Perguruan Tinggi; Reaktualisasi Moralitas Agama (Islam) dalam Proses Perubahan Masyarakat; Islamisasi Pembangunan di Malaysia: Kes Pendekatan Islam Hadhari; Islamisasi Pemikiran Pembangunan di Indonesia: Perspektif Tawhidik; Dari Mafia Berkeley ke Mafia ISDEV; Peranan Pembangunan Institusi Pendidikan terhadap Pembangunan Berteraskan Islam di Indonesia; Islamisasi Pembangunan di Indonesia: Kajian dari Perspektif Perencanaan Pembangunan; dan *Decolonization of Education Through Islamization and Dewesternization*.

Pembangunan berasas kepada nilai-nilai Islam seperti pembicaraan di dalam buku ini sangat penting untuk terus diperbincangkan dalam forum-forum ilmiah oleh para ilmuwan Islam di masa depan. Selama ini ilmu pengetahuan telah dikuasai oleh dunia barat, di sisi lain ummat Islam hanya menjadi pengikut pandangan-pandangan barat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Apabila ilmuwan-ilmuan Islam dari berbagai latar belakang keilmuan bersedia melahirkan karya-karya ilmiah dan intensif dalam mengadakan pertemuan ilmiah baik di tingkat lokal, regional maupun internasional, maka akan mempercepat terwujudnya pembangunan Islam di dunia. Pembangunan Islam yang berkembang Insya Allah akan mampu melahirkan masyarakat adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT.

Medan, April 2014
Editor
Azuar Juliandi

Sambutan

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan iman dan Islam kepada kita. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berupaya menerbitkan buku Islamisasi Pembangunan ini sebagai sebuah karya yang bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan Islam.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Muhammad Syukri Salleh dari *Centre for Islamic Development Management Studies* (ISDEV) Universiti Sains Malaysia (USM) yang telah sangat berjasa dalam menjalin silaturahmi keilmuan diantara sesama ilmuwan negara serumpun. Jalinan silaturahmi tersebut telah membuahkan hasil, salah satunya adalah terselenggaranya kegiatan tahunan Workshop Antarbangsa Pembangunan Berteraskan Islam (WAPI) dan *International Conference on Islamic Development* (ICID) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Kegiatan WAPI dan ICID yang menjadi dasar lahirnya buku ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan berlanjut hingga saat ini. Visi WAPI dan ICID adalah terwujudnya konsep-konsep pembangunan berlandaskan nilai-nilai Islam khususnya di negara serumpun. Misi WAPI dan ICID adalah melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di negara serumpun untuk menggali, mengembangkan dan mensosialisasikan konsep-konsep pembangunan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan WAPI dan ICID adalah memotivasi masyarakat intelektual melakukan penelaahan kritis dalam mewujudkan berbagai konsep pembangunan yang digali dari nilai-nilai Islam. Sasaran WAPI dan ICID adalah para kaum intelektual Islam khususnya para mahasiswa dan dosen perguruan tinggi yakni untuk: melakukan berbagai penelitian guna menemukan berbagai pengetahuan mengenai pembangunan dalam segala sendi kehidupan yang bersumber dari sumber-sumber Islam; mensosialisasikan pengetahuan pembangunan berasaskan Islam melalui berbagai pertemuan ilmiah secara berkelanjutan; mempublikasikan temuan-temuan mengenai konsep pembangunan berasaskan Islam dalam bentuk terbitan berkala.

WAPI dan ICID yang telah dilaksanakan selama ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Para intelektual telah berupaya untuk mengkaji dan mensosialisasikan nilai-nilai pembangunan

berasaskan Islam sebagai sebuah konsep dan pengetahuan ilmiah, seperti: tasawwur Islam, pembangunan berasaskan Islam, manajemen Islam, riset Islam, institusi Islam, keuangan Islam, ekonomi Islam, politik Islam dan sebagainya.

Pengetahuan ilmiah yang telah dihasilkan oleh para intelektual Islam seperti di atas merupakan sebuah kekuatan besar dalam menghadapi derasnya arus pengetahuan dari negara-negara barat. Pengetahuan barat yang umumnya dikembangkan oleh orang non-Islam berorientasi kepada kepentingan dunia, materialisme, individualisme dan mengesampingkan nilai-nilai Ilahiah. Nilai-nilai barat tersebut merasuk ke segala sendi kehidupan dan terbukti banyak merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Kalangan ilmiah di perguruan tinggi juga sudah lama terpengaruh oleh nilai-nilai barat tersebut. Akibatnya, setelah lulus dari perguruan tinggi para intelektual negara serumpun yang kebanyakan beragama Islam semakin lama akan semakin jauh dari ajaran Islam. Padahal apabila para intelektual Islam didekatkan kepada Islam maka mereka akan memiliki semangat jihad yang tinggi dalam menggali nilai-nilai yang bersumber kepada sumber-sumber ilmu dan pengetahuan Islam.

Ilmu dan pengetahuan yang berasaskan Islam akan menjadi bekal bagi para intelektual dalam berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan di muka bumi. Hingga akhirnya seluruh umat manusia akan merasakan bahwa Islam adalah rahmatan lil 'alamin.

Akhirul kalam, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam mensukseskan WAPI dan ICID. Marilah kita berdo'a semoga Allah memberi keberkahan atas upaya mulia yang telah kita dilakukan dalam menegakkan kejayaan Islam. Amin.

Medan, April 2014
Rektor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dr. Agussani, MAP.

Daftar Isi

ISLAMISASI PEMIKIRAN PEMBANGUNAN	1
Pengenalan	1
Islamisasi Ilmu	2
Islamisasi Pemikiran Pembangunan	4
Penutup	6
Referensi	7
 ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN DI PERGURUAN TINGGI	 9
Pendahuluan	9
Memahami Hakikat Islamisasi Ilmu Pengetahuan	12
Islamisasi Kurikulum Suatu Kebutuhan	14
Perlunya Islamisasi Ilmu Pengetahuan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	17
Mengimplementasikan Islamisasi Ilmu Pengetahuan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	19
Kesimpulan	24
Referensi	25
 REAKTUALISASI MORALITAS AGAMA (ISLAM) DALAM PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT	 27
Pendahuluan	27
Bercermin pada Pengalaman Keagamaan Masa Lalu	28
Kembali pada Moralitas Agama (Islam)	31
Referensi	38
 ISLAMISASI PEMBANGUNAN DI MALAYSIA: KES PENDEKATAN ISLAM HADHARI	 39
Pendahuluan	39
Maksud Islamisasi Pembangunan	32
Pelaksanaan Islamisasi Pembangunan di Malaysia	44
Sorotan Latar Belakang Islam Hadhari	47
Unsur-Unsur Islamisasi Pembangunan dalam Pendekatan Islam Hadhari	50
Kegagalan Pendekatan Islam Hadhari	54
Kesimpulan	56
Referensi	57
 ISLAMISASI PEMIKIRAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF TAWHIDIK	 61
Pendahuluan	61
Asas Pemikiran Pembangunan di Indonesia	62
Arah Baru Pemikiran Pembangunan Islam Indonesia	66

Islamisasi Pembangunan Islam Berbasis Tawhidik	71
Kesimpulan	76
Referensi	77

DARI MAFIA BERKELEY KE MAFIA ISDEV: PERANAN PEMBANGUNAN INSTITUSI PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI INDONESIA	79
Pendahuluan	79
Pembangunan Institusi Pendidikan atau Hegemoni Amerika?	82
Mafia Berkeley dan Penguatan Ekonomi Pembangunan	84
Asal-Usul Mafia Barkeley	86
Mafia Berkeleys dan Persoalan Pembangunan di Indonesia	89
Dari <i>Mafia Berkeley</i> Ke <i>Mafia Isdev</i> : Pembangunan Berteraskan Islam dan Kecambah Isdev yang Mulai Tumbuh	91
Referensi	95

ISLAMISASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN	97
Pendahuluan	97
Pengertian dan Sejarah Perencanaan Pembangunan	98
Perencanaan Menyeluruh (<i>Comprehensive Planning</i>)	105
Perencanaan Strategik (<i>Strategic Planning</i>)	106
Perkembangan Perencanaan Pembangunan di Indonesia	107
Islamisasi Perencanaan Pembangunan di Indonesia	115
Penutup	123
Referensi	123

DECOLONIZATION OF EDUCATION THROUGH ISLAMIZATION AND DEWESTERNIZATION	129
Introduction	129
History of Decolonization	131
The Philosophy of Islamization of Knowledge	134
The Western Concept of Knowledge	136
Decolonization of Education	139
Decolonization of Education Within The Framework of Dewesternization and Islamization	140
Conclusion	145
Bibliography	146

ISLAMISASI PEMIKIRAN PEMBANGUNAN¹

Muhammad Syukri Salleh²

Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)

Universiti Sains Malaysia

Pulau Pinang, Malaysia

Email: syukri54@gmail.com

PENGENALAN

Pemikiran pembangunan, seperti juga dengan pemikiran dalam bidang-bidang lain, merupakan satu ilmu. Perbincangan tentang Islamisasi pemikiran oleh itu tidak boleh lepas lari daripada perbincangan tentang Islamisasi Ilmu itu sendiri. Islamisasi Ilmu adalah akarnya manakala pemikiran pembangunan adalah buahnya. Atas sebab itulah maka dalam makalah ini, Islamisasi Ilmu dibincangkan terlebih dahulu sebelum pemikiran pembangunan dibincangkan.

Makalah ini sebenarnya hanya cuba mencari jawapan kepada dua persoalan sahaja. Pertama, apakah yang dimaksudkan dengan Islamisasi Ilmu itu; dan kedua, apakah boleh pemikiran pembangunan diIslamisasikan. Persoalan pertama bertujuan membentuk kerangka analisis bagi menganalisis persoalan kedua. Dengan mengetahui maksud Islamisasi Ilmu, maka kedudukan pemikiran pembangunan, sama ada boleh diIslamisasikan atau tidak, diharap akan terjawab, InsyaAllah.

Dalam melakukan perkara ini, makalah ini dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama cuba berbincang tentang apa yang dimaksudkan dengan Islamisasi, sejarah kemunculannya dan sebab-sebab kemunculannya. Berasaskan kepada perbincangan dalam bahagian pertama ini, bahagian kedua pula cuba membina pandangan apakah pemikiran pembangunan, terutamanya pemikiran pembangunan dominan masakini boleh diIslamisasikan. Pemikiran pembangunan dominan masakini di sini merujuk kepada pemikiran pembangunan Pertumbuhan (*Growth*) dan

¹ Ucaptama yang disampaikan di *The 5th International Conference on Islamic-Based Development* (ICID-5), anjuran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Ikatan Pelajar dan Alumni ISDEV Sumatera Utara (IPA-ISDEV SU) dan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, di Hotel Madani, Medan, Indonesia, 23 April 2013.

² Profesor Muhammad Syukri Salleh ialah Profesor Perancangan dan Pengurusan Pembangunan dan Pengarah, Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia. Beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada Universiti Sains Malaysia atas pemberian geran Research University Team (RUT) yang membolehkan kajian dan penulisan ini dilakukan dan kepada Pegawai Penyelidik ISDEV Nur Inani Ismail yang membantu mencari bahan-bahan rujukan untuk tulisan ini.

pemikiran Pengagihan-Dengan-Pertumbuhan (*Redistribution-With-Growth*) yang lahir daripada falsafah Neo-Klasikal dan membentuk sistem kapitalis, serta pemikiran pembangunan Strukturalis (*Structuralist*) dan pemikiran pembangunan Pergantungan (*Dependency*) yang lahir daripada falsafah Radikal dan kemudiannya membentuk sistem sosialis atau komunis. Pemikiran pembangunan sebegini diistilahkan sebagai pemikiran pembangunan lazim.

ISLAMISASI ILMU

Islamisasi boleh diertikan sebagai transformasi pandangan alam (*worldview*) daripada yang tidak betul (*crooked*) atau daripada jahil kepada yang Islami (Danjuma A. Maiwada, n.y:275). Dalam sejarah hidup manusia, transformasi sebegini berlaku berkali-kali melalui kedatangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul secara bergilir-gilir. Apabila manusia mempunyai dan mengamalkan pandangan hidup yang tidak betul, Allah SWT kirimkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk membawa mereka kembali kepada amalan yang betul, berasaskan kepada pandangan alam yang Islami. Selepas Rasulullah SAW, Rasul yang terakhir, pembedulan pandangan alam dan ajakan kepada mengamalkannya dilakukan oleh para dai' yang berlegar ke seluruh pelusuk dunia.

Di Nusantara misalnya, transformasi pandangan alam ini diusahakan oleh para dai' dengan mengubah pandangan alam Buddhist dan Hindu kepada pandangan alam Islami. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas (1969), sarjana pertama yang menggunakan istilah Islamisasi ini, menggambarkan bagaimana Islamisasi di Nusantara ini berlaku melalui persejarahan dan impak budaya Islam ke atas dunia Melayu. Proses Islamisasi ini menrevolusikan visi realiti dan kewujudan kepada pandangan hidup Islam yang unggul. Lebih kurang sepuluh tahun selepas itu, Syed Muhammad al-Naquib al-Attas (1978:41) mendefinisikan Islamisasi sebagai pembebasan (liberasi) manusia. Pembebasan ini bermula dengan pembebasan manusia daripada unsur-unsur magikal, mitologikal, animistik, tradisi nasional-budaya, dan selepas itu daripada kontrol sekular ke atas alasan (*reason*) dan bahasa manusia tersebut.

Dalam bidang pendidikan, Islamisasi Ilmu ini didefinisikan sebagai memasukkan disiplin ilmu ke dalam kurikulum, menyediakan perspektif Islam terhadap isu-isu dalam silibus, dan menempatkan, di mana perlu, disiplin sekular ke dalam pandangan alam Islam (Suleman Dangor, 2005:519). Usaha begini telah dilakukan sejak awal 1980han oleh para sarjana Muslim yang bekerja di Amerika Syarikat. Yang paling serius melakukannya ialah para sarjana yang berpayung di bawah *International Institute of Islamic Thought* (IIIT). IIIT ini ditubuhkan pada 1981, berpusat di Herndon, Virginia dan kini mempunyai cabangnya di seluruh dunia. Tujuannya ialah untuk menghidupkan kembali dan mempromosi pemikiran

dan ilmu Islam³. Mengikut pengasas IIIT, Ismail al-Faruqi, projek Islamisasi ini merupakan respons kepada “kecelaruan ummah”, atau apa yang diistilahkan oleh beliau sebagai “*the malaise of the ummah*” (Begum Rokshana Mili, 2008:1)⁴, atau oleh bekas Presiden IIIT ‘AbdulHamid A. AbuSulayman (1993) sebagai “krisis minda” dalam kalangan Muslim. Mengikut ‘AbdulHamid A. AbuSulayman (2007:5), orang-orang Muslim mempunyai visi ideologi yang telah rosak, misalnya dalam motivasi budaya, pendekatan intelektual, dan wacana pendidikan yang tidak betul. Secara lebih khusus, sebagaimana disebutkan oleh Suleman Dangor (2005:519), projek Islamisasi Ilmu ini dilakukan sebagai respons kepada sekularisasi yang berleluasa dalam masyarakat Muslim.

Solusi kepada permasalahan ini, menurut IIIT, ialah dengan mereformasikan diri dan merubah jiwa Muslim itu sendiri. IIIT berusaha melakukan perkara ini melalui projek Islamisasi Ilmu dengan merancang satu reformulasi pemikiran Islam. Reformulasi pemikiran Islam ini dimulakan dengan kepercayaan dan kemanusiaan Islam, global, dan prinsip ketamadunan berasaskan Tauhid (‘Abdulhamid A. Abusulayman, 2007:14-15). Untuk merealisasikan perancangan ini, maka dicadangkan reformasi dalam tiga perkara berikut. Pertama, memperbetulkan hubungan antara wahyu (*divine revelation*) dan alasan (*reason*). Kedua, mendefinisikan semula erti ilmu agar tidak berlaku kekaburan tentang sesuatu konsep. Ketiga, mengorganisasi dan mengorientasi semula metod pendidikan dan instruksi Islam untuk memadamkan dualisme yang keliru yang membahagikan ilmu kepada kategori intelektual, sosial, religius, dan perundangan (‘AbdulHamid A. AbuSulayman 1985:269)⁵. Menurut seorang lagi sarjana IIIT yang aktif, Taha Jabir al-Alwani (2006:7), pembaharuan pemikiran Islam dan Islamisasi Ilmu ini membina intipatinya daripada rekonstruksi dan reformasi minda Muslim, dengan mengembalikan hubungannya dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Projek Islamisasi Ilmu ini telah diterjemahkan secara praktikal di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), terutamanya apabila bekas Presiden IIIT ‘AbdulHamid A. AbuSulayman menjadi Rektor di Universiti tersebut pada tahun 1989 hingga 1999⁶.

Sebenarnya, terdapat sesetengah sarjana yang berfikir bahawa ilmu adalah neutral, hanya penyampai ilmu sahaja yang perlu diIslamkan (Bashir S. Galadanci n.y:272). Sebagaimana ditanggapi oleh Fazlur Rahman (1988:4), ilmu itu tidak salah. Yang salahnya ialah dunia moden yang

³ Untuk mengetahui perkembangan fokus Islamisasi Ilmu IIIT ini, lihat Bashir S. Galadanci, n.y:274).

⁴ “Malaise” bermaksud satu keadaan di mana masyarakat merasakan ada sesuatu yang tidak kena dan tidak berpuashati dengannya, tetapi tidak mengetahui dengan shahih apa yang sebenarnya tidak kena itu.

⁵ Untuk perbincangan terperinci tentang model-model Islamisasi Ilmu ini, lihat Anonymous (n.d.a).

⁶ Untuk analisis kritis ke atas usaha Islamisasi Ilmu di UIAM, lihat Mohamed Aslam Haneef (2009).

menyalahgunakan ilmu. Malah katanya, ilmu sihir yang dikondem oleh al-Qur`an pun adalah juga ilmu, walaupun amalan dan penggunaannya adalah buruk dan dilarang (Fazlur Rahman 1988:5, 10). Bagi Fazlur Rahman (1988:6), semua ilmu adalah baik. Yang membuatkan sesuatu ilmu itu menjadi buruk ialah kerana penyalahgunaannya.

Walau bagaimanapun, dalam mengIslamisasikan Ilmu, hanya ilmu yang dicemari (*polluted knowledge*) yang boleh diIslamisasikan. Ilmu-ilmu yang jelas dilarang oleh Islam, umpamanya ilmu korupsi, ilmu pelacuran, ilmu sihir, ilmu judi, ilmu arak, dan lain-lain seumpamanya tidak boleh diIslamisasikan (Anonymous, n.d.b:18). Menurut Taha Jabir al-Alwani (1994:10), terdapat tiga perkara yang perlu jelas dalam mengIslamisasi Ilmu. Pertama, sumber ilmu perlulah daripada sumber Islami, yakni daripada wahyu (al-Qur`an dan Sunnah) dan daripada alam semulajadi. Kedua, metod untuk mendapatkan ilmu mesti metod Islami. Dan ketiga, hasil yang dicapai mestilah konsisten dengan sifat semula jadi manusia, undang-undang semula jadi alam seagat, prinsip dan perintah ajaran Islami, dan nilai moral dan estetika Islami.

ISLAMISASI PEMIKIRAN PEMBANGUNAN

Bagi Islamisasi pemikiran pembangunan, perbincangan di atas membawa kepada dua kesimpulan utama. Pertama adalah yang berkaitan dengan sifat Islamisasi pemikiran pembangunan, dan kedua, yang berkaitan dengan pemikiran pembangunan yang hendak diIslamisasikan tersebut.

Dalam hal pertama, dapat disimpulkan bahawa Islamisasi pemikiran pembangunan mesti melibatkan transformasi pandangan alam daripada pandangan alam tidak-Islami kepada pandangan alam yang Islami sepenuhnya. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas (1969, 1978) telah menjelaskan tentang transformasi sebegini berdasarkan kepada transformasi pandangan alam masyarakat Nusantara, daripada pandangan alam Buddhist dan Hindu kepada pandangan alam Islam. Begitu juga IIIT. Sama ada secara langsung atau tidak langsung IIIT telah menekankan bahawa Islamisasi perlu dilakukan berdasarkan kepada sumber ilmu Islami (wahyu dan Sunnah), definisi konsep-konsep Islami, dan metod Islami. Dalam perkataan lain, Islamisasi pemikiran pembangunan kena bermaksud Islamisasi pemikiran pembangunan secara total, bukan secara separa. Acuanya adalah berdasarkan epistemologi dan pandangan alam (*tasawwur*) Islam sendiri, definisi konsep-konsepnya adalah mengikut ajaran Islam, dan metodenya juga adalah berasaskan kepada metod Islami⁷.

⁷ Untuk perbincangan tentang perlunya acuan Islam bagi pemikiran pembangunan ini, lihat Muhammad Syukri Salleh, 2003. Bagi perbincangan tentang betapa perlunya definisi semula konsep-konsep ini, lihat Muhammad Syukri Salleh, 2013. Bagi perbincangan tentang betapa perlunya metodenya bersifat Islami, lihat Muhammad Syukri Salleh, 2008.

Islamisasi pemikiran pembangunan sebegini tidak boleh dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh sarjana ekonomi Islam arus perdana yang memakai pendekatan akomodatif-modifikasi dan eklektisme-metodologik. Dalam pendekatan ini, para sarjana ekonomi Islam arus perdana mengakomodasikan perkara-perkara terpilih daripada ekonomi konvensional, memodifikasikannya, dan menamakannya sebagai ekonomi Islam. Bagi mereka, tidak mengapa perkara sebegini dilakukan selagi ia tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam.

Walau bagaimanapun, saya berbeza pendapat dengan pandangan sedemikian⁸. Apa yang dikatakan tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam itu hanya dilihat pada peringkat operasional sahaja. Pada peringkat epistemologi dan pandangan alam, pertentangan itu tidak diteliti dengan sewajarnya. Mekanisme pembangunan di peringkat operasional mungkin ternampak semacam tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam, tetapi apabila dilihat di peringkat epistemologi dan pandangan alam, ia sebenarnya adalah bertentangan. Epistemologi pemikiran pembangunan lazim adalah daripada aqal, manakala pandangan alamnya tertumpu kepada keduniaan. Sebaliknya, epistemologi pemikiran pembangunan berteraskan Islam adalah daripada al-Qur'an dan Hadith (ditambah dengan *ijmak* dan qiyas *ulamak*), manakala pandangan alamnya tertumpu kepada keduniaan dan keakhiratan. Oleh kerana epistemologi dan pandangan alam merupakan intipati kepada acuan, maka apabila berbezanya epistemologi dan pandangan alam pemikiran pembangunan lazim dengan epistemologi dan pandangan alam pemikiran pembangunan Islam ini, berbeza pulalah pemikiran pembangunan antara keduanya.

Islamisasi pemikiran pembangunan oleh itu mesti melibatkan kedua-dua peringkat, peringkat operasional dan peringkat pandangan alam, agar berlakunya transformasi total daripada pandangan alam yang non-Islami kepada pandangan alam yang Islami. Jika peringkat ini diambilkira, maka tidak ada lagi persoalan adanya unsur pembangunan lazim yang tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah. Unsur pembangunan lazim memang bertentangan dengan aqidah dan syariah walaupun ternampak semacam tidak bertentangan kerana acuannya (epistemologi dan pandangan alam) adalah bertentangan dengan acuan pemikiran pembangunan Islam. Apabila pemikiran pembangunan bertunjangkan epistemologi dan pandangan alam Islami, maka dengan sendirinya segala unsurnya adalah selari dengan pemikiran pembangunan Islami. Begitulah juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dinyatakan oleh Mohd Shukri Hanapi (2012), apabila Rasulullah SAW mengadoptasi amalan daripada jahiliyyah, Baginda mentransformasikan pandangan alamnya hingga amalan tersebut menjadi Islami, bukan mencampuradukkan antara unsur jahiliyyah dengan unsur Islami.

⁸ Untuk kritik terperinci saya terhadap pendirian sarjana ekonomi Islam arus perdana ini, lihat Muhammad Syukri Salleh, 2011 a dan 2011 b.

Kedua, bidang ilmu yang hendak diIslamisasikan itu hendaklah bidang ilmu yang tidak dilarang oleh Islam. Dalam kes ini, pemikiran pembangunan boleh diIslamisasikan kerana pembangunan merupakan bidang ilmu yang tidak termasuk dalam bidang ilmu yang dilarang. Malah sebaliknya, bidang ilmu pembangunan adalah merupakan bidang ilmu fardhu kifayah yang perlu dimiliki oleh orang-orang Islam. Cuma dalam bidang ilmu pembangunan dominan sekarang – sama ada ilmu pembangunan Pertumbuhan dan Pengagihan-Dengan-Pertumbuhan yang lahir daripada falsafah Neo-Klasikal atau ilmu pembangunan Strukturalis dan Pergantungan yang lahir daripada falsafah Radikal – semuanya tidak Islami kerana acuannya ialah acuan Barat, epistemologinya bersifat keduniaan semata yang bersumberkan kepada aqal, manakala sifatnya condong kepada kepentingan Barat (*western-ethno-centric* atau *Eurocentric*).

Islamisasi pemikiran pembangunan oleh itu merujuk kepada mengIslamkan pemikiran pembangunan ini secara total. Pemikiran pembangunan lazim ini bukan sahaja merupakan ilmu yang telah dicemari, malah merupakan ilmu yang salah di sisi Allah SWT. Islamisasi pemikiran pembangunan sedemikian tidak mungkin sempurna kecuali dengan memulakan daripada acuan dan epistemologi Islam sendiri, bersumberkan wahyu dan Sunnah Rasulullah SAW, serta bersifat mencari keredhaan Allah SWT (*mardhatillah*) agar dengan itu akan tercapailah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*al-Falah*). Islamisasi pemikiran pembangunan ini oleh itu tidak boleh diakomodasi dan dimodifikasi daripada pemikiran pembangunan lazim lalu dinamakan pembangunan berbasiskan Islam seperti yang dilakukan oleh sarjana ekonomi Islam arus perdana. Islamisasi pemikiran pembangunan mesti membina pembangunan berteraskan Islam daripada acuannya sendiri, bukan daripada acuan pembangunan lazim. Pemikiran pembangunan berteraskan Islam itu harus lahir sebagai satu pemikiran pembangunan yang baru, bukan pemikiran pembangunan yang lahir daripada pemikiran pembangunan lazim yang cemar dan salah.

PENUTUP

Perbincangan di atas telah menjawab dua persoalan yang menjadi tujuan makalah ini. Pertama, Islamisasi ilmu adalah merujuk kepada transformasi pandangan alam secara total, dengan definisi dan metod yang Islami. Kedua, Islamisasi pemikiran pembangunan pula boleh diIslamisasikan kerana ia bukan bidang ilmu yang dilarang oleh Islam. Namun begitu, Islamisasi pemikiran pembangunan ini harus berbentuk total, bukan berbentuk separa. Apabila pandangan alam Islami menjadi acuan kepada pemikiran pembangunan, maka seluruh unsurnya, sama ada di peringkat operasional atau di peringkat falsafah, akan bersifat Islami secara komprehensif.

REFERENSI

- Anonymous (n.d.a). "Islamization of Knowledge Models", [http://i-epistemology.net/ attachments/ 505_iokn%20-%20Chp%205%20-20Islamization%20of%20Knowledge%20 Models.pdf](http://i-epistemology.net/attachments/505_iokn%20-%20Chp%205%20-%20Islamization%20of%20Knowledge%20Models.pdf), di akses pada 19 April 2013.
- Anonymous (n.d.b). "Definition and Goals of Islamization of Knowledge", [http://i-epistemology.net/ attachments/ 505_iokn%20-%20Chp%203%20-%20Definition%20and%20Goals%20of%20Islamization%20of%20Knowledge.pdf](http://i-epistemology.net/attachments/505_iokn%20-%20Chp%203%20-%20Definition%20and%20Goals%20of%20Islamization%20of%20Knowledge.pdf), diakses pada 19 April 2013.
- 'AbdulHamid A. AbuSulayman (1985). "Islamization of Knowledge with special Reference to Political Science", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol.2, No.2, pp. 263-289.
- 'AbdulHamid A. AbuSulayman, transl. Yusuf Talal DeLorenzo (1993). *Crisis in the Muslim Mind*, Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought.
- 'Abdulhamid A. Abusulayman (2007). *Revitalizing Higher Education in the Muslim World – A Case Study of the International Islamic University Malaysia (IIUM)*, Occasional Paper Series 12, London, UK & Washington, USA: The International Institute of Islamic Thought.
- Bashir S. Galadanci (n.y). "Islamization of Knowledge: The Journey so Far", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol.14, No.2.
- Begum Rokshana Mili (2008). "Islamization of Knowledge: A Focus on Theory and Practice of Islamizing Governance Polity", kertas dibentangkan di *Workshop on Islamic Epistemology and Curriculum Reform*, at Islamic University Kustia, Bangladesh, 2-3 Mei 2008.
- Danjuma A. Maiwada (n.y). "Islamization of Knowledge: Background and Scope", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol.14, No.2.
- Fazlur Rahman (1988). "Islamization of Knowledge: A Response", *The American Journal of Islamic Social Science*, Vol.5, No. 1, pp. 3-11.
- M. A. K. Lodhi, ed. (1994). *Islamization of Attitudes and Practices in Science and Technology*, Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought, reprint.
- Mohamed Aslam Haneef (2009). *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*, Gombak, Selangor; IIUM Press, second edition.
- Mohd Shukri Hanapi (2012). "From Jahiliyyah to Islamic Worldview: In Search of an Islamic Educational Philosophy", a paper presented at *2nd International Conference of Sultan Omar 'Ali Saifuddien Centre for Islamic Studies (SOASIS)*, organized by SOASIS, Universiti Brunei Darussalam (UBD), at UBD, on 5-7 November 2012.
- Muhammad Syukri Salleh (2003). *Tujuh Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam*, Kuala Lumpur: Zebra Editions dan Penang: Islamic Development Management Project (IDMP), Universiti Sains Malaysia.
- Muhammad Syukri Salleh (2008). "Keperluan, Kedudukan dan Hala Tuju Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam", *Pemikir*, Bil. 54, Oktober-Disember 2008.

- Muhammad Syukri Salleh (2011a). "Airan Pemikiran Ekonomi Islam Melayu", makalah yang disampaikan di *Konferensi Internasional Islam di Alam Melayu dengan Tema "Jaringan Islam Di Alam Melayu: Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan"*, anjuran Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (PPs UIN SGD) dengan kerjasama Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Malaysia (APIUM), di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, 20 - 22 November 2011.
- Muhammad Syukri Salleh (2011b). "Islamic Economics Revisited: Recontemplating Unresolved Structure And Assumptions", makalah yang disampaikan di *The Eighth International Conference on Islamic Economics and Finance: Sustainable Growth and Inclusive Economic Development From an Islamic Perspective*, anjuran Qatar Foundation, Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank, dan International Association of Islamic Economics, 25 – 27 Desember 2011, di Doha, Qatar.
- Muhammad Syukri Salleh (2013). "Concepts in Islamic Economics Revisited: The Case of Poverty", makalah yang dibentangkan di *Workshop on Basic Concepts and Thoughts in Islamic Economics*, anjuran Association of Science Culture Education (ILKE), Association of Entrepreneurship and Business Ethics (IGIAD), dan Scientific Studies Association (ILEM), di Istanbul, Turki, 1-3 Mac 2013.
- Suleman Dangor (2005). "Islamization of Disciplines: Towards an Indigenous Educational System", *Educational Philosophy and Theory*, Vol.37, No. 4, pp. 519-531.
- Syed Muhammad al-Naquib al-Attas (1969). *Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesia Archipelago*, Kuala Lumpur, Malaysia: n.p.
- Syed Muhammad al-Naquib al-Attas (1978). *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur, Malaysia: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).
- Taha Jabir al-Alwani (1994). "Islamization of Attitudes and Practices in Science and Technology", in M. A. K. Lodhi, ed., *Islamization of Attitudes and Practices in Science and Technology*, Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought, reprint.
- Taha Jabir al-Alwani (2006). *Islamic Thought: An Approach to Reform – An Introduction to the Structures of Discourse in Islamic Thought*, London, UK & Washington D.C., USA: The International Institute of Islamic Thought.
- The International Institute of Islamic Thought (1989a). *Islamization of Knowledge—General Principles and Work Plan*, Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought, second edition, revised and expanded.
- The International Institute of Islamic Thought (1989b). *Toward Islamization of Disciplines*, Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought.

ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN DI PERGURUAN TINGGI

Muhyarsyah

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Medan, Indonesia

Email: otanjung@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan hendaknya saling berhubungan antara *iman, aql, qalb dan taqwa*⁹. Esensi ilmu secara mutlak sebagai milik Allah SWT, tentu memberikan kesadaran pada manusia akan keterbatasan yang dimilikinya. Pemahaman ilmu secara epistemologi Islam senantiasa menekankan paradigma dan tujuannya pada ketauhidan, agar tetap istiqomah dalam memahami ilmu *observable* (yang terlihat) dan *non-observable* (yang tidak terlihat). Ilmu *observable* diperoleh melalui akal dengan melakukan *experiment, observation, dan sensory*¹⁰. Sedangkan ilmu *non-observable* diperoleh melalui *wahyu* dan *intuisi* yang menghasilkan ilmu yang mutlak tidak terlihat (*ghaib mutlaq*) dan relatif (*ghaib nisbi*) namun tetap diyakini. Maka ketika Islam memposisikan ilmu sebagai esensi dasar dalam mencapai kebahagiaan manusia, seluruh pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan hendaknya menggabungkan antara *akal, wahyu* dan *intuisi* dalam kerangka *'aqli* dan *naqli*¹¹.

Permasalahan yang muncul adalah, *pertama*, sebagian besar para sarjana, ilmuwan, intelektual dan pendidik Islam menjadikan akal sebagai satu-satunya sumber mutlak dalam mendapatkan ilmu pengetahuan; *kedua*, mengabaikan wahyu dan intuisi sebagai sumber asasi; *ketiga*, mengabaikan keyakinan (*religion*) sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan ilmu; *keempat*, sebagian besar intelektual Islam telah terkontaminasi pola pikir sarjana barat melalui ide sekularisasi dan liberalisasi.

⁹ Kasule, Omar Hasan. (2008). *Towards Islamic Epistemology and Islamic Curricula*. In the Workshop on Epistemology held at Universitas Islam Negeri Jakarta on 23rd May 2008.

¹⁰ Kamali, Muhammad Hassan. (Winter 2006). Reading the Sign: A Qur'anic Perspective on Thinking. *Islamism & Science Journal*, Vol. 4, No. 2. Lihat juga Golshani, Mehdi (1989). *Philosophy of Science from the Qur'anic Perspective in Toward Islamization of Disciplines*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.

¹¹ Sumber ilmu pengetahuan pada dasarnya dari Allah, namun dalam proses mendapatkan ilmu didasarkan pada ketentuan Allah SWT dalam memberikannya kepada manusia dan seluruh makhluk ciptaan-Nya. Allah SWT dapat memberikan ilmu melalui naluri (*instinct*), pancaindera (*sensory*), intuisi/nalar (*intuition/reason*), akal (*intellect*), pengalaman dan penelitian empiris (*experience and research of empirical*), dan wahyu (*revelation*). Lihat (Hasan, Muhammad Thalhah. (2006). *Dinamika Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Lantabora Press; Al-Ghazali (J). Tahafut al Falasifah.

Sarjana barat berpandangan bahwa ilmu dan agama adalah terpisah¹², mereka melakukan dikotomi antara ilmu agama (*al-'ulum al-diniyyah/religious science*) dengan ilmu umum (*al-'ulum al-tajribiyah/general science*), menganggap ilmu pengetahuan adalah bebas nilai (*value free*), akal menjadi sumber mutlak dalam mendapatkan kebenaran, sejarah (*history*), peradaban (*civilization*) dan budaya (*culture*) hanya menjadi dasar dalam memodernisasi kehidupan sosial tanpa menjadikannya sebagai rujukan dalam mendapatkan kebenaran.

Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti *sekularisme, liberalisme, marxisme, materialisme, rasionalisme, positivisme, emperisme, skeptisme, agnotisme, relativisme*, dll. Bahkan dampak dikotomi antara ilmu dan agama, memunculkan dua konsep yang saling bertolak belakang yaitu antara *dunia-akhirat, tekstual-kontekstual, akal-wahyu, objektif-subjektif, induktif-deduktif*, dll. Efeknya adalah memposisikan manusia sebagai Tuhan dalam kehidupannya di dunia, karena mereka berpendapat bahwa unsur transendental (agama) dan makhluk (manusia) sebagai hasil ciptaan sehingga dapat dilakukan dikotomi.

Permasalahan di atas menjadi salah satu benang merah munculnya ide Islamisasi ilmu pengetahuan (*Islamization of knowledge*). Ide ini merupakan gagasan monumental dalam upaya mengembalikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam memahami ilmu pengetahuan, serta melahirkan ilmuan (sarjana) Islam yang memahami ilmu konvensional (*al-'ulum al-tajribiyah*) disatu sisi dan ilmu agama (*al-'ulum al-diniyyah*) disisi lain. Dalam merealisasikan tujuan mulia ini, diperlukan sebuah restorasi untuk membenahi sistem pendidikan yang menempatkan ajaran Islam sebagai pintu gerbang dalam menggali ilmu pengetahuan. Salah satunya melalui pembenahan kurikulum berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman pada institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang berlatar belakang Islam.

Sebagai salah satu institusi perguruan tinggi Islam yang merupakan Amal Usaha Muhammadiyah. Tentunya Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) perlu melakukan pembaharuan kembali tentang konsep dan konstruk dari kurikulum, metode pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, serta melakukan evaluasi pembelajaran yang selama ini dilakukan dengan mengintegrasikan antara ilmu dan agama.

Hal ini disebabkan, ketika visi UMSU ingin “menjadi pusat keunggulan dalam penyelenggaraan dan pengembangan ke-Islaman, ilmu pengetahuan dan profesionalitas, kesenian dan teknologi berwawasan global”. Sementara itu misi UMSU adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian dan pembinaan nilai-nilai hidup Islami; mengembangkan kebebasan berfikir ilmiah yang dijiwai dengan semangat

¹² Leif Stenberg . (1996). *The Islamization of Science: Four Muslims Positions Developing an Islamic Modernity*. Stockholm: Almqvist & Wiksell International; lihat juga Moten, Abdul Rashid. (1998). *Approaches to Islamization. Intellectual Discourse*, Vol 6, No 1, 88-98.

ketauhidan; mengembangkan jiwa kemandirian dalam berbagai ilmu pengetahuan, keahlian/ketrampilan, teknologi dan seni; serta menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam sebagai bagian integral dari tujuan Muhammadiyah. Namun pada kenyataannya belum mampu dalam mensinergikan dan mengintegrasikan antara ilmu dan agama.

Apakah problem ini disebabkan pemahaman Dosen, ketika menyusun satuan acara perkuliahan & garis-garis besar program pengajaran, metode pengajaran, sumber pengajaran, dan evaluasi pengajaran pada mata kuliah umum dianggap berdiri sendiri dan tidak dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai ke-Islaman, atau ketidakinginan Dosen dalam menggali khazanah warisan keilmuan dari para ilmuwan Islam dalam upaya mensinergikan mata kuliah umum yang mereka ajarkan.

Jika ini masalahnya, maka harapan dan keinginan dalam merealisasikan visi dan misi UMSU akan sulit tercapai. Bahkan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diharapkan sebagai ujung tombak dalam upaya menanamkan nilai-nilai ke-Islaman pada mahasiswa sampai saat ini hanya memberikan kontribusi yang terbatas dalam merubah pola pikir, perilaku, moralitas dan intelektualitas mahasiswa dalam memahami ilmu dan agama (Islam) secara kaffah.

Berbagai permasalahan di atas dapat diidentifikasi dengan suatu kesimpulan, diantaranya adalah etika berpakaian dan pergaulan mahasiswa tidak mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman; masih rendahnya pemahaman sebagian mahasiswa dan dosen mengenai nilai-nilai ke-Islaman; masih rendahnya keinginan dosen untuk mencoba mengintegrasikan antara ilmu konvensional dengan memasukkan nilai-nilai ke-Islaman dalam setiap proses perkuliahan; kurangnya minat sebagian dosen untuk mensinergikan antara ilmu konvensional dan warisan keilmuan Islam dalam setiap mata kuliah yang diajarkan; rendahnya minat dosen dalam membaca, menggali dan memahami sumber-sumber ilmu pengetahuan yang berasal warisan (*turats*) para sarjana Islam klasik dan sarjana Islam modern.

Maka berdasarkan permasalahan yang kompleks tersebut, penulis tertarik memberikan sebuah pemikiran dan solusi mendasar yang komprehensif dalam upaya melakukan sebuah restorasi dan perbaikan dalam rangka mengembalikan nilai-nilai ke-Islaman sebagai dasar dari visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menjadi salah satu institusi Islam yang melahirkan sarjana-sarjana yang faham tentang ilmu modern (konvensional) dan menjadikan agama (Islam) sebagai sumber dasar dalam menjiwai nilai-nilai ilmu pengetahuan.

Oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, diantaranya adalah, apakah hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan?, apakah Islamisasi kurikulum suatu kebutuhan?, mengapa Islamisasi ilmu pengetahuan perlu di lingkungan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara?, bagaimana metode penerapan Islamisasi ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara?.

MEMAHAMI HAKIKAT ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN

Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan adalah sebagai ide untuk mengembalikan peradaban dan kegemilangan Islam dalam segala aspek¹³. Sebab ilmu pengetahuan adalah jantung dari perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan kebahagiaan manusia. Disamping itu Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, mencakup konsep ilmu dalam bingkai epistemologi dan konsep Tuhan dalam bingkai teologi.

Konsep Islamisasi Ilmu pengetahuan pada dasarnya telah muncul dan berkembang pada masa Sultan Al-Ma'mun (khalifah pada Dinasti Abbasyiah ketujuh). Ini ditandai dengan berdirinya sebuah institusi keilmuan dinamakan *Bait Al-Hikmah*¹⁴. Pada era ini disebut sebagai *Islamic Golden Age* (era keemasan Islam) dalam peradaban dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ide Islamisasi ilmu pengetahuan kembali muncul pada abad ke 20 dari beberapa ilmuwan Islam modern diantaranya adalah Sayyid Hussien Nasr dengan idenya bahwa ilmu pengetahuan akan dapat diperoleh dengan intelektualitas yang bersifat ke-Tuhanan¹⁵. Sementara itu Muhammad Naquib Al-Attas berpendapat bahwa pembebasan manusia dari faktor irasional serta paham sekuler¹⁶. Sedangkan Ismail Razi Al-Faruqi berpendapat bahwa antara realitas keduniawian tidak bisa dipisahkan dengan realitas absolut (Allah)¹⁷.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di negara-negara Eropa/Barat bermula dari pemberontakan dan penolakan masyarakat terhadap agama Kristen yang mana kekuasaan absolut dikendalikan pihak Gereja, dilanjutkan dengan konflik antara pihak gereja dan Ilmuan (sarjana), serta terjadinya revolusi industri di Prancis. Dampak dari kondisi ini

¹³ Aspek agama, pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dll.

¹⁴ Bait al-hikmah (*House of Wisdom*) adalah institusi ilmiah yang didirikan pada abad ke 19 pada masa Khalifah Sultan Al-Ma'mun. Ia berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penelitian dan penerjemahan karya-karya para saintis dan filosofis ilmuwan Greek. Pada masa tersebut bermunculan para ilmuwan-ilmuan Islam yang menguasai berbagai disiplin ilmu diantaranya AL-Kinid, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Al-Haitham, dll.

¹⁵ Nasr, Seyyed Hoosein. (1968). *Man and Nature: The Spritual Crisis in Modern Man*. London: Mandala Unwin Paperbacks. Lihat juga buku Nasr, Seyyed Hoosein. (2001). *Science and Civilization in Islam*. Chicago: ABC International Group Inc; dan Nasr, Seyyed Hoosein. (1976). *Islamic Science: An Illustrated Study*.

¹⁶ Al-Attas, Muhammad Naquib. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: Internation Institute of Islamic Thought and Civilizaation. Lihat juga buku Al-Attas, Muhammad Naquib. (2001). *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: Internation Institute of Islamic Thought and Civilizaation.

¹⁷ Lihat buku Al-Faruqi, Ismail Raji. (1987). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. International Institute of Islamic Thought.

melahirkan sebuah *renaissance era* (era kebangkitan) di negara-negara Eropa/Barat yaitu kebangkitan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun perkembangan dan kemajuan yang terjadi menyebabkan peran agama terhadap ilmu pengetahuan dalam posisi berseberangan, sehingga melahirkan nilai-nilai sekuler¹⁸. Ini sejalan dengan pernyataan *Nietzsche*, bahwa “agama tidak bisa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan”. Ia menambahkan, “seseorang tidak dapat mempercayai dogma-dogma agama dan metafisika jika memiliki metode-metode yang ketat untuk meraih kebenaran di dalam hati. Antara ilmu pengetahuan dan agama masing-masing menempati bidang yang berbeda”¹⁹. Pemikiran ini telah merasuki dan dieksplorasi sebagian besar para sarjana Islam yang memiliki pemikiran sekuler. Salah satunya Bassam Tibi, yang mengemukakan bahwa keterbelakangan umat Islam dalam pembangunan ilmu dan teknologi berasal dari umat Islam sendiri. Ini disebabkan, masyarakat Muslim telah dipengaruhi secara struktural oleh budaya dan ajaran Islam. Maka solusi dari masalah ini adalah dengan melakukan sekularisasi terhadap Islam.²⁰

Jika melihat hakikat dari Islamisasi Ilmu Pengetahuan/*Islamization of Knowledge/ Islamiyyat al-Ma'rifat* pada intinya adalah ingin memurnikan kembali ilmu dalam kerangka Al-Quran dan Hadis. Al-Attas mengemukakan sebagai *Liberation of man first, from magical, mythological, animistic, national-cultural tradition (proposed to Islam), and then from secular control over his reason and language*.²¹ Al-Attas juga mengatakan perlunya *the deliverance of knowledge from its interpretation based on secular ideology; and from meaning and expressions of the secular*²², dalam pengertian bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dengan merujuk pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang disimpulkan bahwa Allah adalah sumber dan azali ilmu manusia.

Maka jika pemikiran para sarjana Barat mengatakan ilmu adalah bebas nilai (*value free*) tentu dinafikan oleh Islam. Hal ini disebabkan ilmu pada dasarnya adalah sarat nilai (*value laden*), sehingga Islam berpandangan bahwa ilmu sesuatu yang universal dan menyatu, tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama (Islam). Sehingga netralitas (*value free*) suatu ilmu pengetahuan pada dasarnya tidak dapat diterima dalam logika berpikir yang sehat ketika manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Bahkan

¹⁸ Sekularisme secara etimologi berasal dari kata *saeculum* (greek) yang memiliki arti tentang waktu tertentu atau tempat tertentu, atau lebih tepatnya menunjukkan kepada waktu sekarang dan di sini, dunia ini. Maka *saeculum* hampir sama dengan *wordly* (Duniawi). Sekularisme secara terminologi diartikan sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara negara dan agama (*state and religion*), juga diartikan sebagai pemisahan semua aspek kehidupan duniawi dan agama.

¹⁹ Nietzsche, Friedrich Wilhelm. (1974). *The Gay Science* (abbr. GS). New York: Vintage Books; lihat juga Heidegger, Martin. (1977). *The Word of Nietzsche: God is Dead. The Questions Concerning Technology and Other Essays*. New York: Harper & Row.

²⁰ Tibi, Bassam. (1991). *Islam and Cultural Accommodation of Social Change*. Bolder Westview Press

²¹ Al-attas, *op cit*

²² *Ibid*

kebohongan dan kemunafikan para ilmuwan Eropa/barat terlihat ketika mereka menekankan netralitas ilmu, sementara mereka memasukkan nilai-nilai peradaban dan budaya mereka (baca: Eropa/Barat) pada sistem, konsep, metode dan pengajaran pada institusi-institusi pendidikan. Ini juga dipaksakan penerapannya pada sistem pendidikan bekas negara-negara jajahan mereka.

al-Din Khalil mengkritik pemikiran para ilmuwan sekuler tentang ilmu pengetahuan dengan mengemukakan bahwa, Islamisasi ilmu pengetahuan sesuatu konsep yang jelas dalam memahami dan memaknai sebuah ilmu pengetahuan, karena hakikatnya adalah untuk mengaplikasikan aktivitas intelektual berdasarkan konsep Islam dari alam semesta. Ini mencakup dalam mengemukakan, menyusun, mengkomunikasikan sampai pada suatu proses penerbitan²³ karya-karya ilmiah. Al-Alwani berpendapat Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai sebuah metodologi yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan sumber-sumbernya, serta penelaahan intelektual dari perspektif pandangan Islam tentang manusia, kehidupan dan alam semesta. Islamisasi ilmu pengetahuan bukan hanya sebagai kamuflase dari terminologi agama atau hanya menghubungkan sesuatu yang relevan dengan ayat Alqur'an, namun ilmu pengetahuan harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid²⁴. Sehingga Islamisasi ilmu pengetahuan dapat memberikan makna dan menghadirkan ilmu dalam sebuah kerangka ontologi dan epistemologi Islam dengan menggunakan metodologi yang dibawa dari nilai ke-Islaman²⁵.

Maka dengan demikian, ketika konsep Islamisasi ilmu pengetahuan diaplikasikan dalam sistem pendidikan dan kurikulum, akan melahirkan generasi muda Islam yang memiliki moralitas, spiritualitas dan keilmuan yang kuat. Bahkan lebih jauh akan memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki kehidupan dan kemanusiaan pada seluruh ummat Islam. Disamping itu, kemampuan intelektual dan profesionalitas yang dimiliki para generasi muda Islam dapat berkompetisi sejajar dengan para ilmuwan di negara-negara maju²⁶.

ISLAMISASI KURIKULUM SUATU KEBUTUHAN

Konteks Islamisasi kurikulum pada dasarnya adalah upaya mengintegrasikan antara disiplin ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai warisan Islam (ajaran dan peradaban Islam). Upaya yang dilakukan

²³ Imad al Din Khalil,. (1991). *Islamization of Knowledge: A Methodology*, Herndon VA & London, UK, IIT

²⁴ Al-Alwani, Taha Jabir. (1995). *Islamization of Knowledge: Yesterday and Today*. American Journal of Islamic Social Science. Vol. 12, No. 1.

²⁵ Haneef, Mohamed Aslam. (2005). *A critical survey of Islamization of knowledge*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.

²⁶ Al Migdadi, Mahmoud Hamid. (2011). *Issues in Islamization of Knowledge*, Man and Education, *Revue Académique des sciences humaines et sociales*, No. 7.

adalah menekankan pemahaman kepada para ilmuwan, intelektual, tenaga pendidik Islam, bahwa disamping memahami ilmu pengetahuan modern (konvensional) mereka juga harus dapat memahami ilmu pengetahuan dari warisan Islam. Sehingga proses pembelajaran pada institusi perguruan tinggi dapat mensinkronkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai positif dan negatif dari suatu disiplin ilmu yang dipelajari.

Mahasiswa dibawa pada suatu proses berfikir secara objektif dan komprehensif dalam menilai suatu ilmu yang mereka pelajari dari sudut pandang kritis dalam membandingkan hasil pemikiran para sarjana barat dan Islam mengenai ilmu pengetahuan yang mereka pelajari.

Upaya ini adalah salah satu bentuk pengintegrasian antara ilmu dan agama (warisan keilmuan Islam) dalam proses perkuliahan di perguruan tinggi. Namun proses pengintegrasian ini tentu membutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kemauan dan keinginan dalam menggali, mempelajari, menganalisa, dan memahami kembali ilmu pengetahuan yang bersumber dari warisan/peradaban Islam dalam kerangka epistemologi (konsep ilmu) dan teologi (Ketuhanan).

Proses mengintegrasikan kurikulum dalam kerangka Islam tentu membutuhkan sebuah perhatian serius dan sistematis dari semua pihak, khususnya pembuat dan pelaksana kebijakan, sehingga akan melahirkan para sarjana-sarjana yang memiliki ilmu pengetahuan, keahlian, moralitas, dan spritualitas dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja²⁷. Dalam merealisasikan pengintegrasian antara ilmu pengetahuan dan agama²⁸ dalam suatu kurikulum yang disusun, diperlukan suatu eksplorasi yang komprehensif dari tenaga pendidik (Dosen) memahami Al-Qur'an, Hadis, fiqh, sejarah Islam, dan peradaban Islam melalui hasil pemikiran dari para ilmuwan/ulama Islam²⁹ tradisional dan modern. Sehingga pada saat proses belajar-mengajar dilakukan, tenaga pendidik dapat mengkolaborasikan antara ilmu pengetahuan modern³⁰ dan ilmu pengetahuan agama dalam satu kesatuan.

Ketika materi pengajaran dalam ilmu pengetahuan modern disampaikan kepada peserta didik (mahasiswa), maka perlu dilakukan usaha mereviu, mengevaluasi, memodifikasi, mengasimilasi, bahkan menghilangkan dasar-dasar pemikiran ilmu yang tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islaman.

²⁷ Ruzita Mohd. Amin, Selamah Abdullah Yusof and Mohamed Aslam Haneef. The Effectiveness of an Integrated Curriculum: The Case of the International Islamic University Malaysia. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance – Sustainable Growth and Inclusive Economic Development from an Islamic Perspective. Doha – Qatar, 10th – 20th December 2011.

²⁸ Al-qur'an, Hadist, Fiqh, Ushul Fiqh

²⁹ Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Khaldun, Al Biruni, dll

³⁰ ilmu alam, ilmu sosial, ilmu terapan, ilmu teknologi, dll

Selanjutnya, dilakukan suatu analisa perbandingan antara teori, konsep dan aplikasi tentang ilmu pengetahuan dari hasil pemikiran para ilmuan barat (*western scholars*)/ ilmuan konvensional (*conventional scholars*) dengan ilmuan Islam (*Islamic scholars*). Dengan demikian, proses ini akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang benar-benar dapat difahami para peserta didik (mahasiswa) secara benar dan objektif. Bukan sebaliknya, terkontaminasi dari hasil pemikiran sekuler dan liberal yang berorientasi pada akal, dengan menjadikan dunia sebagai *absolute object* dalam mencari dan menemukan kebenaran sebuah ilmu pengetahuan.

Dalam merealisasikan Islamisasi kurikulum terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu: Tahap *pertama* adalah memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para tenaga pendidikan (Dosen) tentang pentingnya mengintegrasikan antara ilmu dan agama, bukan sebaliknya, melakukan dikotomi bahwa masalah ilmu adalah masalah kehidupan duniawi dan lingkup pembahasannya hanya berkisar pada realitas, objektivitas dan rasionalitas secara mutlak. Sedangkan masalah agama tidak dapat dijadikan sebagai dasar mendapatkan kebenaran, karena agama berhubungan dari hal-hal yang gaib/tidak terlihat, sehingga tidak dapat diterima secara rasional.

Tahap *kedua* adalah dengan merubah cara pandang (*worldview*) Dosen tentang ilmu pengetahuan yang dipelajari dan diajarkan kepada mahasiswa dengan menekankan dalam kerangka *Islamic Worldview*. Kerangka ini pada dasarnya adalah menyatukan antara realitas dan kebenaran (*reality and truth*), dimana pemahamannya tentang ilmu pengetahuan bukan mutlak terhadap sesuatu yang kelihatan (*Wujud*) dalam kehidupan duniawi saja, namun juga terdapat sesuatu yang tidak kelihatan (*Maujud*) dalam kehidupan akhirat. Sehingga esensi terhadap realitas dan kebenaran dalam *Islamic Worldview* adalah menyatukan ilmu dunia dan akhirat dengan menggunakan metode *tawhidi*. Dasar metode ini menekankan bahwa antara "Allah"³¹, "Kehidupan"³² dan "Alam Semesta"³³ akan menjadi satu kesatuan

³¹ "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zhahir dan yang bathin; dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu". (Al-Hadid: 3); "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (Al-Baqarah: 225)

³² Apakah kamu menyangka bahwa itu semua Kami jadikan dengan sia-sia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami ? (al-Mu'minin : 115); Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya Allah Dialah saja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dialah saja Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat dan Kukuh kekuasaanNya. (Az-zariyat : 56-58)

³³ Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka bertanya kepadamu

yang saling berintegrasi dalam mempelajari dan memahami ilmu secara komprehensif.

Tahap *ketiga* adalah para tenaga pendidik (Dosen) disamping menguasai ilmu pengetahuan modern (konvensional), juga dituntut juga memahami dan menguasai ilmu pengetahuan yang berasal dari warisan Islam (*turat*), sehingga esensi dari nama suatu mata pelajaran/ mata kuliah tidak perlu untuk dirubah, namun tenaga pendidik (Dosen) mampu memasukkan nilai-nilai Islam kedalam setiap pelajaran umum yang diajarkan, dengan memberikan pemahaman tentang konsep, teori, dan pemikiran yang bersumber dari warisan Islam.

Dengan demikian bukan nama dari sebuah mata kuliah/ mata pelajaran yang akan di-Islamkan dengan memberikan label Islam/ syariah, namun kemampuan tenaga pendidik (Dosen) dalam mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan modern dan ilmu pengetahuan dari warisan ilmuwan Islam.

PERLUNYA ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Salah satu penyebab kemunduran umat Islam diantaranya adalah ketika agama dan Ilmu tidak dijadikan sebagai satu kesatuan dalam proses mempelajari ilmu pengetahuan. Maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi bagi umat manusia. Sehingga posisi manusia akan senantiasa menjadi objek dalam menjustifikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi ini tentu disebabkan proses berpikir para ilmuwan tidak ditujukan untuk mencari kebenaran dari proses penggalian ilmu pengetahuan. Karena sebenarnya ilmu dipandang sebagai sesuatu yang "*relatif*" dan "*tidak pasti*", sehingga sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung pada cara pandang seseorang dalam menyimpulkannya melalui nalar (*rasio*) dan pancaindera (*sensory*). Akibatnya memunculkan ketidak pastian (keraguan) secara terus-menerus terhadap penemuan setiap ilmu.

Penggunaan konsep *Tesis-Hipotesis-Anti Tesis* adalah salah satu konsep yang selalu digunakan para intelektual barat dan sebagian besar intelektual Islam ketika ini, dalam menjustifikasi keraguan mereka terhadap penemuan ilmu pengetahuan. Bahkan mereka mengeneralisasi, semua disiplin ilmu (ilmu agama dan umum) tidak memiliki suatu kepastian, sehingga dapat di observasi, dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan kondisi kekinian

seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Al-a'raf : 187) ; Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-qasas : 77)

melalui logika berpikir subjektif. Skeptisme senantiasa dimunculkan agar mendorong munculnya keraguan-keraguan secara terus-menerus. Dampak pemikiran ini menyebabkan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia tidak memiliki kepastian. Salah satu contoh ketidakpastian terhadap penemuan ilmu pengetahuan yang diimplementasikan para ilmuwan barat dalam menyelesaikan problem ekonomi umat manusia adalah dengan munculnya beberapa aliran pemikiran ekonomi seperti *marcantalis*, *pra-classical economic*, *classical economic*, *neo-classical economics*, *modern economic*, dll.

Oleh sebab itu, dalam meluruskan kembali konsep ilmu pengetahuan dalam menghasilkan para intelektualitas Islam yang memiliki moralitas dan profesionalitas dalam mengemban amanah sebagai *khalifatullah fil ardhi* dalam risalah kenabian³⁴. Maka Islamisasi ilmu pengetahuan mutlak dibutuhkan pada institusi perguruan tinggi khususnya yang memiliki latar belakang perguruan tinggi Islam. Tujuannya agar dapat melahirkan para sarjana-sarjana Islam yang menguasai secara seimbang antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan modern (konvensional). Ini sejalan dari tujuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu *"terwujudnya intelektual yang beriman, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri serta dapat beramal sesuai dengan bidang ilmu dengan ikhlas demi terwujudnya masyarakat utama yang diridhai oleh Allah SWT"*.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai gerbong terdepan berupaya maksimal untuk terus meningkatkan kualitasnya dan saat ini menunjukkan sebagai suatu institusi perguruan tinggi yang mengalami kemajuan cukup pesat. Perlu melakukan pembenahan secara terus-menerus khususnya dalam masalah kurikulum pendidikan, agar dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia perguruan tinggi yang berbasis ke-Islaman.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, serta perubahan dunia usaha yang dinamis, jika tidak dibarengi dengan perbaikan kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai ke-Islaman, dapat mengakibatkan ketertinggalan dan keterbelakang universitas muhammadiyah sumatera utara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki visi ke-Islaman. Namun pembenahan dan perbaikan kurikulum yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada besarnya lulusan yang diterima dalam dunia kerja. Sebaliknya harus diimbangi dengan penguasaan dan pemahaman mahasiswa (lulusan) terhadap hakikat ilmu (ilmu umum/modern dan agama).

³⁴ al-Asyqar, Umar Sulaiman. (2008). *Rasul dan Risalah*. Terj. Muir F. Riyad: International Islamic Publishing House.

Pengintegrasian kurikulum berorientasi nilai-nilai ke-Islaman tidak hanya ditujukan pada Fakultas Agama Islam (FAI), serta ditekankan hanya pada Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Namun sebaliknya, seluruh civitas akademik, khususnya tenaga pengajar (Dosen) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki tanggungjawab, kemauan, keinginan dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu umum/ modern dan agama dalam proses pendidikan/ pengajaran.

Dalam mengimplementasikan proses pengintragrasi kurikulum berbasis ke Islam-an dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada staff pengajar (Dosen) tentang konsep dan aplikasi dari Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: *pertama*, penguasaan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan modern (sesuai dengan disiplin keahlian masing-masing dosen); *kedua*, penguasaan terhadap khazanah atau warisan keilmuan Islam (memasukkan dalam setiap proses pengajaran pemikiran-pemikiran dari para ilmuwan Islam); *ketiga*, mengemukakan tentang ajaran-ajaran Islam yang relevan dalam setiap wilayah ilmu pengetahuan modern (teori, konsep dan proposisi dari pemikiran ilmu modern/konvensional dapat dikolaborasikan dengan nilai-nilai ke-Islaman); *keempat*, melakukan sintesa kreatif antara khazanah atau tradisi Islam dengan ilmu pengetahuan modern; *kelima*, memberikan arah bagi para akademisi Islam untuk tetap pada jalur tepat dalam membawa proses berpikir ke arah pemenuhan kehendak Ilahiyah.

Proses fundamental dalam mengaplikasikan Islamisasi ilmu pengetahuan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah dengan merubah cara pandang tenaga pengajar (Dosen) tentang hakikat ilmu yang mereka miliki sesuai dengan cara pandangan hidup Islam (Islamic worldview), dengan menjadikan *Al-qur'an, Hadis, Fiqh & Ushul Fiqh, sejarah Islam, peradaban Islam, dan ilmu modern* menjadi sumber dalam proses belajar-mengajar dalam setiap perkuliahan. Mengutip pendapat Albert Einstein, bahwa "*Science without Religion is blind, and Religion without science is lame*" (ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh)³⁵. Selanjutnya Max Planck juga mengungkapkan bahwa "*with religious people, God appears at the beginning of their thinking, with natural scientists, at the end.*" (Pada masyarakat beragama, Tuhan akan muncul pada awal pemikiran mereka, dengan para ilmuwan alam, pada akhirnya)³⁶

MENGIMPLEMENTASIKAN ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut Al-Attas merupakan bentuk dari pengembalian nilai-nilai Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

³⁵ Gutkind, Eric. (1952). *The Biblical Call to Revolt*. New York: Henry Schuman

³⁶ Planck, Max. (1905). *Treatise on Thermodynamics*. (translated). by Alexander Ogg. Third Edition. Berlin: Dover Publication

Dia melihat bahwa perlunya melibatkan dua proses yang saling berhubungan dalam melakukan Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

Pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, dan *kedua*, memasukan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Jelasnya, "ilmu hendaknya diserap dari unsur-unsur dan konsep utama Islam, maka setelah unsur-unsur dan konsep pokok yang menyimpang dari nilai-nilai Islam dikeluarkan dari setiap ranting setiap disiplin ilmu.

Dalam pemikiran Al-Attas ketika wahyu dalam peradaban Barat telah dianggap mengalami distorsi dan dicampakkan dari wilayah ilmu pengetahuan, maka Islamisasi ilmu justru menegaskan bahwa Wahyu adalah sumber ilmu. Wahyu merupakan dasar kepada kerangka metafisis untuk mengupas filsafat sains. Dengan Wahyu, realitas dimaknai mencakup alam fisik dan non-fisik. Sedangkan tanpa Wahyu, realitas dipahami hanya terbatas pada alam nyata yang dianggap satu-satunya realitas³⁷.

Al-Attas menolak pandangan bahwa Islamisasi ilmu bisa tercapai dengan melabelisasi sains dan prinsip Islam atas ilmu sekuler. Usaha demikian akan menimbulkan persoalan baru bagi para ilmuan, pendidik dan mahasiswa Islam dalam memahami ilmu pengetahuan, sehingga jika diimplementasikan tidak akan memberikan suatu manfaat pada batang tubuh ilmu yang di Islamisasikan. Sebab "virus" dari pemikiran para ilmuan barat/ sekuler masih berada dalam tubuh ilmu itu sendiri, maka ilmu yang dihasilkan dari proses labelisasi menjadi tidak jelas dan kabur, dalam pengertian ilmu yang dihasilkan bukan nilai-nilai Islam dan juga bukan nilai-nilai sekuler. Padahal tujuan dari Islamisasi itu sendiri adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar dimana telah menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Islamisasi ilmu dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian muslim yang sebenarnya sehingga menambah keimanannya kepada Allah, dan dengan Islamisasi tersebut akan terlahirlah keamanan, kebaikan, keadilan dan kekuatan iman.

Menurut al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha "untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi *cause* (cita-cita)."

Dalam menuangkan kembali keseluruhan khazanah pengetahuan umat manusia menurut wawasan Islam, bukanlah tugas yang ringan yang harus dihadapi oleh intelektual-intelektual dan pemimpin-pemimpin Islam saat ini.

³⁷ Al-attas, *op cit*.

Karena itulah, untuk *melandingkan* gagasannya tentang Islamisasi ilmu, al-Faruqi meletakkan "prinsip tauhid" sebagai kerangka pemikiran, metodologi dan cara hidup Islam. Prinsip tauhid ini dikembangkan oleh al-Faruqi menjadi lima macam kesatuan, yaitu *pertama*, kesatuan Tuhan; *kedua*, kesatuan ciptaan; *ketiga*, kesatuan kebenaran dan pengetahuan; *keempat*, kesatuan kehidupan; dan *kelima*, kesatuan kemanusiaan³⁸.

Maka tujuan Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut Al-Faruqi dapat direalisasikan dengan penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan khazanah warisan Islam, membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern, memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern serta pengarahannya aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah.

Dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, Al-Faruqi menyusun 12 langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam merealisasikan Islamisasi Ilmu Pengetahuan yaitu: *pertama*, penguasaan disiplin ilmu modern: prinsip, metodologi, masalah, tema dan perkembangannya; *kedua*, melakukan survei terhadap disiplin ilmu; *ketiga*, penguasaan khazanah Islam melalui ontology, *keempat*, penguasaan khazanah ilmiah Islam melalui analisis; *kelima*, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu; *keenam*, penilaian secara kritis terhadap disiplin keilmuan modern dan tingkat perkembangannya di masa kini; *ketujuh*, penilaian secara kritis terhadap khazanah Islam dan tingkat perkembangannya dewasa ini; *kedelapan*, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam; *kesembilan*, survei permasalahan yang dihadapi manusia; *kesepuluh*, analisis dan sintesis kreatif; *kesebelas*, menyusun buku teks sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman; dan *keduabelas*, penyebarluasan ilmu yang sudah diislamkan³⁹.

Berbagai pandangan tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan kadang menimbulkan berbagai multi tafsir dalam pemahamannya. Sehingga terjadi distorsi dalam memaknai hakikat dari Islamisasi Ilmu Pengetahuan itu sendiri. Berbagai versi dalam mendefinisikan Islamisasi Ilmu Pengetahuan dapat dikemukakan sebagai berikut : versi *pertama* beranggapan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada (ayatisasi). Versi *kedua*, mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Versi *ketiga*, mengemukakan bahwa Islamisasi harus berdasarkan filsafat Islam dengan mempelajari dasar metodologinya. Versi *keempat*, memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika atau beradab.

³⁸ Al-Faruqi, Ismail Razi. (1983). *Tauhid: Its Relevance for Thought and Life*. Kuala Lumpur: International Islamic Federation of Student Organization.

³⁹ Sulaiman, Sa'idu. (2000). *Islamization of Knowledge: Background, Models, and the Way Forward*. Kano: IIIT Nigeria Office

Mengutif konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang dikemukakan Al-Attas dan Al-Faruqi. *Secara substansi dalam mengimplementasikan Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya bukan memberikan labelisasi ilmu dengan memasukkan nilai-nilai Islam. Tetapi tujuannya adalah diperlukan penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan khazanah warisan Islam, membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern, memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern serta pengarah aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah. Sehingga Islam sebagai fondasi dasar upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dapat terealisasi secara maksimal.*

Dalam rentang sejarah sejak keruntuhan dinasti Utsmani di Turki tahun 1922, umat Islam identik dengan kemelaratan, kemiskinan, kesengsaraan, pinindasan, dan kolonialisme. Umumnya sebagian besar umat Islam mengalami keterbelakangan dalam masalah ekonomi, terpecah dalam masalah kehidupan sosial, termarginalisasi dalam kehidupan politik, serta terjadi pengikisan nilai-nilai budaya dan ke-Islaman. Maka kondisi ini direspon para intelektual dan ilmuan Islam ketika konferensi pendidikan Islam diselenggarakan Universitas King Abdul Aziz di Makkah pada tahun 1977. Hasil rekomendasi yang dicapai adalah perlunya melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan dalam seluruh aspek disiplin keilmuan⁴⁰ dengan mengimplementasikan pada level akademis maupun kehidupan masyarakat Islam.

Khusus pada level akademisi, perlunya mengintegrasikan konsep ilmu berdasarkan wahyu, hadist, fiqh/ushul fiqh, sejarah, dan peradaban Islam pada universitas (perguruan tinggi) dalam melakukan penyusunan kurikulum; dalam mempublikasikan karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian; serta dalam kegiatan seminar, konferensi, dan workshop baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, para ilmuan dan akademisi Islam perlu melakukan penelaahan dan penelitian secara terus-menerus dalam mengkaji dan menggali berbagai khazanah keilmuan yang telah dilahirkan oleh para ilmuan-ilmuan Islam untuk dijadikan sebagai dasar rujukan dalam melakukan perbandingan dan penilaian terhadap konsep ilmu dari pemikiran ilmuan barat/sekuler.

Namun demikian pada saat ini pemahaman sebagian besar para akademisi/dosen Islam tentang Islamisasi ilmu pengetahuan masih dipersepsikan sesuatu yang negatif dan tidak memiliki manfaat. Hal ini disebabkan mereka beranggapan Islamisasi Ilmu Pengetahuan hanya mengadopsi pemikiran ilmuan barat/konvensional dengan memasukkan bagian-bagian dari ilmu Islam kedalamnya, sehingga diberikan sebuah label

⁴⁰ Lihat buku Al-attas, Muhammad Naquib. (1979). *Aims and objectives of Islamic Education*. Jeddah: Hodder and Stoughton fo King Abdul Aziz University. al-Faruqi, Ismail Raji (1989). *Islamization of knowledge: General Principles and Workplan*. Herndon: International Institue of Islamic Thought.

“Islam” atau “syariah”. Sementara mereka tidak mamahami bahwa Islamisasi sebagai usaha mengintegrasikan ilmu kedalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadist, Tafsir, Fiqh, Sejarah dan peradaban Islam, dan Bahasa. Akibatnya ketidak tahuan dan kekurangan mereka melakukan proses belajar mengajar maka pemahaman mahasiswa tentang hakikat Islamisasi ilmu menjadi kabur bahkan dianggap sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman.

Bahkan dalam mengembangkan Islamisasi Ilmu pengetahuan sering menimbulkan konflik dalam dunia akademis. Salah satunya adalah pembukaan jurusan ekonomi Islam yang hanya bertujuan untuk memenuhi perkembangan dunia akademis dan juga berkeinginan untuk berkompetisi dalam memenuhi kepuasan para alumni dalam memasuki dunia kerja. Akibatnya esensi dalam Islamisasi ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi telah bergeser dari memenuhi kepentingan politik dan ekonomi yang menciptakan sektarian untuk memenuhi kepentingan ummat Islam sendiri. Padahal secara fundamental Islamisasi dalam bidang ekonomi adalah usaha pemurnian konsep ekonomi yang berkembang saat ini dalam kerangka gerakan intelektual yang memihak pada kebenaran dan mengimplementasikannya untuk kepentingan seluruh ummat manusia.

Oleh sebab kita perlu menata ulang kurikulum yang akan disajikan, serta staf pengajar yang dibutuhkan untuk memahami hakikat dari Islamisasi itu sendiri dalam konteks berpikir kritis dan rasional namun dalam kerangka *worldview* atau *tasawwur* Islam, sehingga proses pemikiran yang menghasilkan kebenaran dan pengimplementasian ilmu ditengah-tengah masyarakat senantiasa dalam kerangka Islam dan keluar dari hegemoni pemikiran secular. Prinsip Islamisasi pengetahuan yang sarat dengan nilai bukan bebas nilai perlu dipahami secara nyata untuk menghindari kesalahan dalam memahami ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai gabungan antara akal dan wahyu.

Jika ini diterapkan maka kemajuan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam kerangka Islam akan memberikan perubahan baru dalam khazanah keilmuan dan juga dapat mengangkat kehidupan ummat manusia khususnya ummat Islam. Dan bukan tidak mungkin kejayaan Islam akan kembali bersinar dalam dunia kontemporer. Sebab kebangkitan Islam yang dikemukakan Yusuf Qardhawi adalah suatu realitas yang terjadi sesuai dengan konsep *life cycle product*.

KESIMPULAN

Islamisasi Ilmu Pengetahuan adalah sebagai ide untuk mengembalikan peradaban dan kegemilangan Islam dalam segala aspek yang menyatukan antara konsep ilmu dalam bingkai "*epistemologi*" dan konsep Tuhan dalam bingkai "*theology*". Sebab Ilmu pengetahuan adalah jantung dari perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan kebahagiaan manusia. Islamisasi kurikulum adalah salah satu dari upaya mengintegrasikan antara ilmu dan agama dalam proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun tahapan yang dilakukan adalah mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai warisan Islam (*Islamic heritage*). Adapun cara yang dilakukan adalah, pertama, pemahaman tenaga pendidik (Dosen) mengenai tidak adanya dikotomi (pemisahan) antara ilmu dan agama, proses belajar dan mengajar dalam kerangka Islamic worldview, tenaga pendidik (dosen) dapat memahami ilmu umum (konvensional) dan ilmu agama. Adapun implementasi secara nyata yang dapat dilakukan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah merubah cara pandang tenaga pengajar (Dosen) tentang hakikat ilmu yang mereka miliki sesuai dengan cara pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*), dengan menjadikan Al-Qur'an, Hadis, Fiqh & Ushul Fiqh, sejarah Islam, peradaban Islam, dan ilmu modern menjadi sumber dalam proses belajar- mengajar dalam setiap perkuliahan.

REFERENSI

- Al Migdadi, Mahmoud Hamid (2011). Issues in Islamization of Knowledge, Man and Education, *Revue Académique des sciences humaines et sociales*, No. 7.
- Al-Alwani, Taha Jabir (1995). Islamization of Knowledge: Yesterday and Today. *American Journal of Islamic Social Science*. Vol. 12, No. 1.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. (2008). *Rasul dan Risalah*. Terj. Muir F. Riyad: International Islamic Publishing House.
- Al-Attas, Muhammad Naquib (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- (1979). *Aims and Objectives of Islamic Education*. Jeddah: Hodder and Stoughton for King Abdul Aziz University.
- (2001). *Risalah untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Faruqi, Ismail Razi (1983). *Tauhid: Its Relevance for Thought and Life*. Kuala Lumpur: International Islamic Federation of Student Organization.
- (1987). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. International Institute of Islamic Thought.
- (1989). *Islamization of knowledge: General Principles and Workplan*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Golshani, Mehdi (1989). *Philosophy of Science from the Qur'anic Perspective in Toward Islamization of Disciplines*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Gutkind, Eric (1952). *The Biblical Call to Revolt*. New York: Henry Schuman
- Haneef, Mohamed Aslam. (2005). *A critical survey of Islamization of knowledge*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Heidegger, Martin (1977). *The Word of Nietzsche: God is Dead. The Questions Concerning Technology and Other Essays*. New York: Harper & Row.
- Kamali, Muhammad Hassan (Winter 2006). Reading the Sign: A Qur'anic Perspective on Thinking. *Islam & Science Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Kasule, Omar Hasan (2008). *Towards Islamic Epistemology and Islamic Curricula*. In the Workshop on Epistemology held at Universitas Islam Negeri Jakarta on 23rd May 2008.
- Khalil, Imad al Din (1991). *Islamization of Knowledge: A Methodology*, Herndon VA & London, UK, IIT.
- Leif Stenberg (1996). *The Islamization of Science: Four Muslims Positions Developing an Islamic Modernity*. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
- Moten, Abdul Rashid (1998). Approaches to Islamization. *Intellectual Discourse*, Vol 6, No 1, 88-98.
- Nasr, Seyyed Husein (1968). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. London: Mandala Unwin Paperbacks.

- Nasr, Seyyed Hoosein (1976). *Islamic Science: An Illustrated Study*. Istambul: Kazi Publication Incorporated.
- Nasr, Seyyed Hoosein (2001). *Science and Civilization in Islam*. Chicago: ABC International Group Inc.
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1974). *The Gay Science* (abbr. GS). New York: Vintage Books.
- Planx, Max (1905). *Treatise on Thermodynamics. (translated).* by Alexander Ogg. Third Edition. Berlin: Dover Publication.
- Ruzita Mohd. Amin, Selamah Abdullah Yusof and Mohamed Aslam Haneef. The Effectiveness of an Integrated Curriculum: The Case of the International Islamic University Malaysia. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance – Sustainable Growth and Inclusive Economic Development from an Islamic Perspective*. Doha – Qatar, 10th – 20th December 2011.
- Sulaiman, Sa'idu (2000). *Islamization of Knowledge: Background, Models, and the Way Forward*. Kano: IIIT Nigeria Office.
- Tibi, Bassam (1991). *Islam and Cultural Accommodation of Social Change*. Bolder Westview Press.

REAKTUALISASI MORALITAS AGAMA (ISLAM) DALAM PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT

Muhammad Qorib

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Medan, Indonesia

Email: qorib75@yahoo.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan warisan budaya, terutama budaya keagamaan. Hampir semua agama besar dunia tumbuh dan berkembang di tanah air ini. Fenomena banyaknya tempat (masjid, gereja, pura, dll.) dapat dijadikan bukti kasat mata betapa tradisi agama begitu kuat berakar di tanah air. Sejak munculnya era informasi, meminjam pembabakan Alvin Toffler, yang ditandai dengan menjamurnya berbagai media komunikasi seperti televisi, internet, tablet dan telepon genggam, acara-acara keagamaan yang turut serta disebarluaskan oleh media informasi itu hadir setiap waktu dengan beragam wajah dan model yang disajikan oleh para pemeluknya. Namun idealisasi yang kerap dipromosikan agama-agama belum dapat dinikmati, apalagi dapat dibanggakan sebagai pembawa rahmat (*rahmatan li al-'alamin*) dan pembangun peradaban besar. Inilah fenomena yang mesti dicermati, dipelajari dan dipecahkan bersama oleh segenap pemeluk agama. Tugas besar para penganut agama tidak lagi terfokus pada bagaimana peningkatan kuantitas jumlah pengikut, melainkan mendekatkan dan melekatkan kenyataan dengan nilai-nilai luhur yang dikandung oleh masing-masing ajaran agama⁴¹.

Saat ini kita sedang berhadapan dan berada dalam arus besar globalisasi. Proses perubahan berlangsung demikian cepat. Menurut Paul Streeten dalam bukunya *Globalisation: Threat and Opportunity (2001)*, globalisasi selain melahirkan berbagai kemudahan tapi juga menimbulkan berbagai perubahan sosial. Streeten menyebutkan bahwa globalisasi melahirkan wajah yang paradoksal, *threat* (ancaman) di satu sisi dan *opportunity* (peluang) di sisi lain⁴². Secara sosiologis, tentu saja ancaman dan peluang itu akan pula dihadapi oleh setiap agama sebagai elemen penting masyarakat. Oleh sebab itu, mau tidak mau, peran-peran keagamaan perlu direvitalisasi. Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi yang berlangsung sangat cepat dan sulit ditebak arahnya itu, orang masih berharap pada agama untuk tampil menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi. Komaruddin Hidayat bahkan

⁴¹ Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit dan Wahyu di Bumi: Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2003), 35.

⁴² Lihat Paul Streeten, *Globalisation: Threat and Opportunity* (Michigan: Copenhagen Business School Press 2001).

mempersonifikasikan agama seperti sosok “superman” yang mampu membuat keajaiban untuk mencari jalan keluar (*way out*) atas berbagai persoalan yang timbul di masyarakat.⁴³

BERCERMIN PADA PENGALAMAN KEAGAMAAN MASA LALU

Proses perubahan (baca: pembangunan) dengan menegaskan peran agama setidaknya dapat dilihat dari pengalaman Barat di masa lalu. Mengapa Barat? Sebagian pakar menyebutkan bahwa Barat adalah model tertua bagi berlangsungnya proyek modernisme, sehingga masyarakatnya menjadi benar-benar *termodernkan* (*thoroughly modernized society*).⁴⁴ Pengalaman Barat tersebut setidaknya dapat memberikan hikmah tersendiri terkait dengan pembangunan tanpa agama. Jika ditelusuri bahwa abad modern di Barat, yang dimulai sejak abad XVII, merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatisme agama. Kenyataan ini dapat dipahami, karena abad modern Barat dibangun atas dasar pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama (sekularisme). Perpaduan antara rasionalisme dan empirisme dalam satu paket epistemologi melahirkan apa yang oleh Thomas Henry Huxley disebut dengan metode ilmiah (*scientific method*).⁴⁵

Penemuan metode ilmiah yang berwatak empiris dan rasional secara menakjubkan membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Industri dan berbagai macam penemuan ilmu pengetahuan membawa kemudahan-kemudahan hidup, membuka wawasan kehidupan baru, dan melahirkan pola kehidupan baru yang disebut modernisme. Modernisme ditandai dengan rasionalisme, kemajuan, dan sekularisme. Dengan demikian, abad modern Barat adalah zaman ketika manusia menemukan dirinya sebagai kekuatan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Manusia dipandang sebagai makhluk yang hebat, yang independen dari Tuhan dan alam. Manusia modern Barat sengaja melepaskan diri dari keterikatannya dengan Tuhan (*theomorphisme*), untuk selanjutnya membangun tatanan manusia yang semata-mata berpusat pada manusia (*antropomorphisme*). Manusia menjadi tuan atas nasibnya sendiri, yang mengakibatkan terputusnya dari nilai-nilai spiritual. Akibatnya, manusia modern Barat pada akhirnya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan hidup sendiri.⁴⁶

⁴³ Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit*, 36.

⁴⁴ Lihat Loek Halman dan Ole Riis, ed., *Religion in Secularising Society: The European Religion at the End of the 20th Century* (Leiden: Brill, 2003), 1.

⁴⁵ Lihat David E. Alexander dan Rhodes W. Fairbridge, ed., “Thomas Henry Huxley (1825-1895)”, dalam *Encyclopedia of Environmental Sciences* (Doordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999), 331-332.

⁴⁶ Ali Maksum, “Spiritualitas Abad Modern: Reposisi Islam dalam Kancah Kebangkitan Agama”, (dikutip dari: <http://www.arsip.masjid.telkom.co.id> [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 14 April 2013 pukul 17.53 WIB). Uraian lengkap mengenai pemikiran Seyyed Hossein Nasr dapat dilihat dalam bukunya, *Islam and The Plight of Modern Man* (Virginia: ABC International Group, 2000).

Menarik seandainya kita mencermati kegelisahan E.F. Schumacher terhadap modernisasi di Barat. Ia menjelaskan bahwa berbagai krisis yang terjadi di Barat baik lingkungan, ekonomi, politik, berkurangnya pasokan makanan dan seterusnya berpangkal dari sirnanya kesadaran agama di dalam diri masyarakat Barat. Mereka mencampakkan kebutuhan mendasar (baca: agama) yang merupakan pilar penting kehidupan manusia. Schumacher menegaskan bahwa pemulihan atas kondisi Barat yang sedang menderita penyakit tersebut sebenarnya adalah kembali pada agama. Dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan sesuatu yang bersifat *perennial* itu.⁴⁷ Jika ditelusuri lebih jauh, manusia dalam bahasa Inggris disebut *human being*. Kedua suku kata itu mengandung makna tersendiri dan tidak bisa dipisah. *Human* mengacu pada ranah lahiriah manusia seperti *body and mind*, sedangkan *being* mengacu pada ranah jiwanya (*soul*)-nya.⁴⁸ *Human being* adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Pemisahan di antara keduanya tentu saja akan melahirkan konsekuensi negatif bagi manusia itu sendiri.

Peradaban modern yang berkembang di Barat sejak zaman renaissance adalah sebuah eksperimen yang telah mengalami kegagalan sedemikian parahnya, sehingga umat manusia menjadi ragu akan pertanyaan apakah mereka dapat menemukan cara-cara lain di masa yang akan datang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Seyyed Hossein Nasr, bahwa manusia modern yang memberontak melawan Allah, telah menciptakan sebuah sains yang tidak berlandaskan cahaya agama tetapi berdasarkan kekuatan akal manusia semata untuk memperoleh data melalui indera. Peradaban modern hanya ditegakkan di atas landasan konsep mengenai manusia yang tidak menyertakan hal yang paling esensial dari manusia itu sendiri. Akibat dari fenomena di atas, masyarakat Barat, yang sering digolongkan *the post industrial society*, suatu masyarakat yang telah mencapai tingkat kemakmuran materi dengan perangkat teknologi yang serba mekanis dan otomatis, bukannya semakin mendekati kebahagiaan hidup, melainkan sebaliknya, kian dihinngapi rasa cemas (*anxiety*). Keadaan tersebut justru akibat kemewahan hidup yang diraihinya. Mereka telah menjadi pemuja ilmu dan teknologi. Tanpa disadari, integritas kemanusiaannya tereduksi lalu terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang sangat tidak humanis.⁴⁹

Terhadap fenomena semacam ini, Nasr menggunakan dua istilah pokok, yaitu *axis* dan *rim* atau *centre* dan *periphery*, untuk membedakan dua kategori orientasi hidup manusia. Nasr berulang kali mengatakan, walaupun dengan ungkapan yang berbeda-beda, bahwa masyarakat modern Barat sedang berada di wilayah pinggiran eksistensinya sendiri, bergerak menjauh dari pusat, baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun dalam lingkungan

⁴⁷ Lihat E.F. Schumacher, *A Guide for the Perplexed* (Random House, 2011).

⁴⁸ Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 6.

⁴⁹ Ali Maksum, "Spiritualitas Abad Modern".

kosmisnya. Mereka merasa cukup dengan perangkat ilmu dan teknologi, sebagai buah gerakan renaissance abad 16, sementara pemikiran dan paham keagamaan yang bersumber pada ajaran wahyu kian ditinggalkan. Dengan ungkapan yang lebih populer, masyarakat Barat telah memasuki *the post-Christian era* dan berkembanglah paham sekularisme. Menurut Harvey Cox sekularisasi berarti terbebasnya manusia dari kontrol ataupun komitmen terhadap nilai-nilai agama. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sekularisasi terjadi ketika manusia berpaling dari "dunia sana" dan hanya memusatkan perhatiannya pada "dunia sini dan sekarang".⁵⁰

Apa yang digambarkan oleh Paul Kleer, sebagaimana dikutip Husni Thoyyar, ketika mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan negatif sebagai akibat dari pembangunan dan modernisasi, khususnya di negara-negara Barat jelas sekali memperlihatkan penyakit-penyakit akibat pembangunan dan modernisasi dengan mengabaikan agama. Manusia Barat bersifat sangat picik dan hampir tidak mampu sama sekali mengadakan hubungan dengan budaya dan kalangan rakyat lain yang ditemuinya. Dia harus memandang dirinya sendiri dalam konteks dunia yang lebih luas dan mengurangi keangkuhannya. Dia membayangkan dirinya bebas dan menyeru seluruh dunia, 'Bebaskan diri kalian sendiri. Putuskan hubungan dengan tradisi. Jadilah seperti kami. Jadilah manusia modern.' Dongeng ini harus ditentang bahwa kita, sebagai manusia modern, tidak dapat berhasil tanpa adanya pengetahuan agama dan pengetahuan para leluhur kita serta tidak dapat bertindak dengan cara yang sepenuhnya berbeda, menuruti hukum-hukum yang sama sekali lain.⁵¹

Memang harus diakui, kemajuan demi kemajuan secara material yang diraih masyarakat modern Barat mengharuskan setiap orang angkat tangan kepada mereka. Dunia yang begitu luas dapat mereka kecilkan seperti sebuah kampung buana (*global village*) yang tak terbatas ruang dan waktu. Tugas-tugas utama yang biasanya diselesaikan dengan menggunakan tenaga manusia, kini diambil alih oleh mesin-mesin canggih yang tidak hanya melipatgandakan hasil produksi, tapi juga meningkatkan kualitas hasilnya. Tapi perlu diingat, di sebalik prestasi gemilang yang diraih manusia modern, ada sesuatu yang hilang dari diri mereka sendiri. Proyek mewah modernisme yang sudah mereka ciptakan malah melahirkan perasaan asing dalam diri mereka sendiri. Modernisme memotret keberhasilan seseorang dari tingkat produktivitas yang dapat ia hasilkan dari kerjanya. Alhasil, manusia modern tak ubahnya seperti mesin yang terus bekerja. Jika ia tidak lagi mampu untuk melakukan itu, artinya ia juga tidak mendapatkan apresiasi sebagai anak zaman peradaban modern. Begitulah, manusia modern berubah menjadi makhluk robotik yang gersang akan nilai indah kehidupan. Mereka kehilangan ranah paling esensial dalam kehidupan mereka.

⁵⁰ Ali Maksum, "Spiritualitas Abad Modern". Lihat pula pemikiran Harvey Cox dalam bukunya, *The Secular City: Secularization and Urbanisazion in Theological Perspective* (Macmillan, 1966).

⁵¹ Husni Thoyyar, "Agama dan Pembangunan", (dikutip dari: <http://huznithoyyar.blogspot.com/> [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 15 April 2013 pukul 06.08 WIB).

Pengalaman pahit Barat itu setidaknya memberikan beberapa renungan bagi kita: Pertama, sebuah proses perubahan yang berlangsung di masyarakat dengan menegasikan agama berarti membuat masyarakat itu bukan semakin maju melainkan semakin mundur. Kemajuan masyarakat tolak ukurnya adalah terpenuhinya sandang, pangan dan papan serta yang terpenting spiritual. Kedua, proses perubahan yang tidak dilandasi agama justru secara substantif melawan entitas manusia sebagai makhluk fisik dan psikis sekaligus. Ketiga, agama akan memberikan acuan moral ke arah mana proses perubahan masyarakat itu berlangsung. Keempat, agama dapat memberikan motivasi yang bersifat teologis kepada setiap subjek pembangunan. Dengan demikian, proses perubahan bukan semata kebutuhan dunia, proses itu juga merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai ilahiah.

KEMBALI PADA MORALITAS AGAMA (ISLAM)

Sejak lahirnya agama di permukaan bumi ini, berbagai penyakit sosial telah menjadi garapan utamanya. Untuk itu tentu saja bagi kaum agamawan terapi yang paling ampuh adalah kembali kepada agama. Namun mereka yang tidak, belum atau skeptis terhadap agama, selalu mencari jalan keluar lain untuk mengatasi penyakit ini. Dunia Barat yang paling bertanggungjawab dalam pengikisan pengaruh agama melalui kebangkitan rasionalisme sekular dan era pencerahan (*enlightment*), mulai menyadari dampak negatif dari keberhasilan rasionalisme minus agama tersebut. Pemisahan gereja dari negara yang merupakan buah dari era pencerahan itu, oleh sebagian kelompok dinilai terlalu kaku diterapkan. Akibatnya ruang lingkup agama untuk mengawal perubahan dan menanggulangi penyakit sosial tidak memiliki ketajaman maksimal.⁵²

Harapan terhadap agama sebagai institusi sakral yang dapat menanggulangi penyakit sosial sebenarnya dapat dilihat dari prediksi para futurolog seperti John Naisbitt dan Patricia Aburdene. Di zaman modern (era teknikalisisasi), agama biasanya tergerus oleh perkembangan yang demikian pesat dan cepat ditambah pola hidup individualistik dan materialistik. Namun menurut Naisbitt dan Aburdene justru agama mendapatkan momen penting kebangkitan. Keduanya menjelaskan, bahwa masyarakat modern terlalu letih pada persoalan fisik lahiriah, karena itu mereka membutuhkan sesuatu yang dapat menuntun mereka sekaligus melepaskan dahaga hidup melalui jalan spiritual (baca: agama). Di sinilah kemudian agama memainkan perannya. Berangkat dari kasus Amerika, Naisbitt dan Aburdene menjelaskan bahwa di Negara maju itu, orang berbondong-bondong lari pada agama dan gerakan spiritual. Memang menjadi sesuatu yang cukup problematik dan sulit untuk diterima jika spiritualitas yang dimaksud hanya sebatas gerakan spiritual tanpa agama formal seperti yang telah ada. Istilah

⁵² Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), 199.

yang dipakai Naisbitt dan Aburdene adalah *spirituality yes organized religion no*. Apa lagi di dalam Islam, spiritualitas dan agama adalah dua hal yang inheren, tidak mungkin keduanya dapat dipisahkan.⁵³ Meskipun demikian, era kebangkitan agama terlihat demikian jelas.

Oleh karena itu, menjadi argumen yang tidak dapat ditawar-tawar lagi jika agama dalam konteks ini adalah Islam dapat menyemburkan moralitas pengawal perubahan. Jika dicermati secara komprehensif, Islam adalah sebuah agama yang aspek-aspeknya melingkupi berbagai persoalan kehidupan, mulai dari akidah, akhlak, ibadah, sampai kepada mu'amalah duniawiyah. M. Quraish Shihab menyebut hal ini dengan istilah *kaffah* (menyeluruh).⁵⁴ Islam kendati bermakna penyerahan diri secara total kepada Allah, namun bukan berarti sebuah agama yang hanya memuat dogma maupun kumpulan ritus tertentu. Dalam maknanya yang utuh, Islam adalah sebuah doktrin, sebuah pandangan dunia, sebuah kebudayaan dan peradaban yang berlandaskan ketauhidan. Dalam perspektif Alquran, Islam diturunkan untuk menebarkan rahmat ke seantero alam (*rahmatan lil al-'alamin*) (QS. Al-Anbiya 21:107). Islam juga bukan sebuah agama yang hanya mengajak umatnya untuk memperoleh kebahagiaan di hari nanti, namun juga mendorong umatnya mencapai kehidupan di dunia ini. Dalam Islam, ranah dunia dan akhirat merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan (QS. Al-Baqarah 2:201).⁵⁵

Islam mengajarkan bahwa fungsi manusia bersisi ganda: '*abd* dan *khalifah*. Sebagai *khalifah*, ia adalah seorang pengganti yang bertanggungjawab, mengajak berbuat yang pantas (*ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahyi 'an al-munkar*). Ia juga dilarang membuat kerusakan di bumi. Selaku pengganti yang bertanggungjawab maka *khalifah* harus berkualitas. Karena itu, setiap *khalifah* harus belajar sepanjang hidupnya dimana saja dan kapan saja. Islam memberikan apresiasi yang amat tinggi bagi para *khalifah* yang berilmu tinggi sekaligus beriman secara kokoh. Komunitas *khalifah* itu disebut *ulual-albab*⁵⁶ (QS. Ali- 'Imran 190-191). Ada empat ciri pokok dari *khalifah* sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu: Pertama, orang yang selalu berzikir (mengingat kebesaran Allah, menyebut nama-nama Allah, dan merefleksikan nikmat yang diberikan Allah). Kedua, orang yang melakukan perenungan atau melakukan analisis. Ketiga, orang yang menyadari sepenuhnya hikmah di balik berbagai penciptaan Allah. Keempat,

⁵³ Lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megatrends 2000: New Directions for Tomorrow* (London: Siddwick & Jackson, 1990). Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1990).

⁵⁴ Lihat pembahasan lengkapnya dalam M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996); *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

⁵⁵ Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 290.

⁵⁶ Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram*, 291.

pengakuan terhadap segala kebesaran Allah dan rendahnya kemampuan manusia.⁵⁷

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam telah memberikan prinsip-prinsip moral. Prinsip-prinsip moral itu selain tercantum dalam Alquran dan Sunnah juga tercantum dalam Piagam Madinah (Arab: *Mitsaq al-Madinah*; Inggris: *The Medina Document*). Piagam ini memuat konsensus sosial antara kaum Muslim, Yahudi, Nasrani dan Musyrik Madinah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tanpa melihat latar belakang mereka. William Muir, sebagaimana dikutip oleh Nouruzzaman Shiddiqi, menilai Piagam Madinah ini sebagai konstitusi awal yang dikenal dan dipraktikkan umat manusia.⁵⁸ Beberapa hal penting yang dapat dicermati dalam Piagam Madinah dijelaskan dalam bahagian berikut ini.

Pertama, persatuan umat manusia walaupun berasal dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Kedua, kebebasan memeluk dan beribadah menurut cara agama masing-masing. Dalam masalah keyakinan beragama ditumbuhkan sikap saling menghormati, "*untuk kamu agama kamu dan untuk ku agama ku (QS. Al-Kafirun 109: 6)*", dan tidak diperkenankan melecehkan agama orang lain.

Ketiga, rasa kebersamaan. Dalam Islam semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Masyarakat diibaratkan sebagai sebatang tubuh yang setiap bagiannya sama-sama sakit dalam kesusahan. Hidup bermasyarakat harus saling membantu dalam semangat kesetiakawanan yang tinggi. Si lemah harus dibela dan si miskin harus dibantu. Dalam keadaan bagaimana pun, seseorang tidak boleh diperlakukan secara buruk. Dilarang memendam dengki dan iri hati. Si kaya harus sadar bahwa harta yang dimilikinya adalah karunia Allah dan dapat menghimpunnya dengan bantuan orang lain. Karena itu, ia harus selalu sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain, terutama hak fakir dan miskin. Hak milik individu diakui sebagaimana pula hak setiap orang harus dihormati.

Keempat, penegakan keadilan. Semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Tidak ada seorang pun mendapatkan hak istimewa dalam hukum. Demi keadilan dan terpeliharanya ketertiban serta ketenteraman masyarakat maka hukum harus ditegakkan. Karena itu, dilarang melindungi atau berpihak pada pelaku kejahatan siapa pun orangnya. Hukuman dijatuhkan setimpal dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan atau besar kecilnya kerusakan yang ditimbulkan dalam masyarakat. Kelima, perdamaian. Perdamaian adalah tujuan utama. Perang tidak boleh dilanjutkan jika lawan meminta berdamai. Namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. Keenam,

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, 308-312.

⁵⁸ Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram*, 291.

musyawarah. Segala masalah yang menyangkut kepentingan bersama harus diselesaikan secara musyawarah yang dilandasi kebebasan berpendapat. Keputusan diambil berdasarkan kebenaran.

Dengan patokan-patokan moral tersebut, Nabi Muhammad mampu untuk membangun masyarakat Badui menjadi satu bangsa yang tangguh dan beradab (*civilized*). Mereka yang dahulunya tidak pernah mengenal persatuan di luar batas kesukuan, kini bersatu untuk mencapai sebuah cita-cita sosial. Mereka yang dahulunya berperang satu sama lain dengan alasan ekonomi dan dendam darah, akhirnya bersatu padu untuk mewujudkan kedaulatan. Dendam diganti dengan pemberian maaf. Mereka yang dulunya yakin bahwa tak ada hidup sesudah mati, dan hari ini adalah untuk hari ini serta tidak perlu berbagi nikmat dan kesusahan dengan orang lain, kini mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup setelah mati dengan berlomba-lomba melakukan kebaikan (*fastabiq al-khairat*).⁵⁹

Seluruh adegan sejarah dalam konteks berbangsa dan bernegara yang dijalankan Nabi di Madinah mencerminkan sebuah kosmopolitanisme peradaban terancang yang oleh Robert N Bellah dalam bukunya *Beyond Belief* dikatakan modern, bahkan terlalu modern untuk ukuran Timur Tengah waktu itu. Kosmopolitanisme peradaban Islam muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik. Kosmopolitanisme itu bahkan menampilkan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yakni kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad. Dalam konteks inilah, warisan Nabi dalam penciptaan peradaban Madinah menjadi dasar utama lahirnya kosmopolitanisme peradaban Islam. Pernyataan Bellah yang menyebut Madinah sebagai kota modern, bahkan sangat modern untuk ukuran zaman waktu itu, karena kondisi sosiologis-geografis waktu itu, struktur Timur Tengah belum mampu menopang struktur kosmopolitan Madinah yang ditampilkan Nabi Muhammad. Tak salah juga kalau sejarawan agung Arnold J Toynbee menyebut peradaban Islam kala itu sebagai *oikumene* (peradilan dunia) Islam. *Oikumene* Islam ini, lanjut Toynbee, adalah salah satu di antara enam belas *oikumene* yang menguasai dunia. Jejak kosmopolitanisme peradaban Islam dalam membentuk pencerahan di Timur Tengah menjadi jejak utama lahirnya pencerahan di Barat kemudian.⁶⁰

Secara lebih eksplisit, moralitas Islam dalam proses perubahan masyarakat mengambil ruang yang tidak terbatas. Prinsip-prinsip yang dipromosikan Islam dapat melintasi ruang dan waktu meskipun perlu dilakukan pengkajian dan pemahaman ulang. Hal ini memungkinkan moralitas itu tetap sesuai dengan perubahan yang terjadi. Dalam mengawal proses perubahan masyarakat, Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar. Penulis mengambil dua prinsip yang dianggap paling penting yaitu prinsip-prinsip dalam bidang

⁵⁹ Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram*, 291-293.

⁶⁰ Lihat Muhammad Qorib, "Spirit Kosmopolitanisme", dalam *Harian Republika* 19 Desember 2009.

ekonomi dan prinsip-prinsip dalam bidang politik. Beberapa prinsip lain juga sebenarnya tidak kalah pentingnya, namun karena pertimbangan ruang pembahasan yang agak terbatas dan kebutuhan yang bersifat *ad hoc* maka prinsip-prinsip itu tidak penulis kemukakan.

Pertama, prinsip-prinsip dalam bidang ekonomi. Mencari rezeki dalam Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari mata rantai beribadah kepada Allah. Islam menepis anggapan kebanyakan orang bahwa agama ini memberikan penolakan yang demikian besar terhadap ranah ekonomi. Justru sesungguhnya Islam amat menganjurkannya.

Dalam menjalankan roda ekonomi diperlukan etika agar dapat menyelamatkan umat manusia dan tidak dibenarkan mengorbankan orang lain. Manusia diperintahkan Allah untuk mencari rezeki bukan hanya yang mencukupi kebutuhannya, namun Alquran juga memerintahkan untuk mencari apa yang diistilahkan dengan *fadhl Allah*, yang secara harfiah dipahami dengan “kelebihan yang bersumber dari Allah”. Salah satu ayat yang menguraikan hal ini dapat dilihat berikut ini: “*Apabila kamu telah selesai shalat maka bertebaranlah di bumi dan carilah fadhl Allah...*” (QS. Al-Jumu’ah/ 62: 9). Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan tangan bantuan kepada pihak lain yang oleh karena satu sebab dan lain sebab tidak berkecukupan. Ayat tersebut demikian tegas menjelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki seseorang tersimpan hak orang lain yang mesti ditunaikan.⁶¹

Islam juga menjelaskan bahwa keseimbangan dalam berekonomi mutlak diperlukan. Keseimbangan akan mengantarkan kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Dengan kata lain, Islam menolak tegas bentuk kapitalisme. Atas dasar ini pula Alquran mengkritik dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu, “*Supaya harta itu tidak beredar pada orang-orang kaya saja di antara kamu...*” (QS. Al-Hasyr/ 59: 7). Dari sini juga datang larangan penimbunan dan pemborosan barang. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Taubah/ 9: 34 yang memberikan ancaman sedemikian keras kepada para penimbun barang.

Nabi Muhammad juga menegaskan dalam sebuah hadis: “*Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, dengan tujuan menaikkan harga, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah juga berlepas diri darinya.*” Ayat dan hadis tersebut oleh sementara pakar dijadikan dasar pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelundupan, dan

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 403.

yang mengambil keuntungan secara berlebihan, karena penimbunan menyebabkan kenaikan harga yang tidak semestinya.⁶²

Islam juga melarang perilaku riba. Kata riba dari segi bahasa berarti "kelebihan". Kalau kita hanya berhenti pada makna harfiah ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata bahwa jual beli sama saja dengan riba (*QS. Al-Baqarah/ 2: 275*). Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Alquran, kata riba terulang sebanyak delapan kali. Upaya memahami apa yang dimaksud dengan riba adalah dengan mempelajari ayat-ayat yang turun di Madinah, atau lebih khusus lagi kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu: *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda). Ulama seperti Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan Alquran hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud di sini adalah "pelipatgandaan yang berkali-kali".⁶³

Kedua, prinsip-prinsip dalam bidang politik. Dalam kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang biasa diartikan dengan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya.

Dalam Alquran tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata *sasa-yasusu*, namun bukan berarti Alquran tidak menguraikan persoalan politik. Sekian banyak ulama Alquran menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan merujuk pada Alquran dan sunnah Nabi. Bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Politik Keagamaan).

Uraian Alquran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang memiliki akar kata *hukm*. Kata ini pada mulanya berarti "menghalangi" atau "melarang dalam rangka perbaikan". Dari akar kata itu muncul kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna *sasa-yasusu-sais-siyasat*, yang berarti "mengemudi, pengendali dan cara pengendalian".⁶⁴

Kekuasaan politik dianugerahkan Allah kepada manusia. Penganugerahan ini dilakukan melalui ikatan perjanjian. Ikatan ini terjalin antara sang penguasa dengan Allah di satu pihak dan dengan masyarakat di pihak lain.

Perjanjian dengan Allah di dalam Alquran disebut dengan *'ahd*. Ada pun perjanjian dengan masyarakat disebut dengan *bai'at*. Perjanjian itu disebut dengan *amanat* dan harus dilaksanakan. Dari sini tidak heran jika perintah taat kepada penguasa (*uli al-amr*) didahului oleh perintah menunaikan amanah (*QS. Al-Nisa' 4: 58-59*).

⁶² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 411-412.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 413-414.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 416-417.

Surah Al-Nisa' ayat 58-59 dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dan pemerintahan. Bahkan Rasyid Ridha berpendapat bahwa seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang hal pemerintahan, maka ayat ini telah memadai. Sementara *amanat* berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum Muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.⁶⁵

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan hal ini amat banyak, salah satu di antaranya berupa teguran kepada Nabi Muhammad yang hampir saja menyalahkan seorang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks ini turun firman Allah: *"Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena (membela) orang-orang yang khianat (QS. Al-Nisa'/ 4: 105).*

Berkaitan dengan amanat yang dibebankan kepada para penguasa, ditekankan kewajiban ketaatan masyarakat terhadap mereka. Namun perlu dicermati bahwa ketaatan kepada para penguasa (*uli al-amr*) tidak pernah berdiri sendiri namun berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, *uli al-amr* dapat diikuti selama mereka menetapi peraturan-peraturan yang berlaku. Namun apabila perintah mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam sebuah kaidah populer dijelaskan: *"Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah)".*⁶⁶ Dapat dilihat bahwa ketaatan yang diajarkan Islam bukan ketaatan literal melainkan ketaatan bersyarat. Jika syarat terpenuhi maka ketaatan itu dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, proses transformasi masyarakat cukup riskan jika menegasikan agama. Agama tidak hendak menjadi faktor penghambat, justru institusi sakral ini memberikan acuan moral agar proses perubahan tetap terarah dan tidak melahirkan konsekuensi negatif bagi manusia sebagai subjek perubahan.

Pengalaman Barat yang cukup pahit memberi hikmah cukup berharga kepada kita. Betapa arogansi kemanusiaan yang berlebihan dengan mengabaikan Tuhan (baca: agama) malah melahirkan petaka bagi manusia itu. Ajaran agama dalam keadaan bagaimana pun tetap berfungsi sebagai pelita yang tidak akan mencederai manusia. Mispersepsi manusia terhadap agama lebih karena disebabkan kurangnya pemahaman terhadap agama secara komprehensif, ditambah lagi berbagai kepentingan yang melekat (*vested interest*) memainkan andil secara dominan. Kondisi demikian menyebabkan agama banyak melahirkan kekecewaan untuk kemudian

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 425-426.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 427.

ditinggalkan banyak orang. Tentu saja, agama yang dapat mengawal proses perubahan masyarakat adalah agama yang lekat dan dekat dengan berbagai kepentingan masyarakat, bukan sebuah agama yang elitis dan terpisah dari kehidupan konkrit. Semoga bermanfaat. *Wa Allah a'lam.*

REFERENSI

- Alexander, David Edan Rhodes W. Fairbridge, ed. (1999). "Thomas Henry Huxley (1825-1895)" dalam *Encyclopedia of Environmental Sciences*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Cox, Harvey (1966). *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective*. Macmillan.
- Halman, Loek dan Ole Riis, ed. (2003). *Religion in Secularising Society: The European Religion at the End of the 20th Century*. Leiden: Brill.
- Hanafi, Hassan. (t.t.) *Al-Yamin wa al-Yasar fi al-Fikr al-Din*. Kairo: Madbuli.
- Hidayat, Komaruddin (2003). *Wahyu di Langit dan Wahyu di Bumi: Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Hidayat, Komaruddin dan Muhammad Wahyuni Nafis (2003) *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ibnu Taimiyah (1951). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Iqbal, Muhammad (1963). *Tajdid al-Fikr al-Din*. Kairo: Al-Nahdhah.
- Madjid, Nurcholish (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan. Cet. Ke-4*. Jakarta: Paramadina.
- Maksum, Ali (2013). "Spiritualitas Abad Modern: Reposisi Islam dalam Kancah Kebangkitan Agama". (dikutip dari: <http://www.arsip.masjid.telkom.co.id> [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 14 April 2013 pukul 17.53 WIB).
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene (1990). *Megatrends 2000: New Directions for Tomorrow*. London: Siddwick & Jackson.
- Nasr, Seyyed (2000). *Islam and The Plight of Modern Man*. Virginia: ABC International Group.
- Qorib, Muhammad (2009). "Spirit Kosmopolitanisme". Dalam *Harian Republika* 19 Desember .
- Schumacher, E.F. (2011). *A Guide for the Perplexed*. Random House.
- Streeter, Paul (2001). *Globalisation: Threat and Opportunity*. Michigan: Copenhagen Business School Press.
- Shihab, Alwi (1998). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- (2006). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- (2006). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shiddiqi, Nouruzzaman (1996). *Jeram-Jeram Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoyyar, Husni (2013). "Agama dan Pembangunan". (dikutip dari: <http://huznithoyyar.blogspot.com/> [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 15 April 2013 pukul 06.08 WIB).

ISLAMISASI PEMBANGUNAN DI MALAYSIA: KES PENDEKATAN ISLAM HADHARI⁶⁷

Mohd Shukri Hanapi⁶⁸

Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)

Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

Universiti Sains Malaysia

11800 Pulau Pinang

Email: hshukri@usm.my / hshukeri@yahoo.com

PENDAHULUAN

Fenomena kebangkitan Islam yang berlaku di sebahagian besar dunia Islam sekitar tahun 1970-an dan 1980-an merupakan antara faktor utama yang menjadi pencetus kepada munculnya proses Islamisasi pembangunan di Malaysia selain faktor sejarah dan perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia (Ibrahim Ahmad, 1989). Hal ini ditambah pula dengan faktor desakan daripada gerakan Islam termasuklah Parti Islam Se-Malaysia (PAS) supaya Kerajaan kembali kepada Islam (Musafir Kelana, Mohd Izani Mohd Zain & Ummu Atiyah Ahmad Zakuan, 2006:607).

Situasi yang berlaku ini telah menimbulkan kebimbangan dalam UMNO (parti pemerintah). Jika UMNO tidak bertindak balas terhadap desakan kembali kepada Islam, situasi ini sedikit sebanyak boleh mengancam kelangsungannya dalam menerajui pemerintahan negara. Oleh sebab itu, Kerajaan telah memberi reaksi positif terhadap faktor-faktor tersebut (Ibrahim Ahmad, 1989). Misalnya, sebaik sahaja Mahathir Mohammad (Tun Dr.) dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat menggantikan Hussein Onn (Tun) pada 1 Julai 1981, beliau telah berusaha melaksanakan dasar yang meletakkan Islam sebagai agenda utama dalam pentadbiran negara. Hasilnya pada tahun 1982, Kerajaan telah berjaya memperkenalkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI)⁶⁹ (Jabatan Perdana Menteri, 2007)

⁶⁷ Kertas kerja yang dibentangkan di *International Conference on Islamic Development* (ICID) ke-5, anjuran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, dengan kerjasama Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM) Pulau Pinang, pada 23 April 2013, di Hotel Madani, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

⁶⁸ Mohd Shukri Hanapi, Ph.D ialah Pensyarah di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (PPSK), Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang.

⁶⁹ Dalam pelaksanaan DPNI ini, Mahathir Mohammad dengan tegas mengingatkan pelaksanaan dasar ini tidak seharusnya menimbulkan keraguan mana-mana pihak. Nilai-nilai seperti beramanah, jujur, bertanggungjawab, ikhlas, cekap, berdedikasi, tekun, bersih, berdisiplin dan sebagainya merupakan nilai-nilai sejagat yang seharusnya boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira agama dan keturunan. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan untuk menegakkan sebuah

yang memberi penekanan kepada Islam sebagai agama yang sangat bertoleransi dan sangat mengutamakan nilai-nilai dan sifat-sifat murni dalam kalangan penganutnya (INTAN, 1991:xvii). Dengan ini membolehkan Kerajaan turut serta dalam arus kebangkitan Islam dan seterusnya menjamin kelangsungan kuasa pemerintahan negara (Ibrahim Ahmad, 1989).

Sebenarnya, hal ini memulakan satu era baru apabila Malaysia mula dikenali oleh masyarakat dunia sebagai sebuah negara Islam berbanding dengan era kepimpinan sebelumnya (Hussin Mutalib, 1993; Ahmad Fadhli Shaari, 2001)⁷⁰. Menurut Muhammad Redzuan Othman & Amin Fadlillah (2012), perbezaan yang ketara antara era kepimpinan Mahathir Mohammad dengan era kepimpinan Perdana-perdana Menteri sebelumnya terletak pada pendekatan mereka melaksanakan dasar-dasar Islam. Inilah julung kalinya seorang pemimpin negara mengisytiharkan secara terbuka dasar baru berhubung kedudukan dan peranan Islam dalam masyarakat yang merangkumi bidang ekonomi, pentadbiran, politik, undang-undang, pendidikan, sains dan teknologi di Malaysia.

Usaha Kerajaan melaksanakan agenda Islam ini sebenarnya mendapat kritikan daripada gerakan Islam yang lain termasuk Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Dalam hal ini, PAS berpendapat usaha Kerajaan itu hanyalah bersifat *jibayah* (atas desakan) bukan atas dasar *hidayah* (petunjuk daripada Allah SWT). Meskipun begitu, Kerajaan Malaysia tetap melaksanakan proses Islamisasi pembangunan tersebut, malah ia makin rancak. Antara agenda Islam yang diperkenalkan oleh Kerajaan ialah penubuhan institusi-institusi agama Islam seperti Pusat Penyelidikan Islam, Institut Dakwah dan Latihan Islam, dan menaiktaraf urusetia Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam kepada satu bahagian penuh di Jabatan Perdana Menteri (Musafir Kelana, Mohd Izani Mohd Zain & Ummu Atiyah Ahmad Zakuan, 2006:605-606). Usaha-usaha ini memperlihatkan inisiatif Kerajaan melebarkan ruang Islamik dalam dasar dan hal ehwal Islam.

Walaupun agenda Islam rancak dilaksanakan, Malaysia tidak diuar-uarkan sebagai sebuah Negara Islam sehinggalah satu kenyataan yang dibuat oleh Mahathir Mohammad sewaktu berucap di majlis perasmian Perhimpunan Parti Gerakan pada 29 September 2000. Pada ketika itu Mahathir Mohammad mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Ramai yang melihat pengiktirafan tersebut sebagai jawapan kepada beberapa pihak

negara merdeka yang cekap dan maju, boleh mentadbir secara berkesan dan boleh bersaing dengan negara-negara maju (INTAN, 1991:xvii).

⁷⁰ Hussin Mutalib (1990) menyatakan proses Islamisasi di Malaysia sebenarnya bermula sebelum Mahathir Mohammad menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat pada tahun 1981. Sewaktu beliau menjawat jawatan Menteri Pelajaran, beberapa perubahan khususnya dalam memperbaiki tahap Pendidikan Islam di sekolah-sekolah telah dilaksanakan dengan penubuhan Panel Penasihat Pendidikan Islam pada tahun 1974 dan peruntukan sebanyak RM22 juta untuk mempertingkatkan kemahiran guru-guru Pendidikan Islam di Malaysia.

terutamanya PAS yang sentiasa mempertikaikan status Malaysia sebagai sebuah negara Islam (Musafir Kelana, Mohd Izani Mohd Zain & Ummu Atiyah Ahmad Zakuan, 2006:608-609)⁷¹.

Setelah Mahathir Mohammad melepaskan jawatan Perdana Menteri pada 31 Oktober 2003, proses Islamisasi pembangunan di Malaysia ini disambung dan diteruskan oleh penggantinya iaitu Abdullah Ahmad Badawi (Tun). Proses Islamisasi pembangunan era Abdullah Ahmad Badawi diketengahkan melalui pendekatan Islam Hadhari, iaitu satu pendekatan untuk membangunkan tamadun dan peradaban umat yang berteraskan syariat dan landasan Islam (Abdullah Ahmad Badawi, 2007; Jabatan Perdana Menteri, 2007). Pendekatan ini merupakan penambahbaikan kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. Pendekatan yang tidak terlalu politikal dan tidak memberi penekanan kepada aspek hukum seperti PAS ini berhasrat menjadikan Malaysia sebagai model bagi membangunkan masyarakat yang berteraskan tamadun Islam melalui penguasaan ilmu dan pembangunan modal insan yang terancang (Muhammad Syukri Salleh, 2005a:151; Abdullah Ahmad Badawi, 2007).

Setakat ini didapati Malaysia sekadar melaksanakan pembangunan secara Islamisasi. Hal ini termasuklah pendekatan Islam Hadhari yang diperkenalkan oleh Abdullah Ahmad Badawi. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan Islamisasi pembangunan? Kenapakah pendekatan Islam Hadhari itu dikatakan sebagai salah satu daripada proses Islamisasi pembangunan? Kenapakah Malaysia tidak melaksanakan pembangunan yang melibatkan proses pembungkian akar umbi sistem dan meruntuhkan struktur sedia ada? dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan pendekatan Islam Hadhari itu tidak dapat diteruskan?

Bagi menjawab semua persoalan ini, perbincangan dalam kertas kerja ini difokus kepada empat perkara utama. Pertama, membincangkan maksud Islamisasi pembangunan dan proses Islamisasi pembangunan di Malaysia. Kedua, membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia memilih proses Islamisasi pembangunan berbanding proses pembungkian akar umbi sistem dan meruntuhkan struktur sedia ada. Ketiga, membincangkan unsur-unsur yang membuktikan pendekatan Islam Hadhari itu sebagai salah satu daripada proses Islamisasi pembangunan. Keempat, membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan pendekatan Islam Hadhari itu tidak dapat diteruskan.

⁷¹ PAS termasuk *Demoratic Action Party* (DAP) menolak pengiktirafan tersebut. DAP misalnya membantah dengan menjalankan kempen No. 929 yang merujuk kepada September 29 iaitu tarikh Malaysia diiktiraf sebagai negara Islam.

MAKSUD ISLAMISASI PEMBANGUNAN

Islamisasi (*Islamiyyah* atau *Islamization*) merupakan satu proses mengIslamkan sesuatu dengan memasukkan nilai-nilai suci yang terdapat dalam ajaran Islam. Akhirnya 'si' pada perkataan Islamisasi itulah yang membuktikan ia merupakan satu proses sebagaimana akhirnya 'isme' yang merujuk kepada ideologi (Ahmad Fadhli Shaari, 2001). Hampir sama dengan definisi Ahmad Fadhil Shaari (2001) ini ialah definisi yang dikemukakan oleh Hassan Langgulung (1998). Menurut beliau, Islamisasi bermaksud penerapan nilai-nilai Islam dalam sesuatu perkara dengan cara meletakkan sesuatu perkara itu dalam rangka konsep Islam. Secara lebih mudah, Islamisasi adalah satu proses mengislahkan atau memurnikan kembali keseluruhan gagasan, struktur, matlamat dan rekabentuk sesuatu perkara supaya kembali kepada ajaran tauhid.

Kedua-dua definisi ini sebenarnya sekadar menjelaskan Islamisasi itu sebagai satu proses mengislahkan dan memurnikan sesuatu perkara yang tidak selari dengan Islam terutamanya dari aspek operasionalnya yang mencakupi nilai-nilai, teori-teori, peralatan, kaedah-kaedah pelaksanaan, struktur, matlamat dan rekabentuknya.

Secara lebih terperinci lagi, Muhammad Syukri Salleh (2000:163) menyatakan Islamisasi itu merupakan satu kaedah mengIslamkan sesuatu yang wujud secara beransur-ansur, bukan secara sekali gus dan drastik tanpa membungkahkan akar umbi sistem dan meruntuhkan struktur yang wujud itu. Kebiasaannya ia dilakukan secara akomodatif dan kadangkala terpaksa berbentuk apologetik. Menurut Muhammad Razak Idris (2011), perubahan yang berlaku secara beransur-ansur ini dikatakan antara sifat unik dan istimewa proses Islamisasi.

Apabila proses Islamisasi ini diterapkan terhadap pembangunan, maka berlakulah Islamisasi pembangunan (*Islamiyyah al-Tanmiyyah* atau *Islamization of development*). Ia merupakan satu kaedah penggantian unsur-unsur pembangunan lazim yang tidak selari dengan Islam dengan unsur-unsur pembangunan berteraskan Islam. Pelaksanaannya yang secara beransur-ansur itu tidak bermula dari akar umbi Islam sebaliknya struktur pembangunan Barat dikekalkan. Proses pengIslamisasian pembangunan Barat dilakukan dengan harapan agar kaedah ini berupaya membentuk dan menggantikan sistem dan struktur konvensional yang sedia ada dengan sistem dan struktur Islam sepenuhnya. Akhirnya, proses pengIslamisasian pembangunan ini dikatakan dapat membentuk model pembangunan berteraskan Islam.

Pemikiran pengIslamisasian pembangunan ini sebenarnya telah lama wujud. Misalnya, dalam ekonomi Islam ia dikenali sebagai aliran pemikiran akomodatif-modifikasi dengan sifat eklektisme-metodologik. Pendekatan akomodatif-modifikasi merujuk kepada pendekatan yang bersedia menerima

dan memperbaiki pemikiran ekonomi bukan Islam untuk menjadikannya sebagai ekonomi Islam. Eklektisme-metodologik pula merujuk kepada pendekatan yang fleksibel, memilih-milih perkara yang dirasakan baik dari pelbagai sumber dan menggunakannya secara kolektif dalam ekonomi Islam. Pendekatan akomodatif-modifikasi dan eklektisme-metodologik ini memberikan hujah bahawa sumbangan daripada sumber-sumber disiplin lain seperti teori Neo-Klasikal patut diterima (Muhammad Syukri Salleh, 2011:275-276).

Hujah logik yang sering dikemukakan oleh pemikir-pemikir daripada aliran pemikiran akomodatif-modifikasi dan eklektisme-metodologik ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohammad Umar Chapra (2001) dan Abdel Rahman Yousri Ahmed (2002). Menurut Mohammad Umar Chapra (2001:39), ekonomi Islam boleh mengguna pakai teori-teori ekonomi konvensional sekiranya teori-teori ini tidak bertentangan dengan struktur logik pandangan hidup (*worldview*) Islam. Begitulah juga dengan pandangan Abdel Rahman Yousri Ahmed (2002). Bagi beliau, ekonomi Islam sebagai gabungan unik antara prinsip syariah dengan ekonomi konvensional. Selagi konsep dan prinsip ekonomi konvensional tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia boleh diadaptasi dalam ekonomi Islam (dipetik daripada Muhammad Syukri Salleh, 2011:276).

Menurut Muhammad Syukri Salleh (2011:277), kewujudan pendekatan akomodatif-modifikasi dan eklektisme-metodologik ini sebenarnya sebagai akibat daripada kecelaruan para pendukungnya tentang perbezaan antara peringkat falsafah dengan peringkat operasional ekonomi Islam itu sendiri. Peringkat falsafah ekonomi Islam mencakupi komponen-komponen yang menjadikan terbinanya kerangka ekonomi Islam. Dalamnya terkandung tasawur, dasar falsafah dan definisi konsep-konsep ekonomi Islam. Peringkat operasional ekonomi Islam pula mencakupi nilai-nilai, teori-teori, peralatan, dan kaedah-kaedah pelaksanaan ekonomi Islam. Ia merupakan komponen-komponen yang membolehkan ekonomi Islam itu direalisasikan. Antara kedua-dua peringkat ini, tunjangnya adalah peringkat falsafah, manakala komponen-komponen dalam peringkat operasional akan terbentuk mengikut tunjang falsafahnya. Jika hanya komponen-komponen dalam peringkat operasional yang dipilih-pilih, diakomodasi dan seterusnya dimodifikasi mengikut Islam sedangkan kerangkanya di peringkat falsafah dibiarkan tetap bertunjangkan kepada kerangka ekonomi konvensional, maka komponen-komponen dalam peringkat operasional tersebut tidak akan menjadi Islam secara hakiki.

Dalam konteks pengamalan di Malaysia, Islamisasi pembangunan ini bermaksud proses penerapan nilai-nilai suci yang terkandung dalam ajaran Islam secara berperingkat-peringkat dalam segenap aspek yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. Tujuannya adalah untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti yang natijahnya akan melahirkan masyarakat yang cemerlang dari segenap aspek, baik dari sudut material

mahupun spiritual (Ahmad Fadhil Shaari, 2001). Maksudnya, dengan menghayati nilai-nilai Islam ini, secara tidak langsung seseorang insan itu mampu membentuk kekuatan spiritual dalam dirinya. Seterusnya dengan kekuatan tersebut mampu puka menjana kemajuan dari sudut material.

Berdasarkan maksud Islamisasi pembangunan yang dibincangkan ini, didapati Islamisasi pembangunan itu mempunyai tiga ciri utama. Pertama, penggantian unsur-unsur pembangunan lazim yang tidak selari dengan Islam dengan unsur-unsur pembangunan berteraskan Islam; kedua, dilaksanakan secara beransur-ansur tanpa membungkihkan dan meruntuhkan struktur pembangunan lazim yang sedia ada; dan ketiga, dilakukan secara akomodatif dan berbentuk apologetik. Semua ini sebenarnya tidak bermula dari akar umbi Islam tetapi bermula daripada sistem Barat yang kemudiannya dimurnikan dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, sistem Barat yang tidak selari dengan Islam dibuang dan digantikan dengan nilai-nilai Islam, manakala sistem Barat yang dikatakan tidak bertentangan dengan Islam pula dikekalkan. Hal ini nampak seakan-akan memperkuat sistem dan struktur pembangunan lazim yang sedia ada sahaja.

PELAKSANAAN ISLAMISASI PEMBANGUNAN DI MALAYSIA

Setakat penelitian yang saya lakukan, proses Islamisasi pembangunan ini telah banyak dilaksanakan di Malaysia. Antara yang paling utama adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1 : Islamisasi Pembangunan di Malaysia

Bil.	Pelaksanaan Proses Islamisasi Pembangunan	
	Peringkat Negeri	Peringkat Negara
1.	Wawasan SIHAT	Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam (DPNI)
2.	Islam Hadhari Terengganu Bestari (IHTB)	Pendekatan Islam Hadhari
3.	Gagasan Membangun Bersama Islam (MBI)	

Berdasarkan Jadual 1, pelaksanaan Islamisasi pembangunan di Malaysia boleh dibahagi kepada dua peringkat. Pertama, pelaksanaan pada peringkat negeri. Setakat ini, negeri-negeri yang jelas nampak terkehadapan berusaha ke arah itu ialah Terengganu dan Kelantan. Di Terengganu, Islamisasi pembangunan diaplikasikan melalui Wawasan SIHAT (S-sihat fizikal dan mental, IH-ilmu yang dihayati, A-akhlak yang mulia dan T-takwa) pada zaman Wan Mokhtar Ahmad (Dato' Seri Amar Di Raja Tan Sri)⁷² (Ahmad Ikram Abdullah, 1997:16; Muhammad Syukri Salleh, 1999:76) dan pendekatan Islam Hadhari Terengganu Bestari (IHTB) pada zaman Idris Jusoh (Dato'

⁷² Wan Mokhtar Ahmad memimpin Kerajaan Negeri Terengganu bermula dari 1 September 1974 – 29 November 1999.

Seri)⁷³ (Muhammad Syukri Salleh, 2005a:140-142; Idris Jusoh, 2007). Di Kelantan pula, Islamisasi pembangunan telah diaplikasikan melalui gagasan Membangun Bersama Islam (MBI) (1990-kini) (Sahawati Harun, 2011:2). Walau bagaimanapun, pelaksanaan kedua-dua Islamisasi pembangunan di Terengganu itu telahpun terhenti apabila kepimpinan dan kuasa politik negeri bertukar. Cuma yang masih berjalan sekarang ini ialah gagasan MBI di Kelantan sahaja.

Kedua, pelaksanaan pada peringkat negara. Misalnya, pelaksanaan DPNI oleh Mahathir Mohammad pada tahun 1982 (Mauzy & Milne, 1983) dan pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari oleh Abdullah Ahmad Badawi pada 30 Januari 2004 (Muhammad Syukri Salleh, 2005b:55; Faisal@Ahmad Faisal Abdul Hamid & Wan Adli Wan Ramli, 2006:12). Pendekatan Islam Hadhari ini tidak lagi dilaksanakan setelah Mohd Najib Abdul Razak (Dato' Seri) mengambil alih jawatan Perdana Menteri Malaysia yang keenam pada 3 April 2009. Sebaliknya Mohd Najib Abdul Razak memperkenalkan satu gagasan baru iaitu Gagasan 1Malaysia (G1M) (Syed Mahadzir Syed Ibrahim & Mohd Shah A'shari, 2010:xii).

G1M ini sebenarnya bukanlah satu pendekatan Islamisasi pembangunan. Walau bagaimanapun unsur-unsur Islam itu masih ada, tetapi terlalu sedikit. G1M meletakkan konsep *al-Wasatiyyah* (kesederhanaan) sebagai pendukungnya (JAKIM, 2010). Sebenarnya usaha pengaplikasian konsep *al-Wasatiyyah* dalam G1M ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia adalah lanjutan dari konsep *al-Wasatiyyah* yang digunakan dalam pelaksanaan Islam Hadhari sebelum ini. Menurut Najib Tun Razak (2010:46), tujuan diletakkan konsep *al-wasatiyyah* sebagai pendukung G1M ini kerana ia akan merealisasikan ajaran Islam dengan lebih komprehensif serta berimbang antara pelbagai tuntutan. Hal ini semata-mata untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam contoh iaitu sebuah negara yang maju, disegani, bertoleransi dan berimbang dari segenap bidang.

Walaupun bagaimanapun, perbincangan dalam kertas kerja ini hanya memfokuskan salah satu daripada proses Islamisasi pembangunan yang telah dilaksanakan di Malaysia iaitu pendekatan Islam Hadhari. Paling tidak terdapat empat sebab utama pendekatan Islam Hadhari ini dipilih. Pertama, ia merupakan proses pelaksanaan Islamisasi pembangunan pada peringkat negara yang lebih komprehensif setakat ini; kedua, sebelum dilaksanakan pada peringkat negara, pendekatan Islam Hadhari ini terlebih dahulu dilaksanakan pada peringkat negeri, iaitu negeri Terengganu; ketiga, ia lebih dikenali, bukan sahaja dalam negara, bahkan juga di luar negara; dan keempat, ia dibincangkan oleh banyak pihak sehingga Jabatan Kemajuan

⁷³ Idris Jusoh memimpin Kerajaan Negeri Terengganu bermula dari Mac 2004 – Mac 2008.

Islam Malaysia (JAKIM) dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) berusaha menerbitkan Jurnal Hadhari⁷⁴.

Di samping itu timbul pula persoalan, kenapakah Malaysia mengamalkan Islamisasi pembangunan dan tidak memilih pendekatan pembungkihan akar umbi sistem dan meruntuh struktur sedia ada? Paling tidak terdapat dua sebab utama Malaysia memilih pendekatan Islamisasi pembangunan. Pertama, negara Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk dengan 40 peratus rakyatnya terdiri daripada orang bukan Islam (Lee Ban Chen, 2002); dan kedua, pendekatan Islamisasi pembangunan lebih mudah dilaksanakan kerana ia bersifat beransur-ansur dan tidak dilaksanakan secara sekali gus dan drastik berbanding pendekatan pembungkihan akar umbi. Menurut Abdul Rahman Mahmood (2009:42), hal ini dapat mendorong masyarakat bukan Islam menerima beberapa perubahan atau proses Islamisasi pembangunan yang dilaksanakan.

Meskipun pelaksanaan Islamisasi pembangunan di Malaysia tidak bersifat drastik dan bukan berbentuk rombakan sistem dan struktur, ia masih tetap dipandang negatif oleh sebilangan orang bukan Islam. Misalnya, Lee Ban Chen (2002) yang meluahkan rasa kebimbangan beliau terhadap proses Islamisasi pembangunan dengan mengatakan perlumbaan antara UMNO dengan PAS untuk mengislamisasikan negara akan terus mempolarisasikan rakyat Malaysia sebagai Islam dan bukan Islam dalam semua bidang. Selain itu, salah seorang Ahli Parlimen DAP, Lim Kit Siang turut mempersoalkan Islamisasi pembangunan yang dilaksanakan. Beliau menyatakan Malaysia tidak boleh diislamisasikan kerana kurang daripada 60 peratus penduduk di Malaysia yang beragama Islam. Dengan itu, beliau tetap berpendirian bahawa Malaysia sebuah negara sekular dengan Islam sebagai agama rasmi (Thock Ker Pong, 2005).

Secara peribadi, saya berpandangan situasi yang lebih berat lagi akan berlaku sekiranya Malaysia menggunakan pendekatan pembungkihan akar umbi dan meruntuhkan sistem yang sedia ada. Oleh sebab itulah Malaysia hanya menggunakan pendekatan Islamisasi pembangunan sebagai salah satu strategi untuk memperkasakan Islam di negara ini. Hal inilah yang menyebabkan proses Islamisasi pembangunan itu tidak ditentang secara total oleh orang-orang bukan Islam. Masih ada sebilangan orang bukan Islam yang memandang positif terhadap proses Islamisasi pembangunan ini. Misalnya, Terence Chong (2006) yang berpandangan proses Islamisasi pembangunan melalui pendekatan Islam Hadhari ini sebagai usaha pemerintah untuk memperkasakan orang Islam bagi berhadapan dengan cabaran-cabaran global pada hari ini dan agar kaum Melayu-Islam menjadi

⁷⁴ Jurnal Hadhari merupakan jurnal berwasit dan berindeks yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Hadhari Keluaran Khas telah dilancarkan oleh Ahmad Zahid Hamidi (Dato' Seri Dr.), Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 25 Oktober 2008. Mulai tahun 2009, Jurnal Hadhari diterbitkan sebanyak 2 keluaran dalam setahun (JAKIM, 2011).

lebih berjaya pada tahap global. Beliau juga berpendapat setelah berlakunya peristiwa 11 September 2001, Islam Hadhari akan membuka jalan kepada Malaysia untuk menjadi tauladan kepada masyarakat Islam sedunia. Sarjit Singh (2006) pula berpandangan proses Islamisasi pembangunan melalui pendekatan Islam Hadhari penting kerana ia menekankan ketamadunan Islam yang berpaksikan ajaran asas agama tersebut. Menurut beliau lagi, pendekatan Islam Hadhari ini dapat membentuk sebuah negara yang harmoni dan aman damai.

SOROTAN LATAR BELAKANG ISLAM HADHARI

Pemikiran Islamisasi pembangunan melalui pendekatan Islam Hadhari ini telah pun bermula sejak tahun 2002 lagi. Menurut Abdul Hamid Othman⁷⁵ (Dato' Seri Dr.), perbincangan untuk melaksanakan Islamisasi pembangunan melalui pendekatan Islam Hadhari ini telah mula dilakukan oleh beliau dengan rakan-rakan ulama dan cendekiawan Islam pada tahun 2002. Tujuannya adalah untuk mencari jalan merealisasikan tamadun bangsa dan negara. Setelah hasil perbincangan tersebut dikemukakan kepada mantan Perdana Menteri Malaysia kelima, Abdullah Ahmad Badawi, beliau kemudiannya mendapat ilham untuk mengisytiharkan dasar Islam Hadhari sebaik sahaja menggantikan Mahathir Mohammad. Sebelum Islam Hadhari ini diisytiharkan, Mahathir Mohammad telah mengisytiharkan Malaysia sebagai Negara Islam (Muhammad Syukri Salleh, 2005a:137)

Namun, dalam tempoh 2002 hingga Mac 2004, Islam Hadhari ini kurang diberi perhatian walaupun pada 30 Januari 2004, Abdullah Ahmad Badawi melancarkan dan merasmikan "Islam Hadhari Pengurusan Negara Islam Peringkat Kebangsaan" di Seminar Percambahan Pemikiran Islam Hadhari di Dewan Kompleks Belia, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan (Muhammad Syukri Salleh, 2005b:55). Tidak berapa lama selepas itu iaitu seminggu sebelum Pilihan Raya Umum 2004 (PRU ke-11) pada 21 Mac 2004, Abdullah Ahmad Badawi menyebutnya sekali lagi di satu majlis yang dihadiri oleh 25,000 orang. Dalam PRU ke-11 itu, Islam Hadhari dijadikan sebagai salah satu agenda Manifesto Barisan Nasional di peringkat nasional dan di peringkat negeri Terengganu (Muhammad Syukri Salleh, 2005a:137-138).

Setelah Barisan Nasional (BN) memperoleh kemenangan besar dalam PRU ke-11 itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang baru Abdullah Md. Zn (Dato' Dr.) telah diamanahkan oleh mantan Perdana Menteri, Abdullah Ahmad Badawi untuk menggerakkan Islam Hadhari ini (Berita Minggu, 11 April 2004). Berikutan daripada itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dijadikan sebagai sekretariat (New Sunday Times, 1 Ogos 2004). Selain itu, institusi-institusi Islam Kerajaan yang lain seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM),

⁷⁵ Penasihat Agama kepada mantan Perdana Menteri Malaysia kelima, Abdullah Ahmad Badawi.

Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), Jabatan Pengajian Tinggi (JPT), dan Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) turut terlibat dalam menggerakkan dan mempromosikan Islam Hadhari ini kepada kumpulan sasaran masing-masing (Jabatan Perdana Menteri, 2007). Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam Jadual 2.

Jadual 2: Agensi Pelaksana Pendekatan Islam Hadhari

Bil.	Agensi	Sasaran
1	JAKIM	Kakitangan kerajaan dan masyarakat awam
2	JASA	Pertubuhan politik
3	JAPIM	Guru dan pelajar sekolah
4	JPT	Institusi pengajian tinggi awam dan swasta
5	KAGAT	Warga Angkatan Tentera Malaysia
6	IKIM	Masyarakat bukan Islam
7	YADIM	Pertubuhan bukan kerajaan (NGO)
8	JPM (Penasihat Agama, Perdana Menteri)	Sektor swasta

Sumber: Dirumuskan daripada Garis Panduan Pelaksanaan Pendekatan Islam Hadhari di Agensi-agensi Kerajaan, Pekeliling AM Bilangan 1, 2007.

Bagi membuktikan pendekatan Islam Hadhari itu masih lagi diberi perhatian, pada 23 September 2004, Abdullah Ahmad Badawi sendiri yang menghuraikan Islam Hadhari dengan lebih terperinci dan mendalam dalam ucapannya di Perhimpunan Agung UMNO ke-55 di Pusat Dangan Dunia Putra (PWTC) (Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid & Wan Adli Wan Ramli, 2006:12). Walaupun Islam Hadhari hanyalah sebahagian daripada banyak lagi isi ucapannya, ia boleh dianggap sebagai dokumen pertama tentang Islam Hadhari yang paling lengkap setakat ini (Muhammad Syukri Salleh, 2005a:139).

Sebenarnya, dalam tempoh sebelum dan selepas PRU ke-11, selain dari Jabatan Perdana Menteri – sama ada Perdana Menteri sendiri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Abdullah Md. Zin dan JAKIM – terdapat pelbagai pihak lain yang turut juga mempromosikan Islam Hadhari, terutamanya Kerajaan negeri. Paling menonjol dalam kalangan Kerajaan negeri ialah Kerajaan Negeri Terengganu. Sejak sebelum PRU ke-11 lagi, Barisan Nasional amnya dan UMNO negeri Terengganu khasnya – ketika itu di bawah kepimpinan mantan Perdana Menteri Malaysia kelima, Abdullah Ahmad Badawi sendiri (sebagai Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri) dan menjadi parti pembangkang kepada pemerintahan PAS – telah

memperkenalkan satu pendekatan yang dikenali sebagai Islam Hadhari Terengganu Bestari (IHTB) (Muhammad Syukri Salleh, 2005a:140).

Sebenarnya, pendekatan IHTB ini adalah satu inspirasi untuk mewujudkan kemajuan peradaban dengan mengambil kira kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai wadah mencapai ketinggian peradaban tersebut. Fokusnya ialah tadbir urus yang baik, mesra teknologi, dan infrastruktur dan infrastruktur yang berkesan. Dengan itu, ia diharap dapat membina empat perkara berikut. Pertama, negeri yang baik, aman dan makmur serta diampuni Allah SWT (*baldah tayyibah wa rabb ghafur* – Saba', 34:15). Kedua, masyarakat yang saling hormat menghormati, bertimbang rasa, mesra dan harmonis merentasi kaum, agama dan fahaman politik yang berbeza, dan sama-sama menghayati konsep amar makruf nahi munkar, berilmu, berbudaya belajar seumur hidup, pekerti yang luhur, bersifat global, berdikari, dan tidak meminta-minta. Ketiga, keluarga yang sihat, dinamik, cergas, dan mampu melahirkan insan yang bersih rohani dan jasmaninya serta terdidik dengan nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan. Keempat, individu yang berfikiran tajam, kreatif dan menghormati pandangan orang lain, tidak kekok dengan teknologi komunikasi dan maklumat, dan memelihara hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia (Muhammad Syukri Salleh, 2005b:57-58 & 2005a:140-141).

Pendekatan IHTB yang diperkenalkan ini mempunyai lapan prinsip yang agak berbeza dengan prinsip Islam Hadhari yang kemudiannya disenaraikan oleh mantan Perdana Menteri, Abdullah Ahmad Badawi di Perhimpunan Agung UMNO ke-55. Pertama, ilmu. Kedua, *syumul* (komprehensif) dan seimbang (*ummatan wasata*). Ketiga, cemerlang (*khayra ummah*). Keempat, mesra. Kelima, kompetitif, inovatif dan kreatif. Keenam, global. Ketujuh, moden dan kontemporari, dan kelapan, akhlak (Muhammad Syukri Salleh, 2005a:159-160; Idris Jusoh, 2007:13). Selepas Abdullah Ahmad Badawi memperkenalkan 10 prinsip Islam Hadhari di peringkat nasional iaitu pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT; kedua, Kerajaan adil dan beramanah; ketiga, rakyat berjiwa merdeka; keempat, penguasaan ilmu pengetahuan; kelima, pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif; keenam, kehidupan berkualiti; ketujuh, pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita; kelapan, keutuhan budaya dan moral; kesembilan, pemuliharaan alam semula jadi; dan kesepuluh, kekuatan pertahanan (JAKIM, 2005:22), maka Kerajaan Negeri Terengganu telah menamakan kelapan-lapan prinsip Islam Hadharinya sebagai nilai-nilai Islam Hadhari Negeri Terengganu (Muhammad Syukri Salleh, 2007:4).

Pendekatan Islam Hadhari yang diperkenalkan ini sebenarnya merupakan satu pendekatan untuk membangunkan tamadun dan peradaban umat yang berteraskan syariat dan landasan Islam (Muhammad Syukri Salleh, 2005b:63 & 2005a:137). Ia meliputi aspek akidah, ibadah dan akhlak. Hal ini bertujuan melahirkan modal insan yang jitu dari aspek keimanan, keintelektualan, sakhshiah dan pembangunan fizikal (JAKIM, 2005:15).

Secara lebih jelas lagi, Islam Hadhari merupakan satu pendekatan baru berkonsepkan kemajuan dan pembangunan seimbang antara keperluan fizikal dan spiritual dalam usaha membangunkan dan melestarikan ketamadunan umat Islam berasaskan prinsip *siyasah syar'iyah* (politik Islam) (Khadijah Mohd Khambali @Hambali & Nor Adina Abdul Kadir, 2010).

Sebenarnya, pendekatan Islam Hadhari ini diperkenalkan berdasarkan beberapa rasional iaitu Islam sebagai agama Persekutuan; sebagai kesinambungan DPNI; pemacu Wawasan 2020; menjadikan Islam sebagai penyelesaian cabaran semasa; dan merealisasikan Islam sebagai agama yang dapat memberi rahmat kepada alam sejagat (Jabatan Perdana Menteri, 2007).

UNSUR-UNSUR ISLAMISASI PEMBANGUNAN DALAM PENDEKATAN ISLAM HADHARI

Secara asasnya, memang pendekatan Islam Hadhari mempunyai tasawurnya yang tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan melalui prinsip pertamanya yang jelas menekankan kualiti keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Siddiq Fadzil, 1988:12-13). Jelas di sini bahawa Islam Hadhari meletakkan elemen tauhid sebagai tunjang dalam pembangunan tamadun dan peradaban umat.

Meskipun Islam Hadhari mempunyai tasawurnya yang tersendiri, namun ia didapati masih mengekalkan unsur-unsur tasawur lazim. Dengan kata lain, acuan Islam Hadhari adalah gabungan antara tasawur Islam dengan tasawur lazim. Bagi membuktikan hal ini Muhammad Syukri Salleh (2005a:151) mengatakan Islam Hadhari kerap dihubungkan dengan 'kemodenan'. Misalnya, ketika Abdullah Ahmad Badawi menyampaikan syarahannya di Oxford Centre for Islamic Studies (lebih kurang seminggu selepas ucapannya di Perhimpunan Agung UMNO ke-55), beliau mengatakan Islam Hadhari adalah satu pendekatan terhadap sebuah tamadun Islam yang progresif, yang menghargai isi dan bukan bentuk, yang berhasrat menyedarkan umat Islam bahawa kemajuan dituntut oleh Islam. Pendekatan ini dikatakan selaras dengan kemodenan, tetapi berakar umbi ajaran Islam dan nilai-nilai Islam yang luhur.

Bukan setakat itu, malah Abdullah Ahmad Badawi sering menghubungkan Islam Hadhari dengan kemodenan itu secara berulang-ulang. Misalnya dalam Forum Strategi Arab 2004 yang berlangsung di Dubai, Abdullah Ahmad Badawi (2004e) berkata begini:

"Mengagumi kuasa yang ada pada agama yang agung, saya menerapkan konsep Islam Hadhari sebagai inspirasi kepada rakyat saya ke arah pembangunan yang progresif. Ia merupakan satu pendekatan yang memerlukan penghayatan

dan bukannya sistem pentadbiran. Pendekatan yang memerlukan Muslim memahami yang kemajuan mesti disertakan dengan Islam. Pendekatan yang sepadan dengan kemodenan tetapi tetap teguh memelihara kesucian ajaran Islam” (dipetik daripada Muhammad Syukri Salleh, 2005a:153).

Jelas di sini bahawa Abdullah Ahmad Badawi menganggap Islam Hadhari sebagai satu pendekatan yang sepadan dengan kemodenan, tetapi ia tetap teguh memelihara kesucian ajaran Islam.

Dalam uaputama di Jamia Milia Islamia di Delhi, India pada 21 Disember 2004 pula, Abdullah Ahmad Badawi (2004f) berkata begini:

“Tidak boleh dinafikan bahawa Islam menjadi imperatif yang bertambah kuat bagi orang Islam untuk tindakan pada hari ini. Di Malaysia, kami percaya bahawa dorongan ini bertindak adalah kerana agama boleh disalurkan ke arah kebaikan, ke arah kemajuan, dan ke arah pembangunan. Kami panggil pendekatan ini sebagai Islam Hadhari – secara harfiah bermaksud ‘ketamadunan’ - yang serasi dengan pemodenan, tetapi tegak bertunjangkan pada nilai-nilai mulia dan kehendak-kehendak Islam” (dipetik daripada Muhammad Syukri Salleh, 2005a:153).

Jelas di sini bahawa Abdullah Ahmad Badawi mengatakan Islam Hadhari itu sebagai satu pendekatan yang serasi dengan pemodenan, namun ia tetap bertunjangkan nilai-nilai mulia dan kehendak-kehendak ajaran Islam.

Selain itu, Menteri Besar Terengganu (sewaktu di bawah kepimpinan Abdullah Ahmad Badawi), Idris Jusoh (2004) menjelaskan lagi maksud Islam Hadhari ini sebagai satu pendekatan holistik dan penterjemahan Islam ke dalam pembangunan zaman moden berasaskan al-Qur’an dan al-Sunnah untuk melahirkan masyarakat yang dinamik, progresif dan bertamadun (dipetik daripada Muhammad Syukri Salleh, 2005a:151). Di sini juga jelas dihubungkan pendekatan Islam Hadhari itu dengan kemodenan.

Dalam pengajian pembangunan, perkataan moden berkait rapat dengan teori Modenisasi⁷⁶ yang lahir di Barat setelah falsafah Barat berjaya

⁷⁶ Modenisasi berasal daripada perkataan Latin, *modernus* yang bermaksud pada masa ini. Modenisasi adalah satu fasa sejarah Barat yang sedang melalui pasca-tradisi, pasca zaman pertengahan. Modenisasi dicirikan dengan industrialisme, kapitalisme, sekularisasi, dan negara-bangsa (Khalif Muammar A. Haris, 2012:34). Habermas (1985), seorang ahli falsafah yang mewakili Modenisasi, terpaksa mengakui kelemahan yang ada pada Modenisasi, khususnya dalam wacana kesadaran manusia (*consciousness*) sehingga banyak menimbulkan penyelewengan akliah, tetapi beliau cuba mempertahankan Modenisasi daripada kritikan golongan pascamoden. Zaman moden bagi Habermas berkait rapat dengan proses rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi pula diperkenalkan oleh Max Weber

meminggirkan agama dan tradisi daripada menguasai masyarakat. Teori Modernisasi telah menolak pandangan alam yang berdasarkan agama dan membangun tasawur baru yang menolak aspek metafizik (Khalif Muammar A. Haris, 2012:35). Oleh sebab itu, teori Modernisasi meletakkan manusia bukan sebagai hamba dan Khalifah Allah SWT. Menurut Habermas (1985), Bauman (1991), dan Hermansen (1996), dalam teori Modernisasi manusia dianggap sebagai penentu segala sesuatu (*measure of all things*), pembawa dan sumber segala hak.

Menurut Muhammad Syukri Salleh (2005a:169) dan Abdul Rahman Embong (2002:168-169), teori Modernisasi ini sebenarnya ada hubung kait dengan Falsafah Pembangunan Neo-Klasikal yang melahirkan sistem kapitalisme Ibunya ialah sains sosial Barat yang bersifat anti-dogmatis, anti-teologi, bebas nilai dan saintifik yang berasaskan ilmu *daruri* dan hujah-hujah akal sahaja. Sifat anti-dogmatis membahayakan akidah umat Islam, sifat anti-teologi menolak ritualisme dan penganalisan agama, sifat bebas nilai menafikan pegangan dan tasawur seseorang, sifat saintifik mengetepikan alam ghaib, manakala ilmu *daruri* dan hujah-hujah akal tidak mencukupi untuk memahami fenomena dan permasalahan pembangunan.

Meskipun maksud moden yang diguna pakai oleh mantan Menteri Besar Terengganu, Idris Jusoh dan mantan Perdana Menteri, Abdullah Ahmad Badawi itu merujuk kepada pemakaian teknologi dan peralatan canggih terkini, namun ia boleh menimbulkan kekeliruan dan konotasi yang negatif dalam kalangan ilmuwan Islam dan bukan Islam (Muhammad Syukri Salleh, 2005a:169). Pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Syukri Salleh (2005a) ini patut diambil penting dan diteliti secara mendalam. Hal ini kerana maksud moden dalam Islam Hadhari yang merujuk kepada pemakaian teknologi dan peralatan canggih itu seakan-akan hampir menyamai tujuan teori Modernisasi itu diperkenalkan. Misalnya, Moore (1963) yang mengatakan teori Modernisasi diperkenalkan adalah untuk mentransformasikan masyarakat pra-moden kepada jenis teknologi dan organisasi sosial sebagaimana masyarakat Barat yang maju dalam bidang ekonomi dan politik. Berdasarkan pandangan Moore (1963) ini, ternyata beliau menekankan proses perubahan yang perlu berlaku dalam masyarakat di negara Dunia Ketiga. Perubahan tersebut pula perlu dilakukan mengikut pola perubahan yang telah dilalui oleh masyarakat Barat iaitu konsep

untuk menjadi asas kepada kapitalisme. Menurut Hardiman dan Midgley (1982), Modernisasi adalah antara teori yang dikemukakan oleh para sarjana ekonomi Barat seperti Rosentein-Rodan, Nurkse, Leibenstein, Rostow dan Harrod Domar berhubung punca berlakunya kemiskinan di negara-negara Eropah Timur yang baru mencapai kemerdekaan selepas tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Hunt (1989) mengatakan teori ini kemudiannya diperluaskan lagi bagi mencari punca kemunduran dan kemiskinan di negara Dunia Ketiga khususnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Menurut Hardiman dan Midgley (1982), punca berlakunya kemunduran dan kemiskinan di negara-negara tersebut disebabkan oleh pergantungan kepada sektor pertanian, penggunaan kaedah serta teknologi pengeluaran yang rendah, kekurangan infrastruktur dan sikap serta pegangan tradisi petani yang bertentangan dengan kehendak pertanian moden (dipetik daripada Mohd Fauzi Mohd Harun & Ahmad Fauzee Abdullah, 2007:40).

Modenisasi yang *eurosentrik* sifatnya. Selain itu, Black (1967) pula berpendapat teori Modenisasi ini diperkenalkan untuk membolehkan institusi menyesuaikan diri dengan kadar perubahan fungsi yang cepat bagi meningkatkan pengetahuan manusia supaya mereka dapat menguasai dan mengawal persekitarannya yang akhirnya membawa kepada revolusi saintifik. Revolusi saintifik membantu Barat menguasai dan meneroka dunia. Berdasarkan pandangan Black (1967) ini, teori Modenisasi cuba menerapkan sains dan teknologi moden dalam masyarakat Dunia Ketiga. Hal ini mempamerkan masyarakat Dunia Ketiga masih lagi terikat dengan negara Barat kerana sains dan teknologi dihasilkan di sana (Ahmad Shukri Mohd. Nain & Rosman Md. Yusoff, 2003:51).

Permasalahan yang timbul ini sebenarnya telah disedari oleh mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Abdullah Md. Zin sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui kata-kata beliau sebagaimana berikut:

Wasatiyah or a balanced approach to life would be a more precise way to describe Islam Hadhari. Moderation, on the other hand, could connote hastiness to the point of neglecting traditions, Islamic scholars tend to shy away from using the word 'moderate' because it can be manipulated and exploited by external influences. In the same way, scholars are cautious about the word modern which they associate with Western civilization. The word progressive could also be used to define Islam Hadhari but wasatiyah is preferable (New Sunday Time, 1 Ogos 2004 – dipetik daripada Muhammad Syukri Salleh, 2005b:170).

Terjemahannya: *Wasatiyah* atau pendekatan seimbang terhadap kehidupan adalah cara tepat menerangkan tentang Islam Hadhari. Kesederhanaan, sebaliknya boleh bererti terburu-buru sehingga mengabaikan tradisi. Cendekiawan Islam mengelak daripada menggunakan perkataan 'sederhana' kerana ia boleh dimanipulasi dan dipergunakan oleh pengaruh luar. Begitu juga, cendekiawan Islam berhati-hati dengan perkataan moden yang mereka kaitkan dengan tamadun Barat. Perkataan progresif boleh juga digunakan untuk mendefinisikan Islam Hadhari, tetapi *wasatiyah* adalah lebih diajukan

Selain Abdullah Md. Zin, Mohd Nakhaei Haji Ahmad (2005) turut menyedari tentang aspek Modenisasi dalam Islam Hadhari ini. Namun dalam hal ini beliau menyatakan proses Modenisasi yang terdapat dalam Islam Hadhari itu tidak sama dengan Modenisasi Barat. Hal ini kerana Modenisasi yang terdapat dalam Islam Hadhari itu telah dilepaskan daripada pembedaan dan diseraskannya dengan Islam. Elemen sekularisme dan kapitalisme yang mengakar dalam proses Modenisasi di Barat tidak diterima dalam

pembangunan di negara ini. Berdasarkan pandangan Mohd Nakhaei Haji Ahmad (2005) ini didapati proses Islamisasi jelas berlaku dalam pendekatan Islam Hadhari. Aspek Modernisasi yang diguna pakai itu hanya disesuaikan dengan ajaran Islam melalui penggantian unsur-unsur pembangunan lazim yang tidak selari dengan Islam dengan unsur-unsur pembangunan berteraskan Islam.

Oleh sebab pendekatan Islam Hadhari itu menggunakan acuan yang bercampur aduk antara tasawur Islam (tauhid) dengan tasawur lazim (Modernisasi), maka ia dikatakan sebagai salah satu daripada proses Islamisasi pembangunan. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003:22), sesuatu pendekatan itu tidak boleh dikatakan pendekatan pembangunan berteraskan Islam apabila ia lahir daripada acuan yang bercampur aduk antara epistemologi dan tasawur Islam dengan epistemologi dan tasawur lazim.

KEGAGALAN PENDEKATAN ISLAM HADHARI

Pendekatan Islam Hadhari yang digagas oleh mantan Perdana Menteri, Tun Abdullah Badawi telah mengalami dinamika pasang surut dalam pelaksanaannya. Pada peringkat awal - tidak lama setelah pelancarannya - pendekatan Islam Hadhari dialu-alukan kehadirannya terutama dalam kalangan parti pemerintah yang berkuasa iaitu UMNO. Timbulnya pandangan yang positif ini kerana Islam Hadhari menawarkan satu konsep atau pendekatan yang meletakkan Islam sebagai teras utama dalam arus pembangunan negara yang berdasarkan kepada keunggulan tamadun dan peradaban bangsa. Selain itu, pendekatan ini juga diyakini mampu mengembalikan semula kepercayaan rakyat terhadap Kerajaan yang cukup terjejas berikutan berlakunya penyingkiran dan pemenjaraan mantan Timbalan Perdana Menteri, Anwar Ibrahim (Dato' Seri) pada tahun 1998 (Mohammad Redzuan Othman & Amin Fadlillah, 2012).

Hal ini dapat dibuktikan dengan keputusan PRU ke-11 pada tahun 2004. UMNO telah meraih kemenangan terbesar dalam sejarah pilihan raya di negara ini. Sebagai salah satu manifesto Barisan Nasional (BN) dalam menghadapi PRU ke-11, Islam Hadhari dilihat cukup berperanan sekali. Ia dikatakan dapat mempromosikan Islam yang berimbang (*al-Wasatiyyah*) dan progresif sekali gus menolak pendekatan Islam yang diperjuangkan PAS. Peranan Islam Hadhari ini dilihat menjadi faktor utama dalam meraih sokongan pengundi Melayu. Berhubung hal ini, Khadijah Md. Khalid (2007) menyatakan:

Islam Hadhari was instrumental in winning the hearts and minds of the Malaysians electorate, particularly the rural Malays, prompting them to switch their support from PAS to the UMNO.

Terjemahannya: Islam Hadhari berperanan penting dalam memenangi hati dan minda pengundi rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu luar bandar, mendorong mereka untuk menghidupkan sokongan mereka daripada PAS kepada UMNO.

Walau bagaimanapun, oleh sebab acuan pendekatan Islam Hadhari itu bersifat campur aduk antara tasawur Islam dengan tasawur lazim, Islam Hadhari mula kehilangan arah matlamat dan cita-cita besarnya dalam mereformasikan cara pandang (tasawur), sikap dan mentaliti masyarakat Melayu untuk merealisasikan pembangunan berteraskan Islam dan impian Malaysia sebagai negara Islam contoh. Dengan kata lain, apabila akar umbi sistem dan strukturnya masih bertunjangkan tasawur lazim, maka ia menimbulkan pelbagai masalah pada peringkat operasionalnya.

Justeru, sebagai implikasinya Islam Hadhari dikritik dan dipertikai oleh banyak pihak. Misalnya, golongan pembangkang terutama PAS yang mempertikaikan pendekatan Islam Hadhari sebagai pendekatan yang dikatakan berteraskan Islam (Abdul Hadi Awang, 2005). Selari dengan pandangan PAS ini, M. Bakri Musa (2007) mengatakan pendekatan Islam Hadhari yang diperkenalkan Kerajaan tidak sepenuhnya menepati kehendak Islam kerana dalam usaha kerajaan menyerlahkan imej Islamnya menerusi dasar Islamisasinya, ia tidak disertai dengan komitmen untuk menjalankan Islam secara bersungguh-sungguh. Isu tentang kemerdekaan dan hak asasi manusia yang menjadi salah satu prinsip Islam Hadhari menimbulkan kontradiksi dengan realiti yang berlaku, iaitu banyaknya tahanan politik ISA yang masih belum dibebaskan pada ketika itu.

Selain itu, golongan Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO) Islam mengatakan Islam Hadhari lemah dalam aspek pelaksanaannya kerana tiada gagasan dan acuan yang bersifat konkrit, malah Islam Hadhari dilihat sebagai slogan politik dan terlalu menekankan aspek material semata-mata (Mohammad Redzuan Othman & Amin Fadlillah, 2012). Hal ini selari dengan pandangan Muhammad Syukri Salleh (2005a:177) yang mengatakan pendekatan Islam Hadhari itu bagaikan terlalu terikat dengan UMNO. Ia dijadikan agenda manifesto Pilihan Raya UMNO khususnya dan BN amnya dalam Pilihan Raya Umum 2004. Hal ini ditambah pula dengan pengisytiharannya dalam Perhimpunan Agung UMNO ke-55 oleh Abdullah Ahmad Badawi. Pada ketika itu, beliau ialah Presiden UMNO.

Disebabkan acuannya yang bersifat campur aduk itu juga, Islam Hadhari dilihat mempunyai kekurangan sekurang-kurangnya pada empat perkara utama. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2005a:163-178), empat perkara tersebut ialah pertama, penggunaan istilah yang kurang sesuai umpamanya istilah 'hadhari' dan 'moden' telah banyak menimbulkan kontroversi; kedua, Islam Hadhari tidak mempunyai prinsip-prinsip tapak yang kukuh. Sebagai

pendekatan pembangunan berteraskan Islam, Islam Hadhari sepatutnya bertapak pada tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam. Ia mempunyai acuan, pelaku, skala waktu, kerangka, perkaedahan, peralatan, dan matlamat akhir yang tersendiri; ketiga, pencapaian Islam Hadhari diukur dengan indeks-indeks pembangunan yang sedia ada. Sebagai satu pendekatan pembangunan berteraskan Islam, Islam Hadhari tidak cukup diukur dengan indeks-indeks pembangunan lazim yang hanya tertumpu kepada indeks ekonomi dan sosial; dan keempat, kedudukan Islam Hadhari dalam strategi pembangunan negara tidak jelas. Setakat penelitian yang dilakukan, Islam Hadhari itu dilihat bagaikan sekadar lanjutan, kesimbangan dan pemantapan DPNI. Hal ini menyebabkan masa hadapan Islam Hadhari tidak gah dan berkesan sepertimana tidak gah dan tidak berkesannya DPNI itu sendiri. DPNI sebelum ini hanya sebahagian kecil daripada strategi pembangunan induk negara yang besar. Oleh itu, ia hanya berkemampuan mengadakan ceramah-ceramah dan kursus-kursus agama yang sukar dilihat kesannya⁷⁷.

Semua kekurangan yang wujud pada aspek operasional Islam Hadhari ini berpunca dari aspek acuannya yang bercampur aduk antara tasawur Islam dengan tasawur lazim. Meskipun ia dilihat sedikit berjaya pada peringkat awalnya, namun ia tidak dapat mengekalkan kejayaannya itu. Hal ini ditambah pula dengan pelbagai kontroversi yang timbul sehingga aspek operasionalnya itu dikritik dan dipertikaikan oleh pelbagai pihak. Menurut kajian yang dilakukan oleh Muhammad Redzuan Othman dan Amin Fadlillah (2012), sebagai kesannya, Islam Hadhari ini dikatakan sebagai penyebab kemerosotan undi Barisan Nasional (BN) dalam PRU ke-12.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan perbincangan dalam makalah ini, dapatlah dirumuskan bahawa terdapat dua sebab utama Malaysia memilih Islamisasi pembangunan sebagai kaedah pelaksanaan Islamnya. Pertama, negara Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk dengan 40 peratus rakyatnya terdiri daripada orang bukan Islam; dan kedua, pendekatan Islamisasi pembangunan lebih mudah dilaksanakan kerana ia bersifat sedikit demi sedikit dan tidak dilaksanakan secara sekali gus dan drastik berbanding pendekatan pembungkian akar umbi. Sebenarnya, Islamisasi pembangunan itu mempunyai tiga ciri utama.

Pertama, penggantian unsur-unsur pembangunan lazim yang tidak selari dengan Islam dengan unsur-unsur pembangunan berteraskan Islam; kedua, dilaksanakan secara beransur-ansur tanpa merombak dan meruntuhkan struktur pembangunan lazim; dan ketiga, biasanya dilakukan secara akomodatif dan kadangkala terpaksa berbentuk apologetik. Islam Hadhari dikatakan sebagai salah satu daripada proses Islamisasi pembangunan kerana ia masih tidak merombak dan meruntuhkan struktur pembangunan

⁷⁷ Untuk perincian tentang perkara ini, lihat Muhammad Syukri Salleh (2005a:163-178).

lazim yang wujud iaitu aspek Modernisasi. Berikutan daripada itu, pelaksanaan Islam Hadhari telah menimbulkan banyak masalah dan kontroversi.

Semua masalah dan kontroversi yang wujud itu didapati berpunca dari aspek acuannya yang bercampur aduk antara tasawur Islam dengan tasawur lazim. Meskipun Islam Hadhari dilihat sedikit berjaya pada peringkat awalnya, namun ia tidak dapat mengekalkan kejayaannya itu.

REFERENSI

- Abdul Hadi Awang (2005). *Hadharah Islamiyyah Bukannya Islam Hadhari*. Kuala Lumpur: Nufar Street Sdn. Bhd.
- Abdul Rahman Embong (2002). "Pembangunan: Daripada Modernisasi Kepada Globalisasi", dlm. Misran Rokimin, James Francis Ongkili & Azmi Aziz (Eds.), *Falsafah dan Peradaban Pembangunan*. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
- Abdul Rahman Mahmood, Kamaruddin Haji Salleh, Ahmad Sunawari Long & Faudzinain Badaruddin (2009). "Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia", dlm. *Jurnal Hadhari*, Bil. 2 (2009), hlm. 33-51.
- Abdullah Ahmad Badawi (2007). *Islam Hadhari Approach: Towards a Progressive Islamic Civilisation*. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Ahmad Fadhil Shaari (2001). *Islamisasi di Malaysia: Satu Sorotan Pencapaian*. Diakses daripada <http://www.geocities.com/afadhlis/politik2.htm>, pada 20 Mac 2013.
- Ahmad Ikram Abdullah (2007). *Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam: Pendekatan Negeri Terengganu Darul Iman*. Terengganu: Yayasan Islam Terengganu.
- Ahmad Shukri Mohd. Nain & Rosman Md. Yusoff (2003). *Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan*. Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
- Bauman, Z. (1991). *Modernity and Ambivalence*. Cambridge: Polity Press
- BPDN (Bahagian Penerbitan Dasar Negara) (2009). *Satu Malaysia Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan*. Putrajaya: Jabatan Penerangan Malaysia, Komunikasi dan Kebudayaan, Kementerian Penerangan.
- Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid & Wan Adli Wan Ramli (2006). "Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim", dlm. Abdul Halim Haji Mat Diah & Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid (Eds.), *Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Habermas, J. (1985). *The Philosophical Discourse of Modernity*. Massachusetts: The MIT Press Cambridge.

- Hassan Langgulong. 1998. "Islamisasi Pendidikan dari Perspektif Metodologi", kertas kerja *Seminar Kebangsaan Islamisasi Pendidikan: Menangani Cabaran*, anjuran Jabatan Pendidikan, Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), 14-16 Julai.
- Hermansen, M. K. (1996). "Modernity and Religious Worldviews – The Challenge of Classical Islamic Religious Thought for Contemporary Muslim Intellectuals", dlm. Sharifah Shifa al-Attas (ed.), *Islam and The Challenge of Modernity: Historical and Contemporary Contexts*, hlm. 509-534. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Hussin Mutalib (1990). *Islam and Ethnicity in Malay Politics*. Singapore: Oxford University Press.
- Hussin Mutalib (1993). *Islam in Malaysia: From Revivalisme to Islamic State*. Singapore: National University of Singapore.
- Ibrahim Ahmad (1989). *Konflik UMNO-PAS Dalam Isu Islamisasi*. Petaling Jaya, Selangor: IBS Buku Sdn. Bhd.
- Idris Jusoh (2007). *Islam Hadhari Terengganu Bestari Siri Syarahan ISDEV No. 2*. Pulau Pinang: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV).
- INTAN (Institut Tadbiran Awam Negara) (1991). *Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam*. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Malaysia.
- Jabatan Perdana Menteri (2007). "Garis Panduan Pelaksanaan Pendekatan Islam Hadhari di Agensi-agensi Kerajaan", *Pekeliling AM Bilangan 1, 2007*. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri Malaysia.
- JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) (2005). *Islam Hadhari: Satu Penjelasan*. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) (2010). *Konsep Wasatiyyah Pendokong Gagasan 1Malaysia 1Ummah*. Diakses pada 28 September 2010, daripada <http://www.ukm.my/jhadhari/index.php/bm>.
- JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) (2011). *Jurnal Hadhari*. Diakses daripada <http://www.islam.gov.my/portal/lihat.php?jakim=4701>, pada 14 April 2013.
- Khadijah Md. Khalid (2007). "Voting for Change? Islam and Personalized Politics in the 2004 General Elections", dlm. Terence Gomez, Edmund. (ed.), *Politics in Malaysia: The Malay Dimension*. London: Routledge.
- Khadijah Mohd Khambali @ Hambali & Nor Adina Abdul Kadir (2010). "Pendekatan Wasatiyyah Dalam Pengaplikasian Islam Hadhari di Dalam Memperkasakan Misi 1Malaysia", kertas kerja yang dibentangkan dalam *Seminar Kebangsaan 1Malaysia "1Malaysia, Realiti Bersama"*, anjuran Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, di Universiti Malaysia Sabah, 1-2 November.
- Khalif Muammar A. Haris (2012). "Pandangan Islam Terhadap Tradisi dan Kemodenan", dlm. *Jurnal Hadhari*, 4 (1) (2012), hlm. 23-48.

- Lee Ban Chen (2002). *Bumi di Pijak*. Kuala Lumpur: Oriengroup Sdn. Bhd.
- M. Bakri Musa (2007). *His Hollowness the Imam of Islam Hadhari*. Diakses pada 7 April 2013, daripada <http://www.bakrimusa.com/archives/his-hollowness-the-imam-of-islam-hadhari>.
- Mauzy, Diana K. & Milne, R.S. (1983). "The Mahathir Administration in Malaysia: Discipline Through Islam", *Pacific Affair*, Jil. 56, Bil. 4.
- Mohd Fauzi Mohd Harun & Ahmad Fauzee Abdullah (2007). *Kemiskinan Mengikut Teori Konvensional dan Perspektif Islam*. Shah Alam, Selangor: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA
- Mohd Nakhaei Haji Ahmad (Datuk) (2005). *Pendekatan Hadhari dalam Memahami Islam*. Diakses daripada http://library.utem.edu.my/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=833&Itemid=113, pada 2 April 2013.
- Muhamad Razak Idris (2011). *Menjayakan Proses Islamisasi Secara Holistik*. Diakses daripada <http://www.bharian.com.my/articles/MenjayakanprosesIslamisasiSecaraHolistik/Article/>, pada 2 April 2013.
- Muhammad Redzuan Othman & Amin Fadlillah (2012). "Perspektif Badan Bukan Kerajaan (NGO) Islam Terhadap Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam dan Pendekatan Islam Hadhari", dlm. *Jurnal Hadhari*, Bil. 4 (1) (2009), hlm. 49-76.
- Muhammad Syukri Salleh (1999). "Islamic State and Development: The Political Economy of Wawasan SIHAT in Terengganu, Malaysia", *IKIM Jurnal* (Kuala Lumpur), Vol. 7, No. 2, Julai-Disember, hlm. 73-92.
- Muhammad Syukri Salleh (2000). "Pas dan Islamisasi di Kelantan", *PEMIKIR*, No. 21, Julai-September, hlm. 161-185.
- Muhammad Syukri Salleh (2003). *7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam*. Kuala Lumpur: Zebra Editons Sdn. Bhd. dan Pulau Pinang: Projek Pengurusan Pembangunan Islam (IDMP), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.
- Muhammad Syukri Salleh (2005a). "Islam Hadhari di Malaysia: Versi dan Elemen Pembangunan Berteraskan Islam", dlm. Sivamurugan Pandian *et al.* (Ed.), *Abdullah Ahmad Badawi: Satu Tahun di Putrajaya*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
- Muhammad Syukri Salleh (2005b). "Islam Hadhari dari Perspektif Pembangunan Berteraskan Islam", *PEMIKIR*, No. 39 & 40, Januari-April-Jun, hlm. 53-88.
- Muhammad Syukri Salleh (2007). "Mukadimah", dlm. Idris Jusoh, *Islam Hadhari Terengganu Bestari Siri Syarahan ISDEV No. 2*. Pulau Pinang: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV).
- Muhammad Syukri Salleh (2011). "Pemikiran Ekonomi Islam Melayu", dlm. H.M. Anton Athoillah, MM, *Prosiding Konferensi Internasional Islam di Dunia Melayu (Malay-Nusantara's Networks of Islam: Past, Present and Future)*. Bandung: Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

- Musafir Kelana, Mohd Izani Mohd Zain & Ummu Atiyah Ahmad Zakuan (2006). "Pembangunan Islam di Malaysia: Satu Pendekatan Islam Substantif", *KHAZANAH*, Vol. V, No. 66, November-Disember, hlm. 603-618.
- Najib Tun Razak (2010). *Transformasi Minda Memeta Wawasan Melaksanakan Amanah*. Putrajaya: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Malaysia.
- Sahawati Harun (2011). *Islamisasi Pembangunan di Kelantan*. Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang diserahkan kepada Fakulti Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak diterbitkan.
- Sarjit Singh (2006). "Hubungan Etnik di Malaysia: Ke Arah Pembentukan Masyarakat Berintegrasi", dlm. Zaid Ahmad et. al., *Hubungan Etnik di Malaysia*. Shah Alam, Selangor: Oxford Fajar, hlm. 192-221.
- Siddiq Fadzil (1998). *Minda Melayu Baru*. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar (IKD).
- Syed Mahadzir Syed Ibrahim & Mohd Shah A'shari (2010). *Gagasan Najib: 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan*. Shah Alam, Selangor: Warisan InKEd.
- Terence Chong (2006). "The Emerging Politics of Islam Hadhari", dlm. SAW Swee-Hock & K. Kesavapany, *Malaysia Recent Trends and Challenges*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 26-46.

ISLAMISASI PEMIKIRAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF TAWHIDIK

Sukiman

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara
Medan, Indonesia
Email: winsukiman@yahoo.com*

PENDAHULUAN

Umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, tetapi perencanaan pembangunan kurang mendekat dengan pemikiran Islam yang berbasis tawhid, padahal pemikiran pembangunan yang berbasis tawhid itulah yang paling diperlukan masa sekarang ini. Apalagi di Indonesia yang sedang mengalami berbagai krisis kehidupan seperti merosotnya moral, banyaknya perilaku kejahatan, menipisnya silaturahmi, rendahnya disiplin, disana sini terjadi konflik, tawuran, rusaknya lingkungan yang kesemuanya ini sudah mengkhawatirkan akan semakin merusak pembangunan. Sekiranya pembangunan ini dirancang berdasarkan tawhid, maka pembangunan akan berjalan ke arah nilai-nilai ketuhanan yang tentu mewujudkan manusia-manusia yang taat beribadah dan manusia yang shaleh dan taqwa yang pada gilirannya bangsa Indonesia ini akan menjadi baik, maju dan bermartabat, sehingga Allah s.w.t. akan menurunkan rahmat, barakah serta kemuliaan dan jauh dari bencana dan kehancuran.

Sungguhpun tidak dapat dinafikan bahwa asas perencanaan pembangunan di Indonesia ini tetap menggunakan pola kenegaraan yang sudah baku yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta pola pembangunan daerah masing-masing. Kecuali itu, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal juga memberi pengaruh bagi pembangunan di suatu daerah. Pembangunan di provinsi biasanya dipengaruhi pula oleh budaya dan kearifan lokal yang mayoritas penduduknya, sehingga pembangunan daerah juga diisi oleh pemikiran para tokoh dan pejabat yang ada di daerah tersebut. Walaupun demikian ada juga pengaruh pemikiran pembangunan yang religius, terutamanya pemikiran Islam yang jika para tokohnya ikut andil dalam kegiatan pembangunan.

Sudah masanya pemikiran pembangunan Islam yang tawhidik ini diperkenalkan secara sistematis, komprehensif kepada umat Islam, agar umat ini mengetahui posisi ilmu ini dapat memberikan modal bagi usaha membangun bangsa menuju kemajuan yang hakiki, yakni meraih negeri yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan begitu pemikiran pembangunan Indonesia ini perlu diisi dengan nilai-nilai pembangunan yang

tawhidik atau secara jelas digunakan istilah islamisasi pemikiran pembangunan Indonesia. Tentu saja diperlukan usaha agar islamisasi ini dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan umat Islam tentu saja dipergunakan beberapa jalur baik melalui pendidikan, keluarga, masmedia dan lingkungan.

ASAS PEMIKIRAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Pemikiran pembangunan di Indonesia relatif sangat beragam sesuai dengan kebhinekaan bangsa Indonesia baik suku, bahasa, agama dan budaya, sehingga asas pembangunan merupakan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang dituangkan dalam keputusan politik negara lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum Orde Baru priode 18 Agustus 1945 - Desember 1949, belum menghasilkan GBHN. Priode 1959, 1966 berdasarkan penetapan Presiden nomor: 2/1959, Presiden membentuk MPRS, maka telah ditetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Bahkan di era ini dipisahkan GBHN politik dan GBHN pembangunan, Priode 1966 (awal Orde Baru) hingga menjelang sidang umum MPRS tahun 1968 tidak berhasil menetapkan GBHN, dan akhirnya MPR menetapkan salah satu tugas kabinet pembangunan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun (Ketetapan MPR. 1993:2-8)

Sedangkan di era Orde Baru, asas pembangunan yang digunakan adalah: Pertama; Pancasila sebagai landasan ideal,⁷⁸ sehingga ajaran Pancasila dikembangkan dan dijabarkan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, dan pada tahun 1978 lahirlah Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum perjanjian luhur, pandangan hidup, cita-cita, dan tujuan berbangsa, moral pembangunan.⁷⁹ (BP7, 1993:15-17

⁷⁸ Yaitu: (1) Ketuhanan yang Maha Esa (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Poerdarminta, 1987:702).

⁷⁹ Lebih luas lagi Pancasila difungsikan dan berperan: (1). Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu berperan dalam memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. (2). Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu berupa sikap, tingkah laku dan perbuatannya yang senantiasa selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara bulat dan utuh. (3). Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. (4). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, berarti semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber pada Pancasila. (5). Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila harus kita bela untuk selama-lamanya. (6). Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, memang telah terbukti ampuh untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Sampai di sini dapat diketahui bahwa pemikiran asas pembangunan Indonesia yang dijabarkan dari Pancasila itu diambil dari berbagai pemikiran bangsa yang Bhineka tunggal Ika, di mana P4 itu awalnya dirintis oleh Tim Sebelas,⁸⁰ untuk menghimpun, menyaring dan menuntaskan bahan yang disusun oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Dapat dipahami di antara tim ini tidak ada seorangpun pakar Muslim Indonesia yang ikut dalam penyusunan P-4 ini, padahal masa itu banyak pakar atau intelektual muslim yang berwawasan Internasional, sehingga pemikiran pembangunan ke arah Islam kurang mendapat perhatian. Walaupun demikian pada hakikatnya Pancasila itu sudah merupakan semangat keislaman yang diawali dengan semangat berketuhanan (tauhid dan ubudiyah), kemanusiaan (muamalat), persaudaraan (ukhuwah), musyawarah dan mufakat serta kesejahteraan.

Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional,⁸¹ yaitu hukum dasar tertulis dan merupakan sumber hukum, di mana setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau putusan pemerintah bahkan juga setiap tindakan kebijaksanaan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Republik Indonesia (BP-7: 84). Dengan demikian maka, UUD 45 mengikat pemerintah, mengikat semua lembaga negara, lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada termasuk setiap penduduk yang tinggal di wilayah negara Indonesia, sehingga UUD 1945 berisi norma, aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan di Indonesia mestilah mengacu kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar.

(7). Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 juga memuat cita-cita dan tujuan Nasional. (8). Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, artinya semua organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan wajib mencantumkan asas ini dalam anggaran dasar masing-masing organisasi tersebut. (9). Pancasila sebagai moral pembangunan di mana nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam Pancasila dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam evaluasinya. (10). Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila. (BP 7-Pusat, 1993: 15-16).

⁸⁰ Tim Sebelas terdiri dari berbagai ahli terutama dari pihak TNI, Kehakiman, teknokrat yaitu: Sudharmono SH (ketua merangkap anggota), Dr. J.B. Soemarlín (wakil ketua merangkap anggota), anggota-anggota Letjen TNI H.M. Rachmat Kartakusumah, Letjen TNI Machmoed Soebarkah, Letjen TNI Daryatmo, Letjen TNI Ali Moertopo, Prof. Drs. A. Majid Ibrahim, Kartijo, Ismail Saleh SH, Drs. Moerdiono. Semua tim ini adalah pemikir militer, hukum dan politisi.

⁸¹ Undang-Undang Dasar 1945 berisi pembukaan, batang tubuh terdiri dari 17 bab, 37 pasal dan aturan tambahan 4 pasal, aturan peralihan 2 ayat (BP7 pusat, UUD, P4 dan GBHN (1993:1-9)).

Ketiga, Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai landasan operasional,⁸² landasan ini menurut ahli tata negara, merupakan acuan pembangunan Indonesia bagi meraih tujuan dan cita-cita Nasional (M. Solly Lubis, 1988:2). Adapun cita-cita Nasional seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2, berbunyi: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, adil dan makmur” (BP7 1993:1). Garis-Garis Besar Haluan Negara pada hakikatnya merupakan “kehendak rakyat Indonesia”. Ia ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat yang telah menang dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Merekalah yang menetapkan arah Pembangunan Nasional dengan musyawarah di lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Demikian pula dengan pembangunan daerah harus bersesuaian dengan tujuan pembangunan Nasional tetapi harus mendapat pengesahan daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten. Program pembangunan daerah ini pula harus sejalan dengan cita-cita kemerdekaan RI, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, aman dan makmur. Tujuan pembangunan Indonesia juga mesti selaras dengan cita-cita Nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan diredhai oleh Allah swt.

Oleh sebab itu, pembangunan daerah mesti sesuai dengan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang secara efektif dilaksanakan di awal Orde Baru.⁸³ Ketika hasil pemilihan umum tahun 1971, terpilihlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang salah satu tugasnya ialah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973⁸⁴ yang memuat pola Pembangunan Nasional jangka panjang pertama dan pola umum pembangunan lima tahun kedua. GBHN 1993 juga tetap menggunakan pola yang sama.

⁸² Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksimal untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang diinginkan baik dalam jangka sedang lima tahun maupun dalam jangka 25 tahun, GBHN disusun dengan Pancasila sebagai landasan idiel dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, ketetapan-ketetapan MPR, Republik Indonesia (1993:15-16).

⁸³ Sebelum Orde Baru priode 18 Agustus 1945 – Desember 1949, belum menghasilkan GBHN. Priode 1959, 1966 berdasarkan penetapan Presiden nomor 2/1959, Presiden membentuk MPRS, maka telah ditetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Bahkan di era ini dipisahkan GBHN politik dan GBHN pembangunan, Priode 1966 (awal Orde Baru) hingga menjelang sidang umum MPRS tahun 1968 tidak berhasil menetapkan GBHN, dan akhirnya MPR menetapkan salah satu tugas kabinet pembangunan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun (Ketetapan MPR. 1993:2-8).

⁸⁴ Tugas ini berdasarkan amanat UUD 1945. Bab II pasal 3 yang berbunyi: “Majlis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara” (Ketetapan MPR,1993:2).

Adapun pola pembangunan Nasional lima tahun ke enam (GBHN 1993) ditetapkan 9 asas yaitu: "Pertama, asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, asas manfaat. Ketiga, asas demokrasi Pancasila. Keempat, asas adil dan merata (e) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan (f) Asas hukum. Kelima, asas kemandirian. Keenam, asas kejujuran. Ketujuh, asas ilmu pengetahuan dan teknologi (GBHN, 1993:180-181). Maka seluruh sektor pembangunan di Indonesia ini harus mengacu kepada asas-asas yang telah disebutkan di atas. Lebih-lebih lagi dalam GBHN tahun 1993 ini telah menambah modal dasar pembangunan yang dapat dijadikan kekuatan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Kedua, jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, wilayah yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa. Keempat, kekayaan alam yang beraneka ragam yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara. Kelima, penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif. Keenam, rohaniyah dan mental. Ketujuh, budaya bangsa Indonesia yang dinamis. Kedelapan, potensi dan kekuatan efektif bangsa. Kesembilan, Angkatan bersenjata Republik Indonesia (GBHN,1993:182-183).

Keempat, Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Propernas), ini dibuat di era reformasi, karena istilah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak populer lagi sehingga diganti menjadi Propernas berdasarkan hasil ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketetapan-ketetapan itu diantaranya adalah ketetapan Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketetapan ini menyangkut berbagai masalah bangsa di antaranya nilai-nilai agama dan budaya tidak dijadikan sumber etika dalam pembangunan bangsa dan Negara. Akibatnya terdapat krisis akhlak dan moral seperti ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (TAP MPR, 2003:77).

Untuk memperbaiki keadaan tersebut diperlukan arahan Propernas yang menghendaki wujudnya nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Arah dasar tersebut menghendaki agar nilai-nilai agama dan budaya bangsa dijadikan sebagai sumber etika pembangunan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka memperkuat akhlak penyelenggara negara dan masyarakat (TAP MPR, 2003:79-80).

Selain itu, terdapat ketetapan MPR tentang visi Indonesia sebagai gambaran menyeluruh dari keinginan rakyat Indonesia mendapat keutamaan dalam pembangunan Nasional. Visi Indonesia 2020 ialah, wujudnya masyarakat Indonesia yang beragama, manusiawi, berpadu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara (TAP

MPR, 2003:130).⁸⁵ Visi tersebut sangatlah mulia karena cita-cita Indonesia 2020 akan membangun negeri ini meraih kemakmuran, kejayaan dan kesejahteraan. Untuk memberhasilkan visi tersebut, MPR telah mengarahkan semua penyelenggara negara agar berpedoman kepada *visi* Indonesia 2020 untuk menetapkan kebijaksanaan program pembangunan kehidupan bangsa dan negara (TAP.MPR, 2003:133).

Untuk saat ini di daerah setiap awal tahun melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSYREMBANG) di mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) masing-masing Kabupaten Kota menyipakan konsep perencanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD masing-masing. Konsep perencanaan ini dimusyawarahkan bersama oleh masing-masing dinas dengan mengundang para ahli baik praktisi, Perguruan Tinggi dan tokoh masyarakat. Hasil musrembang ini akan direalisasikan dalam membangun daerah. Sekali lagi paradigma ini tentu tetap mengacu kepada asas pembangunan Indonesia, sungguhpun melibatkan para ustaz, ulama atau cendikawam muslim, tetap saja belum mengacu kepada pemikiran yang tawhidik.

ARAH BARU PEMIKIRAN PEMBANGUNAN ISLAM INDONESIA

Seperti diketahui bahwa pemikiran pembangunan bernuansa Islam di Indonesia kurang berkembang, karena sejak pemerintah masa Orde Lama lebih menekankan pembangunan bernuansa nasionalis. Sementara masa Orde Baru beberapa priode juga kurang responsif terhadap pemikiran pembangunan bernuansa Islam, hal ini dimungkinkan karena para intelektual muslim kurang dekat dengan kekuasaan masa itu, bahkan orang-orang meliterlah yang berkuasa dan memberikan kontribusi besar untuk merancang dan pelaksana pembangunan di Indonesia, sampai-sampai seorang kepala desa, camat, bupati dan gubernur hampir diisi oleh meliter. Tetapi kemudian sejak BJ Habibi masuk dalam Kabinet Pembangunan Indonensia mulai muncul harapan baru kekuasaan berdampingan dengan Islam, apalagi lahirnya Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh BJ Habibi sendiri. Sejak masa itu banyak para intelektual muslim masuk dalam Kabinet Pembangunan, sejak masa itu hubungan Pemerintahan Soeharto semakin mesra dengan para cendikiawan muslim. Sekurang-kurangnya ada beberapa perkembangan kearah baru pemikiran pembangunan yang bernuansa Islam, arah baru itu ialah:

⁸⁵ Cita-cita ini pun sebenarnya merupakan inspirasi berasaskan amanat Undang-Undang Dasar RI, yang berbunyi: "Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur" (Pembukaan UUD 1945).

Pertama, aspek politik, berupa penerimaan secara penuh Pancasila sebagai dasar negara di mana pada masa Orde Lama muncul berbagai gejolak politik akibat penyelewengan total terhadap ideologi negara Pancasila sebagai konsensus nasional yang telah dirumuskan oleh bangsa sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pertentangan ideologi menyeret bangsa Indonesia kepada pertarungan yang mengakibatkan perpecahan. Akibat dari perpecahan, tidak ada kesempatan untuk membangun sehingga pembangunan ekonomi, pendidikan dan keamanan terbengkalai. Bagi umat Islam munculnya gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) seperti di Aceh oleh Tengku Muhammad Daud Beureuh, sedangkan di Sulawesi dipimpin oleh Kahar Muzakar bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Akibat gerakan ini menyebabkan umat Islam terpojok serta partai politik Islam dituduh oleh lawan politiknya sebagai partai anti Pancasila dan anti pembangunan. Tetapi setelah menyadari situasi tersebut maka umat Islam kembali menerima Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai satu-satunya azas dalam bernegara, berbangsa dan bertanah air. Menurut B. J. Boland (1985:90), penerimaan umat Islam bahwa Pancasila adalah ideologi resmi negara yang isinya lima dasar yaitu Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nasionalisme, Demokrasi, Keadilan sosial dan humanitis. Dihubungkan dengan pendekatan konstitusional 1950,⁸⁶ antara para pendukung negara berdasarkan Islam atau negara di mana hukum-hukum sesuai dengan atau tidak menantang Al-Quran dan Hadis.

Kedua, aspek hukum Islam, telah lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama (UU-PA), sebagai amanat pembangunan. Perjuangan umat Islam untuk melahirkan UU-PA sebenarnya telah memakan waktu yang cukup panjang, meskipun keberadaan peradilan agama sudah diperkuat oleh UU No 14 tahun 1970 dan UU No 1 tahun 1974 dan hal ini bukanlah berarti karena umat Islam adalah mayoritas di Republik ini. Sebab telah lama disepakati oleh bangsa Indonesia bahwa ukuran mayoritas dan minoritas bukan merupakan ukuran mutlak. Tetapi keberadaan Peradilan Agama diperlukan guna memenuhi keperluan umat Islam di Indonesia dan keberadaannya tidak akan merugikan umat non muslim. Oleh sebab itu, hanya mengatur dan menerapkan hukum perkawinan bagi umat Islam yang sesuai dengan keindonesiaan, sehingga UU ini masih merupakan bagian dari wawasan pembangunan hukum nasional.

Menurut Ismail Saleh, hukum nasional kita harus memperhatikan wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, wawasan Bhineka Tunggal Ika dan membangun sistem hukum nasional modern yang merupakan *system of law*.⁸⁷ Apabila dikaitkan dengan pernyataan Ismail Saleh tersebut, maka UU-PA lahir secara wajar sesuai dengan kondisi keindonesiaan dan terjamin dalam UUD 1945 pada pasal 29. Terjaminnya dalam UUD 1945 bukan

⁸⁶ Salah satu isinya menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya.

⁸⁷ Pernyataan ini dikutip oleh Tohap Simanungkalit, Bagaimana Pancasila Menjaring Bahan-Bahan Hukum Nasional, *Kompas*, 1 Juli 1989.

berarti melepaskan begitu saja terhadap kehidupan umat beragama akan tetapi memberikan ruang terhadap pembinaan kehidupan umat beragama baik perangkat hukum maupun prosedur pengembangan agama.

Ketiga, dalam bidang ekonomi, telah tumbuh dan berkembangnya Bank Perkereditan Rakyat, Bank Muamalah dan Bank Syariah. Tumbuhnya bank-bank Islam ini telah mencairnya kendala berupa lemahnya keuangan umat Islam Indonesia, karena tanpa keuangan maka kegiatan umat Islam akan kurang terealisasi. Untuk memajukan umat Islam Indonesia salah satu usaha ialah dengan menggiatkan aktivitas ekonomi, dan salah satu pilarnya ialah memanfaatkan jasa bank dan koperasi Islam. Meskipun kemampuan umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi diragukan, karena menurut Marzuki Yatim seperti yang dikutip oleh Muhammad Hasan Kamal (1987:76), untuk mendirikan perusahaan-perusahaan Islam dan bank-bank Islam yang terpercaya tetap tidak lebih daripada suatu ekspresi dari idealisme belaka. Sebahagian masalahnya terletak pada fakta bahwa kecendekiawanan Islam baik di Indonesia maupun di Timur Tengah belum lagi merembesi dinding pemikiran dan sikap dari orang-orang yang terlibat dalam perancangan ekonomi dan perbankan.

Keraguan umat Islam terhadap penggunaan jasa bank sebagai punggung perekonomian umat Islam sebenarnya disebabkan karena perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya untuk menggunakan jasa bank. Di Indonesia juga terjadi perbedaan pandangan tentang jasa bank tersebut, menurut Muhammad Kamal Hasan (1987:79), di antaranya golongan NU cenderung melarang perusahaan bisnis atau meminjam uang dari bank dan bagi Muhammadiyah merasa bahwa sebuah bank hanya dapat meminta ongkos administrasi kepada deposito, pinjaman, pemindahan uang atau menyimpan barang demi keselamatan. Ada lagi pendapat lain bahwa sistem perbankan modern diperbolehkan dengan syarat bunganya tidak dipergunakan untuk sektor konsumen, yaitu bunga hendaknya tidak diambil dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang memerlukan uang untuk kelangsungan hidup. Bunga hendaknya hanya diambil dari pinjaman yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan produksi. Mengenai larangan riba dalam Al-Quran merupakan larangan yang mengacu kepada bentuk-bentuk suku bunga yang ribawi melebihi biasa dan bersifat eksploitatif. Berangkat dari keadaan itulah muncul gagasan untuk mendirikan bank-bank Islam tanpa bunga berdasarkan konsep bagi keuntungan (*syirkah mudharabah*).⁸⁸ Masa kini pemikiran ekonomi Islam sudah berkembang menuju bisnis Islam seperti Ahad Net yang menyediakan barang dan jasa yang menggunakan

⁸⁸ *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam satu perkongsian atau proyek di mana pihak pertama memberikan dana (*sahibul mal*) dan pihak kedua berfungsi sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai dengan *nisbah* (rasio) yang disepakati bersama dan kerugian akan ditanggung penyandang dana selama kerugian itu terjadi akibat risiko bisnis biasa. Namun, jika kerugian terjadi karena kecurangan atau kelalaian pengelola usaha maka si pengelola berkewajiban menanggung kerugian. Lihat Muhammad Syafii Antonio (2011:58).

syariat Islam, sehingga dapat menciptakan rasa aman baik dari hasil produksi yang dijamin halal serta menggunakan akhlak al-karimah sebagai bentuk pelayanan yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W.

Keempat, bidang pendidikan Islam telah cukup berkembang munculnya pesantren modern seperti Gontor Ponorogo, Al-Jaitun dan banyak lagi pesantren yang sudah menghasilkan alumni sangat berkualitas yang memadukan antara ilmu Islam dengan sains modern. Sekarang ini giliran IAIN berubah menjadi universitas Islam dengan menambah fakultas baru seperti fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sains dan Teknologi Islam, Sosial dan Politik Islam, Kedokteran Islam dan Kelautan Islam. Perubahan dari intitut menjadi universitas karena sejak masa Rasulullah s.a.w ilmu itu satu yang datang dari Allah swt lewat wahyu, maka sebuah keniscayaan bahwa ilmu menjadi sebatang pohon memiliki pokok dan cabang yang menyatu atau disebut dengan "*Syajarat al-Ulum*" yang menurut Mulyadi Kartanegara, bahwa ilmu berakar kebenaran Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, kemudian batangnya terdiri dari: (1). Ilmu al-Quran (2). Ilmu Akliah (3). Ilmu Teoritis (4). Ilmu Praktis. Seterusnya ilmu-ilmu cabang, pertama, meliputi Tasawuf, Kalam, Fiqh, Hadis dan Tafsir. Cabang kedua, Mantiq, Fisika, Matematika, Metafisika, cabang lainnya adalah Politik, Ekonomi dan Akhlak.⁸⁹ Demikian juga Amin Abdullah menyebutkan bahwa transformasi IAIN ke UIN sebagai usaha integrasi ilmu yang menurutnya ada lima lapis,⁹⁰ Lapis kelimanya ialah didasari oleh Al-Quran & Sunnah, dilingkar keduanya adalah metodologi dan pendekatan keilmuan seperti Kalam, Falsafah, Tasawuf, Hadis, Tarikh, Fiqh, Tafsir, Lughah. Lingkar tiganya ialah, Arceologi, Philologi, Humaneutics, Proses Chemistry Biologi, Etica, Fhenomenology, Phsikology, Antropologi dan Sosilologi. Lingkar berikutnya antara lain International Law, Religius Fluralism, Global Economic, Human Rights, Politics/ Civil Society, Culture Studies, Gender Issues dan Enveronimental Issues. Begitulah sesungguhnya integrasi antara ilmu Islam dengan sains modern. Ide integrasi ini sudah awal digulirkan, Muhammad Abduh seperti dikutip oleh Harun Nasution (1982:65), mengatakan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan modern yang banyak berdasar pada hukum alam (*natural laws= Sunnatullah*) tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Hukum alam adalah ciptaan Tuhan dan wahyu juga berasal dari Tuhan, maka ilmu pengetahuan modern yang berdasar pada hukum alam dan Islam sebenarnya yang berdasar pada wahyu, tidak boleh dan tak mungkin

⁸⁹ Materi ini disampaikan oleh Mulyadi Kertanegara "Epistimologi Islam dan Desain Kurikulum" pada acara *Workshop* Penyusunan Pengembangan Akademik dalam rangka Tranforamsi 4 IAIN menjadi UIN di Brastagi Sumatera Utara, Tgl. 12-15 Nopember 2012.

⁹⁰ Lapis pertama, Quran dan Sunnah sebagai ulum al-Din, Natural Seiences dan Technology dan Humanities & Social Seiences). Lapis pertama & kedua, Quran & Sunnah serta ilmu-ilmu Metodologi dan pendekatan. Lapisan Kedua dan ketiga, Quran & Sunnah serta ilmu-ilmu Metodologi seperti Kalam, Falsafah, Tasawuf, Hadis, Tarikh, Fiqh, Tafsir dan Lughah. Lapisan Keempat, setelah ilmu metodologi berkembang seperti, Antropoloi, Sosiologi, Philologi, Geometry, Falsafah, Antropologi, Philologi, Arceologi, dll. Amin Abdullah "*Peta Keilmuan Ilmu-Ilmu Keislaman Masa Depan*, UIN di Brastagi Sumatera Utara, Tgl. 12-15 Nopember 2012.

bertentangan. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan ilmu pengetahuan modern mesti sesuai dengan Islam. Tujuan integrasi keilmuan ini diharapkan generasi muda Islam Indonesia akan menjadi ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama.

Kelima, dalam bidang budaya telah pernah ada festival Istiqlal yang memamerkan karya seni dan budaya Islam nusantara baik dengan cara pameran dengan membuat ruangan yang isinya berupa keratifikas atau pekerjaan tangan umat Islam dari berbagai daerah sehingga karya itu dapat dilihat oleh para pengunjung. Bahkan lebih dari itu dipamerkan hasil pertanian dan produksi bisnis umat Islam seperti pakaian muslim, baju adat istiadat dan alat karya seni kalsik. Juga memamerkan buku ilmiah yang ditulis oleh para ulama atau cendekiawan muslim, buku-buku ini ada yang menulis tentang ilmu agama, ilmu pengetahuan modern dan kitab-kitab *Al-Quran*, Hadis serta teknologi informasi yang Islami. Ada juga pentas seni yang ditampilkan seperti nasyid, qasyidah, rebana, musik Islam, puisi, drama Islam. Di Medan ada Ramadhan Fair yang telah dirintis awalnya oleh Wali Kota Medan Abdillah di Masjid Raya Al-Makmun bertujuan untuk menyemarakkan bulan suci Ramadhan. Acara ini menampilkan buka bersama, taushiyah, diskusi, pameran tentang hasil karya seni Islam, serta menjual kuliner yang dapat menambah penghasilan pedagang kecil di kawasan teresbut.

Selain aktivitas budaya Islam, sudah cukup lama dan dibanggakan adalah kegiatan Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota Tingkat provinsi dan nasional, baik dilakukan oleh pemerintah maupun dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Negara, Pertamina, BUMN dan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta. Pokoknya MTQ jadi bahagian pembagunan sumber daya manusia, terutama bagi umat Islam sehingga nilai-nilai *Al-Quran* dapat dibumikan dalam kehidupan. Kegiatan ini selalu berkembang sesuai dengan keadaan, yang dahulunya hanya lebih kepada bacaan saja tetapi kini sudah sangat berekembang kepada beberapa cabang seperti cabang, tilawatil Quran, syarhil Quran, khatil Quran, tahfizul Quran. Para pemenangnya terus dimusyabaqahkan kepada peringkat yang tertinggi sampai nasional. Menurut Irman Gusman⁹¹ pelaksanaan MTQ untuk tingkat nasional sudah terlaksana 24 kali, sedangkan MTQ untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana 33 kali, sedangkan untuk tingkat Kota Medan sudah terlaksana 46 kali. Seandainya dari setiap pelaksanaan MTQ ini dapat memberikan sumbangan berupa perbaikan karakter bangsa melalui peningkatan iman dan takwa, niscaya akan terjadi perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun praktek kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Karena kegiatan MTQ merupakan syiar Islam yang sangat efektif untuk menggugah

⁹¹ Ketua Dewan Perwakilan Daerah yang membuka kegiatan MTQ ke 46 Kota Medan, Selasa, 19 Maret 2013 di Lapangan Cadika Paramuka Medan Johor, *Waspada*, Rabu, 20 Maret 2013.

umat Islam Indonesia untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

ISLAMISASI PEMBANGUNAN ISLAM BERBASIS TAWHIDIK

1. *Tasawur* Pemikiran Pembangunan Tawhidik

Berangkat dari paparan di atas kelihatan bahwa pemikiran pembangunan Islam itu belum utuh dan masih berintegrasi dalam pemikiran pembangunan nasional. Hal, itu dapat dipahami karena Indonesia bukan negara Islam sehingga semua konsep pembangunan itu mesti mengacu kepada sumber hukum pembangunan itu sendiri seperti yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi Indonesia adalah negeri mayoritas umat Muslim yang semestinya menunjukkan dan mengajukan konsep pemikiran pembangunan Islam kepada pemerintah. Setidak-tidaknya adalah konsep pemikiran pembangunan bernuansa Islam itu nyata dan dapat diaplikasikan dalam pembangunan negara. Dalam tataran pemikiran pembangunan Islam yang sudah kongkrit dan sistematis yang penulis ketahui adalah prinsip pembangunan Islam karya Prof. Muhammad Syukri Salleh,⁹² yang salah satunya ialah *Tasawur* Islam sebagai acuan pembangunan Islam. Adapun yang dimaksud dengan *tasawwur* Islam menurut Muhammad Syukri Salleh (2003:21) ialah gambaran bentuk Islam yang hakiki yang menjelaskan secara keseluruhan prinsip-prinsip asas Islam yang benar dan lengkap sehingga bersebat di dalam diri orang yang memahaminya. *Tasawwur* Islam ini berakar dari empat sumber utama yakni al-Quran *al-Hadith*, *Ijma'* dan *Qiyas* ulama. Jika dirujuk kepada Al-Quran maka *tasawur* Islam itu ialah pembangunan kehidupan umat Islam secara menyeluruh dan *kaffah*, firman Allah s.w.t. dalam surah al-Baqarah: 208: Maknanya: "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*" (Q.S, 2:208).

Mengamalkan Islam secara *kaffah* sesungguhnya memahami lebih dahulu konsep Islam *kaffah* itu sendiri. Dalam ilmu fardhu 'ain terdapat ilmu ketuhanan (Tauhid/Aqidah), peraturan hidup (Fiqh) baik pelaksanaan ibadah, muamalah, munakahat atau jinayah, dan hal-hal untuk mendekatkan diri kepada Allah (Tasauif). Tauhid⁹³ dalam kehidupan

⁹² Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam itu ialah: (1). *Tasawur* Islam sebagai acuan pembangunan (2). Manusia sebagai pelaku pembangunan (3). Alam roh, alam dunia dan alam akhirat sebagai skala waktu pembangunan (4). Fardhu ain sebagai kerangka pembangunan (5). Ibadah sebagai kaedah pembangunan (6). Sumber alam sebagai modal pembangunan (7) *Mardhatillah* sebagai matlamat pembangunan.

⁹³ Menurut Yusuf al-Qardawy (1997:48), tauhid itu ada dua macam, yaitu, *Tauhid Rububiyah* dan *Tauhid Uluhiyah*. Adapun yang dimaksud dengan tauhid *Rububiyah* ialah meyakini bahwa tidak ada *Rabb* (Tuhan) selain Allah, tidak ada khaliq, tidak ada pemberi rezeki melainkan Allah semata. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran Surah az-Zumar (39):38 dan Surah Yunus (10):31. Adapun yang dimaksud dengan

manusia bukan sekedar menghiasi kehidupan semata-mata. Tawhid merupakan anasir dari eksistensi manusia, rahasia keabadian manusia dan inti dari keberadaan manusia di dunia ini dan tanpa itu, hidup manusia tidak bermakna dan eksistensi manusia adalah naif (Yusuf Al-Qardawy, 1997:49). Melalui tawhid, Islam berupaya untuk membersihkan agama dari semua keraguan menyangkut transendensi dan keesaan Tuhan.

Dengan demikian, menurut Muhammad Syukri Salleh (2003:21), asas *tasawwur* Islam itu ialah: pertama, bahwa Allah s.w.t. adalah pencipta, kedua: manusia adalah makhluk, dan ketiga ialah bahwa sumber alam juga adalah makhluk yang sama-sama tunduk dan patuh kepada Allah s.w.t. Jadi prinsip ini adalah dapat mencapai dua tujuan sekaligus yaitu pengakuan akan Tuhan sebagai satu-satunya Pencipta alam semesta dan penyamaan semua manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi dengan sifat-sifat kemakhlukan manusiawi yang sama dengan status alam semesta. Dengan demikian maka *tasawur* Islam berakar daripada tauhid yang intinya terkandung dalam kalimat *la ilaha illa Allah* (kalimat *tayyibat*). Dari kalimat inilah seorang Muslim membangun ibadah yang kukuh, akhlak yang mulia serta dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan-aturan Allah s.w.t.

Seorang yang memiliki aqidah yang kuat dapat melahirkan sikap dan amal shaleh. Pada dasarnya perpaduan antara iman dan amal shaleh sangat dekat, iman tanpa amal shaleh ia akan merugi dan hidupnya hampa. Dalam al-Quran Allah memberikan sebuah contoh yang sangat indah tentang hubungan iman, amal shaleh dan akhlak sebagai buah iman. Firman Allah Surah Ibrahim:24-25 yang maknanya: "*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat*" (Q:S,14:24-25).

Berdasarkan ayat tersebut, maka manifestasi tawhid sebagai deklarasi kehidupan dari sikap budaya, sikap mental dan kehidupan untuk menyebarkan amal shaleh (amal kebajikan) dalam segala kesempatan. Sehingga, ciri orang Islam adalah orang yang bertawhid, kapan dan di mana saja dia hidup harus menegakkan amal shaleh. Jika seseorang di daerahnya sendiri dia merasa perlu untuk menegakkan amal soleh, tetapi di tempat yang lain tidak, namanya belum memahami makna tawhid.

Tasawur Islam yang telah disebutkan di atas itulah jika diintegrasikan dengan arah pemikiran pembagunan Islam, apalagi dipolakan dengan tujuh prinsip pembangunan Islam, sehingga menjadi *blue print* pembangunan

tauhid uluhiyah, ialah tidak menyembah, tidak memohon pertolongan, tidak berdoa, tidak takut dan tidak berharap kecuali kepada Allah semata.

Indonesia, tentu sangat indah, baik dan benar, serta dapat dijamin hasil pembangunan ini akan mewujudkan *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, serta memperoleh barakah dan kemakmuran.

2. Islamisasi Pemikiran Pembangunan Tawhidik di Indonesia

Untuk memudahkan poses Islamisasi pemikiran pembangunan tawhidik ini kiranya perlu membuat buku pedoman sebagai Garis-garis Besar Pemikiran Pembangunan Tawhidik (GBPPT) yang isinya tentu prinsip pembangunan yang Islami yang secara umum telah dikemukakan di atas. Lebih-lebih lagi pembangunan Indonesia ini diisi dengan nilai-nilai keislaman baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, lingkungan, keamanan, sains dan teknologi serta aspek-aspek pembangunan lainnya. Kemudian isi buku ini dilakukan sosialisasi dengan enam jalur.⁹⁴ Jalur-jalur tersebut adalah:

- a. Jalur Pendidikan. Pendidikan merupakan proses transformasi keilmuan kepada manusia, baik pendidikan formal (sekolah) maupun non formal (pendidikan luar sekolah), sehingga jalur ini sungguh efektif bagi menyampaikan pemikiran pembangunan berbasis tawhid. Lebih-lebih kini sudah dikembangkan tentang paradigma manajemen pendidikan berbasis tawhid, karena tawhid adalah prinsip pengetahuan, dimana ajaran tawhid menjadi dasar bagi semua ilmu pengetahuan, artinya setiap individu seorang muslim mengawali pengetahuannya dengan mengesakan Allah swt. Menurut Al-Faruqi (1996:10), sebagai prinsip pengetahuan tawhid adalah pengakuan bahwa Allah sebagai kebenaran (*al-haq*) itu ada dan bahwa Dia itu Esa. Pernyataan ini menunjukkan semua kebenaran datang dari Allah, dan sesuatu yang datang dari Allah akan dapat diperoleh, dipelajari dan diuji kebenarannya oleh manusia. Ilmu yang asas ini sudah disampaikan pada generasi muslim yang sangat muda, karena usia ini masih bersih pikirannya dari ide-ide yang salah dan meyesatkan. Secara sederhana dimulai dari lembaga pendidikan Islam saja seperti madrasah, pesantren baik klasik maupun modern (tsanawiyah maupun aliyah). Pada tingkat ini sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dengan mata pelajaran Pemikiran Pembangunan Tawhid (PPT).

Seterusnya di tingkat perguruan tinggi seperti IAIN dan UIN didirikan sebuah program studi "Manajemen Pembangunan Islam (MPI)" yang salah satu kajiannya adalah Pemikiran Pembangunan Tawhid. Di Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara telah lama ada mata kuliah"

⁹⁴ Eman jalur ini dipinjam dari langkah-langkah menyebarluaskan P4, hal ini sangat efektif dan memudahkan penyebaran sebuah gagasan kepada masyarakat. Masa itu keenam jalur ini dipandang sebagai usaha yang sangat berhasil mensosialisasikan P4 ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Baca BP-7 Pusat, 193: 61-63,

Pembangunan Islam,”⁹⁵ sedang diupayakan menjadi prodi baru di fakultas ini. Sudah semestinya mata kuliah PPT ini wajib di ajarkan disemua prodi pada Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun swasta. Artinya semua mahasiswa di perguruan tinggi Islam wajib menerima mata kuliah PPT ini, sehingga menjadi mata kuliah dasar umum bagi semua prodi. Lain halnya dengan Prodi MPI di Fakultas Ushuluddin adalah lebih sepsial yang secara mendalam di pelajari sehingga diharapkan lahir sarjana S1, S2 dan S3 dalam bidang pemikiran pembangunan Islam berbasis tawhid. Para alumni ini diharapkan menjadi agen dan penyebar PPT di tengah-tengah masyarakat sehingga ide ini membahana dalam setiap lapisan umat, selanjutnya pemerintah akan mengadopsinya menjadi bahagian dalam pembangunan Indonesia.

- b. Jalur Keluarga. Jalur pendidikan keluarga juga dipandang penting, karena jalur ini sebagai pendidikan pendahuluan dari sekolah, oleh sebab itu pemikiran pembangunan tawhid ini sudah dimulai dari pendidikan keluarga. Bahkan paradigma baru yang mesti kita mulai dari pra berumah tangga, seorang remaja muslim sebelum menikah semestinya dilakukan kursus pernikahan yang salah satu meterinya adalah pembangunan berbasis tawhid. Menurut Ahmad Tafsir (2000:5), penanaman iman harus dimulai sejak dini sekali yaitu sejak memilih jodoh, Nabi bersabda “Pilih-pilihlah tempat penyemaian benih”. (HR. Ibnu Majah), maksudnya hati-hatilah memilih jodoh karena sifat ayah dan atau sifat ibu dapat menurun kepada anaknya. Jika ayah dan ibunya nakal, sifat itu kemungkinan besar akan menurun kepada anaknya, jika sifat buruk itu menurun, anak itu akan sulit dididik menjadi orang beriman. Sekiranya para remaja dikursus pembangunan berbasis tawhid sebelum menikah maka sudah dapat dipastikan akan memberi peluang kepada mendidik anaknya menjadi anak atau generasi bertawhid.

Selain itu, pedoman pembangunan tawhid ini secara sederhana dibuat buku saku yang diberikan kepada setiap rumah tangga untuk dijadikan bahan bacaan keluarga muslim. Dengan sendirinya akan menjadi bahagian dan sikap dari setiap para anggota keluarga tersebut. Sikap sorang ayah dan ibu yang berperilaku tawhid dalam rumah tangga akan menjadi lebih mudah ditiru anggota keluarga, Ahmad Tafsir (2000:6) menyebutkan Pendidikan keimanan itu pada dasarnya dilakukan oleh orang tuanya, caranya melau peneladanan dan pembiasaan. Peneladanan dan pembiasaan inilah yang tidak mungkin dilakukan di sekolah, pesantren atau oleh guru agama yang diundang ke rumah, hanya kedua orang tuanya itulah yang dapat melakukan hal itu. Sekiranya ayah dan ibu memiliki wawasan, keteladanan dan pembiasaan berfikir pembangun tawhid inilah yang akan mendidik genarasi tawhid di dalam rumah tangga.

⁹⁵ Mata kuliah ini awalnya adalah “Teologi Pembangunan” yang diajarkan sejak tahun 1996 dan kini mata kuliah itu ditukar menjadi Developmentalisme Dalam Islam dan diganti dengan Pembangunan Islam, dimana penulis sendiri adalah sebagai tenaga pengajarnya.

- c. Jalur Lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan generasi muda sangat besar, oleh karena itu, lingkungan masyarakat perlu ditumbuhkan pendidikan berbasis tawhid. Kendatipun sulit membuat pola sosialisasi kepada lapisan masyarakat, tetapi jika para ulama, muballigh dan cendikiawan bersedia melakukannya lewat tabligh, dakwah, taushiyah di berbagai majlis talim baik di Mesjid, Mushalla dan pengajian-pengajian umum, tentu hal ini akan terlaksana. Oleh sebab itu, buku pedoman tentang pemikiran pembangunan tawhid itu mestilah tersedia, sehingga para ahli ini dapat menyampaikannya ke tengah-tengah masyarakat. Jika diperlukan para alumni atau pihak prodi pembagunan Islam di Perguruan Tinggi Islam dapat menciptakan Biro Konsultasi Pemikiran Pembagunan Tawhid (BKPPPT) di setiap desa. Biro ini mempersiapkan (1) Buku saku atau brosur tentang pembagunan tawhid. (2). Ruangan konsultasi yang memadai (3). Tenaga ahli pembangunan tawhid baik sarjana S1, S2 dan S3. Pelayanan berdasarkan tingkat masyarakat yang datang berkonsultasi, jika pertanyaan yang sederhana akan dijawab oleh tenaga konsultasi pada peringkat sarjana, akan tetapi jika berkaitan dengan analisis dan problematika akan diselesaikan oleh para sarjana magister atau doktor. (4). Peralatan baik internet, TV dan alat berbasis teknologi informasi dan (5). Keperluan adminstrsi berupa kartu konsultasi, notulen dan perlengkapan lainnya.
- d. Jalur Media Masa. Media masa sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia modern, karena media masa itu menurut T.A Lathief Rousydiy (1985:119) adalah alat komunikasi yang terdiri dari (1). Pers semua surat kabar, majalah, buku-buklu, brosyure, pamphlet, foster, foder. (2). Radio, yang memiliki siran langsung yang tidak mengenal jarak dan rintangan sehingga mempunyai daya tarik berupa musik, kata-kata dan efek suara. (3). Televisi yang merupakan perpaduan antara radio dan film. Ketiga media masa ini menurut beliau mempunyai tiga fungsi yaitu berupa alat hiburan, alat penerangan, alat pendidikan dan alat propaganada. Dengan demikian, sekiranya semua alat ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan pemikiran pembangunan tawhid sangat menguntungkan. Ada rubrik yang mengasuh konsultasi pembangunan tawhid di surat kabar, ada mimbar pembagunan tawhid.⁹⁶ Sangat lebih baik lagi sekiranya ada majalah pembagunan tawhidik sebagai alat media menyiarkan pengetahuan pembagunan tawhid, ide inipun telah dicoba dirancang di Fakultas Ushuluddin.⁹⁷ Sese kali para ahli

⁹⁶ Sukiman M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin telah memulai mensosialisasikan dalam pembinaan mental pegawai dan Dosen IAIN SU yang temanya disiplin dalam pandangan agama, yang diulas berdasarkan pendekatan tawhidik, kemudian diekspos lewat surat kabar *Waspada*, Selasa, 19 Maret 2013.

⁹⁷ Pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 lalu ada musyawarah dengan para guru besar Fakultas Ushuluddin yang membicarakan langkah-langkah pengembangan program studi di fakultas ini, salah satu yang diambil adalah mendirikan sebuah Pusat Studi Tauhid dan Pembangunan Islam (PS TPI) sebagai bahagian dari rencana membuka studi Pembangunan Islam.

pembangunan Islam ini tampil di Radio,⁹⁸ TV berupa ceramah, dialog interaktif yang bertemakan pemikiran pembagunan tawhidik. Sekiranya media masa ini dapat dipergunakan untuk menyampaikan ide pemikiran pembagunan tawhidik ini tentu akan sampai dipahami, dan disikapi serta diamalkan oleh umat Islam maka ia akan menjadi bahagian dari pembagunan Indonesia

- e. Jalur Organisasi Agama. Di Sumatera Utara terdapat beberapa organisasi agama Islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Aj-Jamiatul al-Washliyah, Al-Mahmudiyah, juga beberapa organisasi Islam yang bersifat aktivis seperti Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara (IKADI-SU), Itihadul Muballighin, dan yang lainnya. Oleh karena organisasi yang menggunakan Islam sebagai haluan dan tujuan perjuangannya maka semestinyalah pemikiran pembangunan tawhid ini menjadi penting untuk mereka ketahui. Karena pada hakikatnya tawhid sebagai inti ajaran Islam yang wajib disampaikan kepada umat termasuk anggota organisasi Islam yang didirikan itu. Kita hakkul yakin bahwa ajaran keimanan ini sudah mereka jadikan sebagai ajaran utama dari organisasi tersebut, akan tetapi diduga para ahli dalam organisasi ini belum mengintegrasikannya dengan aspek-aspek pembagunan. Sangat indah sekiranya semua organisasi Islam menggunakan dan menjadikan pemikiran pembagunan tawhidik ini sebagai arah dakwah dan aktivitas organisasi mereka, tentu akan lebih masyhur dan lambat laun akan menjadi bahagian dari pembagunan Indonesia.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: Pertama, pembangunan di Indonesia pada dasarnya mesti menggunakan asas Pancasila sebagai landasan ideal, UUD-1945 sebagai landasan konstitusional dan GBHN sebagai landasan operasional. Di masa reformasi GBHN sudah tidak dipakai maka digantikan dengan Propernas dan pola pembagunan daerah di masing-masing daerah yang dihasilkan oleh Musrembang daerah. Berdasarkan paradigma pembangunan itu, maka pembangunan tawhidik belumlah dijadikan bahagian dari pembagunan di Indonesia. Kedua, pemikiran pembagunan Islam di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang yang kini terdapat beberapa arah yaitu, dalam bidang politik telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas berbangsa, bernegara oleh umat Islam, bidang hukum Islam telah lahir UU Pengadilan Agama bagi kemaslahatan umat Islam, bidang ekonomi telah lahir bank perkereditan Rakyat Syariah (BPRS), bank Muamalat, kperasi dan

⁹⁸ IAIN SU telah memiliki Radio yang menyiarkan berbagai informasi tentang kagiatan akademik dan kajian ilmiah keislaman. Media ini akan dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan pembangunan berbasis tawhidik ini.

bisnis Islam. Pemikiran ini belumlah dirancang berdasarkan pembangunan tawhidik. Ketiga, Pemikiran pembagunan tawhidik belum dirancang secara permanen, dan setematik, oleh sebab itu sudah waktunya untuk membuat konsep (tasawwur) yang terintegratif antara tawhid (iman), ibadah, muamalah, akhlak dengan pola kehidupan umat berupa sosial ekonomi, politik, pendidikan, sains dan teknologi, kesehatan, lingkungan dan keamanan. Dengan demikian umat Islam ini dibangun secara kaffah melalui tujuh prinsip pembagunan Islam agar umat sejahtera di dunua dan akherat atas keredhaan Allah SWT. Keempat, sebagai usaha islamisasi pemikiran pembagunan tawhidik ini perlu disosialisasikan lewat jalur pendidikan (sekolah), keluarga, lingkungan, media masa dan organisasi keagamaan. Melalui jalur-jalur ini ide pembagunan tawhidik akan menyeyebar ketengah-tengah umat dan kemudian menjadi sikap dan kebiasaan umat Islam, dengan sendirinya akan menjdi bahagian dari pembangunan Indonesia.

REFERENSI

- Abi Al-Husin Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi (450 H). *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kaherah: Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1974) *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar Fikr.
- Ahmad Tafsir (2000). *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- (2005). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abu Nasir Al-Faraby (1976). *Kitab Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Abd. Karim Al-Qusyairiy (t.t). *Ar-Risalah Al-Qusyairiyah*. Kaherah: Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- B. J. Boland (1985). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Alih Bahasa Saafroedin Bahar, tp.
- BP-7 (1993), *Bahan Penataran P-4 – UUD 1945, Dan GBHN*. Jakarta: Seroja.
- Harun Nasution (1982). *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakrta: UI Press.
- Ismail Razi Al-Faruq (1988). *Tauhid*, Bandung: Pustaka.
- Yusuf Al-Qardawy (1997). *Iman wa al Hayat*. Kairo: Daar asy-Syuruq.
- M. Quraish Shihab (1992). *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- M. Solly Lubis (1988). *Sistem Nasional*. Medan: USU
- Muhammad Hasan Kamal (1987). *Muslim Intellectual Responses to New Order Modernization in Indonesia*, Alih Bahasa, Ahmadi Thaha, Jakarta: LSI.

- Muhammad Syukri Salleh (2002). *Pembangunan Berteraskan Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributions Sdn Bgd.
- Muhammad Syukri Salleh (2003). *7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam*. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd dan Pulau Pinang: Projek Pengurusan Pembangunan Islam, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.
- Muhammad Syafii Antonio (2011). *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager"*, Jd 2. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Syed Omar Syed Agil (1994). *Islam dan Pembangunan Persatuan Sains Sosial Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- T.A. Lathief Rousydie (1985). *Retorika: Teori Dan Praktik*. Medan: Rimbow.

DARI MAFIA BERKELEY KE MAFIA ISDEV: PERANAN PEMBANGUNAN INSTITUSI PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI INDONESIA

Warjio

*Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU)
Program Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Medan Area (UMA)
Medan, Indonesia
Email: warjio1974@gmail.com*

PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai satu teori perubahan sosial adalah fenomena yang luar biasa, karena sebuah gagasan dan teori begitu mendominasi dan mempengaruhi pikiran umat manusia secara global, terutama dalam belahan dunia yang disebut dengan “Dunia Ketiga” (Mansour Faqih, 2011:11). Walaupun demikian, kedudukan pembangunan sebagai teori perubahan sosial masih selalu mengalami kritikan dan kemelut (Muhammad Syukri Salleh, 2002:1). Kritik dan kemelut dalam pembangunan sebagai satu teori perubahan sosial, salah satunya terletak pada perdebatan ideologi yang terkandung di dalamnya serta peran aktor dan institusi akademik (Leonard Binder, 2011). Misalnya, dalam dua dekade terakhir ini, reformasi ekonomi berorientasi pasar menjadi kecenderungan umum tidak hanya di negara-negara kapitalis Barat, tetapi juga di negara berkembang. Hampir semua negara-negara Asia, Amerika Latin dan Eropa Timur dipimpin oleh negara dalam mengatur reformasi menuju ekonomi pasar yang lebih terbuka. Salah satu hal yang luar biasa dalam proses ini ialah telah peran tumbuhnya peran yang dimainkan oleh teknokrat. Banyak di antaranya telah lulus studi di bidang ekonomi di universitas terkenal di luar negeri. Menurut Sin Yatsui (2002), universitas-universitas terkenal dunia khususnya yang di Amerika Serikat memainkan peranan penting di dalam melahirkan teknokrat-teknokrat di negara berkembang. Mereka sebagai “pembuat kebijakan” dan mengatur ekonomi dan pembangunan dan sekaligus juga sebagai “kepanjangan tangan” dari hegemoni kekuasaan kapitalis Amerika Serikat.

Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Sin Yatsui (2002), Yevgeny Kuznetsov (2010), Aung Kyaw Phyo (?) peranan institusi pendidikan tinggi atau universitas elit di Amerika Serikat sangat besar dalam melahirkan para teknokrat ini. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kajian Sin Yatsui (2002) di negara Chile telah lahir apa yang disebut dengan “*Chicago Boys*”. *Chicago Boys* adalah para ekonom yang menjadi arsitek ekonomi dan pembangunan di Chile. Mereka disebut *Chicago Boys* karena mereka alumni dari University

of Chicago dan mendapat gelar master dan doktor⁹⁹ dalam bidang ekonomi¹⁰⁰ sebagai bagian dari perjanjian program akademik sejak tahun 1956¹⁰¹. Di Indonesia, lahir apa yang disebut dengan Mafia Berkeley. Mafia Berkeley dianggap sebagai kelompok ekonom yang berhasil menjadi arsitek ekonomi dan pembangunan sejak masa Orde Baru pimpinan Soeharto. Keberadaan Mafia Berkeley, menurut Revrisond Baswir (2006) yang dimulai sejak masa Orde Baru dan mengakar kuat hingga sekarang ini. Giri utama pemikiran Mafia Berkeley adalah dengan memberikan keleluasaan atau kebebasan pada pasar untuk bekerja tanpa campur tangan pemerintah (Ali Wardhana, 2013:23-43). Orde Baru,—menurut Presiden Soeharto dalam pidatonya di depan sidang DPR-GR pada 16 Agustus 1970, adalah “ (orde Baru) merupakan koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan disegala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya; dan di lain pihak berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa kita dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang sehingga mempercepat pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945” (Mustopadidjaja AR, dkk,2012:115). Orde Baru, dalam catatan Bapenas, lahir sebagai koreksi atas kekeliruan dan kegagalan sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan

⁹⁹ Beberapa diantara mereka yang masuk dalam “Chicago Boys” adalah Sergio de Castro (M.A. and Ph.D. in Economics, University of Chicago; Minister of Economy, 1975-76; Minister of Finance, 1976-82), Pablo Baraona (M.A. in Economics, University of Chicago; President of the Central Bank, 1975-76; Minister of Economy, 1976-78), Sergio de la Quadra (M.A. in Economics, University of Chicago; President of the Advisory Committee on Tariff Policy, 1975; President of the Central Bank, 1982; Minister of Finance, 1982), Alvaro Bardón (M.A. in Economics, University of Chicago; President of the Central Bank, 1976-81), Rolf Lüders (M.A. and Ph.D. in Economics, University of Chicago, Bi-minister of Hacienda and Economy, 1982-83) and Miguel Kast (M.A. in Economics, University of Chicago; Minister Director of the National Planning Agency (Sin Yatsui, 2002).

¹⁰⁰ Dalam teori-teori sosial, khususnya dalam bidang ekonomi, University of Chicago dikenal dengan Chicago Economic (Ilmu Ekonomi Chicago). Ini adalah cara pandang yang khas terhadap Ilmu Ekonomi dan kebijakan ekonomi—sangat menekankan pada pasar bebas, setidaknya sejak tahun 1930-an. Disinilah lahir Mazhab Chicago, yang didirikan oleh Prof. Frank H. Knight, Lloyd Mints, Henry C. Simont dan Jacob Vinner (William Outwhite, 2008).

¹⁰¹ Perjanjian tersebut ditandatangani Maret 1956 antara dua pihak dengan program Point-Empat sebuah ICA dengan dukungan keuangan dari Yayasan Rockefeller dan Ford. Awalnya perjanjian itu memiliki durasi dari tiga tahun 1956-1959, tapi kemudian diperpanjang dua kali untuk menyelesaikan pada akhirnya pada bulan Juni 1964. Kontrak akademik ini terdiri dalam dua elemen. Di satu sisi, Departemen Ekonomi University of Chicago menerima setiap tahun beberapa mahasiswa Chili untuk diterima sebagai mahasiswa. Di sisi lain, Departemen mengirim pengajar dan staf administrasi untuk menyelenggarakan yang reorganisasi di sekolah Ekonomi dari Chatholic University serta memberikan kelas. Dengan usaha mereka, kurikulum diubah menjadi lebih satu Gaya Amerika-gaya dan sebuah pusat baru untuk Penelitian ekonomi telah dibuat. Melalui perjanjian ini sekelompok mahasiswa Chili pergi untuk mewujudkan studi pascasarjana mereka di bidang ekonomi di Chicago dan banyak orang lain telah melakukannya setelah berakhirnya perjanjian. Ketika mereka kembali ke Chili banyak dari ekonom Chicago terlatih dipekerjakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dari Chatholic University sebagai full-time professors. Banyak pengalaman dari studi pascasarjana keras di Chicago serta mereka kerja pendiri sekolah ekonomi di Chatholik University dibudidayakan esprit de corps di antara para ekonom, yang membantu mereka untuk mengatasi lawan mereka dan untuk mencapai program mereka sebagai tim yang koheren (Sin Yatsui, 2002) di bawah kekuasaan militer. Di antara mereka, pimpinan De Castro telah dianggap sebagai penting faktor penting ke sukesan. Dari pertengahan 1970-an mereka akan memonopoli posting utama dalam ekonomi.

pembangunan Orde lama yang didasarkan pada paradigma Nasakom, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin serta Kepemimpinan Tunggal. Orde lama berakhir dengan mewariskan krisis multidimensi yang ditandai oleh kehancuran dasar-dasar bangunan ekonomi, politik dan budaya bangsa, ancaman disintegrasi nasional, kemerosotan perekonomian, kelangkaan kebutuhan bahan pokok, tingkat inflasi yang cukup tinggi, merosotnya daya beli masyarakat dan meningkatnya penderitaan rakyat " (Mustopadidjaja AR, dkk,2012:115). Sistem politik Indonesia pada masa Orde baru dikarakteristikan sebagai suatu pemerintahan birokrasi. Giri khas sistem ini adalah keputusan-keputusan penting diformulasikan dalam birokrasi, korps militer dan administrasi sipil. Kekuatan-kekuatan di luar birokrasi dalam masyarakat, seperti pemimpin kharismatik, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan maupun gerakan massa, tidak mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional (Budi Winarno,2003: 163). Ini semua dilakukan atas alasan pembangunan.

Dalam kondisi seperti ini, Pembangunan menjadi sebuah ideologi baru yang dikampanyekan oleh pejabat pemerintah Orde Baru, yang memberikan legitimasi bagi hampir semua langkah kebijakan dan tindakan pemerintah. Untuk mempercepat pembangunan bangsa dan pemulihan ekonomi, Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memerlukan sekumpulan orang terdidik yang memiliki kemampuan dalam bidang pembangunan khususnya ekonomi. Sekumpulan orang yang mampu merancang arah tujuan pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana sekumpulan orang terdidik ini dapat dimunculkan? Negara atau institusi manakah yang dapat mendidik mereka sehingga tujuan dapat tercapai? Di sinilah Mafia Berkeley muncul. Mereka,—yang menurut Karl D. Jacson (1978) adalah *teknokrat*. Para birokrat yang memiliki spesialisasi dan terlatih yang muncul dari lingkaran elit dalam Orde Baru. Berbeda dengan dengan kaum politisi dari partai-partai politik, teknokrat tidak punya basis massa; oleh karena itu, kekuasaan mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka untuk menata ekonomi dengan rumus-rumus rasional mereka sendiri (Syamsul Hadi, 2005:161).

Menurut Syamsul Hadi (2005:161), ideologi utama para teknokrat ini adalah prinsip-prinsip ekonomi yang ortodox atau lazim disebut ekonomi neo-klasik, yang melihat keharusan untuk mengoptimalkan ekonomi pasar dan meminimkan peran negara dalam bidang ekonomi. Akan tetapi dalam tingkat yang cukup signifikan, mereka juga setuju dengan prinsip-prinsip keynesian yang cenderung mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi berdasarkan indikator-indikator GNP. Intervensi negara menurut pandangan ini, penting untuk mengakselerasikan proses industri. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk untuk mengembangkan sektor industri, selalu harus tinggi karena sektor industri dipandang perlu untuk memberikan dorongan yang besar bagi seluruh gerbang pembangunan ekonomi. Garis pemikiran ini secara langsung didukung oleh pakar teori kenamaan, **WW** Rostow dengan teorinya tentang " *The Take off into self Sustained growth*". Ideologi ekonomi neo-klasik mencerminkan elemen-elemen kepentingan kaum borjuis domestik dan internasional terutama perusahaan-perusahaan transnasional

(TNC) dan mitra mereka di Indonesia yang kepentingannya adalah mengembangkan modal di dalam negeri dan memperoleh surplus ekonomi dari usaha mereka. Modal asing yang tertarik pada kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah dan sebagai pasar yang luas jelas tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan pro-sosialis dan nasionalisme Soekarno. Bagi Ideologi neo-klasik yang juga menjadi pandangan baku bagi IMF dan World Bank, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah mesin utama penggerak pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, agen-agen ideologi neo-klasik menjadi jembatan emas kaum borjuis domestik dan internasional. Agen-agen itu adalah para teknokrat. Para Mafia (dari) Berkeley, Amerika Serikat.

Dalam kaitan ini, makalah ini akan mendiskusikan munculnya Mafia Berkeley dan peranan Mafia Berkeley dalam pembangunan Indonesia serta apa yang mereka capai. Oleh karenanya, makalah ini akan menganalisis sepak terjang Mafia Berkeley dalam pembangunan Indonesia. Diawali dengan pendekatan institusional dan peran kelembagaan, makalah ini akan memberikan alternatif pendekatan pembangunan Indonesia dengan model Pembangunan Berteraskan Islam (PBI). Sebagai sebuah pendekatan dalam pembangunan, PBI, oleh penulis juga akan dianalisis dalam perspektif kelembagaan, yaitu The Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV) di Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia.

PEMBANGUNAN INSTITUSI PENDIDIKAN ATAU HEGEMONI AMERIKA?

Di awal-awal makalah ini telah disinggung peran institusional pendidikan tinggi dalam melahirkan elit yang memiliki kemampuan spesialisasi dan berlatih. Mereka menjadi lokomotif pembangunan dari Orde yang diwakilinya. Persoalannya, apakah mereka memang menjadi bagian dari hegemoni kekuasaan kapitalis? Menurut Mansour Faqih (2005:36), pembangunan sebenarnya merupakan gerakan sosial yang direkayasa untuk Negara berkembang atau lazim disebut dengan Dunia Ketiga. Gerakan sosial yang terjadi di Dunia Ketiga, seringkali senantiasa berkaitan secara tidak langsung dengan pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*), yakni perubahan sosial yang direkayasa oleh negara, melalui apa yang disebut dengan pembangunan (Gbara, 2007). Hal ini dilakukan dengan apa yang disebut dengan Transformasi sosial, yang didefinisikan sebagai penciptaan hubungan ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan yang secara mendasar baru dan lebih baik. Dalam hal ini transformasi sosial dianggap sebagai model atau bentuk alternatif tentang perubahan sosial. Negara-negara kapitalis memerlukan transformasi sosial untuk dominasi barunya dengan melahirkan hegemoni (Gramsci, 1971). Bagi Gramsci (1971), pendidikan, kultur dan kesadaran adalah daerah perjuangan yang penting bagi melahirkan hegemoni. Di sinilah, Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga terjebak dalam lingkaran Politik Hubungan kolonial. Politik Hubungan Kolonial adalah hubungan antara kelompok yang tidak seimbang antara kelompok kuat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dengan kelompok lemah, dimana memiliki ketergantungan dan yang kuat menguasai (Clark, 1986).

Dengan dasar pemikiran tersebut, saya berasumsi bahwa hegemoni negara kapitalis seperti Amerika Serikat telah memainkan peranan penting melalui teknokrat-teknokrat ekonomi dan pembangunan di Indonesia sejak masa Order Baru dalam apa yang disebut Mafia Berkeley. Proses hegemoni Amerika Serikat itu melalui Mafia Berkeley dilakukan dengan penguatan institusi pendidikan tinggi (Universitas).

Sebagaimana disebutkan Mansour Faqih (2002), Pasca perang kebijakan bantuan Amerika ke negara berkembang dimulai dengan ucapan Presiden Truman dari Point Keempat pidato pelantikannya 7 Januari 1949. Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, prioritas kebijakan luar negeri AS ditempatkan pada rekonstruksi Negara-negara Eropa, sementara kekhawatiran bagi negara-negara berkembang relatif rendah. Namun pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 mengubah persepsi pembuat kebijakan Amerika, meyakinkan mereka kebutuhan untuk terlibat secara aktif dalam negara berkembang untuk melawan ekspansi komunis. Kebijakan bantuan Amerika terhadap negara berkembang didasarkan pada ideologi perang dingin dan keperluan pasar liberal. Selama bagian substansial 1950 dari bantuan Amerika ke negara-negara berkembang ditargetkan asisten program militer dan hanya sebagian kecil yang berorientasi pada program-program tanpa tujuan militer. Bantuan ekonomi dan program bantuan teknis dianggap sebagai melengkapi dengan asisten program militer (Sin Yasui, 2002).

Pembuat kebijakan Amerika takut bahwa tumbuh ketidakpuasan masyarakat Asia, Afrika dan Amerika Latin karena untuk mencukupi ekonomi pembangunan dapat membuat mereka rentan terhadap godaan komunis. Untuk meningkatkan sosial ekonomi mereka, itu dianggap perlu untuk menyebarkan modernitas Amerika dengan pengetahuan dan teknologi serta cita-cita liberal ke daerah tersebut, sehingga mengurangi ancaman komunis. Perjanjian Universitas dianggap sebagai alat yang tepat untuk tujuan ini. Pada tahun 1950, AS membentuk lembaga bantuan resmi, dengan kerjasama yayasan swasta (seperti Ford, Rockefeller dan Carnegie). Melalui lembaga ini dipromosikan program beasiswa antara universitas di Amerika yang dipilih dan universitas inti di negara-negara berkembang untuk melatih kader pimpinan yang akan melaksanakan modernisasi proyek negara asal mereka dengan cara yang diperintahkan. Dari tahun 1953 pada, sekelompok perjanjian universitas yang melahirkan sebagai konsekuensi dari kerjasama segitiga antara lembaga bantuan, swasta yayasan swasta dan universitas terkenal di Amerika.

Di balik perjanjian ini adalah keyakinan bahwa kedua pejabat badan bantuan dan staf yayasan kemajuan dalam mengembangkan negara harus dicapai dalam proses pemerintahan. Dengan lebih baik bahwa perubahan harus dipimpin oleh sekelompok elit dengan kemampuan teknis dan bukan oleh kaum revolusioner yang didukung oleh gerakan massa. Model dasar dari perjanjian universitas-ke-universitas telah mengikuti dua dimensi. Pada satu sisi, setiap tahun sekelompok mahasiswa dari universitas penerima

negara berkembang adalah diberikan beasiswa untuk belajar di universitas-universitas Amerika. Di sisi lain, kontingen Profesor Amerika dikirim ke universitas penerima untuk mewujudkan reformasi kelembagaan, yang dapat mencakup revisi kurikulum dan penciptaan pusat-pusat penelitian. Tujuannya adalah untuk menanamkan Program pendidikan Amerika- dalam rangka untuk menjamin reproduksi gaya Amerika (Sin Yasui, 2002).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan dalam kaitan ini adalah ekonomi kelembagaan sebagaimana yang dijalankan oleh sekolah-sekolah ekonomi di universitas-universitas terpilih di Amerika Serikat. Peran mereka sangat besar di dalam upaya melahirkan para teknokrat- teknokrat di negara berkembang. Posisi mereka juga berfungsi sebagai "satelit" bagi teknokrat-teknokrat tersebut bagi memastikan kepentingan mereka. Kenyataan ini menguatkan tesis bahwa universitas-universitas memainkan peranan dalam melahirkan kelompok pakar yang nantinya berperan dalam pembangunan. Hal ini sebagaimana disebutkan Dutt (2011), Herath (2005), Prasad (2003), Jones (1997) bahwa penguatan institusi kelembagaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan ekonomi.

MAFIA BERKELEY DAN PENGUATAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pembangunan memerlukan aktor yang bisa menterjemahkan ide dalam bentuk aksi. Dalam kaitan ini, elit terdidik dan terlatih merupakan aktor yang diperlukan dalam pembangunan untuk menterjemahkan ide dalam bentuk aksi melalui perencanaan pembangunan. Orde Baru memiliki sekelompok kaum terdidik dan terlatih dalam hal ekonomi dan pembangunan, yaitu teknokrat, mereka adalah Mafia Berkeley. Mereka ini merupakan hasil kebijakan politik Orde Baru, yang hanya melibatkan segelintir elit di lingkaran kekuasaan yang memiliki peranan besar dalam hal perencanaan pembangunan (Budi Winarno, 2003). Perencanaan pembangunan sebagaimana disebutkan oleh Widjojo Nitisastro, –seorang yang dianggap pimpinan Mafia Berkeley, adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan serta pemilihan cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan tersebut (Mustopadidjaja AR, dkk, 2012:3). Siapa sebenarnya Mafia Berkeley, sehingga mereka memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan? Dalam kaitan ini, seorang peneliti asing, Sin Yasui (2002) menyimpulkan:

They were also a group of economists who did their graduate studies in American universities. They ascended to important governmental positions in the late 1960s with the advent of Soeharto's New Order government after the breakdown of Sukarno regime in the middle of economic turmoil. They quickly took a set of stabilization measures while subsequently implementing a series of liberalizing policies. As a result, by the early 1970s, they succeeded to restore macroeconomic stability with satisfactorily high growth rate.

Menurut Revrison Baswir (2006:17) Mafia Berkeley adalah sekelompok ekonom Indonesia yang dibina oleh Amerika Serikat (AS) untuk membelakokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neoliberal atau neoliberalisme. Mafia Berkeley biasa juga disebut *a remarkable group of young economist* (Boediono, 2009). Pada awal Orde Baru, para ekonom lulusan Universitas California Berkeley, Amerika Serikat, tersebut, memang sangat harum namanya. Mereka yang waktu itu di bawah 40 tahun, dipandang telah berhasil dengan gemilang menyelamatkan perekonomian Indonesia dari bahaya kehancuran yang di wariskan pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Oleh karena itu, Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Suharto. Menurut JB. Sumarlin (Bondan Winarno, 2012), mereka disebut mafia karena pemikirannya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley¹⁰² pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Wdjojo Nitisastro. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini dikenal sebagai arsitek utama perekonomian orde Baru. Ia sempat diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1971-1973 dan Menko Ekuin sekaligus merangkap sebagai Ketua Bappenas pada periode 1973-1978 dan 1978-1983. Menurut Boediono (2009:132), Wdjojo Nitisastro dikenal memiliki komitmen yang kuat untuk kemajuan, serius dan teliti, sangat ramah, bersahaja, dan pendengar yang baik. Jika melihat suatu masalah dia akan melihat secara komprehensif dari aspek kependudukan hingga

¹⁰² Universitas California, Berkeley (juga dikenal sebagai Cal, UC Berkeley, The University of California, atau Berkeley) adalah sebuah universitas publik yang terletak di timur Teluk San Francisco di Berkeley, California, Amerika Serikat, mengarah ke Golden Gate. Kampus tertua dan "flagship" dari Sistem Universitas California, Berkeley merupakan pemimpin universitas riset. Program "induk"-nya dan profesor-profesornya terus-menerus berada di urutan atas di dunia. Didirikan pada 1868, Berkeley menikmati zaman emas ilmu fisika, kimia, dan biologi pada awal 1900-an, memimpin pengembangan cyclotron pertama oleh Ernest O. Lawrence, isolasi virus polio manusia, dan penemuan banyak unsur kimia, termasuk plutonium, berkelium, dan californium. Penghargaan Nobel telah diberikan kepada 19 profesornya yang masih aktif sekarang dan pada masa lalu kepada 53 orang yang berhubungan dengan universitas ini. Pada 1960-an kampus ini terkenal ke seluruh dunia dengan lahirnya Gerakan Kebebasan Berbicara dari protes para murid menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, secara nyata menjadi bagian Amerika pada 1960-an. Perkembangan berikut termasuk beberapa teknologi kunci berhubungan dengan perkembangan internet, BSD Unix, dan Gerakan Sumber Perangkat Lunak Terbuka.

statistik. Dia sangat teliti melihat apa dampak dan kaitannya. Jika dia tidak setuju, dia akan menolaknya secara halus. Kalau dia sudah yakin, dia akan ngotot (Gatra, 15 March 2012).

Widjojo sering dianggap sebagai pemimpin Mafia Berkeley, julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Suharto. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Istilah "*Berkeley Mafia*" atau Mafia Berkeley pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis-penulis 'kiri' AS, David Ransom, dalam sebuah majalah bernama *Ramparts*, edisi 4 tahun 1970. Istilah ini merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan University of California, Berkeley yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia pada tahun 1960-an. *Ramparts* adalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tetapi belakangan menjadi media kelompok 'kiri baru.' Majalah ini sudah berhenti terbit tahun 1975. Dalam artikel tersebut Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukkan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Widjojo dkk. dengan pembantaian massal eks PKI pada akhir tahun 1960-an.

ASAL-USUL MAFIA BARKLEY

Bagaimanakah sebenarnya asal-usul Mafia Berkeley? Menurut J.B. Sumarlin,--salah seorang anggota Mafia Berkeley, asal-usul mafia Berkeley dapat ditelusuri dari usaha penguatan institusi pendidikan yaitu fakultas ekonomi UI (FEUI) sekitar tahun 1950-an (Bondan Winarno, 2012:60). Menurut JB. Sumarlin (Bondan Winarno, 2012) FE UI pada waktu itu mengirimkan dosen-dosennya belajar ke Amerika Serikat. Proyek ini didanai oleh Ford Foundation. Sekitar 40 dosen FEUI dikirim ke berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan magister dan doktor antara tahun 1957 dan 1964. Inisiatif ini dikenal dengan sebutan *Proyek California*, yaitu mengirim dosen-dosen FEUI ke University of California dalam program *capacity building* dan *institutional strenghtening*, Refresentatif Ford Fondation di Indonesia ketika itu adalah Frank Miller, seorang yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno ketika itu. Proyek California ini di bagi empat tahapan. Misalnya, J.B Sumarlin tergabung dalam angkatan ke II bersama dengan Ali Wardhana, Marsudi Djojodipoero, Kwik Kian Kiat (yang kemudian namanya menjadi Budi Paramita), Ang Giok Goen (kemudian namanya menjadi Gunawan Arie Wardhana), Harun Zain, Hariri Hadi. Saat itu fakultas dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Keuangan. Sumitro ketika itu adalah satu-satunya dosen yang memiliki gelar doktor ekonomi. Karenanya ia meminta bantuan kawan-kawan dosen dari

Belanda dan dari fakultas lainnya untuk membantu pendidikan mahasiswa FEUI.

Saat tensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang tinggi akibat perebutan Irian Barat (sekarang disebut sebagai Papua Barat), para pengajar dari Belanda itu mulai meninggalkan Indonesia. Sumitro meminta bantuan *Ford Foundation*, yang kemudian memutuskan untuk mengadakan program beasiswa di mana beberapa mahasiswa FEUI dipilih untuk dikirim ke luar negeri dan belajar di *University of California, Berkeley*. Program ini dimulai pada tahun 1957 dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1960-an, seluruh mahasiswa yang dikirim telah kembali pulang ke Indonesia. Mereka kemudian ditugaskan mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD)

Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Wdjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.

Dalam seminar, para ekonom mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum akan ide mereka dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai Tim Ahli di bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pada 3 Oktober 1966, atas saran dari para ekonom ini, Soeharto mengumumkan program untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, inflasi di Indonesia secara tak terkendali telah mencapai empat digit dan tumpukan hutang yang besar. Hal ini terjadi karena pemerintahan di bawah Soekarno menghabiskan uang besar-besaran untuk membangun monumen, menasionalisasi industri, dan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman luar negeri. Mafia Berkeley memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran. Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969.

Rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian. Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968, Mafia Berkeley segera diberi berbagai jabatan menteri di kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, Mafia Berkeley memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,5 persen per tahun antara tahun 1965 hingga 1997, ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter.

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi seperti itu jelas satu kenaikan yang fantastik. Di masa Orde Lama, laju pertumbuhan ekonomi antara tahun 1960-1965 hanya 2,2 % (Mustopadidjaja AR, dkk, 2012: 122). Dalam kaitan ini, salah seorang yang dikaitkan dan memiliki hubungan dengan Mafia Berkeley dan kini menjabat Wakil Presiden Indonesia,– Boediono (2009:15) mencatat keberhasilan Orde Baru:

“Masa Orde Baru 1966-1998 adalah masa kesetabilan politik yang terpanjang dalam sejarah Indonesia merdeka. Kesetabilan politik itu telah memungkinkan dilaksanakannya kebijakan ekonomi yang konsisten dan berkesinambungan. Hasilnya berupa pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 7 % selama tiga dasawarsa. Pertumbuhan ekonomi ini di barengi dengan stabilitas ekonomi yang cukup mantap, pembangunan infrastruktur besar-besaran yang memperlancar kegiatan ekonomi dan makin menyatukan Indonesia, serta perbaikan bagi indikator sosial dan pembangunan manusia. Pada gilirannya semua perbaikan itu makin memperkuat stabilitas politik sampai terjadi krisis ekonomi pada 1997. Suatu prestasi sosial ekonomi, yang kalau kita jujur, sangat mengesankan.”

Begitu hebatkah Mafia Berkeley, sehingga mampu membawa kemajuan perekonomian Indonesia dan bangkit dari keterpurukan? Revrison Baswir (2006:18-19) dalam bukunya yang berjudul *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia* menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menunjang prestasi para ekonom Mafia Berkeley.

Pertama, adanya manipulasi besar-besaran suasana batin masyarakat untuk memusuhi segala hal yang dapat diasosiasikan sebagai bagian Orde lama. Tindakan tersebut antara lain dilakukan oleh Orde Baru dengan memberangus komunisme, menolak rehabilitasi partai-partai politik yang dibekukan Soekarno, dan melakukan desoekarnoisasi secara besar-besaran. Akibatnya warga masyarakat termasuk para mahasiswa, tidak hanya mendukung seluruh kebijakan ekonomi politik Orde Baru, tetapi cenderung mengasosiasikan diri mereka sebagai bagian dari rezim tersebut.

Kedua, adanya pemerintahan tangan besi Soeharto yang siap memberangus segala tindakan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini memang merupakan skenario inti dari naiknya militer sebagai penguasa Orde Baru. Akibatnya, gerakan perlawanan yang dimotori oleh perwira militer sekalipun, seperti terjadi pada Peristiwa Malari, dapat dihentikan dengan cepat. Jenderal Soemitro, yang menjadi tulang punggung peristiwa itu, dicopot dari jabatannya.

Ketiga, adanya dukungan besar-besaran kapitalisme internasional, untuk membiayai proses pemulihan Indonesia. Hal ini, tidak hanya merupakan prasyarat keberhasilan para ekonom Mafia Berkeley. Sesuai dengan suasana perang dingin yang sedang berlangsung ketika itu, kelahiran Orde

baru memang tidak dapat dipisahkan dari rencana besar kapitalisme internasional untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia.

Dengan latar belakang seperti itu menurut Revrisond Baswir (2006:20), secara ekonomi, pekerjaan para ekonom Mafia Berkeley dalam memulihkan perekonomian Indonesia cukup ringan. Jika diibaratkan dengan kapal dan nahkoda, para ekonom Mafia Berkeley seperti berlayar di atas kapal dengan bahan bakar penuh, geladak tidak gaduh dan suasana lautan yang tenang.

MAFIA BERKELEYS DAN PERSOALAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Andrinof A. Chaniago (2012), dalam bukunya, *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*, menyimpulkan bahwa pembangunan di Indonesia yang dimulai sejak Orde Baru, telah gagal. Menurut Andrinof Chaniago (2012) indikator kegagalan itu tidak hanya pada berbagai ketimpangan yang telah terjadi di Indonesia, tetapi juga dilihat dari kehancuran modal sosial yang sebelumnya sudah diwarisi dari generasi ke generasi terdahulu dan berfungsi sebagai tiang-tiang penyangga dan keutuhan bangsa Indonesia. Pemerintah Orde baru bukan hanya gagal memperkuat dan mempertahankan modal sosial, tetapi malah membiarkannya hancur demi kebijakan ekonomi yang hiperpragmatis dan demi mempertahankan status quo. Dalam kaitan ini Andrinof Chaniago (2012) menegaskan:

“Kegagalan pembangunan ini sekaligus penyebab indonesia terjerebab ke dalam jurang krisis yang amat dalam sejak akhir 1997. Indonesia adalah negara yang paling sulit ke luar dari krisis di antara negara-negara Asia yang dilanda krisis sejak akhir 1990-an karena kelemahan-kelemahan bersifat fundamental di indonesia, bukan hanya bidang ekonomi, tetapi juga bidang politik dan budaya. Berbagai kelemahan fundamental ini terjadi kesalahan kelompok yang berkuasa membawa pembangunan di Indonesia, terutama dimasa dekade terakhir pemerintahan Orde Baru”

Apa yang disampaikan oleh Andrinof A. Chaniago (2012) di atas sebenarnya merupakan akumulasi “model pembangunan neoliberal¹⁰³” gaya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pengkroposan pembangunan dengan gaya neoliberal seperti itu telah menghasilkan apa yang disebut oleh Jeffrey A.

¹⁰³ Neoliberalisme adalah seperangkat kebijakan-kebijakan ekonomi yangh pada tingkat global mengarahkan usaha-usaha pada terwujudnya tiga hal. Perdagangan bebas untuk barang dan jasa,, alairan bebas untuk modal dan kebebasan untuk investasi. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme. Yang pertama, adalah munculnya perusahaan multinasional cooperation, MNC sebagai kekuatan yang nyata da bhkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar dari negara-negara kecil di dunia. Mereka rat-rata berpusat di negara maju (AS, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia memanfaatkan smua fasilitas infrastruktur negara-negara ini, Kedua, munculnya organisasi atau rejim internasional, yang berfungsi sebagai surveillance system. Mereka adalah WTA, IMF dan world bank. Ketiga adanya transformasi teknologi inforrmasi (I Wibowo, 2003)

Winter (2004) sebagai *Utang Kriminal*. *Utang Kriminal* yang dimaksud oleh Jeffrey A. Winter (2004) bahwa pinjaman oleh Bank Dunia kepada Soeharto untuk pembangunan Indonesia telah dimanfaatkan oleh para elit, kroninya khususnya dalam Golkar dan departemen-departemen melalui apa yang disebut dengan korupsi. Sebanyak 30 % dari pinjaman Bank Dunia telah dikorupsi (Bruce Rich, 2004).

Di samping itu, sebagaimana disebutkan oleh Revrisond Baswir (2003: 206-207) Privatisasi BUMN semakin merajalela sehingga negara kehilangan kendali. Sebagaimana disebutkan Veltemeyer (Revrison Baswir, 2003: 206-207) pelaksanaan privatisasi BUMN sesungguhnya bukanlah untuk pengambilalihan perusahaan, melainkan untuk menata ulang struktur perekonomian sebuah negara guna melempangkan jalan bagi agenda-agenda ekonomi neoliberal secara internasional.

Pada masa kehancuran perekonomian Indonesia akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997, Mafia Berkeley turut dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Pada masa reformasi, hanya Widjojo yang masih dipertahankan di pemerintahan.

Seperti halnya dengan ekonom barat dalam ekonomi liberal, para teknokrat itu dalam suatu jangka waktu tertentu sempat 'mengharapkan' bekerjanya mekanisme *trickle down effect* dari pertumbuhan yang tinggi. Namun seperti kata ekonom pemenang nobel, Joseph E. Stiglitz, efek tetesan ke bawah itu hanyalah semacam ilusi, dan dapat dikatakan tak pernah terjadi rembesan ke bawah ke tempat akar rumput. Mereka yang berhasil berjaya mengakumulasi hasil pembangunan ekonomi, dalam suatu sistem yang kapitalistik-liberalistik akan lebih cenderung untuk tak berbagi, kecuali ada mekanisme penekan. Oleh karena itu, tidak semua orang menyukai pendekatan liberal yang dijalankan Mafia Berkeley. Dari dalam Order Baru sendiri, mereka menghadapi perlawanan dari para Jenderal seperti Ali Murtopo, Ibnu Sutowo, dan Ali Sadikin yang mengharapkan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistik.

Beberapa pihak, seperti Hizbut-Tahrir Indonesia, menganggap Mafia Berkeley sebagai pengkhianat karena langkah privatisasi yang mereka lakukan dinilai sebagai bentuk penjualan aset-aset bangsa. Pada masa kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an, Indonesia yang kaya akan cadangan minyak meraup banyak keuntungan. Soeharto mulai berpaling ke kelompok ekonomi nasionalis dan kekuatan Mafia Berkeley pun dikurangi.

Soeharto kembali ke Mafia Berkeley saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terhambat karena turunnya harga minyak di pertengahan tahun 1980-an. Mafia Berkeley sekali lagi melakukan liberalisasi dan deregulasi, sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Namun sekali lagi, saat perekonomian Indonesia tumbuh, Mafia Berkeley menghadapi oposisi politik. Kali ini lawan mereka adalah Sudharmono dan Ginanjar Kartasasmita yang menginginkan nasionalisme ekonomi serta dari

BJ Habibie yang menginginkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Dan seperti yang sebelumnya telah terjadi, Soeharto kembali berpihak pada nasionalis ekonomi dan memperlemah posisi Mafia Berkeley.

Para teknokrat tersebut berhasil memacu pertumbuhan ekonomi, namun sayangnya dalam mengejar pertumbuhan mereka mengabaikan aspek pemerataan keadilan. Satu dan lain sebab, kurangnya perhatian dan prioritas mereka kepada aspek pemerataan, membuat mereka dituduh sebagai menjalankan ekonomi liberalistik di Indonesia. Kecenderungan korup dari sejumlah peserta di kalangan rezim kekuasaan dalam jalannya pembangunan pada tahun-tahun berikut, juga menghasilkan sekelompok kecil penguasa ekonomi dalam bentuk konglomerasi yang memiliki jalinan kuat dengan tokoh-tokoh penentu kekuasaan negara. Sehingga sempurnalah tampilan suasana kapitalistik-liberalistik dalam kehidupan ekonomi Indonesia.

Memperkirakan pemulihan ekonomi Indonesia kepada para ekonom Mafia Berkeley atau Mafia Ekonomi Orde Baru sekarang ini,—sebagaimana kesimpulan Revrison Baswir (2006:21) tidak hanya sia-sia, bahkan dapat mengundang bahaya. Terus memaksakan pengamalan ekonomi pasar neo-liberal di tenga-tengah sikap apatis masyarakat, pemerintahan yang lemah, korupsi yang merajalela justeru dapat menjerumuskan Indonesia ke jurang kehancuran.

DARI MAFIA BERKELEY KE MAFIA ISDEV: PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DAN KECAMBAH ISDEV YANG MULAI TUMBUH

Rancangan pembangunan Orde Baru melalui Mafia Berkeley telah disimpulkan gagal (Andrinof A. Chaniago, 2012). Ia bukan saja rapuh karena korupsi di kalangan elitnya (Jeffrey A. Winters, 2004) tetapi juga karena pembangunan yang dirancang oleh Mafia Berkeley, hanya dinikmati oleh sekelompok kecil elit dan memunculkan ketidakadilan pada masyarakat. Di sisi lain, dengan kondisi itu memunculkan rasa ketidakpercayaan pada masyarakat dan pihak internasional (Faisal Basri, 2002).

Pendekatan neo-klasik dan kemudian neoliberalisme dalam pembangunan terbukti justeru membuat Indonesia terpuruk. Puncaknya adalah krisis ekonomi 1997, yang mengakibatkan Presiden Soeharto,—pemimpin Orde Baru, harus turun dari kekuasaannya atas tekanan masyarakat luas. Demikian juga masa Orde Lama, yang melaksanakan pembangunan dengan pendekatan nasionalisme dan komunis, juga terbukti gagal (Mustopadidjaja AR, dkk, 2012)

Menurut saya, memahami kegagalan pendekatan kapitalis liberal dalam pembangunan Orde Baru,—sebagaimana yang diarsiteki oleh Mafia Berkeley, dan pengalaman Orde Lama dengan pendekatan nasionalisme dan komunismenya, perlu satu alternatif model pembangunan Indonesia. Alternatif pembangunan itu adalah Pembangunan Berteraskan Islam.

Mengapa perlu Pembangunan berteraskan Islam dalam pembangunan Indonesia? Pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas model atau pendekatan kapitalis liberal dan komunisme dalam pembangunan Indonesia telah gagal dan menimbulkan ketidakadilan dan kesejahteraan hanya dikuasai oleh segelintir kelompok saja. Artinya secara empirik pengalaman Indonesia itu telah membuktikan.

Kedua, Islam sendiri secara nyata melawan bentuk-bentuk kapitalisme dan liberalisme. Dalam kaitan ini umat Islam memandang agama sebagai cara hidup manusia dimuka bumi ini. Di dalamnya termasuk cara mengorganisasi aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Di samping memberikan prioritas utama pada kebutuhan spiritualitas manusia, Islam juga menekankan pada ekonomi dan materi.

Gagasan tentang kekayaan dan kesejahteraan diungkapkan dalam istilah-istilah positif misalnya, fadl Allah, rahmah, zinat Allah, rizq, tayyibat, khizzanah, ma'ayis, mulk, barakah dan sebagainya. Istilah-istilah ini semacam mencerminkan rahmat dan berkah Allah swt selalu melimpah bagi manusia (Zakiyuddin Baidhaw, 2007:1). Dimensi ekonomi dan pembangunan menempati ruang khusus dalam kerangka sosial Islam (Muhammad Syukri Salleh, 2002, Warjio, 2012). Hal ini disebabkan karena Islam meyakini stabilitas individu dan kehidupan sosial bergantung pada kesejahteraan materi dan spiritual. Islam mendekati aspek ini secara integral dalam setiap tindakan dan kebutuhan manusia (Zakiyuddin Baidhaw, 2007:10). Oleh karenanya, Pembangunan Berteraskan Islam sangat diperlukan.

Pembangunan Berteraskan Islam atau biasa disingkat PBI memang merupakan satu disiplin ilmu yang baru. Ia muncul sekitar tahun-tahun 70-an yang lalu (Muhammad Syukri Salleh, 2001a:1 & 4, 2002:3).

Salah satu karya penting mengenai PBI adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2002), PBI merujuk kepada satu proses pembangunan yang komprehensif, bersepadu dan seimbang. Ia melibatkan semua aspek kehidupan seseorang, baik di peringkat individu maupun masyarakat. Ia merangkumi aspek pembangunan rohani dan jasmani. Ia juga lahir daripada pelaksanaan fungsi individu dalam institusi sebagai hamba Allah SWT dalam perspektif perhubungan menegak (*habl min Allah*) dan khalifah Allah SWT dalam perspektif hubungan mendatar (*habl min al-Nas*). Sebenarnya, ini merupakan definisi awal PBI yang telah dikemukakan oleh Muhammad Syukri Salleh.

Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003: 18), tujuan pembangunan berteraskan Islam ialah untuk mendapat keredaan Allah s.w.t, atau disebut *mardhatillah* dalam Bahasa Arab. Menurut beliau lagi, sesuatu usaha pembangunan tidak boleh dikatakan berjaya, walaupun mendapat

keuntungan yang besar, sekiranya tidak diredai Allah s.w.t. Oleh yang demikian, beliau menetapkan *mardhatillah* sebagai tujuan pembangunan.

Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003: 81), apabila seseorang itu mencapai keredaan Allah Taala, maka Dia akan dikurniakan *al-Falah* kepada mereka. *Al-Falah* di sini bermaksud kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pandangan tersebut adalah sejajar dengan Mahrus Husain 'Abd al-Jawad (t.th.: 9) yang berpendapat bahwa Allah s.w.t. telah menetapkan ibadah sebagai syarak dalam Islam bertujuan untuk berdamping diri kepada Tuhan dan mencapai keredaan-Nya. Maka berbahagialah dengan keredaan tersebut di samping menikmati kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat.

Menurut Muhammad Syukri Salleh (2002:1-3), terdapat dua faktor utama yang mendorong kemunculan ilmu PBI ini. Faktor pertama ialah timbulnya kesadaran dalam kalangan umat Islam sendiri berikutan daripada kebangkitan semula Islam¹⁰⁴ sekitar akhir tahun-tahun 60-an dan awal tahun-tahun 70-an. Hasil daripada kesedaran tersebut, komitmen umat Islam terhadap Islam semakin meningkat dan kukuh. Malahan usaha-usaha serius mula dilakukan agar ajaran-ajaran Islam dapat dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan umat Islam.

Faktor kedua pula ialah kemelut-kemelut pembangunan yang semakin memuncak pada ketika itu. Misalnya, muncul di seluruh dunia isu-isu seperti kemiskinan yang bertambah meruncing, pengangguran, penyalahgunaan kuasa, rasuah, inflasi, krisis hutang dan masalah pergantungan yang semakin meningkat, jurang pendapatan dan keadilan sosioekonomi yang bertambah kentara, kemerosotan ekologi dan keruntuhan akhlak semakin mencapai tahap yang membimbangkan (Fadzila Azni Ahmad, 2008:3).

Menurut Fadzila Azni Ahmad (2008:3) walaupun berbagai pendekatan dan kebijakan telah diterapkan, namun tujuan pembangunan yang diharapkan masih tidak berhasil dicapai. Hal ini mendorong umat Islam terutamanya para cendekiawan berfikir kembali tentang bentuk dan kaedah pembangunan yang seharusnya dilaksanakan (Muhammad Syukri Salleh, 2002:1; Fadzila Azni Ahmad, 2008:3).

Inilah dua faktor utama yang menjadi antara pendorong kepada lahir PBI pada tahun-tahun 70-an yang lalu. Walaupun ia baru berusia lebih kurang tiga dekad, namun perkembangannya kelihatan agak pesat. Perkembangan

¹⁰⁴ Menurut Muhammad Shukri Salleh (2013), Istilah kebangkitan semula Islam merujuk kepada kesungguhan umat Islam menegakkan semula Islam dalam kehidupan. Ia bersifat menyeluruh dan merangkumi pelbagai sudut. Misalnya, sudut pengkajian, pemahaman, penghayatan, pelaksanaan dan perkembangan Islam. Ini termasuklah bertambahnya perbincangan dan penulisan tentang Islam, baik dalam bentuk akademik maupun yang sebaliknya, usaha-usaha melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan termasuk pengamalan, penginstitutionan, perundangan, pentadbiran dan sebagainya serta meningkatnya gerakan atau pertubuhan Islam.

disiplin ilmu PBI ini jelas dilihat sekurang-kurangnya dalam dua aspek. Pertama, aspek perbendaharaan ilmunya yang sepadu dan holistik; dan kedua pula, aspek pelaksanaannya secara praktikal (Muhammad Syukri Salleh, 2002:8; Fadzila Azni Ahmad, 2008:3-4).

Menurut Fadzila Azni Ahmad (2008:31), penguraian Muhammad Syukri Salleh tentang maksud PBI ini dapat dilihat dengan jelas dalam tiga aspek utama, yaitu aspek *tasawwur*, epistemologi dan ontologi.

Dari aspek *tasawwur*, Muhammad Syukri Salleh (2002:57, 2003a:21) menjelaskan bahwa PBI mestilah lahir daripada *tasawwur* Islam. Menurut beliau lagi, terdapat tiga asas utama dalam *tasawwur* Islam. Pertama, Allah SWT adalah Pencipta. Kedua, pelaku pembangunan adalah makhluk. Ketiga, peralatan pembangunan juga adalah makhluk.

Ketiga-tiga asas inilah merupakan acuan yang membentuk PBI. Dari aspek epistemologi pula, Muhammad Syukri Salleh (2001a:17 & 27, 2002:21-29) menguraikan bahwa ilmu PBI merangkumi kesepaduan antara ilmu *daruri* dengan ilmu *nazari*, dalil-dalil '*aqli* dengan dalil-dalil *naqli*, ilmu *fard 'ayn* dan ilmu *fard kifayah*. Manakala dari aspek ontologi pula, Muhammad Syukri Salleh (2001a:12-13, 2002:8 & 67) menekankan bahwa inti pati PBI melibatkan pembangunan spiritual dan material, akal dan hati, ilmu dan amal, perkaedahan saintifik dan perkaedahan metafizik. Ia juga merupakan gabungan bersepadu disiplin-disiplin ekonomi, politik, keuangan, sosiologi, psikologi, antropologi, falsafah, perundangan dan sebagainya.

Kini PBI, telah begitu gencar disuarakan oleh Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam atau yang lebih dikenal dengan ISDEV (The Centre for Islamic Development Management Studies) yang berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia. Di bawah Direktornya, Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh, ISDEV sebagai kecambah pemikiran pada awalnya, kini telah berkembang sebagai lembaga pendidikan dalam bidang pembangunan berteraskan Islam.

Mahasiswa dan alumninya kini malah telah berdiaspora dan menjadi corong dalam menyuarakan PBI. ISDEV juga dipercayai oleh berbagai lembaga dunia untuk melakukan kajian mengenai PBI¹⁰⁵. Puluhan tesis di tingkat master dan Ph.D kini telah dihasilkan dan malah banyak diantaranya memenangkan penghargaan sebagai penelitian ilmiah terbaik. Dalam mengembangkan PBI, ISDEV juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan berbagai universitas di Indonesia termasuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Medan Area (UMA).

¹⁰⁵ Di bawah grant Research university Team (RUT), grant penelitian dari Kementerian pendidikan Malaysia, ISDEV telah melangkah lebih jauh mengembangkan PBI. Hasil-hasil penelitian ini termasuk sudah dipresentasikan di berbagai negara termasuk di Amerika Serikat dan telah diterbitkan di berbagai jurnal internasional (Canada, Inggeris dan lain-lain).

Saya yakin, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan program di tingkat master dan doktoral, ISDEV akan menjadi lembaga yang dapat menciptakan para teknokrat dalam bidang pembangunan. Namun tentu saja, tidak seperti teknokrat yang dihasilkan oleh University of California Berkeley. PBI memang perlu waktu untuk disosialisasikan sebagai bagian dari Islamisasi pembangunan. Oleh karenanya upaya itu harus terus dilakukan. Semoga.

REFERENSI

- Arestis, Philip; Nissanke, Machiko; Stein, Howard (2005). Finance And Development: Institutional And Policy Alternatives To Financial Liberalization Theory” dalam Eastern Economic Journal 31.2 (Spring): 245-263.
- Aralica, Zoran; Budak, Jelena (2004)” Institutional Development And Good Governance Assessments In Croatia: An Extended Focus On Corruption” dalam An Enterprise Odyssey. International Conference Proceedings: 28-44. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. (Jun 17-Jun 19, 2004).
- Baidhaw, Zakiyuddin (2007), Islam Melawan Kapitalisme, Yogyakarta: Resist Book.
- Baswir, Revisond (2006), Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- (2009), Bahaya NeoLiberalisme, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Basri, Faisal (2002), Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, Jakarta: penerbit Erlangga.
- Binder, Leonard (2011), Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boediono (2009), Ekonomi Indonesia, Mau Kemana: kumpulan Essai, Jakarta : Kompas.
- Chaniago, Andrinof A (2012), Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru, Jakarta LP3ES.
- Djoghla, Ahmed.(2007),” The Institutional Dimension of Sustainable Development”, dalam Environmental Policy and Law 37.5 (Sept): 385-391.
- de Medeiros, Carlos Aguiar (2011),”. The Political Economy of Institutional Change and Economic Development in Latin American Economies” dalam Journal of Economic Issues 45. 2 (Jun): 289-299.
- Dutt, Amitava Krishna (2011). Institutional change and economic development: concepts, theory and political economy” dalam Journal of Institutional Economics 7. 4 (Dec): 529-534.
- Faqih, Mansour (2011), Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- (2008), Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: pergolakan Ideologi LSM di Indonesia, Yogyakarta: Insist Press.
- Gbara, Loveday Nuka (2008), " Policy Analysis of Nigerian Project, 1979-2004" Tesis Ph.D, Washington University.
- Herath, Gamini (2005), " Analysis of the potential and problems of new institutional economics for third world development" dalam International Journal of Social Economics 32. 10 : 877-892.
- Hadi, Syamsul (2005), Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto, Jakarta: Japan Foundation.
- Julio Carranza Valdés; Juan Valdés Paz (2004), "Institutional Development And Social Policy In Cuba: "The Special Period" dalam. Journal of International Affairs 58. 1 : 175-189.
- Jones, Gareth A (1997), " Institutional Development: A Third World City Management Perspective" dalam The Journal of Development Studies 34. 2 (Dec 1997): 182-183.
- Lee, You-Il (1997), " The Role of Government in East Asian Economic Development: Comparative Institutional Analysis" dalam The Asia Pacific Journal of Economics & Business 1. 2 (Dec 1997): 104-107.
- Mustopadidjaja AR, dkk (2012), Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Prasad, Biman C (2003) "Institutional economics and economic development: The theory of property rights, economic development, good governance and the environment" dalam International Journal of Social Economics 30. 5/6 : 741-762.
- Pincus, Jonathan R, Jeffrey A Winters (2004), Membongkar Bank Dunia, Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Salleh, Muhammad Syukri (2002), Pembangunan Berteraskan Islam, Kuala Lumpur: Utusan publication.
- (2003), 7Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam, Kuala Lumpur: Zebra Edition.
- Shin Yasui (2002), "How was the Market Economy Implanted in Developing Countries? The Cases of Chile and Indonesia.
- Tjokrowinoto, Moeldjarto (2007), Pembangunan: Dilemma dan Tantangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wardhana, Ali (2012), "Reformasi Ekonomi: pengalaman Indonesia" dalam Mandala Manurung & Prijono Tjiptoherijanto (2012), JB. Sumarlin Diantara Sahabat, Jakarta : Kompas.
- Wibowo, I, Francis Wahono (2003), Neoliberalisme, Yogyakarta: Gendralas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Winarno, Budi (2003), Komparasi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan, Yogyakarta: Media Presindo.
- Yevgeny Kuznetsov (2010), "Talent Abroad Promoting Growth and Institutional Development at Home: Skilled Diaspora as Part of the Country" dalam Economic Premise, December, Number 44.

ISLAMISASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN¹⁰⁶

Kasyful Mahalli

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Indonesia

Email: kasyfulmahalli@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahapan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan akan dilalui. Perencanaan pembangunan juga akan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik dalam mencapai tujuan.

Dalam suatu proses pembangunan, unsur pertumbuhan dan perubahan (*growth and change*) akan terjadi secara simultan. Giri dan kecepatan perubahan tidak sama antara negara-negara manapun antara satu periode dengan periode yang lain di suatu negara. Menterjemahkan perkembangan masa lalu ke perencanaan masa depan sangatlah tidak mudah dan tidak dapat dilakukan begitu saja. Di satu pihak berbagai faktor ketidakpastian (*uncertainties*) cukup banyak dan sulit diperhitungkan dalam lingkungan dunia yang semakin kompleks. Namun, merencanakan sesuatu berdasarkan semata-mata perkembangan masa lalu, tidak ubahnya dengan "merencanakan masa lalu". Jadi, kesimpulan antara pengalaman, ketajaman visi dalam melihat faktor penting di masa depan serta peningkatan kemampuan atau kualitas metodologi perencanaan akan merupakan tuntutan masa depan (Iwan Jaya Azis, 1990).

Tulisan ini berhasrat mengenalpasti perkembangan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pengertian dan sejarah perencanaan pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia. Pada bahagian selanjutnya dibahas tentang perkembangan perencanaan pembangunan di

¹⁰⁶ Kertas Kerja yang disampaikan pada International Conference on Islamic Development (ICID), kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan Islamic Development Management (ISDEV), School of Social Science, University Sains Malaysia, Medan 23 April 2013.

Indonesia. Di bahagian akhir akan disampaikan Islamisasi perencanaan pembangunan utamanya dari perspektif pembangunan berteraskan Islam.

PENGERTIAN DAN SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Setiap organisasi memulai kegiatan sejalan dengan siklus manajemen tersebut di atas. Dalam organisasi, perencanaan diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan (Amirullah dan Haris Budiyo, 2004:91). Ini berarti bahwa perencanaan adalah suatu pemilihan aktivitas untuk pencapaian tujuan organisasi di masa yang akan datang. Dengan demikian, perencanaan yang baik (*good planning*) merupakan cermin dari manajemen yang baik (*good management*) bagi organisasi¹⁰⁷. Manajemen yang baik inilah yang memberikan hasil yang baik (*good result*) bagi organisasi (Amirullah dan Haris Budiyo, 2004:93). Dengan demikian, kegiatan perencanaan sangatlah penting dan diperlukan untuk setiap usaha dalam mencapai tujuan.

Perencanaan adalah merupakan sebuah proses untuk menghasilkan perencanaan dalam organisasi. Pada tingkatan umum, Griffin (2004: 1999-200) membagi perencanaan organisasi kepada tiga jenis perencanaan yaitu perencanaan strategis (*strategic plan*), perencanaan taktik (*tactical plan*) dan perencanaan operasional (*operational plan*)¹⁰⁸. Ketiga-tiga jenis perencanaan tersebut digunakan bukan saja dalam organisasi seperti perusahaan, organisasi swasta namun juga pada organisasi pemerintah.

Perencanaan kemudian berkembang bukan saja pada lingkup organisasi tetapi juga meliputi perencanaan pembangunan secara umum. Perencanaan pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan juga meliputi proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang di kehendaki. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan merupakan segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber

¹⁰⁷ Mengutip pendapat Griffin (2004:6) organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam suatu cara yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian yang lebih luas bentuk organisasi dapat diartikan sebagai institusi, baik dalam bentuk institusi pemerintah, swasta mahupun bisnis

¹⁰⁸ Rancangan strategis adalah rancangan umum yang medasari keputusan alokasi sumberdaya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Rancangan taktis merupakan suatu rancangan yang ditujukan untuk mencapai tujuan taktis dan dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari suatu rancangan strategis. Manakala rancangan operasional dimaksudkan sebagai suatu rancangan yang menitikberatkan pada pelaksanaan rancangan taktis untuk mencapai tujuan operasional (Lihat Griffin, 1999:199-200).

daya akan dialokasikan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Apabila dilakukan pemisahan period perjalanan teori perencanaan, maka ada dua alur besar teori perencanaan, yaitu instrumental rasionalitas dan komunikatif rasionalitas. Instrumental rasionalitas merupakan konsep-konsep pemikiran pada era *Pra Modern Planning* dan *Modern Planning Theory*, sedangkan komunikatif rasionalitas berada pada era *Post Modern Planning Theory*. Dalam typologinya, teori perencanaan ini berada pada filosofi *Positivist* dan *Postpositivist* (Almendinger, 2002).

Perencanaan sebagai sebuah teori muncul di pelbagai literatur sebagaimana yang ditulis oleh Faludi (1973), Friedmann (1987), Forester (1989), Guy (1991), Alexander (1993), dan Cambell dan Fainstein (1996), Healey (1997, 2000), Huxley dan Yiftachel (2000). Konsepsi perencanaan pembangunan pula dikemukakan oleh Arthur Lewis (1965), Jhingan (1984), Conyers dan Hills (1994), dan Todaro (2000).

Namun demikian, Hudson (1979) dan Mantysalo (2004) membagi teori perencanaan berdasarkan lima jenis yaitu: perencanaan sipnotik (*synoptic planning*) yang biasa juga disebut sebagai perencanaan menyeluruh (*rational comprehensive planning*), perencanaan tambahan (*incremental planning*), *transactive planning* atau disebut juga dengan perencanaan komunikatif (*communicative planning*), *advocacy planning*, dan perencanaan radikal (*radical planning*).

Para ahli teori perencanaan kontemporer menyatakan bahwa pengambilan keputusan perencanaan tidak terlepas dari politik (Fainstein dan Fainstein 1996: 265). Para ahli yang mengkaji kaitan perencanaan dengan politik di antaranya adalah Gans (1993), Fainstein dan Fainstein (1996), Davidoff (1965) dan Linblom (1966). Masing-masing pakar tersebut mengemukakan empat corak perencanaan sekaitan dengan pelaku penetapan tujuan perencanaan dan cara mencapai tujuan yaitu: pertama, perencanaan tradisional, kedua, perencanaan demokratis, ketiga, perencanaan ekuiti, dan keempat, perencanaan tambahan (*incremental planning*). Secara sederhana karakteristik umum dari keempat corak perencanaan tersebut dapat diringkaskan sebagaimana terlihat pada Tabel-1 berikut:

Tabel-1 Karakteristik Corak Perencanaan

Corak Perencanaan	Pengambil Keputusan	Landasan Teori
Tradisonil/ Rational Comprehensive	Perencana	Teknokratik
Demokratis	Masyarakat (Umum)	Demokrasi
Ekuiti	Kesepakatan Umum	Sosialis
Inkremental	Kelompok masyarakat	Liberal

Sumber : Diolah penulis

Tabel-1 di atas menunjukkan bahwa dalam perencanaan tradisional (yang juga disebut *rational comprehensive planning*), penetapan tujuan dan kaedah pencapaian tujuan dilakukan oleh perencana (Gans, 1993 dalam Fainstein dan Fainstein, 1996: 266). Para perencanalah yang paling tahu tujuan dan kaedah yang benar. Para perencana adalah para pakar dan berpengalaman sehingga mereka dapat dipercaya untuk menerapkan keahliannya dalam perencanaan umum. Dengan kepakarannya, para perencana dianggap mampu bertindak objektif, tidak memihak salah satu kelompok dalam menetapkan tujuan perencanaan dan cara mencapai tujuan tersebut.

Dalam kondisi masyarakat di mana terjadi transformasi pemerintahan dan dalam penyusunan masyarakat terdapat pelbagai peranan perencana, diantaranya sebagai pengurus perubahan (Haryo Winarso, 2002), dan sebagai pemakalah, narasumber, moderator penyepakatan visi, misi dalam penyusunan naskah awal RPJP (Heru Purboyo HP, 2008).

Dalam perencanaan demokratis pula, pihak yang berwenang menetapkan tujuan dan cara mencapainya adalah masyarakat. Perencanaan demokratis dilandasi oleh teori demokrasi (Fainstein dan Fainstein, 1996: 275). Perencanaan demokratis berpendapat bahwa mayoritas masyarakat merupakan pendapat yang paling benar.

Dalam prakteknya, perencanaan ekuiti sering dipertukarkan dengan perencanaan advokasi walaupun menurut pencetusnya Davidoff (1965), perencanaan ekuiti tidaklah sama dengan perencanaan advokasi. Dalam perencanaan ekuiti diperlukan kesepakatan umum untuk mencapai suatu perencanaan umum manakala dalam perencanaan advokasi kesepakatan umum tidak diperlukan, walaupun kedua corak perencanaan tersebut bersandar pada teori sosialis.

Berbeda dengan corak sebelumnya, Lindblom (1966:4) menunjukkan bahwa dalam perencanaan inkremental tidak terdapat tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan inkremental lebih menekankan pada keperluan masyarakat dan dilakukan secara terpotong-potong (*incremental*). Satu produk perencanaan dibuat tidak berhubungan dengan produk perencanaan yang lain. Terpotong-potongnya produk perencanaan ini karena perencanaan inkremental berlandaskan pada teori politik liberal. Dalam kondisi ini liberalisme mendorong kekuasaan di masyarakat sehingga masyarakat membuat perencanaannya masing-masing.

Walaupun terdapat berbagai corak perencanaan yang dikaji oleh para ahli, namun demikian Klosterman (1985) mengemukakan adanya argumen yang menyokong dan menentang perencanaan. Kelompok yang menentang perencanaan bertolak dari argumen ekonomi. Argumen ekonomi (*economic arguments*) didasari atas pemikiran Adam Smith (1776) dan John Stuart Mill

(1859) yang menganut tradisi Liberal¹⁰⁹. Mereka mengkritik perencanaan dan campur tangan pemerintah yang dapat mematikan inisiatif pihak swasta (*private sector*), mematikan inovasi dan menyebabkan terjadinya pemborosan. Bagi pandangan mereka perencanaan tidak diperlukan karena teori ekonomi seperti teori pasar persaingan dapat memberikan jalan keluar tercapainya alokasi sumber dengan cara yang efisien (*efficient allocation of resources*).

Kelompok kedua yang menentang perencanaan datang dari argumen pluralis. Mereka menentang adanya perencanaan karena menurut pandangan mereka perencanaan akhirnya akan mengendalikan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam jangka panjang. Menurut mereka pemerintah sepatutnya meningkatkan kekuatan politis dalam berunding dengan berbagai kelompok masyarakat sehingga tidak terjadi dominasi kehidupan umum oleh suatu kelompok.

Kelompok lain yang menentang perencanaan muncul dari kelompok tradisi ilmu-ilmu sosial (*traditional arguments*). Mereka mengkritik perencanaan umum karena umumnya para perencana hanya bertumpu pada aspek fisik semata. Mereka juga menganggap bahwa pembangunan kota secara politis merupakan bawahan (*subordinate*) pemerintah dan adanya usaha pemerintah dalam penyediaan keperluan dan kepentingan umum tidak lain hanyalah pelayanan pemerintah pada kelompok pedagang.

Kelompok radikal (*radicalist argument*) pula menolak teori dan praktek perencanaan menyeluruh (*comprehensive planning*) karena cenderung menjadi budak kapitalis. Menurut kelompok ini perkembangan sosial ekonomi masyarakat dikendalikan oleh sistem kapitalis. Mereka juga mengkritik kaedah kerja para perencana yang bekerja atas nama kepentingan umum walaupun sebenarnya kerja mereka cenderung mensahkan tindakan pemerintah dalam melestarikan kelompok kapitalis.

Walaupun demikian, para kelompok penentang perencanaan tersebut di atas juga mengusulkan jalan keluar bagi terwujudkannya perencanaan (Klosterman, 1985). Kelompok argumen ekonomi mengusulkan bahwa pemerintah diperlukan dalam perencanaan pembangunan terutama dalam hal penyediaan barang umum (*public goods*), mengatasi eksternaliti, distribusi pelayanan dan jasa serta untuk mengatasi keadaan dilema¹¹⁰.

¹⁰⁹ Smith (1776) dan Mill (1859) menekankan pada kebebasan individu dan kekuatan pasar (*market forces*). Mereka menganggap bahawa keterlibatan kerajaan dalam pembangunan ekonomi harus dibatasi dan menyerahkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar (*market mechanism*). Mereka percaya bahawa pasar adalah efisien dan dapat segala persoalan dapat diselesaikan melalui kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran (dapat diselesaikan melalui kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran (*demand and supply*)). Oleh kerananya kerajaan harus melindungi kebebasan individu dan memberikan peluang bagi pihan dan tindakan-tindakan.

¹¹⁰ Sebagai contoh keadaan dilemma ini adalah kawasan perkampungan kumuh (*slum village*) di bandar. Kondisi dilemanya adalah penyediaan perumahan yang terjangkau dan murah dihadapkan pada harga tanah yang tinggi.

Kelompok argumen pluralis mengusulkan bahwa untuk menghindari masalah kepentingan antara kelompok yang timbul akibat dampak dari perencanaan menyeluruh (*comprehensive planning*) diperlukan perencanaan advokasi (*advocacy planning*). Dalam perencanaan advokasi, perencanaan harus dapat mewakili kepentingan masyarakat yang tidak terwadahi dan para perencana berfungsi sebagai penasihat.

Kelompok tradisi ilmu sosial pula mengusulkan bahwa perencanaan harus bebas nilai, memiliki definisi dan tujuan yang jelas, kaedah analisis yang jelas, dapat dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Sedangkan bagi kelompok argumen radikal, perencanaan sebaiknya dilakukan secara terpusat (*central planning*) manakala kesenjangan masyarakat diatasi melalui penguasaan alat dan mekanisme produksi oleh pemerintah.

Sebenarnya perencanaan pembangunan konvensional bermula dari perencanaan pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari uraian yang dikemukakan antara lain oleh Lewis (1951) dan Tiberger (1964). Lewis (1951) menunjukkan enam pengertian perencanaan yang dipakai dalam kepustakaan ekonomi. Pertama, perencanaan dikaitkan dengan letak geografis, bangunan tempat tinggal dan sebagainya. Kadangkala ia disebut sebagai perencanaan Kota dan negara dan adakalanya disebut perencanaan saja. Kedua, perencanaan berarti memutuskan uang apa yang akan dipakai pemerintah pada masa depan seandainya pemerintah memiliki uang untuk dibelanjakan. Ketiga, ekonomi berencana adalah ekonomi di mana masing-masing satuan produksi (atau perusahaan) hanya memakai sumber daya insani, bahan dan peralatan yang dialokasikan dan menjual produknya ke pemerintah pusat. Keempat, perencanaan kadangkala berarti penentuan sasaran produksi oleh pemerintah walaupun untuk satu atau dua industri saja yang dianggap penting. Kelima, sasaran perekonomian dimaksudkan untuk mengalokasikan semua buruh, bahan mentah dan sumber lainnya ke berbagai bidang perekonomian. Keenam, kata perencanaan dipakai untuk menggambarkan sarana yang dipergunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada perusahaan swasta.

Perencanaan pembangunan pada mulanya tersebut dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang hanya menekankan pada ilmu ekonomi saja karena permasalahan pokok perencanaan pembangunan pada awalnya adalah menyangkut masalah ekonomi¹¹¹. Perencanaan pembangunan ini

¹¹¹ Tingginya perhatian terhadap perancangan pembangunan menurut Lincoln Arsyad (1999: 112) disebabkan 3 faktor utama yaitu : pertama, munculnya hasrat Negara Sedang Berkembang (*developing country*) untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi dan mempersiapkan landasan ekonomi yang kuat bagi pembangunan selanjutnya; kedua, perancangan ekonomi di negara-negara sosialis (yang dianggap negara pertama yang menjalankan perancangan ekonomi sistematis dengan konsep pembangunan lima tahunan) menyebar ke negara lain; dan ketiga, pengalaman perancangan (*war time planning*) di Eropah dan Amerika yang menunjukkan bahawa peranan pemerintah mempengaruhi tingkat dan arah

kemudian berkembang ke berbagai bidang oleh karena persoalan pembangunan bukan saja persoalan pemenuhan keperluan masyarakat yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi semata-mata, tetapi juga aspek-aspek sosial, budaya, fisik prasarana dan tata-ruang. Dengan perkataan lain, persoalan pembangunan bersifat multidimensi. Oleh sebab itu di berbagai negara termasuk di Indonesia, istilah perencanaan pembangunan lebih umum digunakan dibandingkan dengan perencanaan ekonomi.

Sekaitan dengan hal yang tersebut di atas, Sjafrizal (2009:1) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merangkumi aspek yang cukup luas, tidak hanya meliputi aspek fisik dan tata-ruang saja, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya. Kesemua aspek ini saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Namun demikian ada pandangan yang tidak realistik dan keliru yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan hanya mencakup aspek fisik dan tata-ruang saja sehingga perencanaan selalu diasosiasikan hanya dengan Ilmu Planologi¹¹². Oleh karena itu tidak salah kiranya bila banyak kalangan berpendapat bahwa Ilmu Perencanaan Pembangunan tersebut sebenarnya bersifat multidisiplin yang mencakup beberapa bidang ilmu terkait baik fisik dan tata-ruang, ekonomi dan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Menurut Bintoro (1998), ada beberapa tujuan dari perencanaan pembangunan yaitu:

1. Mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*)
2. Meningkatkan pendapatan per kapita
3. Mengadakan perubahan struktur ekonomi
4. Perluasan kesempatan kerja
5. Pemerataan pembangunan (*distributive justice*)
6. Pembinaan institusi-institusi ekonomi masyarakat
7. Kemandirian pembangunan
8. Stabilitas ekonomi

Kemunculan ilmu perencanaan pembangunan di negara-negara yang menganut faham sosialis menekankan kemutlakan peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Untuk dapat mengarahkan peranan pemerintah tersebut secara sistematis dalam mendorong proses pembangunan, muncullah pemikiran dari para ahli untuk menggunakan

pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata mengutamakan pada *market forces* (kekuatan pasar).

¹¹² Menurut Uton Rustan (2010), planologi menunjukkan pengertian ilmu pengetahuan (logos) tentang perancangan (plan) sama ada dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, geologi dan sebagainya. Ilmu pengetahuan tentang merancang atau merencana (planologi) khususnya dalam merancang tata kota dimasukkan dalam ilmu pengetahuan keteknikan kerana banyak memerlukan ilmu pengetahuan tentang pekerjaan rekayasa (engineering) membuat bangunan.

konsep perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di negara sosialis di kenal dengan istilah “perencanaan pembangunan terpusat” (*central planning*). Perencanaan Pembangunan Terpusat ialah perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan kewenangan pemerintah dan kekuatan politik sebagai landasan utama.

Di negara-negara kapitalis, perencanaan pembangunan hadir sebagai bentuk campur tangan pemerintah. Dalam pandangan kaum kapitalis, kehadiran pemerintah diperlukan dalam perencanaan pembangunan karena adanya kegagalan pasar (*market failure*)¹¹³. Menurut Klosterman (1985) perencanaan di negara kapitalis menyandang empat fungsi sosial. Pertama, melingkupi kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, kedua, mengurangi dampak negatif dari kegiatan individu dan kelompok seperti limbah dan polusi, ketiga, menyediakan tujuan bagi pembuatan keputusan umum seperti tata guna lahan, dan keempat, mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.

Perencanaan pembangunan pada negara-negara kapitalis seperti Inggris dan Amerika Serikat dilaksanakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat tenaga kerja penuh (*full employment*) dan harga-harga yang stabil melalui dasar fiskal dan dasar moneter (Lincoln, 1999: 68). Pemerintah berusaha melakukan perencanaan ekonomi guna mencegah ketidakstabilan ekonomi. Kehadiran perencanaan pada negara kapitalis menurut Klosterman (1985) tidak lain merupakan implikasi dari fungsi pemerintah dalam pembangunan terutama dalam penyediaan barang umum, mengurangi biaya sosial akibat eksternalitas negatif dan menjaga kestabilan ekonomi.

Perencanaan pembangunan sebagai sebuah disiplin ilmu kemudian berkembang pesat pula di negara-negara non sosialis setelah Perang Dunia II berakhir. Pada masa itu terdapat dua kelompok negara yang berkeinginan untuk memacu proses pembangunan negaranya secepat mungkin yaitu kelompok negara yang kalah perang dan kelompok negara yang baru merdeka. Dalam kelompok negara yang kalah dalam perang (seperti Jerman, Italia dan Jepang), perencanaan pembangunan ditujukan pada membangun kembali negara dengan segera dari kehancuran akibat peperangan. Pada kelompok negara yang baru merdeka pula perencanaan pembangunan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain sebagai akibat dari penjajahan yang cukup lama. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah negara-negara bekas jajahan di kawasan Asia dan Afrika. Pada negara-negara yang baru merdeka ini, perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam bentuk *planning by incentive* dengan menggunakan mekanisme pasar¹¹⁴ sebagai landasan utama.

¹¹³ Kegagalan pasar (*market failure*) diartikan sebagai ketidakmampuan pasar dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang tercermin dari adanya barang awam (*public goods*), *externality*, dan maklumat tidak simetri.

¹¹⁴ Istilah mekanisme pasar diartikan sebagai tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar.

Pada peringkat empiris, terdapat banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai perencanaan. Penelitian perencanaan umumnya terbagi atas dua aras utama yaitu aras teori perencanaan dan aras praktek perencanaan. Sebagaimana dikatakan oleh Sujarto (1990) perencanaan tidaklah dikembangkan berdasarkan teori tetapi sebaliknya teori perencanaan berkembang sebagai kelanjutan dari pengalaman mengenai usaha-usaha manusia untuk mengatasi keadaan hidupnya. Perkembangan teori-teori perencanaan di Amerika pada dekade 60-an misalnya, tidaklah terlepas dari kehidupan bangsa Amerika yang mengalami berbagai konflik diskriminasi rasial, ketidakadilan sosial, dan kemiskinan. Berbagai masalah ini membuka mata para perencana bahwa pada hakikatnya perencanaan pembangunan harus melihat segi-segi sosial serta peran serta masyarakat dalam pembangunan (Saraswati, tanpa tahun).

Penelitian menyangkut praktek perencanaan telah dikaji oleh para ahli di antaranya oleh Jent (1964), Kaufman dan Jacobs (1987), dan Linblom (1959). Menurut para ahli tersebut, paling tidak terdapat 6 (enam) corak perencanaan yang dikenal dalam praktek yaitu: pertama, perencanaan menyeluruh (*comprehensive planning*), kedua, perencanaan induk (*master planning*), ketiga, perencanaan startegik (*strategic planning*), keempat, perencanaan ekuiti (*equity planning*), kelima, perencanaan advokasi (*advocacy planning*), dan keenam, perencanaan tambahan (*incremental planning*).

Namun begitu, penelitian-penelitian terdahulu yang boleh dikaitkan dengan penelitian ini dapat dibagi kepada dua tema utama yaitu perencanaan menyeluruh (*comprehensive planning*) dan perencanaan strategik (*strategic planning*). Hal ini disebabkan perencanaan ekuiti (*equity planning*), perencanaan advokasi (*advocacy planning*), dan perencanaan tambahan (*incremental planning*) lahir sebagai kritikan terhadap kelemahan dari perencanaan menyeluruh dan perencanaan strategik. Penjelasan tentang kedua corak perencanaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

PERENCANAAN MENYELURUH (*COMPREHENSIVE PLANNING*)

Penelitian perencanaan menyeluruh (*comprehensive planning*) dalam dataran teori dilakukan oleh Kent (1964) dan Fainstein (2005) dan dikenal dengan *urban general plan*. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa perencanaan menyeluruh meliputi analisis dalam semua aspek kehidupan perkotaan seperti kependudukan, perekonomian, sosial fisik dan sebagainya. Dalam pembangunan kota, perencanaan komprehensif melahirkan perencanaan pengembangan fisik atau perencanaan rencana tata ruang (*spatial planning*). Tradisi perencanaan (kota) sudah dimulai manusia seiring dengan usia peradaban kota yang telah dibangun manusia sejak jaman Mesir Kuno (Barocas 1972 dipetik dari Sudaryono, 2012). Perencanaan kota pada masa lalu telah menggunakan prinsip-prinsip perencanaan kota yang dikenal sekarang sebagai *modern planning* yang

mencakup *town planning*, *zoning*, *site planning*, dan *civic design* (Mokhtar, 1974 dikutip dalam Sudaryono, 2012:2). Perencanaan kota melalui perencanaan modern banyak diilhami oleh penelitian Le Corbusier (1929) yang mengilhami para perencana kota di dunia untuk membangun kota secara vertikal hingga pembangunan *superblock* dan *compact city*.

Dalam dataran praktik, perencanaan menyeluruh ini telah diteliti di berbagai negara seperti di negara-negara sedang berkembang (Dedero, 2010), negara Indonesia di antaranya oleh Muhamamad Musiyam (1996), Denny Zulkaidi (2002), Andi Oetomo (2002) Hadi Wahyono (2008), negara Jordan oleh Potter, Darmame, Barham dan Nortcliff (2009), negara Saudi Arabia oleh Mohammad Abdullah Eben Sale (2002), negara Sudan (Post, 1996), negara Malaysia oleh Abdul Ghani Salleh (2007), negara Zimbabwe oleh Mutenheri (2009) dan negara India (Roy, 2009). Para peneliti ini umumnya membicarakan persoalan praktek perencanaan dari berbagai aspek pembangunan kota terutama dari spek fisik. Seperti misalnya penelitian Muhammad Musiyam (1996) yang mengungkapkan kegagalan perencanaan menyeluruh dalam menyelesaikan konflik penataan ruang di Indonesia. Begitu pula dengan Dedero (2010) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara konsep dan pelaksanaan perencanaan di beberapa kota seperti kota Ibadan (Nigeria), kota Mumbai (India) dan kota San Antonio (Brazil). Ia juga menyimpulkan bahwa perencanaan yang dibuat telah menimbulkan kemiskinan kota.

Klosterman (1985) menyatakan bahwa pembangunan kota melalui perencanaan menyeluruh, telah melahirkan ketidakadilan dalam pembangunan kota. *Modern planning* pula telah menyederhanakan asumsi bahwa terdapat hubungan yang sangat positif dan dapat dibenarkan secara ilmiah antara pikiran yang tumbuh di masyarakat, kepentingan kapitalis, dan intervensi yang dilakukan pemerintah kota sehingga perencanaan kota diyakini akan mampu membuat kota menjadi terpadu sejalan keinginan dan keperluan masyarakat (Sudaryono, 2012: 8). Namun dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara pikiran dan kenyataan. Adanya keasus perlawanan masyarakat dalam pembangunan kawasan seperti peruntuan masjid di Kota Medan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa corak perencanaan yang dikemukakan di atas memperlihatkan adanya ketidaksejajaran antara perencanaan dan pelaksanaan.

PERENCANAAN STRATEGIK (*STRATEGIC PLANNING*)

Kritikan terhadap perencanaan menyeluruh yang bertumpu pada aspek fisik (tata ruang dan bangunan vertikal) memunculkan corak perencanaan strategik. Pada awalnya, corak perencanaan strategik adalah perencanaan yang dilakukan pada perusahaan (Stoner and Winkel: 1990), Griffin, 2004:199-200, Plunket, Attner dan Allen, 2005:157-158 dan Rue dan Byars, 2007:139). Stoner dan Wankel (1990) memperkenalkan perencanaan strategik sebagai proses pemilihan organisasi, penentuan

kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan kaedah yang diperlukan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategik dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.

Menurut Achmad Djunaedi (2000:4), sebelum tahun 1980-an, para perencana perusahaan dan perencana kota tidak pernah saling berkomunikasi untuk bertukar cara berpikir perencanaan. Pada awal 1980an, komunikasi antara dua pihak tersebut terjalin, dan perencana perkotaan meminjam pendekatan perencanaan strategik, yang biasa dipakai di bidang usaha, ke bidang perencanaan perkotaan.

Praktek perencanaan strategik dalam pembangunan dalam perspektif perencanaan umum dilakukan oleh Kaufman dan Jacobs (1987) yang menyimpulkan bahwa perencanaan strategik tidak jauh berbeda dengan jenis perencanaan menyeluruh (*comprehensive planning*). Mereka menganggap bahwa perencanaan menyeluruh dan perencanaan strategik dimisalkan sebagai barang yang sama tetapi dikemas dengan bungkus baru. Pengalaman pelaksanaan perencanaan strategik dengan kasus kota Cleveland di Amerika Serikat dikemukakan oleh Krumholz (1982).

Untuk kasus Indonesia, penelitian perencanaan strategis terutama dalam penyusunan Rencana pembangunan daerah telah dilakukan di antaranya oleh Achmad Djunaedi (1995, 2001), Kasyul Mahalli (2008), Eko Budi Santoso (2008), dan Sjafrizal (2009). Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, ditemui kesan adanya jurang antara perencanaan pembangunan (sebagai produk dari perencanaan strategis) dan penataan ruang (sebagai produk perencanaan menyeluruh). Sekaitan dengan hal ini, Achmad Djunaedi (2001) mengusulkan dua alternatif model penerapan perencanaan strategis untuk perencanaan keruangan yaitu pertama, perencanaan tata ruang berjalan bersama secara kohesif dengan perencanaan pembangunan, dan kedua, perencanaan strategis pembangunan daerah memayungi semua perencanaan lainnya termasuk perencanaan tata ruang.

PERKEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Perencanaan pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan juga meliputi proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan merupakan segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, penjadualan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan (Bappenas, 2007).

Usaha perencanaan pembangunan di Indonesia dimulai pada masa orde lama tepatnya pada tahun 1947 melalui Maklumat Pemerintah mengenai Pembangunan Negara 18 Agustus 1945. Usaha perencanaan pembangunan tersebut ditandai dengan dibentuknya Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada April 1947 yang diketuai oleh Drs. Mohamad Hatta. Panitia ini berhasil membuat dokumen rencana yang bertajuk "Dasar Pokok dari pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia". Dokumen inilah yang merupakan awal sejarah perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Walaupun demikian, akibat keadaan politik yang belum stabil, dokumen tersebut tidak dapat di jalankan hingga harus di buat dokumen perencanaan yang lain seperti dokumen "Plan Produksi Tiga Tahun Republik Indonesia" dengan jangka waktu tahun 1948-1950. Perencanaan ini pun gagal karena Indonesia beralih menjadi Negara federal.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memulai tahapan baru dengan dibentuknya Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960. Namun dokumen ini juga gagal dilaksanakan karena adanya gejolak keadaan politik yaitu dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi Negara kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut dari dekrit Presiden ini adalah dibentuknya Dewan Perencana Nasional (Depernas) yang bertugas menyusun perencanaan pembangunan nasional. Depernas menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Semesta Berencana (*Comprehensive National Development Plan*) dengan jangka waktu 1961-1969. Melalui Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963, Depernas akhirnya berubah menjadi Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga kini. Lahirnya Bappenas merupakan tonggak sejarah munculnya institusi perencanaan di Indonesia.

Perencanaan pembangunan pada masa orde baru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bappenas ditugasi untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita pertama yang dimulai pada tahun 1969 hingga tahun 1973 dimuat dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)¹¹⁵. Era Repelita ini berlangsung hingga Repelita VI yang berakhir pada tahun 1998 akibat adanya cobaan dalam bentuk krisis ekonomi yang melanda Indonesia¹¹⁶.

¹¹⁵ GBHN adalah dokumen perancangan yang memuat arah dan tujuan pembangunan selama lima tahun. GBHN merupakan hasil keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang harus dijalankan oleh presiden.

¹¹⁶ Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sebenarnya merupakan hasil dari efek berantai (*contagion effect*) dari krisis ekonomi yang terjadi secara regional. Krisis ini disebut juga dengan krisis moneter yang ditandai dengan merosotnya nilai mata uang rupiah terhadap US\$ menjadi Rp. 17,000/US\$ 1. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -13% Krisis ekonomi semakin parah akibat perilaku serakah dari pelaku ekonomi yang melakukan spekulasi demi mencari keuntungan serta perilaku panik dari pengusaha yang diikuti oleh pelarian modal (*capital flight*). Krisis moneter akhirnya menyebabkan terjadinya krisis sosial, krisis politik, krisis moral dan krisis keamanan (Soesilo Bambang Yudhoyono :2006).

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menunjukkan lemahnya asas ekonomi Indonesia sekaligus menunjukkan lemahnya paradigma pembangunan yang berjalan pada masa Soeharto. Paradigma pembangunan yang dianut oleh pemerintah pada waktu itu adalah pertumbuhan ekonomi (Bratakusumah, 2003). Akibat dari krisis ekonomi yang telah merusak mekanisme penyusunan perencanaan, maka Repelita dan GBHN tahun 1998 tidak dapat dilakukan. Namun demikian, program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pembangunan pada masa orde baru berpangkal pada pendekatan pembangunan bangsa (*Nation Building Approach*) dalam kerangka jangka panjang dan jangka menengah. Pada jangka panjang, pendekatan pembangunan bangsa yang berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu antara berbagai kehidupan masyarakat. Manakala pada jangka menengah, pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial dengan lebih bertitik berat pada pembangunan sektor pertanian dan sektor sosial serta kelembagaan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial (Lincoln Arsyad, 2005: 32).

Walaupun demikian krisis ekonomi telah membuahkan reformasi dan otonomi daerah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 bertujuan untuk meruntuhkan diktatorisme sekular Orde Lama dan Orde Baru. Reformasi perlu dijadikan kes dalam memahami peranan etika religius dalam pembangunan dan perubahan sosial. Reformasi bermula dari krisis moneter lalu merebak ke krisis ekonomi hingga menyebabkan krisis moral yang akhirnya menyebabkan pula timbulnya konflik sosial (Bustanuddin Agus, 2007: 17-21).

Reformasi melahirkan tuntutan desentralisasi dan memunculkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah¹¹⁷. Undang-undang pemerintahan daerah ini dikenal juga dengan nama undang-undang otonomi daerah¹¹⁸.

¹¹⁷ Menurut Amri (2000), lahirnya kedua undang-undang tersebut disebabkan oleh dua motif yaitu motif ekonomi dan motif politik. Pada motif ekonomi diartikan sebagai tuntutan daerah akan keadilan dan pemerataan pembangunan. Daerah yang kaya akan sumberdaya alam seperti Aceh, Riau dan Irian Jaya merasa kurang mendapatkan hasil dari sumberdaya alam yang dimilikinya karena pajak diambil oleh pemerintah pusat. Di lain pihak ada pula daerah yang kurang memiliki sumber daya alam. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah inilah yang menuntut keadilan dan pemerataan agar mereka mendapatkan dana pembangunan sebagai kompensasi hasil sumberdaya alamnya. Motif kedua adalah motif politik yaitu demokrasi. Daerah menginginkan adanya keleluasaan untuk mengatur dan menentukan sendiri apa yang ingin dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, karena mereka merasa bahwa yang mengetahui tuntutan masyarakat daerah adalah pemerintah daerah bukan pemerintah pusat. Inilah sebenarnya yang diartikan sebagai otonomi daerah.

¹¹⁸ Otonomi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pokok otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 dianggap sebagai momentum baru dalam desentralisasi pembangunan di Indonesia.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perencanaan pembangunan juga mengalami perubahan. Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengakibatkan perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya pemerintah Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah di daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN ini merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam SPPN menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dokumen ini mengandung perencanaan untuk tempoh waktu perencanaan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk tempoh 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bahagian terdahulu, perencanaan pembangunan mengalami pasang surut begitu pula dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan. Perkembangan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan tahun 1945 hingga sekarang dapat dilihat secara terperinci pada Tabel-2 berikut.

publik dan mewujudkan demokrasi lokal. Pembahasan mendalam tentang otonomi dan pembangunan daerah diantaranya dapat dilihat pada Mudradjad Kuncoro (2004) dan Sjafrizal (2009).

Tabel-2 Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Rencana Pembangunan Tahun 1945-sekarang

Periode	Lembaga Perencanaan	Menteri/ Ketua Lembaga Perencanaan	Dokumen yang dihasilkan
Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)	Badan Perencana Ekonomi, memperkuat Panitia Pemikir Siasat Ekonomi.	Sjahrir (Perdana Menteri)	Dasar-Dasar Pokok dari Perencanaan Ekonomi Indonesia
Periode Federal (1950-1959)	Panitia Pemikir Siasat Ekonomi.	- M Hatta (Wapres) dibantu A.K. Gani (Menteri Kemakmuran) - Sjahrir (PM) - Ir. H. Djuanda (Menkeu).	Plan Mengatur Ekonomi Indonesia (Rencana Hatta).
Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	Biro Perencana Negara mendukung Depernas (Depernas sudah ada terlebih dahulu).	Ir. H. Djuanda (merangkan jabatan Menkeu hingga 1955).	Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (GNB-RPLT).
1961-1969	Dewan Perencana Nasional (Depernas).	1. Prof. M. Yamin. 2. Ir. H. Djuanda (Menteri I).	Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penas BD).
1969-1998	Kementerian Negara PPN/ Bappenas.	1. Prof. Dr. Widjojo Nitisasatro (Menteri) 2. Prof. Dr. Salef Afif (Wakil Kepala Bappenas merangkap Menteri Negara PAN). 3. Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita.	Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
1998-2004	Bappenas.	Junaidi Hadisumarto (Kepala Badan).	1. Program Pembangunan Nasional (2000-2004)/ Propenas. 2. Rencana Pembangunan Satu Tahun (Repeta).

Periode	Lembaga Perencanaan	Menteri/ Ketua Lembaga Perencanaan	Dokumen yang dihasilkan
2004-sekarang	Kementerian Negara PPN/ Bappenas.	1. Drs. Kwik Kian Gie (Menteri). 2. Paskah Suzetta. 3. Prof. Dr. Armida Ali Syahbana.	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sumber : Nugroho dan Wrihatnolo (2011)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tidak terlepas dari falsafah pembangunan yang terdiri dari dasar negara¹¹⁹ dan paradigma pembangunan¹²⁰ yang dianut oleh bangsa Indonesia. Perkembangan falsafah pembangunan yang mewarnai perencanaan pembangunan di Indonesia dari tahun 1945 hingga kini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel-3 Perkembangan Falsafah Perencanaan Pembangunan di Indonesia

1945-1949	1950-1959	1960-1965
UUD 1945 (Kristalisasi Nilai-nilai Kebangsaan dan Perjuangan Bangsa)	UUD RIS – UUD 1950 (Perubahan dan Perjuangan Menegakkan Kedaulatan)	UUD 1945 (Kembali ke UUD 1945 Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
Pembangunan merupakan perjuangan kolektif bangsa dalam mengisi kemerdekaan, dalam membebaskan anak bangsa dari penjajahan dan keterbelakangan di berbagai bidang kehidupan, memberdayakan individu dan masyarakat agar bisa maju dan mandiri dalam membangun Indonesia Merdeka. Pembangunan bidang perekonomian bersemangat koperasi dan	Falsafah pembangunan didasarkan dan ditujukan pada perwujudan sila-sila Pancasila; mengakui kebebasan berserikat dan berkumpul di bidang politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Pembangunan merupakan tanggung jawab dan dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang membenarkan eksistensi pasar dengan pengembangan kebijakan	Falsafah pembangunan merupakan sintesis dari Pancasila dan Manipol-Usdek-Nasakom berdasarkan asumsi “revolusi belum selesai”. Pembangunan merupakan proses transformasi revolusioner dalam segenap bidang kehidupan menuju masyarakat “sosialisme ala Indonesia”. Penyelenggaraan negara dan pembangunan merupakan tanggung

¹¹⁹ Falsafah bangsa dalam bernegara dan pandangan hidup bangsa.

¹²⁰ Pola pikir berbasis ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bangsa dalam konteks governance dan development era pemerintahan terkait

disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.	perekonomian didasarkan Pasal 38 UUDS 1950 yang mirip dengan Pasal 33 UUD 1945.	jawab segenap komponen bangsa didasarkan pada demokrasi politik dan ekonomi terpimpin, membenarkan etatisme ekonomi, dan kegotongroyongan nasakom di bawah seorang Pemimpin Besar Revolusi (PBR).
1966 - 1998	1998 - 2004	2004 - 2015
UUD 1945 (Kembali ke UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi)	UUD 1945 (Proses Amandemen, Legitimasi Substitusi GBHN, dan Pelembagaan SPPN)	UUD 1945 (Hasil Amandemen, Pemilihan Umum Presiden Secara Langsung)
Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia secara berkeimbangan mengacu pada Trilogi Pembangunan; menggunakan sistem Demokrasi ekonomi yang membenarkan "mekanisme pasar terkendali" merupakan kebijakan pemerintah yang terarah pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas yang sehat dan dinamis, serta pembangunan yang berkelanjutan. Pelaku pembangunan adalah pemerintah dan peran aktif masyarakat. Pembangunan merupakan perjuangan panjang yang harus dijaga kesinambungannya. Hal ini dituangkan ke dalam GBHN yang memuat strategi pembangunan 25 tahun dan disesuaikan setiap lima tahun sekali melalui Sidang Umum MPR.	Pembangunan merupakan rangkaian upaya (a) berkesinambungan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di seluruh bidang kehidupan yang terarah pada pencapaian cita-cita dan tujuan bernegara, yaitu: Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur; (b) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan demokrasi dan memperkuat landasan pembangunan selanjutnya; serta (c) mewujudkan masyarakat aman, damai, adil, terbuka, demokratis dan sejahtera atas dasar sendi-sendi masyarakat madani.	Pembangunan demokrasi di seluruh wilayah Tanah Air dilaksanakan secara berencana dalam berbagai bidang kehidupan, terarah pada pencapaian visi, misi dan program Presiden terpilih, yaitu (1) pada Kabinet Indonesia Bersatu I : terwujudnya kehidupan nasional yang aman, bersatu, rukun, dan damai menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; terwujudnya perekonomian yang mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja, penghidupan yang layak, dan pembangunan yang berkelanjutan; (2) Pada Kabinet Indonesia Bersatu II: Peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi tumbuh dengan keadilan sejati bagi rakyat (development, prosperity, democracy, and justice)

Sumber : Mustopadidjaja AR (2012)

Tabel-3 di atas menggambarkan bahwa terjadinya perubahan falsafah pembangunan di Indonesia. Tuntutan perubahan falsafah pembangunan ini sebagai akibat dari gejolak politik yang terjadi pada masing-masing periode pembangunan.

Sehubungan dengan adanya perubahan falsafah pembangunan, paradigma pembangunan juga mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada Tabel-4 berikut.

Tabel-4 Perkembangan Paradigma Pembangunan

1945-1949	1950-1959	1960-1965
Kolektivitas dan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, peningkatan kemampuan individu dan masyarakat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, termasuk dalam bidang perekonomian yang disusun atas dasar semangat kooperasi dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai amanat konstitusi.	Paradigma independensi dan antindependensi dengan pola pikir kebebasan berserikat dan berkumpul di bidang politik, ekonomi dan kemasyarakatan dalam upaya membebaskan diri dari ketergantungan, belenggu keterbelakangan, dan kemiskinan akibat dominasi kolonial. Perencanaan pembangunan era ini sangat dipengaruhi pola pikir pimpinan pemerintah yang bertekad melaksanakan sistem ekonomi politik berlandaskan paham nasionalisme.	Paradigma pembangunan dalam Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) 1961-1969 adalah Manipol-Usdek-Nasakom beranjak dari pemahaman "revolusi belum selesai" yang dioperasionalkan melalui demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, sosialisme Indonesia, dan kegotongroyongan Nasakom (nasional, agama, dan komunis).
1966 - 1998	1998 - 2004	2004 - 2015
Paradigma yang digunakan adalah penataan sistem politik dan ekonomi secara konstitusional dan rasional dilandasi semangat kembali ke Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Prinsip yang dipakai adalah setiap kebijakan ekonomi dan politik harus mencerminkan pasal-pasal dalam UUD 1945, berlandaskan demokrasi ekonomi, dan mekanisme	Paradigma pembangunan adalah reformasi total secara terencana, melembaga dan berkesinambungan sebagai koreksi terhadap seluruh penyimpangan yang terjadi di bidang ekonomi, politik dan kelembagaan pemerintah disertai usaha mewujudkan otonomi (desentralisasi) nilai dan prinsip "tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" serta terbangunnya masyarakat madani, persatuan dan	Paradigma yang mendasari strategi pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu I, "pro growth, pro poor, dan pro jobs" serta "pembangunan berkualitas". Paradigma pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II adalah pembangunan yang seimbang, inklusif, dan kreatif (a balanced growth, and inclusive as well as creative development) menuju

<p>pasar terkendali. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan diambil mindset pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dengan siklus kepemimpinan nasional lima tahunan dan "trilogi pembangunan" memadukan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta peningkatan kualitas SDM, pembangunan manusia, dan pembangunan yang berkelanjutan.</p>	<p>kesatuan nasional, serta kegotongroyongan segenap komponen bangsa.</p>	<p>Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan demokratis,</p>
--	---	--

Sumber : Mustopadidjaja AR (2012)

ISLAMISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya pemerintah Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya dibuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2005 hingga tahun 2025, manakala Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu RPJM I tahun 2005-2009, RPJM II tahun 2010-2014, RPJM III tahun 2014-2019 dan RPJM IV tahun 2015-2024.

Pada RPJP Nasional tahun 2005-2025 termuat visi Indonesia 2025 yaitu *Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*. Adapun makna dari visi tersebut adalah : Mandiri diartikan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju diukur dari kualitas sumber daya insani, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Adil diartikan tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antara individu, jenis kelamin, maupun wilayah. Sedangkan makmur diartikan sebagai terpenuhi seluruh keperluan hidup sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Pencapaian visi tersebut diatas didukung oleh 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia aseri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Landasan hukum penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia tidak dapat terlepas dari paradigma pembangunan yang berlaku. Paradigma pembangunan yang selama ini berlaku di Indonesia bertumpu pada paradigma pembangunan lazim yang tidak terlepas dari kepentingan pasar¹²¹, walaupun secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, telah menggariskan aturan yang sangat jelas tentang peran negara, paradigma pembangunan utamanya pembangunan kesejahteraan dan ekonomi Indonesia¹²².

Sebagai landasan hukum penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memuat visi dan misi abadi bangsa Indonesia. Visi abadi yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ialah "*Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur*". Sedangkan misinya adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran visi dan misi tersebut di atas yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang berkenaan dengan kesejahteraan. Peran negara terhadap

¹²¹ Lihat misalnya padangan Ari A Perdana (2001) tentang peranan "kepentingan" dalam mekanisme pasar dan penentuan kebijakn ekonomi di Indonesia yang menyoroti bagaimana peranan pemerintah Indonesia yang terpaksa harus berkompromi dengan pasar dalam penentuan kebijakan pembangunan ekonomi.

¹²² Perbincangan khusus tentang konstitusi ekonomi lihat tulisan Jimly Asshiddiqie (2010)

kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dituangkan dalam pasal-pasal sebagaimana dapat dilihat ada Tabel-3 berikut.

Tabel-3 Pasal-Pasal Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat Dalam UUD 1945

Pasal	Ayat	Isi
1	2	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
27	2	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
28 A		Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
28 C	1	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
28 D	2	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
28 H	1	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
31	1	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
	2	Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
33	1	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
	2	Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
	3	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
	4	Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
34	1	Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
	2	Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
	3	Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sumber : Undang-Undang Dasar 1945, diolah

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi sekaligus dasar falsafah bernegara bangsa Indonesia, sebenarnya sangat sarat dengan nilai-nilai agama Islam. Menurut Sri Edi Swasono (2010: 22), salah satu pasal yang memuat nilai Islam adalah pasal 33 UUD 1945. Pasal

33 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian dapat diartikan bahwa perekonomian secara imperatif harus disusun, tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai dengan kehendak dan perilaku para penguasa pasar. Ketimpangan yang muncul harus direstruktur dengan campur tangan pemerintah, agar daulat pasar tidak menggusur daulat rakyat. Perekonomian disusun mengacu pada Firman Allah pada Surah al-Hasyr (59:7) yang artinya:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan adanya demokrasi ekonomi dan demokrasi Indonesia berdasar pada faham kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutualism* dan *brotherhood* alias berjamaah dan berukhuwah¹²³) dan bukan pada asas perorangan (*individualistik*) sebagaimana demokrasi barat. Dalam konteks Islam, persaudaraan ini sesuai dengan ayat al-Hujuraat (49:10) yang artinya:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Kandungan nilai-nilai Islam dalam pasal-pasal kesejahteraan tersebut di atas sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran Bung Hatta¹²⁴ sebagai perumus pasal-pasal ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hatta secara tegas menyatakan bahwa ekonomi Indonesia adalah sosialisme religius. Menurutnya sosialisme Indonesia timbul dari tiga faktor yaitu: pertama, sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama. Agama menghendaki adanya rasa persaudaraan (*brotherhood/ukhuwah*) dan tolong-menolong antara sesama manusia serta bersikap adil. Kedua, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi daripada jiwa berontak terhadap perlakuan yang sangat

¹²³ Dalam pandangan Sri Edi Swasono (2010) salah satu nilai kemanusiaan yang ditekankan dalam Islam adalah Ukhuwah atau persaudaraan.. Menurut Al Qur'an, hidup bersama itu merupakan kenikmatan terbesar, seperti firman-Nya: "Dan ingatlah akan kenikmatan Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara." (Ali Imran: 103). Ukhuwah dapat dibedakan menjadi *ukhuwah diniyah* (persaudaraan sesama agama), *ukhuwah wathiniyah* (persaudaraan sesama bangsa) dan *ukhuwah bashariah* (persaudaraan sesama manusia)

¹²⁴ Untuk mendalami pemikiran ekonomi Bung Hatta dalam perspektif Islam silahkan melihat Anwar Abbas (2008).

tidak adil dari penjajahan sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima Marxisme, mencari sumber sosialisme yang berakar pada masyarakat Indonesia sendiri (Sri Edi Swasono, 1985:138-141). Jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari Marxisme. Artinya, yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosial demokrasi Barat dan Sosialisme religius (Islam) dimana marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak (Sri Edi Swasono, 2010).

Walaupun tidak secara terbuka Hatta mencantumkan Islam sebagai landasan pembangunan, namun menurut Muchtar Naim (dalam Anwar Abbas, 2008), Hatta telah mementingkan jiwa dan etika dalam ajaran Islam itu sendiri ketimbang mengambil sistem dan bentuk strukturnya. Dalam istilah Bachtiar Effendy (2011), Hatta lebih menekankan substansi dari pada bentuk yang legal formal.

Dalam catatan kritis, Muhammad Syukri Salleh (2011) mengemukakan bahwa jika benar pemikiran sosialisme religious Mohammad Hatta itu bersifat Islam, kenapa istilah sosialisme masih perlu dikekalkan sekarang? Bila Mohammad Hatta mungkin memunculkan pasal 33 UUD 1945 dengan sebegitu rupa agar kemudiannya, bila sesuai seperti sekarang ini, sistem Islam sepenuhnya dapat dikembangkan. Tetapi sekarang, apabila kecenderungan kepada ekonomi Islam telah begitu ramai dan sangat digalakkan, kenapa istilah sosialisme masih diperlukan lagi?.

Berdasarkan pandangan di atas, muncul pertanyaan: ke arah manakah seharusnya perencanaan pembangunan Indonesia?. Bila dilihat daripada kenyataan tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan Indonesia semestinya berpijak pada dataran sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Adanya nilai-nilai Islam dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia berakar pada dan bertujuan untuk mengimpelementasikan nilai tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan. Bahkan, dalam kerangka acuan pelaksanaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tahun 2006 yang lalu telah mencatat bahwa salah satu pilar yang patut dipertimbangkan sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang adalah paradigma baru pembangunan ekonomi Indonesia. Sehubungan dengan paradigma baru ini, Pasal 33 UUD 1945 perlu direnungkan kembali agar pembangunan sekarang dan di masa yang akan datang tetap pada jalurnya sebagaimana yang divisikan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*).

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu dilakukan perubahan paradigma perencanaan pembangunan Indonesia. Keperluan akan perencanaan pembangunan disebabkan adanya keperluan akan pengarah kegiatan pembangunan dan adanya pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dalam mencapai tujuan. Konsepsi perencanaan bukanlah sekedar membuat rencana tetapi menyangkut proses yang berlangsung

secara berterusan dan memiliki implikasi penting terhadap peran perencana.

Dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi filosofis, yaitu *tauheed uluhiyyah*, *tauheed rububiyah*, *khilafah*, *tazkiyyah an-nas*, dan *al-falah*. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam Islam dan berasal dari dua sumber utama Islam, yakni al-Quran dan sunnah. Menurut paradigma Islam, kelima pondasi filosofis ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut (Aidit Ghazali, 1990).

- a. *Tauheed Uluhiyyah*, yaitu percaya pada Kemahatunggalan Tuhan dan semua yang di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, manusia hanyalah penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada manusia lainnya.
- b. *Tauheed Rububiyah*, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada satu titik ekstrem, sikap fatalistik tidak dibenarkan, sementara pada titik ekstrem lainnya, kepercayaan sepenuhnya hanya pada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi Sang Pencipta.
- c. *Khilafah*, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di samping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya.
- d. *Tazkiyyah an-nas*, ini merujuk kepada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperkirakan sebelum manusia menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan pembangunan (*agent of change and development*). Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apa pun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.
- e. *Al-falah*, yaitu yaitu konsep keberhasilan dalam Islam bahwa keberhasilan apa pun yang dicapai di kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia tidak menyalahi petunjuk atau bimbingan yang telah Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, tidak ada dikotomi di antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia ataupun persiapan bagi kehidupan di akhirat.

Menurut Khursid Ahmad (dalam Zeenath Kausar, 2000; 17-19) ada beberapa hal yang menjadi kekhususan konsep pembangunan dalam perspektif Islam yaitu :

1. Konsep pembangunan Islam bersifat komprehensif yang mencakup dimensi moral, spiritual dan material. Pembangunan oleh karenanya merupakan tujuan dengan kegiatan yang berorientasi nilai. Kesejahteraan mencakup keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Manusia merupakan fokus dari usaha dan proses pembangunan.
3. Pembangunan dalam Islam harus dipandang sebagai kegiatan multidimensi.
4. Pembangunan memuat berbagai perubahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Dalam aspek kehidupan sosial, Islam menekankan pada optimalisasi sumberdaya yang diberikan Allah dan memanfaatkannya secara adil. Islam mengajarkan rasa syukur, adil dan membenci kufur dan zalim

Selain dari pada pandangan tersebut di atas, Muhammad Syukri Salleh mengemukakan konsepsi Pembangunan Berteraskan Islam (PBI). Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003) prinsip pembangunan berteraskan Islam mesti merangkumi 7 (tujuh) perkara penting yakni pertama, *tasawwur* (*worldview*) Islam sebagai acuan pembangunan; kedua, manusia sebagai pelaku pembangunan; ketiga, alam roh, alam dunia dan alam akhirat sebagai skala waktu pembangunan; keempat, ilmu fardhu 'ain sebagai kerangka pembangunan; kelima, ibadah sebagai perkaedahan pembangunan; sumber alam sebagai peralatan pembangunan; dan ketujuh, *mardhatillah* sebagai tujuan pembangunan.

Dalam prinsip pembangunan berteraskan Islam tersebut, penekanan ditujukan pada *tasawwur* (*worldview*) pembangunan. Menurut pandangan Muhammad Syukri Salleh (2007:21) *tasawwur* Islam bermaksud gambaran Islam yang hakiki, yang menjelaskan secara keseluruhan prinsip-prinsip dasar Islam secara benar dan lengkap. Dalam al-Qur'an terdapat tiga pokok utama *tasawwur* Islam yaitu: pertama, Allah s.w.t adalah Pencipta, kedua, manusia adalah makhluk, dan ketiga, sumber alam adalah makhluk. Untuk mencapai pembangunan berteraskan Islam, acuan pembangunan haruslah berdasarkan *tasawwur* Islam sebab *tasawwur* yang muncul dari *tasawwur* lazim bukan merupakan pembangunan berteraskan Islam yang tulen.

Dengan menggunakan pengertian perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, ketujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam memberikan implikasi bahwa perencanaan pembangunan dari perspektif pembangunan berteraskan Islam haruslah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, meletakkan *tasawwur* Islam sebagai acuan pembuatan rencana. Perencanaan pembangunan yang Islami haruslah berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam, sebab bila tidak berdasarkan Islam, maka dikhawatirkan nilai-nilai Islam yang akan disesuaikan dengan perencanaan tersebut.

Kedua, peran manusia sebagai pelaku perencana sangat penting. Dalam pandangan Khursid Ahmad (2000) manusia merupakan fokus dari usaha dan proses pembangunan. Dalam poses perencanaan, manusia berperan sebagai pembuat rencana. Pelajaran dari kisah Nabi Yusuf AS dapat dijadikan contoh. Sebagai seorang planner nabi Yusuf memiliki kriteria akhlak dan sikap serta perilaku yang akan menentukan keberhasilan penerapan sebuah perencanaan. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari HasballahThaib (2010: 51-66) mengemukakan akhlak utama yang wajib dimiliki seorang pejabat negara yang disimpulkan dari sikap dan perilaku nabi Yusuf AS yaitu:

1. Iman dan Taqwa. Iman dan Taqwa adalah dasar utama dalam setiap usaha. Iman dan Taqwa merupakan modal utama nabi Yusuf dalam menghadapi krisis.
2. Mengikuti kebenaran (Haq) dan menjunjung tinggi nilai keadilan.
3. Amanah
4. Sabar
5. Tawakkal kepada Allah
6. Istiqamah
7. Zuhud (sikap terpuji)
8. Suka bermusyawarah
9. Bertanggung jawab bagaimana seorang muslim melakukan.

Ketiga, alam roh, alam dunia dan alam akhirat harus dijadikan sebagai skala waktu perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memasukkan unsur waktu dalam penyusunan rencana. Keempat, ilmu sebagai kerangka perencanaan. Proses pembuatan rencana harus didukung oleh ilmu yang memadai. Dukungan ilmu dalam perspektif PBI adalah ilmu fardhu 'ain terbagi atas ilmu Tauhid, ilmu Feqah dan ilmu tasawuf (Muhammad Syukri Salleh (2003:41). Kelima, ibadah merupakan kaedah perencanaan. Perencanaan yang dilakukan tidak lain merupakan salah satu bentuk ibadah. Dalam hal ini rencana yang baik haruslah memuat unsur-unsur berikut: pertama, munasabah (mudah dan dapat dilaksanakan), kedua, berkembang (untuk tujuan perubahan dan untuk menyelesaikan masalah sejagat), ketiga, cara membuat keputusan melalui musyawarah, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dalam surah al-Syura (42:38) yang artinya : "sedang urusan mereka (diputuskan) secara musyawarah sesama mereka..."), keempat, pemilihan tujuan, dan kelima, monitoring (Surathman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad, 1993). Keenam, memanfaatkan sumber alam sebagai peralatan untuk mencapai tujuan perencanaan. Ketujuh, mardhatillah atau redha Allah sebagai tujuan perencanaan. Islam membagi tujuan kepada dua hal yaitu tujuan perantaraan dan tujuan akhir yang hakiki (Surathman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad, 1993:315). Diantara tujuan perantaraan adalah tujuan yang diperoleh di dunia seperti kekayaan dan sebagainya. Tujuan perantaraan ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan akhir yang hakiki yaitu al-falah.

PENUTUP

Pergeseran paradigma perencanaan pembangunan di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan serta hasilnya. Namun demikian, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kemerdekaan yang diperoleh memiliki hakekat yaitu Rahmat Allah yang maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa perjuangan dan kemerdekaan rakyat Indonesia adalah merupakan rahmat Allah yang harus disyukuri dan menunjukkan bahwa Indonesia mempercayai adanya Allah sebagai landasan tauhid pembangunan.

Sebagai landasan ideologis dan falsafah negara, UUD 1945 telah menggariskan aturan yang sangat jelas tentang peran negara, paradigma pembangunan utamanya pembangunan ekonomi Indonesia yang sebenarnya sangat sarat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh sebab itu, pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan. Penegakan nilai-nilai Islam dalam perencanaan pembangunan sangat tergantung pada peran perencana. Oleh karenanya juga, peranan pendidikan perencanaan yang sarat dengan nilai-nilai Islam sudah sepatutnya dikembangkan di Indonesia.

Pembangunan berteraskan Islam telah meletakkan prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pembangunan. Dalam kaitan ini, diperlukan eksplorasi yang mendalam untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks perencanaan pembangunan.

REFERENSI

- Aidit Ghazali (1990). *Development – An Islamic Perspective*, Petaling Jaya, Malaysia: Pelanduk Publications.
- Achmad Djunaedi (1995). Perencanaan Strategik untuk Perkotaan: Belajar dari Pengalaman Negara Lain, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB* No. 19 pp. 20-25 .
- Achmad Djunaedi. (2000). "Keragaman Pilihan Corak Perencanaan (Planning Styles) untuk Mendukung Kebijakan Otonomi Daerah", kertas dibentangkan pada Seminar & Temu Alumni MPKD 2000, Bali, 27-30 Ogos 2000.
- Achmad Djunaedi. (2001). Alternatif Model Penerapan Perencanaan Strategis dalam Penataan Ruang Kota di Indonesia, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB*, Vol. 12 No.1 pp 16-28.
- Adelman, Irma (1999). Fallacies in Development Theory and Their Implications for Policy. University of California Barkley, *Working Paper No. 887*.
- Allmendinger, Philip (2002). *Toward Post-Positivist Typology of Planning Theory*, SAGE Publication, 1 (1). 77-99.
- Altshuler, Alan (1973). "The Goals of Comprehensive Planning" dlm. Andreas Faludi, *A Reader in Planning Theory*, Oxford: Pergamon Press.
- Anwar Abbas (2008). Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan. Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan.

- Ataul Huq Pemanik (1993). *Development and Distribution in Islam*. Petaling Jaya: Pelanduk Publication.
- Bachtiar Effendy (2011). *Islam dan Negara: Transformasi gagasan dan Praktik politik Islam di Indonesia*. Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project Yayasan Bad Demokrasi.
- Benveniste, Guy (1991), *Mastering the Politics of Planning*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Branch, Melville C (1998). *Comprehensive Planning for The 21st Century: General Theory and Principles*. London: Praeger.
- Bratakusumah, Dedy Supriadi (2003) Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Majalah Perencanaan Edisi 32* Bappenas.
- Burah, Bernard Ferdinand D (2001). "Proses Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah dan Partisipasi Stakeholder (Studi Kasus Kabupaten Banyumas)". Disertasi Sarjana Perencanaan dan Kebijakan Daerah, Fakultas Teknik dan Arsitektur, Universitas Gadjah Mada. Tidak Diterbitkan.
- Bustanuddin Agus (2007). *Islam dan Pembangunan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Campbell, Scott; dan Susan Fainstein (eds.). (1996). *Readings in Planning Theory*. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.,
- Catanese, Antony J dan Snyder (1989). *Urban Planning*, terjemahan, Bandung: Penerbit Erlangga.
- Clark, Barry Stewart (1998). *Political Economy; a Comparative Approach*, 2nd Edition, Westport: Greenwood Publishing Group.
- Conyers, Diana & Hills, Peter (1994), *An Introduction to Development Planning in the Third World*, Singapore: John Wiley and Sons.
- Daft, Richard L (2008), *New Era of Management*, Second Edition, Mason: Thomson.
- Davidoff, Paul (1965). Advocacy and Pluralism in Planning. *Journal of the American Institute of Planners*, pp 544-555.
- Davidoff, Paul and Reiner, Thomas A (1973). "A Choice Theory of Planning" dlm. Andreas Faludi, *A Reader in Planning Theory*, Oxford: Pergamon Press.
- Departemen Agama RI, (2007), Syaamil *AlQur'an Terjemah Per-Kata Type Hijaz*.
- Dodero, Abel Lopez (2010). An Analysis of the Rational Comprehensive Model in Selected Cities in Developing Countries, Diakses 12 April 2012, dari laman web <http://www.repec.ver.ucc.mx/documents>
- Eko Budi Santoso (2008). "Penyerasian Proses, Konteks dan Konten Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2008-2013", kertas dibentangkan di Seminar Nasional *Mencari Format Keterpaduan Antara Rencana Pembangunan Dengan Program Pemanfaatan Ruang*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 27 Agustus 2008.
- Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Pustaka Cbor Indonesia.
- Euis Amalia (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramatama Publishing.
- Fainstein, Susan S (2000), New Directions in Planning Theory, *Urban Affairs Review*, Vol 35, No. 4, March pp 451-478
- Fainstein, Susan S (2005), Planning Theory and the City, *Journal of Planning Education and Research*, 25 pp 121-130.

- Fainstein, Susan S.; dan Norman Fainstein (1996). "City Planning and Political Values: An Updated View". Dlm. Scott Campbell dan Susan Fainstein (eds.), *Readings in Planning Theory*. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.
- Faludi, Andreas (1973). *A Reader in Planning Theory*. Oxford: Pergamon Press.
- Foley, John (1997) Communicative Planning Theory and Community Initiatives, College of Urban and Public Affairs (CUPA), *Working Papers, 1991-2000*. Paper 8.
- Forester, John (1989), *Planning in the Face of Power*. Barkley: University of California Press.
- Friedmann, John (1973), "A Conceptual Model for the Analysis of Planning Behavior" dlm. Andreas Faludi (Ed). *A Reader in Planning Theory*. Oxford: Pergamon Press.
- Friedmann, John (1987), *Planning in Public Domain; From Knowledge to Action*. New Jersey: Princeton University Press.
- Galloway, Thomas D and Mahyni, Riad G (1999). Planning Theory in Retrospect: The Process of Paradigm Change, *Journal of the American Planning Association*, Vol 43 Issue 1, pp 62-7.
- Griffin (2002), *Manajemen*, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- H. Widjono Ngoedijo (1997). Profesi Perencanaan dalam Perspektif Masa Mendatang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 8, No.2. pp 62-70.
- Haryo Winarso, Pradono, Denny Zulkaidi dan Miming Miharja (eds) (2002). *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*. Bandung: Departemen Teknik Planologi ITB bekerjasama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko
- Hasballah Thabib dan Zamakhsyari Hasballah Thaib, (2010), *Prinsip Peperencanaan Pembangunan Ekonomi (Studi Kisah Nabi Yusuf AS)*. Medan: Fakultas Ekonomi UISU.
- Helaey, Patsy. (1997). *Collaborative Planning, Shaping Places in Frmented Societies*, Planning Environment Cities.
- Healey, Patsy (2003). *Collaborative Planning in Perspective*. SAGE Publication, Vol 2(2), pp 101-123.
- Hoch, Charles (1994). *What Planners Do: Power, Politics and Persuasion*. Chicago: American Planning Association.
- Hudson, Barclau M (1979). Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions, *APA Jurnal*, pp 387-398.
- Huxley, Mardo and Yiftachel, Oren (2000). New Paradim or Orl Muopia? Unsettlin the Communicative Turn in Planning Theory, *Journal of Education Planning and Research* 19, pp 101-110.
- Innes, Judith E and Boher, David E (2000). Network Power in Collaborative Planning, *IURD Working Paper Series*, UC Berkeley: Institute of Urban and Regional Development.
- Iwan Jaya Azis, (1990). Transformasi Ekonomi Indonesia dan Prognosa Masa Depan, Makalah yang disampaikan pada Simposium Nasional "Menuju Masyarakat Indonesia Abad XXI" yang dilaksanakan oleh ICMI pusat, Jakarta.
- Jhingan, ML (2008). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Jimly Asshiddiqie (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kompas.

- Kasyful Mahalli (2008). "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan" kertas dibentangkan di Seminar Nasional *Mencari Format Keterpaduan Antara Rencana Pembangunan Dengan Program Pemanfaatan Ruang*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 27 Agustus 2008.
- Kaufman, Jerome. L and Jacobs, Harvey M (1987). A Public Planning Perspective on Strategic Planning, *Journal of the American Planning Association*, Winter pp 23-33.
- Khurshid Ahmad (1977). *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, dalam Etika Ekonomi Politik, Jakarta, Risalah Gusti.
- Khurshid Ahmad (2000). "Islamic Approach to Development" dlm. Zeenath Kausar (ed) *Political Development: An Islamic Perspective*. Petaling Jaya: The Other Press.
- Khurshid Ahmad (ed) (1992). *Kajian Dalam Ekonomi Islam*, terj. Silby Bin Maros dan Amir Hussin Baharuddin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Klosterman Richard E (1985). Arguments for and Againsts Planning, *Town Planning Review*. Vol. 56, No 1, pp. 5-20.
- Krumholz, Norman (1982). A Restropective View of Equity Planning: Claveland 1969-1979, *Journal of the American Planning Association* Spring pp 163-174.
- Lainatus Sifah (2008). *Islam dan Pembangunan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Levy, John M (2000). *Contemporary Urban Planning*, Fifth Edition, New Jersey: Prentice Hall.
- Lewis, W. Arthur (1986). *Perencanaan Pembangunan: Dasar-Dasar Kebijaksanaan Ekonomi*. Terjemahan, Jakarta: Aksara Baru.
- Lincoln Arsyad (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lindblom, Charles. E (1973). "The Science of "Muddling Through"" dlm. Andreas Faludi, *A Reader in Planning Theory*, Oxfrod: Pergamon Press.
- M. Safi'i (2009). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Kajian Aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.*, Malang: Averroes Press.
- Mannberg, Mariann (2006). *Communicative Planning - (How) Does It Work?*, Thesis Ph.D, Luleå University of Technology, Tidak Diterbitkan.
- Mohammed Abdullah Eben Saleh (2002). A Vision for Directing Future Planning Efforts: The Case of Villages of Southwestern Saudi Arabia, *Habitat International*, Vol. 26 p.p 51-72.
- Mohd. Kamal Hassan (1994). "The Islamic World-View", in *Towards a Positive Islamic World-View: Malaysian and American Perceptions*, ed. Abdul MonirYaacob and Ahmad Faiz Abdul Rahman, Kuala Lumpur, 1994. (p. 12).
- Mudradjad Kuncoro (2010), *Masalah, Kebijakan dan Politik: Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhammad Akhir dan Hailani (1994). *Hubungan Pembangunan dan Islam*. Jakarta Lappenas.
- Muhammad Hisyam Mohammad (ed) (2007). *Pembangunan dari Perspektif Islam*. Selangor: MPH Group Publishing Sdn Bhd.
- Muhammad Musiyam (1996). "Mengkaji Rational Comprehensive Planning Theory Dalam Konteks Indonesia", *Forum Geografi Tahun X*, p.p 45-56.
- Muhammad Syukri Salleh (2003). *Tujuh Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam*. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.

- Muhammad Syukri Salleh (2007). "Prinsip-Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam", dlm. Muhammad Hisyam Mohammad, (ed), *Pembangunan dari Perspektif Islam*, . Selangor: MPH Group Publishing Sdn Bhd.
- Muhammad Syukri Salleh (2009). "Kearah Pembangunan Berteraskan Islam", *Siri Kertas ISDEV*No. 9, Pulau Pinang.
- Muhammad Syukri Salleh (2011). "Arah Pemikiran Ekonomi Islam Melayu". Kertas Kerja yang disampaikan pada *Konferensi Internasional Islam di Alam Melayu dengan Tema "Jaringan Islam Di Alam Melayu: Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan"* anjuran Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (PPs UIN SGD) dengan kerjasama Akademi Siswazah Universiti Malaya Malaysia (APIUM), di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, 20 - 22 November .
- Mustopadidjaja AR (Ed) (2012). *Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, Paul (1997). *Dasar Perencanaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nyang, S.S. (1976). The Islamic State and Economic Development: A Theoretical Anlysis, *The Islamic Culture*. Jil 50, Januari
- Patricia Aburdence dan Valeriana Kallab (1986). *Mengkaji Ulang Strategi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peet, Richard and Hartwick, Elaine (2009). *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives*. New York: The Guilford Press.
- Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo (2011). *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rittel, Horst JR and Webber Melvin R. (1973). Dilemmas in a General Planning, *Policy Sciences* 4 (1973), pp. 155-169.
- Rostow W.W (1971). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, London: Cambridge University Press.
- Said Sa'ad Marthon (2007). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Terjemahan Ahmad Ikrom. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim.
- Sastrapratedja, M, Riberu, J dan Parera, Frans M (Eds) (1986). *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaas Etis dan Kritis*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Sjafrizal (2009a). *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*, Jakarta: Baduose Media.
- Sjafrizal (2009b). "Peperencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah; Konsep, Pengalaman Empirik dan Kebijakan Publik", kertas dibentangkan pada *Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Peperencanaan Indonesia*, Bukittinggi, 13 Agustus 2009.
- Spahic Omer, (2007). Integrating Islamic Worldview into The Planning of Neighbourhoods, *Jurnal of Construction in Developing Countries*, Vol. 12, No. 2. P 63-80
- Sri Edi Swasono (Ed) (1985). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.
- Sri Edi Swasono (2005). *Ekspose Ekonomika : Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, Edisi Baru, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM.
- Sri Edi Swasono (2010). "Kembali ke Ekonomi Konstitusi, Menolak Neoliberalisme", kertas yang dibentangkan pada diskusi FE USU, Medan 18 Desember 2010.

- Sri Edi Swasono (2010). *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*, Jakarta: Perkumpulan PraKarsa.
- Srinivas, Hari (tt). "Japan: Overview of Planning". di laman web www.gdrc.org/uem/observatory/jp-overview.html. (2 Januari 2011)
- Sudaryono Sastrosasmito (2012). "Fenomenologi Sebagai Epistemologi Baru Dalam Perencanaan Kota dan Pemukiman", pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar yang dibentangkan pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 14 Mac 2012.
- Surathman Kastin Hassan dan Sanep Ahmad (2010). *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*. Edisi Kedua, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, Kuala Lumpur, (pp. 1-2).
- Terry, George R dan Leslie W. Rue (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. alih bahasa oleh G.A Tico Alu, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tibergen, Jan (1979). *Rencana Pembangunan*: Jakarta: UI Press.
- Tjokrowinoto, Moeljarto (2004). *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tri Widodo (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zeenath Kausar (2000). National Development Planning and Policies for Economic Growth, Political Stability and Islamization: The Case of Malaysia (1956-1966) dlm. Zeenath Kausar (Ed), *Political Development: An Islamic Perspective*. Petaling Jaya: The Other Press.

DECOLONIZATION OF EDUCATION THROUGH ISLAMIZATION AND DEWESTERNIZATION

Saprial Manurung

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Indonesia

Email: sm_zuhro@yahoo.com

INTRODUCTION

One measure of the progress of a nation is the development of knowledge. History has proven that the development of knowledge in the Greek era and the Islamic Golden Age were resulted in a higher civilization. On the contrary, Backwardness of knowledge, has created a barbaric civilization on the darkness era of West. Generally, knowledge has become an essential basis in the formation of human character to achieve a high civilization. However, the essence of knowledge needs to be clearly understood so that no negative impact on the development and advancement of human life.

Al-Attas (Hashim & Rossidy: 2000, p. 25) said that knowledge is not totally and purely the product of the human mind and experience but is also based on revealed truth. Knowledge continuously requires direction, supervision and confirmation from the revealed truth. This is so because the metaphysics of Islam is not only based upon reason and experience but also firmly grounded upon Revelation¹²⁵. Faruqi (1988, p. 17) emphasis on *Tawhid* as the basis of knowledge, in which has a triple axis constitutive, namely, the unity of knowledge, the unity of life, and then the unity of history. In contrast, western view of knowledge is a problem, in so far as it transcends psychology and logic.— According to their, a theory of knowledge may be either monistic or dualistic, and it may be either realistic or idealistic. Epistemological monism dualism is the doctrine that the experienced object and the real object are, at the moment of perception, numerically one and two. The difference in the understanding of knowledge caused to the worldview. Islamic view of science as a whole is the world and the hereafter, on the other hand, western view of science only in the context of the world.

¹²⁵ See more detailed explanation in Al-attas, Muhammad Naquib. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). p. 143-148; Al-attas, Muhammad Naquib. (1999). *The Concept of Education in Islam – A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). p. 12-21; And also see Wan Mohd Nor Wan Daud, (1993-1994). An Outline of the Educational Philosophy and Methodology of Al-Attas. *Journal of Islamic Research*. Vol. 7, No. 1. p. 47-54; Wan Mohd Nor Wan Daud (1998). *The educational philosophy and practices of Syed Muhammad Naquid Al-Attas*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). p. 35-36.

That differences have caused the deviation by humans in using science to their lives. One is, western harness advances in science that they have in the conduct of colonialism and imperialism. The impact is destroyed the whole fabric of community life, as such, social, culture, politics, economic, education, etc. Generally, education has a direct impact on the public mindset. Memmi (2003, p. 35) said that colonialism as an away to give of injustice, Fanon (2008, p. xix) saw colonialism, in its many disguises as cultural, economic, and politic, and knowledge based oppression, lives on. In Encyclopedia of Islam explain that, colonialism is a historical process whereby one state subdues another state or territory for political and economic advantage. In addition to the use of armed force, colonialism usually involves the establishment of a colonial government and migration to the new territories by settlers who occupy the most productive land and control important sectors of the region's society and economy (Compo: 2009, p. 135-136). Malek Bennabi in his book *Vacation de l'Islam* (1954) presented the radical concept of "*colonisabilité*", declined culturally and intellectually to a stage where colonialism becomes a "historical necessity" (Fanon: 2008, p. viii-ix). Aime' (1913–) Franco-Martiniquean poet, dramatist, social critic and politician who was a cofounder of the "*négritude*" movement. His critique of colonialism and capitalism has become one of the key resources in postcolonial thought and struggle (Protevi: 2005, p. 91).

The long journey from the colonial period by western of the fourteenth century to the nineteenth century has caused much suffering experienced by the colonized people, especially Asia, Africa and America. Entering the late nineteenth century or early twentieth century, i.e. since the end of the Second World War, most of the colonized nations fought to achieve independence. The end of the colonial era was still left many problems faced by ex-colonial societies. Because, the occupation has destroyed the whole fabric of community life, and leave the values of cultural, social, political, religious, economic, educational, and others. Of course this problem caused the former colonies would always feel oppressed. Recognizing this condition, various scholars conducted a study to restore the livelihood of the people post-colonies in its indigenous form.

Recognizing this condition, various scientists conducted a study to restore the livelihood of the people post-colonies in its original form, such as *Franz Fanon, Aime Cesaire, Haunani Kay Trask, Bell Hooks, Edward Said, Paulo Freire, Ngungi Wa Thiongo, Ashis Nandy, Hussein Bulhan, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, Vera Kutzinski, Sara Suleri Goodyear, Edward Said, Homi Bhabha, Ann McClintock, Gayatri Spivak*, and others. The idea of "decolonization" became one of the rationales in order to restore the lives and mindset of the early (read indigenous). In this paper, author seeks to describe the historical process of decolonization, focusing especially on the decolonization of education through De-westernization and Islamization.

HISTORY OF DECOLONIZATION

The history of decolonization cannot be separated from the occupation of the western countries. Many historians reveal that economic motives as the basis for the emergence of colonialism in the world. However, the reality, colonialism have destroyed the whole field of community life, such as, social, cultural, economic, political, religious, and others. In addition, they also do the indoctrination to destroy the cultural values of indigenous peoples. Even they (west) to bring the missionaries to spread the faith (religion) they are, which in principle contrary to indigenous beliefs. Then, they took part in the spread to the natives of cultural values, ideas, thoughts, and knowledge that were developed in the West. As a result, they have contributed to the destruction of the livelihood of people around the world.

In the world of education, West has to take part in the conduct of secularization model of education in different countries, especially countries of the former colonies. The emergence of a dichotomy between public and religious education is the result of western efforts in separating science with faith (religion), so that religion is understood only as the right to privacy, on the other hand, science becomes an absolute measure of the success of the man in the world live. Meanwhile, the development of individualistic and materialistic attitude has contributed to the moral decay of society. Development of science is always based on the orientation of the motif, regardless of the essence of science itself in the welfare of mankind. Of course, this condition is disquiet, especially Muslims, because every time he could bring disaster and destruction. Therefore, the need for serious efforts in assessing, analyzing and rearrangements of science concepts as understood by western scientists in institutions of formal and informal education, in order to put science back in the correct position. This can be done by way of understanding the methodology and epistemology from the perspective of Islam and the west, so that the truth of science can be known.

Methodology functions as the window to see the whole problem from the concept to the reality. The methodology is important because it becomes the basis of the study. The methodology directs the study to build a paradigm. Well structured paradigm will make the readers understand the study easily as it is based on logical arguments. To give analysis to the problems by relying only to the cases not the concept, will result in the accuracy of the conclusion (Lukmanul: 2008, p. 389). According to Safi (1996, p. 3-4), methodology is the field of scientific inquiry concerned with the examination of the method used in the study of the natural and human phenomena,—thus the field of scientific inquiry into the justification, description and explanation of the rules of the procedures, but involves the analysis of the ground which constitute scientific method,—therefore, for Safi the study of methodology impinges on questions studied under the label of epistemology, or the theory of knowledge. Addas (2008, p. 2) used of word the issues concerning science, in which means is the theory of theories.

In the context of decolonization, a theory is always in need of concepts as they are the elementary building blocks. And it is here that we are faced with specific problems (Zemi: 2012, p. 3). In understanding for one problem, it need concepts, such as the physical, the spiritual, the natural, and the supernatural lie at the deepest reaches of our thought about life and reality,—Wiredu (2004, p. 15) give a conceptual decolonization in African Philosophy, namely:

“reality, being, existence, object, entity, substance, property, quality, truth, fact, opinion, belief, knowledge, faith, doubt, certainty, statement, proposition, sentence, idea, mind, soul, spirit, thought, sensation, matter, ego, self, person, individuality, community, subjectivity, objectivity, cause, chance, reason, explanation, meaning, freedom, responsibility, punishment, democracy, justice, god, world, universe, nature, super nature, space, time, nothingness, creation, life, death, afterlife, morality, and religion”.

Beginning of the word "decolonization" (Chappell: 1995, p. 303-326), in general, the scientist of anti-colonialist have a consensus, that it's characterized since the end of the Second World War, in which the colonized countries have gained of independence, especially in political policy. In the Indonesian dictionary, decolonization is the elimination of the colony (Tim Redaksi: 2008, p. 333), returning power to the people who colonized (Badudu: 2003, p. 51), as the process by which a subordinated territory becomes a sovereign and independent state (Tønnesson: 2004, p. 253). It's also as the only alternative way of removing the heavy burden of empire colonization which has invaded colonized countries both culturally and naturally (Sepahyand: 2012, p. 26-36), which is done through a revolt, weather implicit or explicit, against imperial axiomatically legal domination. In other words, it is a kind of awareness against the imposed oppression and inferiority like what was done in Marxist movement against master class by slaves (working class) or by Feminist against patriarchal societies (Sepahyand: 2012, p. 27), this occur as a consequences of colonialism through resuming control of one's own destiny. And involve for regaining control of the land and other resources, revitalizing cosmology, religion, social values, classification of living things, kinship, personal names, leadership, reasserting Māori identity and rights and revitalizing the *Māori* language by removing all unnecessary colonial accretions (Matthews: 2004, p. 862).

Smith (Hammond: 2009, p. 6) refers to the word of "decolonization" as a means by which colonies gain independence from their colonizers and assume the instruments of government, though in reality it is a "long-term process" involving the bureaucratic, cultural, linguistic, and psychological divesting of colonial power.— Because of decolonization first requires recognition of Indigenous peoples rights to protect cultural and intellectual property and to share knowledge on their own terms (Hammond: 2009,

p.29), so the purpose of decolonization will be able to grow cultural self-assertion and national self-consciousness— (Boehmer: 2005, p. 203).

Alva (Lomba: 1998, p. 13) tries to de-link the term post-colonialism from formal decolonization, because he thinks many people living in both once-colonized and once colonizing countries are still subject to the oppressions put into place by colonialism. And he justifies this expansion of the term by referring to post-structuralize approaches to history which have suggested that the lives of various oppressed peoples can only be uncovered by insisting that there is no single history but a “multiplicity of histories”. Meanwhile, Verton (Hellebrink: 2007, p. 8) describes decolonization as a “the process that leads toward ending political dominion by colonial powers over overseas territories, and which intends to open possibilities for free political, economic, social and cultural development”. Fanon (Protevi: 2005, p. 1999) developed a powerful critique of colonialism and racism which has become one of the key resources in postcolonial thought and struggle, in Fanon book, *Black Skins White Mask* (1952), *A Dying Colonialism* (1959), *Toward the African Revolution* (1961), and *The Wretched of the Earth* (1961) is his last analysis of the process of decolonization and the pending pitfalls it entailed for newly independent nation-states.

Decolonization refers to the process education use to authenticate the knowledge about problem and phenomena that occur within the framework of the decolonization of education. Because education as a means of mystifying knowledge and hence reality. Education, far from giving people – the confidence in their ability and capacities to overcome obstacles or to become masters of the laws governing external nature as human beings, tends to make them feel their inadequacies, their weaknesses and their incapacities in the face of reality; and their inability to do anything about the conditions governing their lives (Thiong'o: 1981, p. 56).

Bernard Guerin study a framework for decolonization interventions with analysis ten of decolonization interventions, including: Indigenous movements in action orientation, Indigenous movements in popular books and media, cross-cultural awareness training, Anti-racism and anti-discrimination training, decolonization workshops, liberation theology and liberation psychology, historical evaluations and sociopolitical analysis, integrated education programs, truth and reconciliation interventions, and treaty settlements and legal interventions (Guérin: 2010, p. 63).— And then the need for a processes through which the subaltern resist the rules and racialized hierarchies within which they are confined, defying the logic of coloniality which casts them as inferior or not quite human. An education for decolonization must also make no claim to political neutrality, and engage a

method of analysis and social inquiry that troubles the capitalist, imperialist aims of unfettered competition, accumulation, and exploitation"¹²⁶.

Decolonization, however, does not mean and has not meant a total rejection of all theory or research of Western knowledge. Rather, it is about centering our concerns and world views and then coming to know and understand theory and research from our own perspectives and for our own purposes" (Smith: 1999, p. 39). Swadener and Mutua (2010) looked at "decolonization" as a process, in both research and performance, of valuing, reclaiming, and foregrounding Indigenous voices and epistemologies". Therefore, in decolonial option places the *problem* or *problems to be addressed* (and not the object or objects to be studied) in the foreground. By doing so, it leads any investigation through the scholar, intellectual or researcher, *into the world*, rather than keeping him or her *within the discipline* (Tostanova: 2009, p. 131). According to Torres (2011, p. 2), the need thinking through the Decolonial Turn" aim to contribute to this turn not only by further clarifying its definition, depth, and scope, but also by doing so in dialogical manner.

Wilson and Yellow Bird (Belly: 2009, p. 17-18) suggests that one of the first steps toward the decolonization is to equation the legitimacy of colonization. She states that once we know the truth of the injustice, we can think about ways to resist and challenges colonial institutions ideologies. Hence, two of the critical steps in resisting and challenging these institutions are revitalization and practice of culture dismantled by colonization. We must restore and practice our political, cultural, social, economic, spiritual, health and education systems and adapt them to a modern setting. Smith (Haneef: 2003) revealed that "decolonization" is concerned with having "a more critical understanding of the underlying assumptions, motivations and values that inform research practices".— in the Tuhiwai book is divided into two parts. The first part discusses the history of Western research and critiques the cultural assumptions behind research by the dominant colonial culture. The second part focuses on setting a new agenda for indigenous research. Western culture has frequently identified itself as the ethnocentric centre of legitimate knowledge—(Haneef: 2003).

THE PHILOSOPHY OF ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE

Rosenthal discovered, there are about 750 words "*i-l-m*" in the Qur'an,— about one percent in its vocabulary, since the Qur'ân contains roughly something short of 78,000 words (Rosenthal: 2007, p. 20). Islam regards knowledge as *sine qua non* of humanity, with Adam, the first man and Prophet, having been taught "the names of all things" by God Himself,

¹²⁶ See more detailed explanation in Bernard Guerin. (2010). A Framework for Decolonization Interventions: Broadening the Focus for Improving the Health and Wellbeing of Indigenous Communities. *A Journal of Aboriginal and Indigenous Community Health*, Vol. 8, No. 3.

thereby making him superior even to angels. This epistemologically positive attribute of man in Islam is a direct reflection of man's *raison d'être* as God's servant and vicegerent on Earth, which necessitates man's having the possibility of attaining sufficient knowledge of himself, God, and the universe. Hence in the creed of the Muslims, which is derived from the Holy Qur'an and teachings of the last Prophet, Muhammad, the possibility of attaining certain knowledge as opposed to mere opinions (*ra'y*), doubts (*shakk*), and conjectures (*sann*), are deeply ingrained (Wan Mohd.: 2010).

The *mutakallimin* distinguished among degrees of knowledge. According to al-Farra' (Hussain: 2006, p. 17), knowledge varies, in terms of its degree of certainty, between two ends: *ilm* (scientific knowledge) and *jahl* (ignorance). Scientific knowledge, is the knowledge of the whiteness (*mahiyah*) of the "thing", its intrinsic properties (*muqawwimant*), or the thing-in-itself. Ignorance, on the other hand, donates a knowledge of the thing which is contrary to its whiteness or nature. In between these two ends stand two other degree of knowledge: *shakk* (skepticism) and *zann* (probable knowledge). *Shakk* occurs when two opposite understanding of a thing are allotted equal possibilities, while *zann* take place when one of the two possible interpretations is made probable (*rajah*). In terms of the degree of certainty, scientific knowledge ought to be either certain or probable; skepticism and ignorance are no science (Safi in Hussain: 2006, p. 17).

Qutb's (Bouزيد: 1998, p. 226) view, knowledge that, in fell within the purview of human khilafaah mission – and then his conception of "divine knowledge" —i.e., knowledge that, Qutb insists, may not be attained by man but only by God. Al-Ghazali (1998) suggested that knowledge as 'acquisition of that information through which one can successfully attain the true goal of life. Otherwise, knowledge is needed to fulfill religious and spiritual responsibilities, it is also highly important for achieving social and economic development, for the wellbeing of the community, and for ensuring social harmony, freedom and human rights (Arqub: 2009). Two sides these, to give a clear framework in the process of Islamization of knowledge. Because of Islamization has twofold job: first: expanding, upgrading and modernizing Islamic disciplines, second: connecting all other disciplines to Islamic faith and values (Haque: 2012, p. 1). The Messenger of God have clear give explain in the relation knowledge and Islam, His said: "Seeking knowledge is an ordinance obligatory on every Muslim," and also, Prophet said: "Seek knowledge even if it is from China"¹²⁷.

Siddiqi (2011, p. 16) tried to give an suggest with said that, by inviting Islamization enthusiasts to join the rest of humanity in expanding knowledge, while simultaneously working for creating universal awareness of what

¹²⁷ The Messenger of God said: "Seeking knowledge is an ordinance obligatory on every Muslim," and also, Prophet said: "Seek knowledge even if it is from China." People, however disagreed as to what branch of knowledge man is obliged to acquire, and as a result split up into about twenty groups. For more detailed about this explain see Al-Ghazali. (1997). *Al-Ghazali's Ihya' Ulum al-Din: revitalisation of the sciences of religion*. Vol. 1. Egypt: Islamic Inc. p. 9-37

makes use of knowledge beneficial and prevents the fatal error of allowing laissez-faire in the use of knowledge.— knowledge as a tool for power and hegemony can be frustrating if not outright destructive. Last but not the least, we cannot know all that needs be known and, no less important, not everything is known with the same degree of certainty. Humility requires we recognize our limits. Ambiguity and a degree of uncertainty is built into the human situation. It cannot be wished away. Having adopted a humble stance, the way forward is to share the quest of knowledge and its proper use with all and everyone. On the other hand, Sajjadi and Barkhordari (2008, p. 128) in the process “Islamization of sciences (*read knowledge*)” should be prepared and provided in a comprehensive way in order to reflect “religious science” in a clear way. According to him, there are four main approaches can be mentioned with this regard, namely: inferential approach, traditionalistic approach, epistemological approach, and change of pre-assumptions approach.

Thus, the approaches of Islamization of sciences in the inferentialistic approach. The approaches are text of Quran as the holy word includes all sciences and expedition that today's modern science has reached. As a result Quran is looked at as an encyclopedia. The traditionalistic approach, the approaches is placing the findings of the modern science in the frame of traditional science. Making the traditional sciences such as medicine and farming and ... live once more; Knowledge has hierarchical structure. Meanwhile, in the approaches is epistemological approach change in the current paradigm of philosophy of science with the help of Islamic ideas; establishing epistemology system and methodological based on monotheism; refinement of modern sciences. In the religious understandings are considered the pre assumptions. Finally, in the approaches is of scientific research; the process of Islamic science creation is exactly as that of contemporary science Sajjadi and Barkhordari (2008, p. 129-130).

THE WESTERN CONCEPT OF KNOWLEDGE

Historical development of science in the west has a long history. It started from the “Ancient Greek Era” until “Modern Era”. Their ideas were spawned a wide range of concepts and interpretations of science. This concept is sometimes contradictory to each other. Thus, the general meaning of knowledge is determined only by the mind. Therefore, for the first time that we need to know how western scientists in their understanding of science, so that the hegemonic paradigms of western philosophy and sciences in the “modern/colonial capitalist/patriarchal world-system” (Grosfoguel: 2011) does not confusion.

According to Plato, knowledge is sensible perception¹²⁸; true opinion; and true opinion with reasoned explanation (Fowler: 1929, p. 3). A knowledge of the nature of the original; a knowledge of the correctness of the copy; and a knowledge of the excellence with which the copy is executed? (Burry: 1926, p. 145). For Plato (ca. 429–347 B.C.) said that knowledge can only be of what is real. Meanwhile, Aristotle (384–322 B.C.) use common sensible, Epicurus (341–270 B.C.) see all knowledge is rooted in experience, the contact between the soul and the external world. St. Augustine (354–430) said that all knowledge involves the individual's awareness of God. Thomas Aquinas (1225–1274) view that knowledge is something that is empirical—which can be acquired through experience. René Descartes¹²⁹ (1596–1650) said that the mind is everything in getting science—with the famous statement “*cogito ergo sum* (I think, therefore I am)”. Nicolas Malebranche (1638–1715) likened the human mind with the mind of God, the argument that “the human mind perceives ideas that are in the mind of God”. Benedict Spinoza (1632–1677) argues that there is only one substance, God or Nature, of which both ideas and physical objects, Spinoza concluded that ideas are true or false only from the perspective of an individual human mind.

Tweedledum and Tweedledee, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) said that the individual substances each of which reflects the entire cosmos from its own point of view. One's mind is a monad with the special property of self-awareness, and the physical world is (roughly) a set of appearances generated by monads. John Locke¹³⁰ (1632–1704) argues that all our knowledge rests ultimately on simple ideas of sense. He says, consists in one's recognition of relationships of agreement or disagreement among ideas. All knowledge is either intuitive (grasping at once the agreement or disagreement among ideas), demonstrative (grasping that an idea follows logically from other ideas), or sensitive (knowing through experience that particular, finite entities exist). George Berkeley (1685–1753), argues that physical objects are preserved, but only as clusters of ideas in minds. He declaring that only minds and ideas in the mind existed (Heumer: 2002, p. 28). These ideas are caused in our minds by God (who is also a mind) rather than by the action of matter on observers' sensory surfaces—he concluding

¹²⁸ Protagoras said that “man is the measure of all things”. While Heracleitus said that all things are always in motion. Here Plato distinguishes two kinds of motion—movement in space and change of quality and asserts that constant motion of the first kind must be accompanied by change, because otherwise the same things would be at the same time both in motion and at rest. This obvious fallacy Plato appears to ascribe to Heracleitus and his school. The result of this discussion is that if nothing is at rest, every answer on whatever subject is equally correct. Read more in the book of H. N. Fowler. (tr.). (1929). *Plato: Theaetetus – Sophist*. Volume II. London: William Heinemann;

¹²⁹ See more detailed explanation in Descartes, Rene. (1901). *Discourse on Method and Metaphysical Meditations*. London: the walter scott publishing co., Ltd; Rene Descartes (1912). *A discourse on method ; Meditations on the first philosophy ; Principles of philosophy*. London : Dent ; New York : Dutton.

¹³⁰ See more detailed explanation in Locke, John. (1882). *An Essay Concerning Human Understanding*. London: W. Swan Sonnenschein & Co.

that we can be certain that objects are as they appear to us. After all, objects are nothing more than those appearances.

David Hume (1711–1776) built concept knowledge that began with the skeptical theory. He argued, there is no sure thing from the experience of our senses, whether visible or not visible. Nothing in our experience justifies our confidence in the uniformity of nature; it may be that unobserved instances are quite unlike the observed ones. Immanuel Kant¹³¹ (1724–1804) uses a priori synthetic propositions in explaining that we know that for any two events, either they occur simultaneously or one occurs before the other. Similarly, we know that for any two objects in space, there is a pathway leading from one to the other. Johann Fichte (1762–1814) argued with a coherent theory of truth: experiences are regarded as true if they form a coherent, united system. G. W. F. Hegel¹³² (1770–1831) argued that our knowledge of reality is not direct but is mediated by the application of these concepts or universals. Therefore, he concludes that all knowledge is mediated by concepts. Arthur Schopenhauer (1788–1860) argued that the world is made up of ideas and experiences and that these are linked by various versions of the principle of sufficient reason. On this view, the thing-in-itself is the will; reality is the manifestation of a single, unitary will.

John Stuart Mill (1806–1873) uses the concept of phenomenology with the reduction of all statements about physical objects to ones about “permanent possibilities of sensation” (Baergen: 2006, p. xxvi–xlili). Durkheim (Rawl: 2004, p. 3) argues that a necessary foundation for social life, not religious beliefs. For him, religion is more than the idea of gods or spirits, and consequently cannot be defined exclusively in relation to these latter. He also said that religion same with myths and dogma because need of rites (Durkheim: 1964, p. 35). In addition, Darwin (1909, p. 79) revealed, there is no exception to the rule that every organic being naturally increases at so high a rate, that, if not destroyed, the earth would soon be covered by the progeny of a single pair. For Darwin, stated that the balance of nature is evenly maintained from generation to generation through prolonged periods of time (Kidd: 1902, p. 36).

Differences in ideas and thoughts expressed by western scientists generally tend to make sense as an absolute measure in getting the truth. Although, the truth is gained only temporary and relative, which Foucault’s theory, often use the term “*pragmatism*”, by giving attributes to think through “*attitude*” towards “*problematization*”. However, William James (Birden: 2003, p. 1) is not wrong to conclude, if one could determine no *practical* difference, then “*this truth*” and “*that truth*” are *practically* the same. It can be concluded,

¹³¹ See more detailed explanation in book, Kant, Immanuel. (1890). *Critique Pure Eeason*. (tr.) J. M. D. Meiklejohn. London : George Bell and Sons.

¹³² See more detailed explanation in Hegel, G. W. F.. (1910). *The Phenomenology of Mind*. Volume I & II. London: Swan Sonnenschein & Co, Limited and New York: The Macmillan Company.

that there is no place called truth in the concept of western thought, although it can be seen clearly through the events the natural world. Perhaps a very interesting expression proposed by Cashmore (1996, p. 281), the world is not experienced as a series of facts, but of signs encoded in language. This makes it possible for us to experience the world as “natural” and “right”.

DECOLONIZATION OF EDUCATION

When science is built by western scholars with philosophical speculation is based on the idea of secular life, and focuses on human rationality. Islamic scholars as well as anti-colonialists trying to fight through the decolonization of knowledge or education, such as: Jalal Al-e Ahmad, in *The Occidentosis: Plague from the West* (1952) and *The School Principles* (1978); Muhammad Naquib Al-attas, in *Islam and Secularism* (1993); Wan Mohd. Nor Wan Daud, in *Dewesternisation and Islamisation: Their Epistemic Framework and Final Purpose* (2010); Chinua Achebe, in *No Longer at Ease* (1960) and *Things Fall Apart* (1958); Frantz Fanon, in *Black Skins White Mask* (1952) and *A Dying Colonialism* (1959); Julius Nyerere, in *Freedom and unity: Uhuru na Umoja* (1966); Aimé Césaire, in *Discours sur le colonialisme* (1955); Edward Said, in *Orientalism* (1977) and *A Legacy of Emancipation and Representation* (2010); Walter Rodney, in *The Groundings with My Brothers* (1969), Ngugi wa Thiong'o, in *Decolonizing the Mind: The Politics of language in Africa Literature* (1986), Albert Memmi, in *The Colonizer and the Colonized* (1957); Ivan van Sertima, in *They came before Columbus: The African presence in Ancient America*. (2003),

Western scholars tend to give birth to the concept of conflicting science. Most of the arguments that they offer have weaknesses and shortcomings. This condition cannot be separated from the ideology of science that they bring conflict with cultural values and religion. Reconstitute a new platform in order to clean up the education system of the elements of western hegemony that tends to ignore the essence of science as a whole to reach the truth is a must. Decolonization of education through De-westernization and Islamization are a solution to filter back the thought of western scholars about their understanding of science. In addition, it requires the seriousness of Islamic scholars to restore the moral values of Islam in the education system without creating a dichotomy, and learn again to the thought of classical and contemporary scholars in getting the essence of a true science. And with that, It can be one model in conducting educational decolonization.

Decolonization of education aims to restore the basic values of science through a correct understanding, so that no negative impact on human life. Therefore, decolonization can be regarded as a necessity. Because of modern science in the West, its orientation has dominated the intellectual landscape of the world, with a very high level of skepticism towards the essence and nature of science in the search for truth. And then they just revolve around in the natural science and social science disciplines. Smith,

Wilson and Bird define decolonization of education as, "the intelligent, calculated, and active resistance to the forces of colonialism that perpetuate the subjugation and/or exploitation of our minds, bodies, and lands, and it is engaged for the ultimate purpose of overturning the colonial structure and realizing Indigenous liberation" (Yaocihuatzin: 2011, p. 41). Furthermore, for Smith (Haneef: 2003), assume how Western stories and "regimes of truth" are situated within a particular cultural, social system that needs to be "decolonized". Western research brings with it a particular set of values and conceptualizations of time, space, subjectivity, gender relations and knowledge. The presence of a difference in providing an understanding of the essence of decolonization, in general the science agreed the need to restore the decolonization in the form of anything in the activities of human life in the correct position.

Western ideology at this point can be regarded as a parasite that has undermined the global education system. Because they build an understanding of science tend to have negative impacts on the life of social, cultural, economic, political, and other. Institutions of educational are generally only give birth to the knowledgeable scholar, but low with the values of ethical and capital. Religion is only used as a symbol of an individual, without being able to integrate directly in the educational process. The result is a dichotomy of education system, namely, education of social science and education of natural science or social knowledge and religion knowledge, as Al-Alwani (1989, p. 234) called it a "Syari'ah Knowledge" and "Other Knowledge", still prevails until now, and has led to the education system of Islamic Ummah did not develop simultaneously.

DECOLONIZATION OF EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF DEWESTERNIZATION AND ISLAMIZATION

The progress of civilization of a nation essentially has a positive impact on human life. Due to the progress of civilization is directly influenced the development of cultural, social, politic, economic, technology, education, and others. In contrast, it could have a negative impact, when there was moral degradation in all aspects of society life. History has recorded how the rise and fall of a civilization. Allah SWT said: *"And when We decide to destroy a town (population), We (first) send a definite order (to obey Allah and be righteous) to those among them [or We (first) increase in number those of its population] who are given the good things of this life. Then, they transgress therein, and thus the word (of torment) is justified against it (them). Then We destroy it with complete destruction"* (Al-Isra', 17: 16). On the other hand, Toynbee (2004, p. xii) said that civilizations as more or less fixed organisms, given to birth, growth, decline, and death.

The era of "renaissance" may be regarded as the starting point of the progress of western civilization. Western society began to separate themselves from the power of the church through the ideology of secularism.

This ideology has become a new confidence that has freed them from oppression, suffering and misery of life. As a result, religion is only used as a symbol without form, and a conviction without direction. The concept of science is built on logical thinking, religion is only used as a complement and not even have a place in the thinking process. This is because they think that religion would be a hindrance in obtaining the truth. Perhaps what is said Durkheim in his book “*Elementary Forms of Religious Life*” that religion as a social phenomenon¹³³, “God is dead” by Nietzsche¹³⁴, and Spengler (1926, p. 358) statement, that the essence of every Culture is religion, so—and consequently—the essence of every Civilization is irreligion—, can be justification for the advancement of western civilization at this time. On the other hand, Fatemi’s (2010, p. 32) demonstrate how Western education is entangled with a hegemonic discourse that gives superiority, authority and ownership to certain groups namely Europeans. Said argues that colonizers considered themselves as not only the possessors of knowledge, expertise and education but also the source of privileges that bestowed them with the right to define others. He indicates that the education driven by colonization and oppressors controlled the construction of the interaction among identity, power, language, education and knowing. Such an education, Said argues, imposed certain prescriptions against the oppressed and the exploited.

The spread of the ideology of western secularism in all areas of human life in the era of globalization can cause major problems for the Islamic Ummah, when it learned without doing the assessment, evaluation, and analyzed selectively. The ideology of secularism and its derivatives are absolutely opposed to knowledge concepts defined in Islam, such as secularism, capitalism, liberalism, pluralism, materialism, individualism and other isms. Then anti-colonial thought is about a “decolonizing of the mind” working with resistant knowledge and claiming the power of local subjects’ intellectual agency. Resistance in this context is about fighting for survival and beyond. It is about resistance to domination of the past, contamination of the present and the stealing of a people’s feature (Dei: 2006). Therefore, de-colonial options are showing that the road to the future cannot be built from the ruins and the memories of Western civilization and its internal allies (Mignalo in Follér: 2007).

Decolonization through De-westernization may be one solution to clean a distorted understanding of western knowledge. Because of decolonizing is one’s spirit and recognizing the importance of spirituality, often ignored, are very important to integrate in decolonizing practice (Shahjahan: 2005) — if we wish to decolonize, we cannot do it without decolonizing ourselves first. Our behavior towards ourselves and others is always intertwined with

¹³³ See more detailed explanation in Durkheim, Emile. (1964). *The Elementary Forms of the Religious Life*. (tr) by Joseph Ward Swain. London: George Allen & Unwin Ltd..

¹³⁴ See more detailed explanation in Martin Heidegger. (1977). *The question concerning technology*. (tr.) by William Lovitt. About “The Word of Nietzsche: “God Is Dead” New York & London: Garland Publishing, Inc. p. 53-114.

reproducing the hierarchies that permeate everyday life outside the academy (Shahjahan: 2005).

On the other hand, if knowledge is power, then decolonizing knowledge production is also a process of challenging the dominant power. Therefore, individuals engaging in the project of decolonizing the academy need to assess themselves if they are ready to face the consequences of their actions (Adjei: 2007, p. 1054). However, Abu-Lughod (1990, p. 42) said that "...there are perhaps a tendency to romanticize resistance, to read all forms of resistance as signs of the ineffectiveness of systems of power and the resilience and creativity of the human spirit in its refusal to be dominated".

In several of international Islamic seminars and conferences on education, it was discovered that the major problem of education in the Muslim societies is its dual nature that operates under two parallel systems, namely Islamic education system and secular education system (Musthapa: 2012). Al-Faruqi (1988) use the term the "malaise" — as the cause of the ummah's misconception of knowledge creating a "crisis of thought", while Abu Sulayman and Al-Alwani (Haneef: 2009) termed by the "historical split". And then, Fanjwani (2004, p. 6) further conclude, there are three inter-related problems found within much of the writing on Islamic education. *First*, it seeks to be exclusive in its understanding of contemporary educational conditions. In part, this is because it wants to advocate a particular interpretation of Islam as a solution to current problems. *Second*, the Islam it appeals to is a theoretical Islam that, though thought by its advocates to be grounded in scripture, it is simply a projection of whatever is valuable to the authors at the given time. *Third*, most of the writings on Islamic education fail to provide any feasible and creative solutions to the problems of education. Meanwhile, "Al-Attas (1999, p. 33-38) see in the context of "adab"¹³⁵ as a matter of Islamic education. On this context, Al-Attas has been specifically described in his book "Islam and Secularism",

"—the loss of *Adab*. What Nasr calls desacralization of knowledge. "The chief characteristic symptoms of loss of *Adab* within the community", Al-Attas believes, "is the process of leveling." By leveling he means "the leveling of every one, in the mind and the attitude, to the same level of the leveler. This mental and attitudinal process, which impinges upon action, is perpetrated through the encouragement of false leaders who wish to demolish legitimate authority and valid hierarchy so that they and their like might thrive. This Jahili streak of individualism, of immanent arrogance and obstinacy, as he calls it, led what he calls the Modernist and Reformers of our times, including those who masquerade as

¹³⁵ See more detailed explanation in Muhammad Naquib Al-Attas. (1999). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought of Civilization. p. 33-38.

Ulama', to censure "the great ulama of the past and men of spiritual discernment who contributed so much to the knowledge of Islam". Al-Attas is not saying that the Ulama should not be criticized, rather, as he put, "No doubt it is possible to concede that the critics of the great and learned were in the past at least themselves great and learned in their own way, but it is a mistake to put them together on the same level - the more so to place the lesser above the greater in rank as happens in the estimation of our age of greater confusion" (Bugaje: 1996, p. 6)

Al-Faruqi (1988) offer solutions in addressing the education issues that facing Islamic Ummah today, by using recast and remolded of discipline in Islamization of knowledge so as to embody the principles and the relevance of Islam, in its methodology, strategy, and what it regards as its data, its problem, its objective, and also its aspirations. He further stressed that the necessity of *Tawhid* as a foundation in understanding the unity of knowledge, life and history. Because of it is a general view of reality, of truth, of the world, of space and time, of human history and destiny (Faruqi: 1992, p. 10).

Therefore, in applying the concept of *Tawhid* in the education system will provide a positive impact on the formation of human character. Al-Ghazali believed that developing character traits was a form of worshipping God. It's really very interesting explanation of Al-Attas in defining education. According to him, education is "*a process of instilling something into human beings*". In this answer 'a process of instilling' refers to the method and the system by which what is called 'education' is gradually imparted; 'something' refers to the content of what is instilled; and 'human beings' refers to the recipient of both the process and the content. Now the answer given above already encompasses the three fundamental elements that constitute education: the process, the content, the recipient; (Al-Attas: 1999) He further explained, in which education should aim at the balanced growth of the total personality of man through training of the human spirit, intellect, rational self, feelings and senses. The training imparted to a Muslim must be such that faith is infused into the whole of his/her personality and creates in him/her an emotional attachment to Islam and enables him to follow the Qur'an and *Sunnah* and be governed by Islamic system of values willingly and joyfully so that he/she may proceed to the realization of his/her status as *Khalifatullah* to whom God has promised the authority of the universe" (Al-Attas: 1979, p. 158).

The most important objective of education in Islam is to initiate a reform in a person from within. The result it seeks is to bring changes in one's actions, behaviors and characteristics relating to one's daily routine of life. Thus inner reform becomes one of the targets of Islamic education. However, this aim can be attained through a number of different methods. We notice in the Quran, that these various methods of teaching are manifested time and again in Muslim practice. All of them are still to be found today (Arifin: 2004, p. 111). On the other hand, western intellectual reveal that education makes

a person good (Ritter: 1993).— Theaetetus said, for if God wills it and gives you courage, you will be able (Fowler: 1929, 39). Virtue is knowledge, or cannot exist without knowledge; but this knowledge cannot be acquired and communicated. It is not the man who pleases himself, the man who follows the fashion of the day in pursuing the objects of social and political ambition, and is successful in the pursuit, who is virtuous: it is the man who is led, not by personal feeling through life, but by reflective thought, who is really 4 virtuous virtue is knowledge: but it cannot be taught (Stewart: 1909, p. 16). Furthermore, Mannheim(1952, p. 230) see that education has always had the formation of man as its subject matter.

Mannheim's (1952, p. 26) writing in the letter new; he raises the question of a sociological theory of education. He notes that contemporary education is out of touch with social reality. Our society is an industrial one, and this urban, industrial civilization shapes men's chances and expectations in a characteristic way; yet education speaks only about abstract principles and ideals; it does not prepare young people for what they will have to do in order to acquire for themselves a place within the industrial society. What is needed would be an education that would make the pupil adjusted to actual social reality, and even more than that: one that would enable him to transform that reality and to raise it to a higher level.

There is a shared understanding between western and Islamic intellectual, when education as an attempt to produce a good human being. However, differences began to emerge when the Western intellectual view of man as the only object of problem, the real nature to be the only source of knowledge, regardless of other sources. They tended only to look at something realities and ignore that is not real, then, appear various concepts of education in the west, such as naturalism, realism, idealism, pragmatism, progressivism, essentialism, perennials, and many other. This is the starting point of the different concepts, strategies and objectives of education between the West and Islam. In the understanding of science concepts, Al-Faruqi saw science as "a triple axis cinstitute of *Tawhid*", in which it is a fundamental Islamic concept that has always been a part of *tajdid*, or Islamic renewal. However, one dimension of this affirmation of *tawhid* is that the secularist model, as it has been defined by Western experience, is seen as having failed. In this way, the concept of the failure of the West provides an important reinforcement for the re-appropriation of Islamic themes. The perception of the failure of the West makes it possible to argue that the Western model has failed and the *tawhid* provides the foundation for a more effective way of coping with the challenges of contemporary history (Shin: 2004, 211).

Meanwhile, Al-Attas (1993, p. 143-148) divided knowledge into two types, *first*, knowledge is given by God through revelation; and this refers to the Holy Qur'an include The Holy Prophet— and second, knowledge refers to knowledge of the sciences (*'ulum*), and is acquired through experience and observation and research; it is discursive and deductive and it refers to objects of pragmatic value. An interesting conversation between Syeid

Hussein Nashar and his students in describing how a Sufi practices that are applied to see differences in the sources of knowledge.

“As one student explained to me, there are two types of knowledge: (1) principle knowledge and (2) secondary knowledge. The sources of principle knowledge are (1) revelation and (2) “intellection” (direct knowing from communion with Allah). Secondary knowledge is derivable from principle knowledge but the reverse is not true. The proper metaphysics is critical for understanding the universe. According to this student, the universe is divided into four vertical levels with relationships possible between the vertical levels and horizontally within each level. Western science only is capable of examining secondary knowledge of our own horizontal level and this leads to error. A correct Islamic science, in this student’s view, focuses on principle knowledge that is without error by definition because it comes directly from Allah either through revelation or direct personal experience (intellection) of Allah. Islamic science and Sufism, from this perspective, never change. There is no progress only unveiling” (Furlow: 2005, p. 80).

Understanding each of the properties, concepts, and the purpose of science is based on the Islam framework, then one day it will be able to bring the Muslims back in the glory era of Islamic civilization. Islam does not restrict the source of knowledge comes from anywhere. But the concept of education in Islam requires every student to do the analysis and assessment of sources of knowledge that is being studied carefully. May be of interest to quote the words of Ibn Badis that, Are we wrong to adopt advancement of science and technology from the west, then analyze again?. On the other hand, we can ignore the customs and norms that develop in their communities.—Islam was disinterested truth, impervious to any challenge. Islam presented a challenge to all systems of thoughts and beliefs; it was not to be regarded as a passive respondent to challenge (Alghailani: 2011).

CONCLUSION

Decolonization is a response to free themselves from the oppression caused by colonization. Decolonization of education refers to the process education use to authenticate the knowledge about problem and phenomena that occur within the framework of the decolonization of education. In the process of decolonization of education can be done through religious and cultural approaches. The most important thing is to clear the mind and soul of the elements of colonization. Islam always support the decolonization of education with the aim to restore the purity and essence of science in the correct position. Western hegemony in science and technology tends to bring the concept of science that conflict with Islamic values. Because of the

science concept that developed in the west through secularism, capitalisme, communism, liberalism, and other isms have destroyed the basic foundation of the existing science building at this time. Therefore, Muslim scholars must assess, evaluate and analyze the concept of western science to avoid mistakes in the learning process. Decolonization of education through Dewesternization and Islamization is a model that expected to contribute positively to the Islamic scholars in understanding the science based on the values of Tawhid. Meanwhile, the education system needed to be thoroughly overhauled by performing the integration of science. The purpose is to produce scientists who understand science in a coherent whole.

BIBLIOGRAPHY

- Abu-Lughod, Lila. (1990). The Romance of resistance: trading transformation of power through Bedouin women. *Journal American Ethnologist*. Vol. 17 (1).
- Addas, Waleed A. J.. (2008). *Methodology of Economics: Secular Versus Islamic: A Comparative Study of Economics: From Self-Interest to 'God's Interest*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Adjei, Paul Banahene. (2007). Decolonising Knowledge Production: The Pedagogic Relevance of Gandhian Satyagraha to Schooling and Education in Ghana. *Canadian Journal Of Education*. 30, 4: 1046 - 1067.
- Al-Aiwani, Taha Jabir. (1989). The Islamization of Methodology of Behavioral Sciences. *The American Journal of Islamic Social Science*. Vol. 6. No. 2.
- Al-Attas Muhammad Naquib. (1979). *Aims and Objectives of Islamic Education*. King Abdulaziz University. Jeddah: Hodder and Stoughton.
- Al-Attas, Muhammad Naquib. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Attas, Muhammad Naquib. (1999). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought of Civilization.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1988). *Islamization of Knowledge: Problem, Principles and Prospective*. In Islam: Source and Purpose of Knowledge by IIIT. USA: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1992). *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. USA: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1988). Islamization of Knowledge: Problem, Principles and Prospective. In Islamic: Source and Purpose of Knowledge by The International Institute of Islamic Thought. *Proceedings and Selected Papers of Second Conference on Islamization of Knowledge*, 1402 AH/1982.

- Alghailani, Saeed Ali. (2011). Ibn Badis and Modernity. *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*. IPEDR. Vol.17.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Ghazali's Ihya' Uum al-Din: revitalisation of the sciences of religion*. Vol. 1. Egypt: Islamic Inc.
- Arqub, Mamoun Abu. (February, 2009). *Islamic Perspectives on Education*. Birmingham: Islamic Relief Worldwide.
- Badudu, Yus. (2003). *Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Baergen, Ralph. (2006). *Historical Dictionary of Epistemology*. Oxford: The Scarecrow Press, Inc.
- Belly, Janice. (2009). *Back from the brink: decolonization through the restoration of secwepemc language, culture, and identity*. Dissertation PhD. of Education in Simon Fraser University.
- Birden, Susan. (2003). Foucauldian "attitude": postmodern food for thought. *Journal of Philosophy and History of Education*, Volume 53.
- Boehmer, Eleke. (2005). *Colonial and Postcolonial Literature*. New York: Oxford University Press.
- Bouزيد, Ahmed. (1998). *Man, Society, And Knowledge In The Islamist Discourse of Sayyid Qutb*. PhD Dissertation in the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Bugaje, Usman. (1996). Contemporary Muslim Response to the Challenge of Knowledge: Separating the Grain from the Chaff. *Journal of Inter-Cultural Perspectives*, Vol 2. No. 1. March.
- Bury, R. G. (tr). (1926). *Plato IX: Laws*. Volume I. London: Harvard University Press.
- Campo, Juan E. (2009). *Encyclopedia of Islam*. New York: Facts on File.
- Cashmore, Ellis. (1996). *Dictionary of race and ethnic relations*. London and New York: Routledge.
- Chappell, David A. (1995). Active Agents versus Passive Victims: Decolonized Historiography or Problematic Paradigm?. *The Contemporary Pacific*, Volume 7, Number 2, Fall 1995, 303-326;
- Darusman, Lukmanul Hakim. (2008). *Jihād in two faces of shari'ah: sufism and islamic jurisprudence (fiqh) and the revival of islamic movements in the Malay world: Case studies of Yusuf al Maqassary and Dawud Al Fatani*. PhD Thesis in Australian National University.
- Darwin, Charles. (1909). *The Origin of Species*. New York: P. F. Collier & Son.
- Dei, George J. Sefa. (2006). Introduction: Mapping the term terrain – towards a new politics of resistance. In George J. Sefa Dei and Arlo Kempf. (eds.). (2006). *Anti-colonialism and Education: The politics of resistance*. Rotterdam and Taipei: Sense Publishers.

- Descartes, Rene (1912). *A Discourse on method ; Meditations on the first philosophy ; Principles of philosophy*. London : Dent ; New York : Dutton.
- Descartes, Rene. (1901). *Discourse on Method and Metaphysical Meditations*. London: The Walter Scott Publishing, co., Ltd.
- Durkheim, Emile. (1964). *The Elementary Forms of the Religious Life*. (tr.). Joseph Ward Swain. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Fatemi, Sayyed Mohsen. (2010). Deconstructing Global Education. *Islamic Perspective Journal*, Number 4.
- Fowler, H. N. (tr). (1929). *Plato: Theaetetus – Sophist*. Volume II. London: William Heinemann.
- Frantz Fanon. (2008). *Black Skin White Masks*. London: Pluto Press.
- Furlow, Christopher A. (2005). *Islam, science, and modernity: from Northern Virginia to Kuala Lumpur*. Ph.D Dissertation at The Graduate School of The University of Florida.
- Grosfoguel, Ramón. (2011). Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality. *Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 1(1).
- Guerin, Bernard. (2010). A Framework for Decolonization Interventions: Broadening the Focus for Improving the Health and Wellbeing of Indigenous Communities. *A Journal of Aboriginal and Indigenous Community Health*, Vol. 8, No. 3.
- Hammond, Joanne. (2009). *Archaeology Without Reserve: Indigenous Heritage Stewardship in British Columbia*. Master Thesis in Simon Fraser University.
- Haneef, Mohamed Aslam. (2003). Book Review: Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples by Linda Tuhiwai Smith. *The American Journal of Islamic Social Sciences*. Volume 20. Number 3 & 4.
- Haneef, Mohamed Aslam. (2009). *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Haque, Muhammad Moinul. (2012). Islamization of Knowledge. http://i-epistemology.net/attachments/236_Islamization%20of%20Knowledge-kustia.pdf, View, May, 12, 2012.
- Hashim, Rosnani & Imron Rossidy. (2000). Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of the Conceptions of Al-Attas and Al-Faruqi. *Intellectual Discourse*. Vol. 8, No. 1.
- Hegel, G. W. F.. (1910). *The Phenomenology of Mind*. Volume I & II. London: Swan Sonnenschein & Co, Limited and New York: The Macmillan Company.
- Heidegger, Martin. (1977). *The question concerning technology*. (tr.) by William Lovitt. About "The Word of Nietzsche: "God Is Dead" New York & London: Garland Publishing, Inc.

- Hillebrink, Steven. (2007). *Political decolonization and self-determination: The case of the Netherlands Antilles and Aruba*. Amsterdam: Wöhrmann Print Service, Zutphen.
- Huemer, Michael (Ed.). (2002). *Epistemology: Contemporary Readings*. London and New York: Routledge.
- Hussain, Yusof. (2006). *Islamization of Human Sciences*. Kuala Lumpur: Research Centre IIUM.
- Kant, Immanuel. (1890). *Critique Pure Reason*. (tr.) J. M. D. Meiklejohn. London : George Bell and Sons.
- Kidd, Benjamin. (1902). *Principles of Western Civilisation*. London: Macmillan & Co., Ltd.
- Locke, John. (1882). *An Essay Concerning Human Understanding*. London: W. Swan Sonnenschein & Co.
- Loomba, Ania. (1998). *Colonialism/ Postcolonialism*. New York: Routledge.
- Macintosh, Douglas Clyde. (1915). *The problem of knowledge*. New York: The Macmillan Company.
- Maldonado-Torres, Nelson. (2011). Thinking through the Decolonial Turn: Post-continental Interventions in Theory, Philosophy, and Critique—An Introduction. *Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 1(2).
- Mamat, Arifin Bin. (2004). *Quranic Pedagogy And Its Practices In The Teaching Of The Arabic Language In The International Islamic University Malaysia Matriculation Centre*. Birmingham: Unpublished Ph.D. Thesis, University of Birmingham.
- Mannheim, Karl. (1952). *Essays On The Sociology Of Knowledge*. (Ed.) Paul Kecskemeti. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Matthews, Philip W. (2004). Decolonizing the Dictionary: A Preliminary Investigation into Country Names in Māori. *Euralex Proceedings*, 862-863.
- Mazlish, Bruce. (2004). *Civilization and Its Contents*. USA: Stanford University Press.
- Mignolo, Walter.D.(2007). *The De-Colonial Option and the Meaning of Identity in Politics*, (Ed.) by Maj-Lis Follér, Academic Director, Anales. Instituto Iberoamericano, Universidad de Goteborg, Sweden no. 9/10, pp. 43-72, Goteborg University.
- Mummi, Albert. (2003). *The Colonizer and the colonized*. UK: Earthscan Publications Ltd.
- Mustapha, Abdur-Razzaq. (2012). *Islamization or Re-Islamization of Knowledge?*. <http://www.natais.org/2010/09/15/islamization-or-re-islamization-of-knowledge/?download=9>. View, July, 10, 2012.
- Panjwani, Farid. (2004). The 'Islamic' in Islamic Education: Assessing the Discourse. *Current Issues in Comparative Education*, 7 (1).
- Protevi, John. (Ed). (2005). *The Edinburgh Dictionary Of Continental Philosophy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Rawls, Anne Warfield. (2004). *Epistemology and Practice: Durkheim's The Elementary Forms of Religious Life*. UK: Cambridge University Press.
- Ritter, Constantin. (1993). *The essence of plato's philosophy*. (tr.) Adam Allesa. London George Allen & Unwin Ltd.

- Rosenthal, Franz. (2007). *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden - Boston: Brill.
- Safi, Louay. (1996). *The foundation of knowledge: a comparative study in Islamic and Western methods of inquiry*. Kuala Lumpur: International Islamic University and International Institute of Islamic Thought.
- Safi, Louay. (2006). Definition and Classification of Knowledge. In Mohd. Yusof Hussain. (2006). *Islamization of Human Sciences*. Kuala Lumpur: Research Centre IIUM.
- Sajjadi, Seyyed Mahdi and Barkhordari, Ramazan. (2008). Explanation and analysis of Islamization of science and its implications for education. *Quarterly Journal of Educational Innovations*, No. 22, Winter.
- Sepahvand, Hajiali. (2012). Decolonization in Fenimore Cooper's *The Last of the Mohican*: Dialectic Encounter between Europe and Wilderness (America) . *American Journal of Scientific Research*. Issue 50. p. 26-36.
- Shahjahan, Riyad Ahmed. (2005). Mapping the field of anti-colonial discourse to understand issues of indigenous knowledges: Decolonizing praxis. *McGill Journal of Education*. Vol. 40 No. 2 Spring 2005.
- Shin, Jweon. (2004). Social construction of idealized images of women in colonial Korea: the 'new woman' versus 'motherhood'. In Prasenjit Duara. (Ed.). (2004). *Decolonization: Perspectives from now and then*. London: Routledge.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. (2011).Islamization of Knowledge: Reflections on Priorities. *The American Journal of Islamic Social Sciences*. volume 28. Issue 3.
- Smith, Linda Tuhiwai. (1999). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. London & New York: Zed Book Ltd.
- Spengler, Oswald. (1926). *The decline of the west form and actuality*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Stewart, J. A. (1909). *Plato's Doctrine of Ideas*. London: Oxford At The Clarendon Press.
- Swadener, B. B., & Mutua, K. (2008). Locating the field: Performing theories of decolonizing inquiry. In Denzin, K. N., Lincoln, S. Y., & Smith, T. L. (Ed). (2008). *Handbook of critical and Indigenous methodologies*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Thiong'o, Ngugi wa. (1981). *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*. Zimbabwe: Zimbabwe Publishing House.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Tlostanova, Madina V. (2009). *Global Coloniality and the Decolonial Option*. New York: Routledge.

- Tønnesson, Stein. (2004). National divisions in Indochina's decolonization. In. Prasenjit Duara. (ed.). (2004). *Decolonization: Perspectives from now and then*. London: Routledge.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor, (1993-1994). An Outline of the Educational Philosophy and Methodology of Al-Attas. *Journal of Islamic Research*. Vol. 7, No. 1.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor, (1998). *The educational philosophy and practices of Syed Muhammad Naquid Al-Attas*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor. (2010). Dewesternisation and Islamisation: Their Epistemic Framework and Final Purpose. In Noritah Omar, Washima Che Dan, Jason Sanjeev Ganesan and Rosli Talif. (eds.). (2010). *Critical Perspectives on Literature and Culture in the New World Order*. UK: Cambridge Scholars Publishing.
- Wilson, W.A, & Yellow Bird, M. (eds.). (2005). *For indigenous eyes only: A decolonization handbook*. Santa Fe, NM: School of American Research Press.
- Wiredu, Kwasi. (2004), Introduction: African Philosophy in Our Time. In Wiredu, Kwasi. (ed). (2004). *A Companion to African Philosophy*. USA: Blackwell Publishing Ltd.
- Yaocihuatzin. (2011). *Analysis of 45 Nahua/ Mexica/ Aztec Children's Books: Decolonizing Children's Literature On Indigenous Communities*. Phd Dissertation Of University Of Rhode Island And Rhode Island College. Non-Publication.
- Zemi, Sami. (2012) 9/ 11: The End of Islamism? Islamism: A Concept in Need of a Definition or the Hermeneutical Fight over an Object of Study?. Working Paper. Middle East and North Africa Research Group. <http://www.menarg.ugent.be/media/580/defining-islamism.pdf>. View, May, 10, 2012.

ISLAMISASI PEMBANGUNAN

Buku ini berisi mengenal wacana-wacana pembangunan Islam, antara lain: Islamisasi Pemikiran Pembangunan, Islamisasi Ilmu Pengetahuan di Perguruan Tinggi; Reaktualisasi Moralitas Agama (Islam) dalam Proses Perubahan Masyarakat; Islamisasi Pembangunan di Malaysia: Kes Pendekatan Islam Hadhari; Islamisasi Pemikiran Pembangunan di Indonesia: Perspektif Tawhidik; Dari Mafia Berkeley ke Mafia ISDEV; Peranan Pembangunan Institusi Pendidikan terhadap Pembangunan Berteraskan Islam di Indonesia; Islamisasi Pembangunan di Indonesia: Kajian dari Perspektif Perencanaan Pembangunan; dan *Decolonization of Education Through Islamization and Dewesternization*.

Pembangunan berbasas kepada nilai-nilai Islam seperti pembicaraan di dalam buku ini sangat penting untuk terus diperbincangkan dalam forum-forum ilmiah oleh para ilmuan Islam di masa depan. Selama ini ilmu pengetahuan telah dikuasai oleh dunia barat, di sisi lain ummat Islam hanya menjadi pengikut pandangan-pandangan barat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Apabila ilmuan-ilmuan Islam dari berbagai latar belakang keilmuan bersedia melahirkan karya-karya ilmiah dan intensif dalam mengadakan pertemuan ilmiah baik di tingkat lokal, regional maupun internasional, maka akan mempercepat terwujudnya pembangunan Islam di dunia. Pembangunan Islam yang berkembang Insya Allah akan mampu melahirkan masyarakat adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT.